INOVASI VISIONER

Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Membangun Kampus Transformatif
dan Berdampak

Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi Republik Indonesia

INOVASI VISIONER

Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Membangun Kampus Transformatif
dan Berdampak

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Hak Cipta © Pada Penulis Dan Dilindungi Undang-Undang
Hak Penerbitan Pada Kemdiktisaintek
Dilarang Mengutip Sebagian Ataupun Seluruh Buku Ini Dalam Bentuk Apa Pun Tanpa Izin Dari Penerbit.

Inovasi Visioner Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi: Membangun Kampus Transformatif Dan Berdampak

Penulis : Satryo Soemantri Brojonegoro
Khairul Munadi
Togar Mangihut Simatupang
Editor : Hilma Erfiani Baroroh
Kontributor :
Ahmad Najib Burhani, Adi Nuryanto, Aisyah Endah Palupi, Amalia Wahyuni, Andante Candra Isana Purbokusumo, Andika Fajar, Angga, Anggi, Anton Rahmadi, Aprilia Ekawati, Ardi Findyartini, Baginda, Beny Bandanadjaja, Bhimo Widyo Andoko, Carolina, Dela Fahriana Havitiyaningtyas, Dina Handini, Doddy Indra Atmaja, Dwia Aries Tina Pulubuhu, Eko Prasetyo, Ellen Joan Kumaat, Fauzan Adziman, Firman Hidayat, Henri T.h. Tambunan, Ineke Indraswati, Iradhatie Wurinanda, Johanes Gunawan, Lukman, M. Faiz Syuaib, M. Hasan Chabibie, M. Rif'an Jauhari, M. Samsuri, Manifes Zubayr, Mochammad Kahfi, Mayong Krisna Dani, Nur Syarifah, Oki Putra Budiarahman, Pieter, Resta Fauziah, Rifan Djauhari, Roosida Taufani, Septien Prima Diassari, Sri Suning Kusumawardani, Stella Christie, Sumiati, T. Chan Basaruddin, Utami, Yohanes Surya, Yudi Darma.

Desainer :
Cetakan I : 2025
ISBN :
Penerbit :

Daftar Isi

Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		iv
Kata Pengantar		viii
Ucapan Terima Kasih		x
1.	**Asta Cita dalam Pendidikan Tinggi sebagai Pilar Strategis Menuju Indonesia Emas 2045**	1
1.1	Asta Cita sebagai Strategi Pembangunan Nasional	2
1.2	Asta Cita dalam Konteks Pendidikan Tinggi	3
1.3	Visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	4
1.4	Program Prioritas Kemdiktisaintek 2025-2029	6
1.5	Tantangan dalam Pendidikan Tinggi	7
2.	**Paradigma Baru Transformasi Pendidikan Tinggi Menuju Masyarakat Berpengetahuan untuk Pembangunan Berkelanjutan**	
2.1	Perubahan Paradigma Perguruan Tinggi	12
2.2	Kampus Transformatif	19
2.3	Diktisaintek Berdampak	23
2.4	Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi	34
2.5	Perguruan Tinggi sebagai Agen Perubahan untuk Pembangunan 40 Berkelanjutan	40
2.6	Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 2025-2029	43
3.	**Pendidikan Tinggi Transformatif**	49
3.1	Transformasi Pendidikan Tinggi	55
3.2	Pemantapan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi	70
3.3	Kolaborasi Kemdiktisaintek-Kemenkes Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan	72
3.4	Kaji Ulang Regulasi	88
3.5	Transformasi Penilaian Jabatan Akademik Dosen: Dinamika Pertumbuhan Lektor Kepala dan Guru Besar dalam Lima Tahun Terakhir	96
3.6	Isu Kontemporer Pendanaan Pendidikan Tinggi	101
3.7	Isu Kontemporer Kesejahteraan Dosen	104

3.8	Pembukaan Program KIP Kuliah 2025	112
3.9	Skema Pinjaman Pendidikan Tanpa Bunga bagi Mahasiswa	115
3.10	Konsep Uang Kuliah Tunggal Minimalis	121
4.	**Peningkatan Riset dan Pengembangan**	125
4.1	Tantangan Strategis Indonesia	126
4.2	Urgensi Riset Respons Tantangan Strategis Bangsa	129
4.3	Wujudkan Asta Cita melalui Riset dan Pengembangan	130
4.4	Kawal Delapan Program Hasil Terbaik Cepat	132
4.5	Pergeseran Paradigma Pendidikan Tinggi	133
4.6	Program Prioritas Riset dan Pengembangan	136
4.7	Capaian 120 Hari Kerja dan Rencana Jangka Pendek di Bidang Riset dan Pengembangan	138
5.	**Penguatan Sains dan Teknologi**	163
5.1	Pendidik Bertalenta Pembelajaran Transformatif	164
5.2	Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi	168
5.3	SMA Unggul Garuda	178
5.4	Penguatan Literasi Numerik	180
5.5	Evaluasi dan Revisi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan RPP Penyelenggaraan Iptek	184
6.	**Penguatan Tata Kelola, Sumber Daya, dan Layanan untuk Kinerja Institusi yang Efektif**	187
6.1	Penyusunan Organisasi dan Tata Kelola	188
6.2	Pembenahan Administrasi Tugas Belajar	211
6.3	Pengokohan Fondasi Regulasi dan Advokasi	216
6.4	Strategi Komunikasi melalui Gerak Cepat Kehumasan dan Media	218
6.5	Penguatan Kemitraan Strategis di Bidang Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	230
6.6	Peningkatan Performansi Pusat Data dan Teknologi Informasi	239
6.7	Renovasi Gedung dan Ruang Kerja dalam 120 Hari Kemdiktisaintek	253
6.8	Dinamika Anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	258
7.	**Estafet Kepemimpinan Kemdiktisaintek dan Harapan untuk Masa Depan**	267
Penutup		275

Daftar Tabel

Arah Kebijakan Profesi dan Karier Dosen	91
Distribusi Pegawai Kemdiktisaintek	203
Banyaknya Siaran Pers Kemdiktisaintek yang Diangkat Media	223
Daftar Negara yang telah Melakukan Kunjungan Kehormatan ke Kemdiktisaintek	230

Daftar Gambar

Pelantikan Kabinet Merah Putih	2
Gedung Kemdiktisaintek	4
Paradigma Transformasional Pendidikan Tinggi	50
Wamendiktisaintek, Prof. Fauzan memberikan pengarahan penting dan menyampaikan pesan Mendiktisaintek dalam Penandatanganan MoU Kementerian Sosial dan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Jawa Timur yang difasilitasi FRI dan Universitas Negeri Surabaya	54
Wamendiktisaintek menekankan pentingnya re-evaluasi kebijakan dan tata kelola lembaga untuk menghadirkan dampak bagi civitas, masyarakat, dan negara. Dokumentasi: Humas Unesa	54
Sebaran PTKL Pada Kementerian/LPNK Pembina	58
Potret Jumlah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Indonesia	74
Potret Pendidikan Kedokteran saat ini	75
Transformasi Kebijakan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan sesuai UU No.17/2023	76
Pertemuan Mendiktisaintek dengan Menkes Membahas Pendidikan Kedokt	79
Penandatanganan Keputusan Bersama Mendiktisaintek dan Menkes tentang Panitia Seleksi Bersama Penerimaan Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/ Subspesialis	83
Mendiktisaintek dan Menkes telah menandatangani Keputusan Bersama	84
Jajaran Kemdiktisaintek dan Kemenkes yang hadir dalam acara penandatanganan SKB Mendiktisaintek dan Menk	85
Pertumbuhan Lektor Kepala dan Guru Besar 5 tahun Terakhir	97
Lima Teratas Perguruan Tinggi dengan Pengusul Terbanyak	98
Lima Teratas Kelompok Pohon Ilmu dengan Pengusul Terbanyak	99
Webinar Sosialisasi dan Pembukaan Pendaftaran KIP Kuliah 2025 oleh Mendiktisaintek	112
Peluang dan Tantangan Ekosistem Riset di Indonesia	128
Paradigma Transformasional Pendidikan Tinggi	133
Peranan Kemdiktisaintek dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Pertumbuhan Ekonomi	134
Skema Ekosistem Terintegrasi Riset dan Pengembang	138

Kemdiktisaintek sebagai Orkestrator Penciptaan Nilai Bersama (Value Co-creation) Hilirisasi R&D Perguruan Tinggi	146
Wamendiktisaintek Prof. Fauzan Didampingi Dirjen Risbang dan Sesjen Kemdiktisaintek Meninjau Langsung Pengelolaan Peternakan Domba UHAMKA	161
Foto Jajaran Pejabat Kemdiktisaintek Bersama Civitas AkademikaU HAMKA Agrovision Dalam Rangka Peninjauan Riset Ketahanan Pangan	161
Kompetensi Berbentuk T (T-Shaped Competency), Sasaran Penerapan Pembelajaran Transformatif	166
Landasan dan Komponen Utama Pengembangan Program Pembelajaran Transformatif	168
Jumlah Usulan dan Skema Program BERDIKARI	171
Pemanfaatan Sains dan Teknologi pada Program BERDIKARI 2025: Peningkatan Produktivitas Peternakan Sapi Perah di Kecamatan Pudak, Ponorogo, Jawa Timur	173
Pengembangan Agrokreatif dan Agroteknologi untuk Ketahanan Pangan Nasional	173
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie Membuka Forum Ilmiah Musik dan Sains	175
Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Mempraktikkan Pemindaian Otak Ketika Bernyanyi Menggunakan Alat FNIRS	176
Gambaran Pelaksanaan Program BERDIKARI	178
Ilustrasi Sekolah Unggulan Garuda	179
Wamendiktisaintek Prof Fauzan didampingi Prof Yohanes dan Perwakilan UHAMKA pada Pelatihan Metode GASING: Meningkatkan Literasi Numerik Guru Matematika untuk Indonesia Emas 2045	182
Struktur Organisasi Kemdiktisaintek	190
Jajaran Pejabat Tinggi Madya Kemdiktisaintek	195
Pembacaan Doa Saat Pelantikan	197
Penandatanganan Berita Acara Pelantikan Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek oleh Mendiktisaintek	197
Penandatanganan Berita Acara Pelantikan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek oleh Mendiktisaintek	198
Ucapan Selamat Mendiktisaintek kepada Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek	198
Penandatanganan Berita Acara Pelantikan Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Kemdiktisaintek oleh Mendiktisaintek	199
Ucapan Selamat Mendiktisaintek kepada Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Kemdiktisaintek	199
Foto Bersama Mendiktisaintek bersama Jajaran Pejabat Tinggi Pratama Kemdiktisaintek Seusai Pelantikan	201

Foto Bersama Mendiktisaintek bersama Penasihat Khusus Menteri dan Para Staf Khusus Menteri	201
Foto Bersama Mendiktisaintek Bersama Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Kemdiktisaintek	202
Foto Bersama Rektor Universitas Manado Periode 2025-2030 dengan Mendiktisaintek dan Wamendiktisaintek	202
Total Pemberitaan Selama 120 Hari Kemdiktisaintek	221
Tren Pemberitaan Kemdiktisaintek 20 Oktober 2024 hingga 29 Januari 2025	222
Mendiktiisaintek Bersama Jajaran Pejabat Kemdiktisaintek Dalam Taklimat Media Membahas Transformasi Pendid	224
Mendiktisaintek Bersama Jajaran Pejabat Kemdiktisaintek	224
Taklimat Media Bersama Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek	225
Taklimat Media Bersama Tim Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek	227
Unit Layanan Terpadu Diktisaintek: Pusat Informasi dan Pelayanan Publik	228
Tim Layanan Unit Layanan Terpadu Diktisaintek: Mendukung Pelayanan Publik yang Cepat dan Efisien	229
Tim Layanan Informasi ULT Diktisaintek: Responsif dalam Memberikan Pelayanan Publik	229
Daftar Negara yang telah Melakukan Kunjungan Kehormatan ke Kemdiktisaintek	230
Pertemuan dengan Duta Besar Australia: Membangun Kerja Sama Pendidikan dan Pengembangan SDM	232
Penguatan Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Pendidikan, Riset, dan Inovas	233
Kunjungan Kehormatan Duta Besar Singapura: Memperkuat Kemitraan dalam Pendidikan, Sains, dan Teknologi	234
Kunjungan Kehormatan Duta Besar RRT: Memperkuat Kemitraan Strategis dalam Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	235
Kunjungan Kehormatan Duta Besar Palestina: Penguatan Kerja Sama Pendidikan dan Pengembangan SDM	236
Kunjungan Kehormatan British Group Inter-Parliamentary Union: Penguatan Kerja Sama Pendidikan dan Teknologi untuk Indonesia Emas 2045.	237
Struktur Sistem Digital Kemdiktisaintek	240
Laman Awal Dasbor Maturitas PDDikti	242
Tampilan Tahapan Penilaian Maturitas PDDikti	242
Tampilan Pelaporan Maturitas Perguruan Tinggi PDDikti	243

Tampilan Proses Penilaian Pelaporan Maturitas Perguruan Tinggi di PDDik	243
Tampilan Dasbor Dosen dengan Fitur Filter	248
Tampilan Peta Sebaran Data Pendidikan Tinggi di Indoensia	248
Tampilan Tinjauan Waktu Nyata Pengguna SISTER	248
Tampilan Aktifitas Pengguna SISTER di Berbagai Negara	249
Tampilan Proses Bisnis SSO pada PDDikti	250
Tampilan Depan Platform SatuDikti: Layanan Terintegrasi untuk Pendidikan Tinggi	251
Tampilan Kategori Pengguna Layanan SatuDikti: Akses Mudah bagi Mahasiswa, Dosen, dan Umum	252
Tampilan Area Lobi Kemdiktisaintek Sebelum Renovasi	254
Lobi Utama Setelah Renovasi: Modern, Elegan, dan Fungsional	255
Renovasi Ruang Kerja: Modernisasi dan Kenyamanan untuk Kinerja Optimal	256
Penandatanganan Serah Terima Jabatan Mendiktisaintek	269
Jabat Tangan Simbol Kolaborasi dan Keberlanjutan	269
Dari Masa ke Masa: Kepemimpinan Baru Kemdiktisaintek untuk Indonesia Maju Dokumentasi: Humas Diktisaintek	272
Pelantikan Prof. Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	274

Kata Pengantar

Perjalanan seratus dua puluh hari pertama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menandai awal perjalanan besar dalam membangun sistem pendidikan tinggi yang lebih transformatif dan inovatif. Buku ini disusun sebagai bentuk transparansi serta evaluasi atas kebijakan dan program yang telah diimplementasikan selama periode tersebut. Dengan penuh rasa syukur, kami panjatkan puji ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, buku ini dapat diselesaikan dan disampaikan dengan baik.

Buku *"Inovasi Visioner Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Membangun Kampus Transformatif dan Berdampak"* ini bukan sekadar kumpulan data dan pencapaian, tetapi juga menjadi landasan evaluasi dan perbaikan kebijakan ke depan. Inovasi visioner dalam pendidikan tinggi, sains, dan teknologi melibatkan pergeseran paradigma pendidikan tinggi, kepemimpinan transformatif, beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah, dan merangkul teknologi serta pedagogi baru. Pada akhirnya, tujuan utama inovasi visioner ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan hasil belajar mahasiswa, mempersiapkan mereka untuk masa depan, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Ini merupakan komitmen bahwa perguruan tinggi tidak hanya mencapai keberhasilan sendiri tetapi juga melakukannya dengan rasa tanggung jawab yang mendalam serta memberikan kontribusi sosial, ekonomi, dan keberlanjutan.

Berbagai kebijakan yang telah diterapkan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan tinggi, penguatan riset dan inovasi, serta sinergi antara akademisi, industri, dan teknologi. Langkah-langkah strategis ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", yang diwujudkan dalam delapan misi pembangunan yang disebut Asta Cita. Dalam konteks pendidikan tinggi, visi yang mendukung Asta Cita adalah "terwujudnya keberdayaan perguruan tinggi yang bertanggung jawab dengan tata kelola yang baik untuk bertumbuh dan berdampak, meningkatnya kemampuan riset dan pengembangan sampai hilirisasi bernilai tambah, serta berfungsinya sains dan teknologi untuk mempercepat transformasi sosio-ekologi dan ekonomi yang berkelanjutan." Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai motor penggerak kemajuan bangsa dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Keberhasilan awal ini tidak mungkin terwujud tanpa kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran kementerian, akademisi, industri, serta masyarakat yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi pendidikan tinggi yang lebih adaptif dan berdaya saing global.

Buku ini bisa dijadikan sebagai pijakan awal untuk melangkah lebih jauh dalam membangun pendidikan tinggi yang lebih maju dan adaptif. Kami berharap gagasan dan refleksi yang dituangkan di dalam buku ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih inovatif, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Semoga buku ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi semua pihak yang berperan dalam perjalanan besar di Kemdiktisaintek.

Jakarta, 19 Februari 2025

Satryo Soemantri Brojonegoro
Khairul Munadi
Togar Mangihut Simatupang

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku *"Inovasi Visioner Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Membangun Kampus Transformatif dan Berdampak"*. Buku ini merupakan refleksi perjalanan seratus dua puluh hari pertama Kemdiktisaintek dalam membangun sistem pendidikan tinggi yang lebih transformatif, inovatif, dan berdaya saing global.

Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada:

- Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memberikan mandat kepada Prof. Satryo Soemantri Brojonegoro, Ph.D. sebagai Mendiktisaintek dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 pada Senin, 21 Oktober 2024.
- Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P., Ketua dan Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode Tahun 2024-2029 atas dukungan yang diberikan.
- Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah; Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., Menteri Kebudayaan; Budi Gunadi Sadikin, S.Si., CHFC., CLU., Menteri Kesehatan; Prof. Dr. Prasetyo Hadi, SE., MM., CFMP., Menteri Sekretaris Negara; Sri Mulyani Indrawati, SE., M.Sc., Ph.D., Menteri Keuangan; Letnan Jenderal TNI (Purn.) Anto Mukti Putranto, S.Sos., Kepala Staf Kepresidenan (KSP); dan Mayor (Inf.) TNI Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet atas kerja sama yang telah terjalin.

- Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang memperhatikan kebijakan dan program yang mendukung peningkatan kualitas dan akses pendidikan tinggi.
- Prof. Brian Yuliarto, Ph.D. yang dilantik tanggal 19 Februari 2025 sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029, atas aspirasi dan perhatiannya dalam pengembangan kebijakan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.
- Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., dan Prof. Stella Christie, Ph.D., atas kontribusi pemikiran dan dukungan dalam pengembangan kebijakan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.
- Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ir. Suharti, M.A., Ph.D., yang telah melakukan fasilitasi selama masa transisi pembentukan organisasi dan sumber daya Kemdiktisaintek.
- Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi, serta Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, yang telah berperan aktif dalam penyusunan kebijakan strategis dan koordinasi di lingkungan Kemdiktisaintek.
- Penasihat Khusus Menteri, para Staf Khusus Menteri, para Tenaga Ahli Menteri atas dedikasi, masukan, dan kontribusi yang diberikan dalam mendukung penyusunan kebijakan serta pengembangan strategi di lingkungan Kemdiktisaintek.

Apresiasi juga diberikan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, termasuk para direktur, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, kepala biro, dan kepala pusat yang telah memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada seluruh tim yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik dalam aspek penelitian, penyuntingan, maupun dokumentasi. Terima kasih telah menjalankan tugas dengan sangat baik sehingga buku ini dapat tersaji dengan sistematis dan berkualitas.

Tidak lupa, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pemangku kepentingan yang telah mendukung upaya transformasi pendidikan tinggi, termasuk:

- Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) yang terus berperan dalam mendukung pengembangan kebijakan pendidikan tinggi,
- Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang telah berkontribusi dalam menciptakan ekosistem akademik yang dinamis dan inovatif,
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang terus berperan dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia,
- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) yang telah mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi di berbagai wilayah,
- Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) yang telah berperan aktif dalam pengembangan pendidikan tinggi swasta,
- Lembaga penelitian dan pengembangan, industri, serta berbagai mitra strategis yang telah bersinergi dalam memperkuat hilirisasi riset dan inovasi di Indonesia,
- Organisasi profesi dan komunitas ilmiah yang telah berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- Mitra internasional dan organisasi pendukung pendidikan tinggi, seperti lembaga kerja sama internasional, institusi donor, dan organisasi global yang telah mendukung berbagai program riset, pertukaran akademik, dan penguatan kapasitas perguruan tinggi.

Semoga kolaborasi dan sinergi yang telah terjalin dapat terus berkembang, sehingga visi besar dalam membangun pendidikan tinggi yang lebih adaptif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi dapat terwujud. Kami berharap buku ini dapat menjadi inspirasi dan referensi bagi semua pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, riset, dan inovasi di Indonesia.

Jakarta, 19 Februari 2025

Satryo Soemantri Brojonegoro
Khairul Munadi
Togar Mangihut Simatupang

1

Asta Cita dalam Pendidikan Tinggi sebagai Pilar Strategis Menuju Indonesia Emas 2045

Dokumentasi: Diktisaintek

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya membawa kemajuan dalam bidang pendidikan Indonesia. Dengan pendidikan yang maju, Indonesia dapat meraih Visi Indonesia 2045, yakni menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Strategi pencapaian visi ini dituangkan dalam Asta Cita Kabinet Merah Putih, yang juga bertujuan menjawab berbagai tantangan global yang penuh ketidakpastian.

Pelantikan Kabinet Merah Putih
Dokumentasi: Antara Foto

1.1 Asta Cita sebagai Strategi Pembangunan Nasional

Asta Cita terdiri dari delapan misi utama:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,

teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat harmoni kehidupan sosial, lingkungan, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama.

1.2 Asta Cita dalam Konteks Pendidikan Tinggi

Dalam pendidikan tinggi, Asta Cita dirincikan ke dalam lima aspek utama:

1. **Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi** guna meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing global.
2. **Penyediaan beasiswa bagi anak guru, petani, dan buruh** untuk menjamin akses pendidikan tinggi hingga jenjang doktoral.
3. **Peningkatan daya tampung perguruan tinggi**, standarisasi kualitas, dan kemudahan akses masuk perguruan tinggi.
4. **Penguatan sistem pendidikan nasional** guna membentuk SDM yang produktif dan inovatif.
5. **Peningkatan dana riset dan inovasi** yang ditargetkan mencapai 1,5–2,0 persen dari PDB dalam lima tahun ke depan.

Pendidikan tinggi tidak lagi sekadar dianggap sebagai biaya, tetapi sebagai investasi dalam pembangunan manusia. Implikasinya adalah bahwa perguruan tinggi harus berperan aktif dalam menciptakan lulusan yang bermutu, relevan, dan berdampak terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

1.3 Visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Gedung Kemdiktisaintek
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Visi pendidikan tinggi Indonesia yang mendukung Asta Cita adalah "terwujudnya keberdayaan perguruan tinggi yang bertanggung jawab dengan tata kelola yang baik untuk bertumbuh dan berdampak, meningkatnya kemampuan riset dan pengembangan sampai hilirisasi bernilai tambah, serta berfungsinya sains dan teknologi untuk mempercepat transformasi sosio-ekologi dan ekonomi yang berkelanjutan."

Visi yang dapat dibayangkan adalah terwujudnya perguruan tinggi Indonesia yang bukan hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai motor penggerak kemajuan bangsa.

Perguruan tinggi yang diidamkan adalah:

1. **berdaya dan bertanggung jawab**, mampu mandiri secara finansial dan jaminan mutu yang berstandar, namun tetap memiliki komitmen sosial yang kuat, tata kelola yang baik dan transparan akan menjadi fondasi bagi perguruan tinggi untuk tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat;
2. **unggul dalam riset dan pengembangan**, memiliki kapasitas riset yang

kuat, menghasilkan inovasi-inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Hasil riset tidak hanya berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi juga mampu dihilirisasi menjadi produk atau layanan yang bernilai tambah bagi perekonomian;

3. **pelopor transformasi**, menjadi ujung tombak dalam mendorong transformasi sosio-ekologi dan ekonomi yang berkelanjutan melalui penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam mengatasi berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan krisis energi; dan
4. **berbasis sains dan teknologi**, selalu mengacu pada prinsip-prinsip ilmiah dalam setiap kegiatannya yang disebut dengan berbudaya ilmiah (*scientific culture*) di mana teknologi akan menjadi alat yang ampuh untuk mempercepat proses transformasi dan meningkatkan efisiensi.

Untuk mewujudkan visi Kemdiktisaintek, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1) penguatan tata kelola dalam rangka membangun budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja dan inovasi dengan melakukan reformasi tata kelola perguruan tinggi, mulai dari sistem manajemen, akuntabilitas, hingga transparansi;
2) peningkatan kapasitas riset dengan memberikan dukungan yang memadai bagi para dosen, baik dalam hal pendanaan, infrastruktur, maupun akses terhadap data dan membangun kemitraan dengan industri dan lembaga penelitian lainnya untuk mempercepat proses hilirisasi hasil riset;
3) penguatan kemitraan untuk memperluas cakupan dan dampak dari kegiatan perguruan tinggi, yakni membangun jaringan kerja yang kuat dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, industri, masyarakat, dan perguruan tinggi lainnya;
4) pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan investasi pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga kependidikan dan memberikan kesempatan bagi dosen untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan melakukan penelitian; serta
5) integrasi sains dan teknologi dengan mendorong pemanfaatan sains dan teknologi dalam seluruh aspek kehidupan perguruan tinggi, mulai dari proses pembelajaran hingga pengelolaan administrasi.

Dengan terwujudnya visi tersebut, diharapkan perguruan tinggi Indonesia dapat:

(i) meningkatkan kualitas lulusan yang kompeten, inovatif, dan memiliki jiwa kewirausahaan;
(ii) mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan hilirisasi hasil riset sehingga perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa;
(iii) memecahkan masalah sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat, dan
(iv) meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional yang mana perguruan tinggi yang berkualitas akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan studi bagi mahasiswa asing dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4 Program Prioritas Kemdiktisaintek 2025–2029

Kemdiktisaintek telah merancang berbagai program strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, antara lain:

1. **Program Pembelajaran Transformatif.** Pembelajaran inovatif berbasis digital, pembelajaran internasional, pembelajaran kolaboratif dengan dunia usaha dan dunia industri, peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, dan program kewirausahaan dan kecakapan kerja.
2. **Program Penguatan Riset Dasar dan Hilirisasi Riset.** Dana Kompetitif Penelitian *(Competitive Fund)* BOPTN Penelitian dan Dana Padanan *(Matching Fund)* Kedaireka BOPTN Penelitian.
3. **Pengembangan Mutu Kelembagaan Perguruan Tinggi.** Akreditasi program studi, ijin program studi, dan transformasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
4. **Program Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PP PTS).**
5. **Penyediaan Bantuan Operasional Bagi PTN (BOPTN non Penelitian).** Bantuan Biaya operasional PTN Akademik dan Bantuan Biaya Operasional Politeknik dan AKN (Akademi Komunitas Negeri).
6. **Peningkatas Akses Pendidikan Tinggi.** Beasiswa KIPK dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) bagi anak-anak dari daerah tertinggal.

7. **Program Talenta Sains dan Teknologi.** a) Penyediaan beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan (PMDSU, Beasiswa Unggulan, Beasiswa Tut Wuri Handayani, Pelatihan Non Gelar); b) peningkatan keterampilan atau penyesuaian keterampilan *(upskilling and reskilling)* pendidik dan tenaga kependidikan vokasi; dan c) pelaksanaan sertifikasi kompetensi industri bagi mahasiswa pendidikan tinggi vokasi (PTV).
8. **Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PRPTN).** Revitalisasi PTN Akademik dan Revitalisasi Politeknik.
9. **Program Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT).** Pengembangan Unggulan Bidang Prioritas Perubahan Iklim
10. **Penjaminan Mutu Layanan Perguruan Tinggi.** PT yang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan dan PT yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu (LLDIKTI).
11. **Dukungan Manajemen.** Belanja Pegawai PTN dan Satker Pusat, Operasional Perkantoran PTN dan Satker Pusat, dan Manajemen Satker.

1.5 Tantangan dalam Pendidikan Tinggi

Terdapat enam tantangan utama yang dihadapi pendidikan tinggi di Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan:

1. **Rendahnya kebekerjaan lulusan**: masih terdapat lulusan perguruan tinggi yang bekerja di bidang dengan keahlian rendah, serta keterserapan di pasar kerja belum optimal akibat kurangnya kualitas serta taut suai pembelajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan swasta atau industri.
2. **Kurangnya efektivitas dan kualitas pemanfaatan dana penelitian**: terbatasnya anggaran penelitian sementara pelaksanaan penelitian perguruan tinggi belum berkualitas dan berdampak.
3. **Kurangnya perhatian terhadap pengembangan talenta sains dan teknologi:** terbatasnya dukungan terhadap pengembangan karir, jaringan, dan kemajuan profesional menghambat individu-individu berbakat untuk mengejar karir di bidang sains dan teknologi.
4. **Kesenjangan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan masyarakat**: institusi pendidikan tinggi tidak selalu menyelaraskan kurikulum dan prioritas penelitiannya dengan kebutuhan dan tantangan khusus yang ada di komunitas lokalnya.
5. **Regulasi dan kebijakan yang berubah cepat**: mengakitbatkan tidak

tercapainya tujuan pendidikan nasional, misalnya dalam aspek pendanaan dan standar mutu serta pengembangan karier dosen, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum.

6. **Kendala seperti keterbatasan dana, kekurangan infrastruktur, dan kurangnya sinergi kolaboratif antara akademisi, industri, dan pemerintah** telah menghambat implementasi optimal iklim riset dan inovasi Indonesia. Hal ini pada gilirannya menyebabkan peningkatan impor teknologi dan produk strategis, yang memperkuat ketergantungan negara pada sumber daya asing.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, pendidikan tinggi di Indonesia perlu bertransformasi melalui beberapa langkah strategis:

1. **Perubahan Peran Regulator Perguruan Tinggi**. Perguruan tinggi tidak lagi hanya diikat oleh aturan yang kaku, tetapi harus diberdayakan untuk menjadi institusi yang lebih fleksibel dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.
2. **Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas**. Perguruan tinggi harus memiliki tata kelola yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Akuntabilitas dilakukan melalui pengungkapan informasi mengenai capaian akademik dan kontribusi mereka terhadap pembangunan.
3. **Peningkatan Keterhubungan dengan Pemangku Kepentingan**. Perguruan tinggi harus lebih erat bekerja sama dengan dunia industri, pemerintah, dan masyarakat guna mendorong kemajuan pembangunan.
4. **Pengembangan Pendanaan Inovatif bagi Perguruan Tingg**i dengan aplikasi beragam model seperti perjanjian pembagian pendapatan dan penggalangan dana; jalinan kemitraan dengan industri; pencarian hibah; peningkatan donasi alumni; pembiayaan campuran *(blended financing*) yang menggabungkan beberapa sumber pendanaan, seperti filantropi, publik, dan perusahaan swasta; pembiayaan bebas pajak *(tax-exempt financing)*; pinjaman terkait keberlanjutan *(sustainability-linked loans)*; obligasi hijau; pemanfaatan teknologi untuk penggalangan dana dan uji coba inisiatif atau layanan baru; dan penyesuaian strategi pendanaan berdasarkan masukan untuk menciptakan ekosistem keuangan berkelanjutan bagi pendidikan tinggi. Alokasi sumber daya dan pendanaan inovatif dalam pendidikan

tinggi sangat penting bagi keberhasilan reformasi dan transformasi sistem pendidikan tinggi.

Bagaimana kesinambungan dengan program pendidikan tinggi yang telah berjalan?

1. Akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan inklusif akan diperbaiki dengan mengatur ulang kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan beasiswa yang lebih merata.
2. Peningkatan kemudahan akses penelitian dan dukungan bagi inovasi teknologi pendidikan yang tetap dilanjutkan untuk mendorong terobosan inovasi dan penguatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan pemula berbasis teknologi.
3. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diprakarsai tahun 2020 untuk menghadirkan solusi dalam menjembatani kebutuhan antara perguruan tinggi dan industri terkait kompetensi lulusan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi masih menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan industri akan lulusan siap kerja. Tantangan kesenjangan ini mendorong pemerataan akses bagi mahasiswa untuk belajar di luar kelas sekaligus meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang relevan bagi kebutuhan profesional di dunia kerja. Data pada akhir tahun 2024 menunjukkan adanya lebih dari dua juta mahasiswa sudah berpartisipasi pada kesempatan belajar di luar kampus. Kebijakan MBKM akan terus dilanjutkan dengan memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk merancang merdeka belajar yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan kebutuhan industri atau masyarakat. Kurikulum yang memasukkan merdeka belajar tetap berlandaskan pada capaian (*outcome-based education*) yang berorientasi pada keterpaduan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan penerapan pada kegiatan produktif. Merdeka belajar merupakan wahana untuk memberikan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan berbasis pengalaman dan daya saing bagi lebih dari 9,8 juta mahasiswa Indonesia yang tersebar dalam 32.592 program studi di 4.356 institusi perguruan tinggi.

   Beragam perbaikan akan terus dilakukan berdasarkan evaluasi yang kritis termasuk penguatan merdeka belajar dengan pembelajaran

transformatif. Pembelajaran transformatif ini merupakan sebuah teori pembelajaran yang menggambarkan proses perubahan besar dalam cara individu memandang diri mereka sendiri dan dunianya. Hal ini melibatkan pergeseran kesadaran, nilai-nilai, dan keyakinan, yang mengarah pada transformasi pandangan dunia pelajar. Pembelajaran transformatif mempunyai implikasi yang signifikan terhadap pendidikan dan pelatihan. Dengan memahami prinsip-prinsip pembelajaran transformatif, dosen dapat merancang pengalaman pembelajaran yang memfasilitasi pembelajaran yang mendalam dan bermakna serta memberdayakan peserta didik untuk menjadi agen perubahan. Selanjutnya, pembelajaran transformasi merupakan strategi pelengkap untuk membangkitkan perangai ilmiah (*scientific temper*) peserta didik. Perangai ilmiah dapat dibangkitkan dengan habituasi kebebasan berpikir, berpikir kritis, dan kemampuan mengemukakan pendapat dalam pembelajaran dan penelitian. Peserta didik akan terbiasa untuk mempertanyakan keadaan di sekelilingnya dan berpikir kritis untuk menemukan solusi inovatif.

2

Paradigma Baru Transformasi Pendidikan Tinggi Menuju Masyarakat Berpengetahuan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Mahasiswa Program Kampus Mengajar di SDN 7 Banda Aceh. Dokumentasi: Diktisaintek

Paradigma baru dalam transformasi pendidikan tinggi menuntut adanya perubahan fundamental dalam berbagai aspek, mengingat zaman dan tantangan berkembang dengan sangat cepat. Beradaptasi menjadi hal krusial yang wajib dilakukan. Pendidikan tinggi harus mampu menjadi agen perubahan yang fleksibel, adaptif, dan inklusif, dengan menjadikan sains, teknologi, kolaborasi, dan pengembangan karakter perguruan tinggi sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Relevansi dan kualitas pendidikan yang mampu menjawab tantangan global harus menjadi pijakan utama dalam transformasi. Sebab, transformasi bukan sekadar perubahan metode pengajaran, tetapi juga pendekatan terhadap tujuan pendidikan, struktur organisasi, serta hubungan perguruan tinggi dengan masyarakat.

Pendidikan tinggi sendiri memiliki fungsi menciptakan talenta, membangun ekosistem penelitian dan pengembangan yang baik, serta menjadi penggerak pembangunan. Kemdiktisaintek menjadi nahkoda untuk memastikan perguruan tinggi mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan berperan sebagai penggerak pembangunan. Kemdiktisaintek berperan besar dalam pengembangan talenta sains dan teknologi, penumbuhan dan penguatan budaya ilmiah, serta penyelesaian permasalahan sosial dan ekonomi nasional.

2.1 Perubahan Paradigma Perguruan Tinggi

Pergeseran paradigma perguruan tinggi mencerminkan perpindahan dari universitas sebagai menara gading yang terisolasi ke universitas sebagai kontributor yang dinamis, terlibat, dan berdampak bagi masyarakat. Pergeseran utama yang terjadi meliputi dari transmisi pengetahuan hingga penciptaan dan penerapan pengetahuan, dari pengejaran akademik yang terisolasi hingga kemitraan sosial yang terlibat, dari fokus pada disiplin individu hingga pendekatan interdisipliner dan transdisipliner, dan dari terutama melayani siswa untuk melayani pemangku kepentingan yang lebih luas.

Konsep generasi perguruan tinggi menyoroti peran universitas yang berkembang dalam masyarakat. Berikut rincian pergeseran paradigma dari generasi ke-1 ke generasi ke-4.

Generasi ke-1 adalah Universitas Pengajaran, dengan fokus terutama pada

pengajaran dan transmisi pengetahuan yang mapan dan penekanan pada pendidikan klasik dan disiplin tradisional. Peranannya adalah mendidik elit dan melestarikan warisan budaya.

Generasi ke-2 adalah Universitas Riset, dengan fokus menambahkan penelitian ke misi pengajaran, menghasilkan pengetahuan baru melalui penyelidikan ilmiah, dan Model Humboldtian. Peranannya termasuk memajukan pemahaman ilmiah dan berkontribusi pada pembangunan nasional.

Generasi ke-3 adalah Universitas Kewirausahaan, dengan fokus menambahkan inovasi dan transfer teknologi ke pengajaran dan penelitian, terlibat dengan industri dan mendorong pembangunan ekonomi, mengomersialkan penelitian dan mempromosikan kewirausahaan. Peranannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

Generasi ke-4 adalah Universitas Keterlibatan Sosial, dengan fokus mengintegrasikan pengajaran, penelitian, dan inovasi dengan penekanan kuat pada dampak sosial; mengatasi tantangan global yang kompleks melalui kolaborasi interdisipliner, terlibat aktif dengan komunitas dan pemangku kepentingan, dan pembentukan lingkungan sekitar secara proaktif. Peranannya berupa berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, kesetaraan sosial, dan kesejahteraan global.

1) Model Perguruan Tinggi Generasi Keempat

Pendidikan tinggi menjadi fondasi dalam membangun masyarakat berpengetahuan, sehingga pada akhirnya pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dengan baik dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat berpengetahuan tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga memiliki kesadaran tinggi terhadap isu-isu lingkungan dan sosial.

Di era digital dan teknologi yang terus berkembang, masyarakat berpengetahuan juga berarti mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, teknologi memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan luas,

sehingga kesadaran dan pengetahuan dapat diterapkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Untuk itu, pendidikan yang berkualitas, teknologi yang mendukung, serta kolaborasi berbagai sektor menjadi elemen penting dalam membangun masyarakat yang tidak hanya tahu, tetapi juga peduli terhadap masa depan yang lebih baik.

Perguruan tinggi tidak hanya sekedar menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi turut melakukan transformasi sosio-ekologis dan ekonomi. Perguruan tinggi perlu berubah menjadi agen pembangunan dan bukan hanya sebagai agen pendidikan. Perguruan tinggi menambahkan indikator dampak terhadap kinerja yang selama ini diukur berdasarkan aksesibilitas, mutu, dan relevansi. Ini yang disebut dengan perguruan tinggi generasi keempat (generasi pertama fokus pada pengajaran, generasi kedua menambahkan riset, dan generasi ketiga menambahkan relevansi pengembangan).

Perguruan Tinggi atau Universitas Generasi Keempat *(fourth-generation university/*4GU) merupakan model pendidikan tinggi yang menekankan peran perguruan tinggi sebagai agen pembangunan sosial dan ekonomi. Model ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya globalisasi dan kemajuan teknologi di abad ke-21. Dalam konteks ini, perguruan tinggi diharapkan berperan lebih aktif dalam mengatasi tantangan masyarakat dan mendorong inovasi.

Beberapa cara bahwa pendidikan tinggi berperan sebagai agen pembangunan, yaitu:

1. Menciptakan pengetahuan dan inovasi melalui:
   (i) Penelitian: 4GU memprioritaskan penelitian yang mengatasi permasalahan dunia nyata dan berdampak langsung pada masyarakat. Hal ini mencakup penelitian interdisipliner, yang mempertemukan para ahli dari berbagai bidang untuk mengatasi permasalahan yang kompleks;
   (ii) Transfer Teknologi: Universitas membina kolaborasi antara akademisi dan industri untuk mengkomersialkan temuan penelitian dan mempromosikan inovasi teknologi, dan
   (iii) Kewirausahaan: 4GU mendorong pemikiran kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan dosen, mendorong terciptanya bisnis dan usaha baru.
2. Melakukan keterlibatan komunitas (*community engagement*), melalui:

(i) Pelayanan Publik: Universitas terlibat dengan komunitas lokal melalui program penjangkauan, inisiatif sukarelawan, dan proyek layanan masyarakat;
(ii) Pembelajaran Sepanjang Hayat *(lifelong learning)*: 4GU menawarkan berbagai program pendidikan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan para profesional yang bekerja dan masyarakat umum, dan
(iii) Pertukaran Budaya: Universitas mempromosikan keragaman dan pemahaman budaya melalui program pertukaran internasional dan kolaborasi dengan mitra global.

3. Tanggung jawab sosial, melalui:
   (i) Keberlanjutan: 4GU mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam kurikulum dan operasi mereka, mengatasi isu-isu seperti perubahan iklim, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial;
   (ii) Kepemimpinan Etis: Universitas memupuk kepemimpinan etis di kalangan mahasiswa dan dosen, mendorong pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan akuntabilitas sosial; dan
   (iii) Dampak Sosial: 4GU terlibat dalam penelitian dan inisiatif yang mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, kesenjangan, dan kesenjangan layanan kesehatan.

4. Mengembangkan kewarganegaraan sedunia, melalui:
   (i) Internasionalisasi: 4GU menumbuhkan kewarganegaraan global dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar di luar negeri, berpartisipasi dalam proyek penelitian internasional, dan terlibat dengan beragam budaya;
   (ii) Kompetensi Antarbudaya: Universitas membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan untuk menavigasi dunia global, mendorong pemahaman dan kolaborasi antarbudaya; dan
   (iii) Kemitraan Global: 4GU membangun kemitraan dengan institusi di seluruh dunia untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan, kolaborasi penelitian, dan mobilitas mahasiswa.

Dengan menganut prinsip 4GU, institusi pendidikan tinggi dapat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan kelestarian lingkungan. Mereka dapat memberdayakan individu,

memperkuat komunitas, dan membentuk masa depan yang lebih baik bagi semua orang.

Pertanyaan bagi kita adalah apa yang menjadi peluang/kesempatan atau apa yang tersedia bagi pendidikan tinggi dalam menganut peran sebagai agen pembangunan?

1. Peran perguruan tinggi dalam pengembangan talenta sains dan teknologi, yang ditandai dengan tenaga kerja terampil:
   (i) Institusi pendidikan tinggi menghasilkan lulusan terampil yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial;
   (ii) Inovasi dan Kewirausahaan: Individu yang berpendidikan lebih besar kemungkinannya untuk berinovasi dan memulai bisnis, yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja dan diversifikasi ekonomi; dan
   (iii) Kepemimpinan dan Tata Kelola: Pendidikan tinggi menumbuhkan pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah, membekali lulusan untuk menjadi pemimpin dan pembuat kebijakan yang efektif.

2. Peran perguruan tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita harus ingat bahwa Presiden mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8%, perguruan tinggi dapat berperan dalam:
   (i) Peningkatan Produktivitas: Tenaga kerja terampil menyebabkan peningkatan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor perekonomian,
   (ii) Kemajuan Teknologi: Institusi pendidikan tinggi dapat melakukan penelitian dan pengembangan, yang mengarah pada terobosan dan inovasi teknologi, dan
   (iii) Menarik Investasi Asing: Populasi yang berpendidikan tinggi dapat menarik investasi asing, sehingga meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Sementara itu, peran pendidikan tinggi dalam pembangunan sosial, dapat ditilik dari:

(i) Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan: Pendidikan tinggi dapat berkontribusi terhadap kemajuan dalam layanan

kesehatan, yang mengarah pada peningkatan hasil kesehatan dan pengurangan kemiskinan;

(ii) Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan: Pendidikan memberdayakan individu untuk keluar dari kemiskinan dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil; dan

(iii) Pelestarian dan Pengembangan Budaya: Institusi pendidikan tinggi dapat berperan dalam melestarikan warisan budaya dan mendorong pertukaran budaya.

Hal terakhir yang menjadi peluang bagi pendidikan tinggi adalah peran dalam kelestarian lingkungan, yang dapat dipetik dengan melakukan:

(i) Praktik Berkelanjutan: Pendidikan tinggi dapat mempromosikan praktik berkelanjutan dan kesadaran lingkungan di kalangan pelajar dan masyarakat luas; dan

(ii) Teknologi Ramah Lingkungan: Penelitian dan inovasi dalam pendidikan tinggi dapat mengarah pada pengembangan teknologi ramah lingkungan dan solusi berkelanjutan.

2) Transformasi Perguruan Tinggi 5.0

Kemdiktisaintek memandang bahwa Indonesia perlu bergerak melampaui Generasi 4 "Perguruan Tinggi sebagai Agen Pembangunan" menuju Generasi 5 "Perguruan Tinggi Cerdas sebagai Agen Pembangunan". Perguruan Tinggi 5.0 merujuk pada konsep yang relatif baru dalam pendidikan tinggi, yang berfokus pada adaptasi perguruan tinggi terhadap kebutuhan ekonomi dan masyarakat abad ke-21. Konsep ini menekankan peran teknologi dan inovasi dalam mengubah model pendidikan konvensional untuk lebih mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia yang berubah dengan cepat dan menghasilkan solusi-solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. "5.0" menyiratkan persepsi bahwa pendidikan tinggi telah melalui beberapa tahap evolusi, dan ini dianggap sebagai langkah selanjutnya dalam perkembangan tersebut.

Pengembangan Universitas 5.0 berpusat pada teknologi tepat guna terkini dan faktor-faktor seperti perubahan iklim, antara lain, diperhitungkan saat mempersiapkan siswa untuk masa depan. Dalam menyongsong era Masyarakat 5.0, perguruan tinggi dituntut untuk siap diri dalam merombak

pola pendidikan yang sudah dilaksanakan dengan kompetensi yang sangat baku agar pendidikan terus berkembang pada masa yang cepat berubah dan serba tidak pasti yang ditandai dengan hilangnya pekerjaan dan kompetensi lama yang sudah dipersiapkan oleh perguruan tinggi. McKinsey memperkirakan bahwa dalam 10 tahun ke depan jutaan lapangan pekerjaan akan digantikan dengan otomasi. Selanjutnya, ada kebutuhan untuk penelitian interdisipliner baru antara sains dan teknik dengan tujuan mengembangkan kolaborasi manusia-teknologi yang sempurna dalam Industri 5.0.

Perguruan Tinggi 5.0 yang cerdas harus memahami dan memperbarui situasi di dalam dan di luar batas-batasnya, dengan perspektif yang luas tentang kerja sama intra-organisasi dan antar-organisasi. Potensi yang tersedia adalah untuk membangun sistem inovasi baru yang mempromosikan inovasi sosial, sosial, dan digital yang terbuka, secara sistemik demi kepentingan masyarakat dengan peran penting sains dan dampak sosial dan kemasyarakatannya. Konsep Perguruan Tinggi 5.0 merupakan upaya untuk mengatasi transformasi digital dan transisi hijau yang sedang berlangsung saat ini, dan untuk merangsang dimensi sosial dari misi universitas.

Perguruan Tinggi 5.0 merupakan modernisasi pendidikan tinggi yang memenuhi tuntutan dunia kerja digital. Metode pembelajaran baru seperti pembelajaran campuran, pembelajaran yang dipersonalisasi, pembelajaran adaptif, pembelajaran transformatif, dan pembelajaran kolaboratif dalam dunia pembelajaran virtual memungkinkan fleksibilitas, individualisasi, dan interaktivitas yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Adaptasi kurikulum dalam hal pemrograman, pembelajaran mesin, dan pemberian kredensial mikro diperlukan untuk memberikan pendidikan yang baik kepada siswa dan mempersiapkan mereka menghadapi tuntutan dunia kerja digital.

Beberapa komponen utama dari konsep Universitas 5.0 meliputi:

1. Integrasi teknologi canggih: menggabungkan teknologi seperti kecerdasan artifisial, realitas virtual dan tertambah, dan analisis data besar ke dalam pengajaran dan penelitian untuk meningkatkan pengalaman belajar dan membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk karier masa depan.

2. Kemitraan industri: mengembangkan kolaborasi yang kuat antara universitas dan mitra industri untuk memastikan keselarasan program akademik dengan kebutuhan tenaga kerja, menawarkan magang, dan memfasilitasi proyek penelitian terapan.
3. Pendekatan multidisiplin: mempromosikan kolaborasi interdisipliner untuk memungkinkan siswa memecahkan masalah dunia nyata yang kompleks yang memerlukan pengetahuan dari berbagai domain.
4. Pembelajaran yang fleksibel dan personal: menawarkan berbagai format pembelajaran, seperti kursus daring, pembelajaran campuran, dan kredensial mikro, yang memungkinkan siswa menyesuaikan pengalaman pendidikan mereka sesuai dengan minat dan tujuan karier mereka.
5. Pembelajaran seumur hidup: mengakui bahwa pembelajaran tidak berakhir dengan penyelesaian gelar, dan menawarkan kesempatan pendidikan berkelanjutan untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan profesional sepanjang karier seseorang.

Saat mengembangkan dan menata perguruan tinggi, akan sangat membantu untuk mempertimbangkan seberapa baik institusi tersebut menerapkan prinsip-prinsip Universitas 5.0 ini. Meskipun tidak setiap perguruan tinggi mungkin melabeli dirinya sebagai institusi "5.0", mengevaluasi seberapa baik mereka menggabungkan komponen-komponen yang disebutkan di atas ke dalam program, layanan, dan budaya mereka akan membantu dalam menentukan apakah perguruan tinggi tersebut selaras dengan tujuan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk karier yang siap menghadapi masa depan di dunia yang berkembang pesat. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi 5.0 merupakan langkah penting menuju pendidikan tinggi yang modern dan berorientasi masa depan yang memberikan mahasiswa keterampilan yang diperlukan untuk sukses di dunia digital. Perguruan tinggi perlu bertransformasi untuk mampu menerapkan metode dan kurikulum pembelajaran baru demi membentuk pendidikan masa depan yang relevan dan menghasilkan karya-karya intelektual solutif yang bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat.

2.2 Kampus Transformatif

Konsep "universitas atau kampus transformatif" melampaui model pendidikan tinggi tradisional, bergerak melampaui sekadar transmisi pengetahuan untuk merangkul peran mendalam dalam membina evolusi

masyarakat. Konsep ini membayangkan sebuah universitas yang secara aktif terlibat dengan tantangan dunia yang kompleks, menumbuhkan pemikiran kritis, membina inovasi, dan memberdayakan individu untuk menjadi agen perubahan positif.

1. Komitmen terhadap Pembelajaran Bermakna

Inti dari universitas transformatif terletak pada komitmennya dalam menyediakan *pembelajaran yang bermakna*. Perguruan tinggi tidak lagi hanya berorientasi pada hafalan atau penilaian berbasis standar, melainkan pada pengembangan pemahaman mendalam, analisis kritis, serta penerapan ilmu dalam menyelesaikan permasalahan nyata. Hal ini diwujudkan melalui lingkungan belajar yang berpusat pada mahasiswa, dengan menekankan:

- partisipasi aktif dalam pembelajaran,
- proyek kolaboratif antarbidang ilmu, dan
- pengalaman belajar berbasis praktik dan penelitian.

Selain itu, kurikulum kampus transformatif bersifat interdisipliner, memungkinkan mahasiswa mengkaji dan menyelesaikan isu-isu kompleks yang tidak terbatas pada satu disiplin ilmu saja. Perguruan tinggi juga berperan dalam memfasilitasi *pembelajaran sepanjang hayat*, menyediakan kesempatan bagi individu untuk terus berkembang secara akademik maupun profesional di berbagai tahap kehidupan mereka.

2. Refleksi Kritis sebagai Budaya Akademik

Elemen utama lain dari kampus transformatif adalah dedikasinya terhadap refleksi kritis. Perguruan tinggi transformatif memupuk budaya akademik di mana mahasiswa, dosen, dan staf:

- didorong untuk mempertanyakan asumsi,
- menantang paradigma yang berlaku, dan
- terlibat dalam dialog terbuka mengenai dilema etika serta tantangan sosial.

Budaya refleksi kritis ini menciptakan lingkungan yang mendorong *keingintahuan intelektual* dan *penerimaan terhadap perspektif yang beragam*. Kampus transformatif tidak hanya menjadi ruang belajar, tetapi

juga pusat perdebatan akademik yang menghasilkan wawasan baru dan berkontribusi dalam diskursus ilmiah global.

3. Komitmen terhadap Tanggung Jawab Sosial

Universitas transformatif tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang kuat. Sebagai pengurus masyarakat (*steward of society*), kampus transformatif berperan aktif dalam:

- membangun kemitraan dengan pemerintah, industri, dan organisasi sosial untuk menyelesaikan permasalahan komunitas,
- mendukung keberlanjutan dan keadilan sosial, serta
- mengembangkan proyek berbasis pengabdian masyarakat yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, kampus transformatif tidak hanya mencetak lulusan yang siap kerja, tetapi juga individu yang memiliki kepedulian sosial dan berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat.

4. Inovasi sebagai Landasan Perguruan Tinggi Transformatif

Inovasi adalah landasan lain dari universitas transformatif. Universitas ini memupuk pola pikir kewirausahaan, yang mendorong mahasiswa dan dosen untuk mengembangkan solusi kreatif untuk masalah yang kompleks. Hal ini melibatkan penyediaan akses ke sumber daya, bimbingan, dan pendanaan untuk perusahaan rintisan dan proyek inovatif. Universitas menjadi katalisator inovasi, mendorong kemajuan teknologi, kewirausahaan sosial, dan pemecahan masalah yang kreatif. Selain itu, universitas memprioritaskan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, menerjemahkan pengetahuan akademis menjadi aplikasi praktis yang bermanfaat bagi masyarakat dan individu.

5. Kampus yang Inklusif dan Berkeadilan

Ciri khas lain dari kampus transformatif adalah komitmennya terhadap inklusivitas dan kesetaraan. Universitas berupaya menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi individu dari semua latar belakang, tanpa memandang ras, etnis, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi.

Hal ini melibatkan pembongkaran hambatan sistemik terhadap akses dan keberhasilan, mempromosikan keragaman di antara dosen dan staf, dan menciptakan budaya rasa hormat dan pengertian. Universitas menjadi model untuk keunggulan inklusif, menunjukkan kekuatan keragaman untuk mendorong inovasi dan menciptakan perubahan positif.

Intinya, universitas transformatif bukan sekadar lembaga pendidikan tinggi, tetapi kekuatan dinamis untuk evolusi masyarakat. Program ini memberdayakan individu untuk menjadi pemikir kritis, warga negara yang terlibat, dan pemecah masalah yang inovatif, membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan setara. Program ini merupakan mercusuar harapan, katalisator perubahan, dan bukti kekuatan pendidikan untuk mengubah kehidupan dan membentuk masa depan.

6. Pembelajaran Transformatif sebagai Inti Perubahan Paradigma

Pembelajaran transformatif adalah teori yang menjelaskan bagaimana perubahan mendalam dan mendasar dalam pandangan dunia seseorang. Hal ini lebih dari sekedar memperoleh informasi baru; ini tentang mengubah cara seseorang memahami dan menafsirkan dunia di sekitarnya. Proses ini tidak sekadar *menyerap informasi baru*, tetapi juga *merevisi cara berpikir*, sehingga menghasilkan perspektif yang lebih terbuka dan inklusif.

Elemen penting dari pembelajaran trasformatif terdiri dari refleksi kritis, dilema yang disorientasi, dan transformasi perspektif. Elemen penting adalah refleksi kritis, dimana peserta didik menganalisis perspektif mereka yang ada dan mempertimbangkan sudut pandang alternatif. Proses ini dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam pemahaman mereka. Seringkali, pembelajaran transformatif dipicu oleh “dilema disorientasi”, sebuah peristiwa atau pengalaman yang menantang keyakinan seseorang dan menciptakan rasa disonansi kognitif. Tujuannya adalah “transformasi perspektif”, suatu perubahan mendasar dalam cara seseorang memandang dan berinteraksi dengan dunia. Hal ini melibatkan peralihan dari perspektif yang terbatas atau terdistorsi ke perspektif yang lebih inklusif, terbuka, dan reflektif.

Elemen kunci dari pembelajaran transformatif adalah menantang asumsi

yang ada, mengembangkan perspektif baru dan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman baru. Inti pembelajaran transformatif adalah tentang mengubah cara seseorang memandang dunia, bukan hanya apa yang diketahui tentang dunia. Ini adalah proses pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang mendalam.

2.3 Diktisaintek Berdampak

Semboyan "Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang Berdampak" atau "Diktisaintek Berdampak" merangkum visi di mana pembelajaran, penemuan, dan inovasi bertemu untuk menciptakan kekuatan transformatif untuk kebaikan. Ini lebih dari sekadar frasa, tetapi suatu komitmen untuk menumbuhkan pikiran, mendorong kemajuan, dan membentuk masa depan yang lebih baik. Bayangkan sebuah perguruan tinggi sebagai pusat keingintahuan intelektual yang dinamis, tempat para sivitas akademika – terutama para mahasiswa – diberdayakan untuk menjadi pemikir kritis dan warga negara yang terlibat. Sains, yang didorong oleh penyelidikan tanpa henti, mendorong batas-batas pengetahuan, yang mengarah pada terobosan yang mengatasi tantangan global yang mendesak. Teknologi, yang dipandu oleh prinsip-prinsip etika, menerjemahkan penemuan-penemuan ini menjadi solusi praktis yang meningkatkan kehidupan dan mempromosikan keberlanjutan.

Semboyan ini mewakili pendekatan holistik, yang mengakui bahwa perubahan yang berdampak membutuhkan interaksi sinergis antara pendidikan, kemajuan ilmiah, dan inovasi teknologi. Ini tentang membina ekosistem tempat para sivitas menjadi inovator, ilmuwan menjadi pemecah masalah, dan teknologi berfungsi sebagai alat untuk dampak sosial yang positif. Pada hakikatnya, semboyan "Diktisaintek Berdampak" menandakan dedikasi untuk menciptakan dunia di mana pengetahuan memberdayakan, inovasi menginspirasi, dan kemajuan memberi manfaat bagi semua.

Konsepsi baru tentang pendidikan tinggi perlu dipadankan dengan sains dan teknologi sebagai masukan dan luaran, ditambah dengan riset dan pengembangan. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan

oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sementara itu, Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Agar perguruan tinggi dapat berkembang, maka penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu dikembangkan dengan sains dan teknologi yang memberikan dampak bagi pembangunan.

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang *Diktisaintek Berdampak* yang dimulai dengan pendidikan tinggi yang berdampak, siklus riset dan pengembangan yang berdampak, dan penguatan sains dan teknologi yang berdampak.

Pertama, konsepsi "pendidikan tinggi yang berdampak" melampaui citra tradisional ruang kuliah dan buku teks. Ini adalah ekosistem yang dinamis dan terus berkembang yang dirancang untuk menumbuhkan tidak hanya pengetahuan, tetapi juga pemikiran kritis, penalaran etis, dan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk menavigasi dunia yang semakin kompleks. "Pendidikan tinggi yang berdampak" menandakan pergeseran dari sekadar fokus pada pengetahuan akademis menjadi keterlibatan aktif dengan isu-isu dunia nyata dan mendorong perubahan masyarakat yang positif melalui keterlibatan masyarakat, penelitian, dan pengembangan mahasiswa.

Konsep ini mencakup enam hal utama, yaitu

1) pendidikan tinggi yang berdampak melampaui lingkungan kelas tradisional dan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan untuk mengatasi tantangan masyarakat yang kompleks,
2) menekankan pentingnya perguruan tinggi untuk terlibat aktif dengan masyarakat sekitar, berkolaborasi dalam proyek, dan mengatasi kebutuhan lokal,
3) mendorong mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan teoritis mereka pada masalah-masalah praktis, mendorong inovasi dan keterampilan memecahkan masalah,
4) pendidikan tinggi yang berdampak mendorong rasa tanggung jawab sosial di antara mahasiswa dan dosen, mendorong mereka untuk berkontribusi pada dunia yang lebih baik,
5) mengakui peran penting penelitian dalam mengatasi tantangan masyarakat dan mendorong perguruan tinggi untuk melakukan

penelitian berdampak yang bermanfaat bagi masyarakat, dan

6) berfokus pada pengembangan mahasiswa secara holistik, mempersiapkan lulusan tidak hanya untuk dunia kerja tetapi juga untuk menjadi warga negara yang aktif dan menjadi pemimpin di komunitas mereka.

Pendidikan tinggi yang berdampak dimulai dengan kurikulum yang presisi dan relevan. Hal ini bukan tentang menghafal fakta, tetapi tentang memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya dan menerapkannya pada masalah dunia nyata. Ini berarti mengintegrasikan studi interdisipliner, mendorong proyek kolaboratif, dan menumbuhkan budaya bertanya. Misalnya, seorang mahasiswa yang mempelajari ilmu lingkungan mungkin tidak hanya belajar tentang perubahan iklim di kelas; mereka mungkin juga berpartisipasi dalam penelitian lapangan, berkolaborasi dengan masyarakat setempat dalam proyek keberlanjutan, atau berkontribusi pada rekomendasi kebijakan.

Di luar kelas, pendidikan tinggi yang berdampak berkembang pesat melalui pembelajaran berdasarkan pengalaman. Magang, program kerja sama, dan kesempatan belajar sambil bekerja memberikan mahasiswa pengalaman langsung yang tak ternilai, menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Seorang mahasiswa yang mengerjakan proyek pengembangan masyarakat tidak hanya belajar tentang isu-isu sosial tetapi juga memperoleh keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan pemecahan masalah. Demikian pula, seorang mahasiswa yang terlibat dalam laboratorium penelitian berkontribusi pada kemajuan ilmiah sambil mengembangkan metodologi penelitian yang kritis.

Bimbingan dosen menjadi faktor penting dalam membentuk pendidikan tinggi yang berdampak. Para dosen menjadi lebih dari sekadar instruktur; mereka adalah pemandu, mentor, dan kolaborator. Dosen menantang mahasiswa untuk berpikir kritis, mendukung minat akademik dan profesional, serta menciptakan jaringan dukungan seumur hidup.

Lebih jauh lagi, pendidikan tinggi yang berdampak mengakui pentingnya keberagaman dan inklusi. Komunitas kampus yang dinamis mencerminkan kekayaan pengalaman manusia, menumbuhkan pemahaman lintas budaya dan mempromosikan keadilan sosial. Mahasiswa dari latar

belakang yang beragam membawa perspektif dan pengalaman yang unik, memperkaya lingkungan belajar untuk semua orang. Inklusivitas ini mencakup memastikan aksesibilitas bagi siswa penyandang disabilitas dan menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi semua orang.

Inovasi menjadi inti dari pendidikan tinggi yang berdampak. Perguruan tinggi bukan lagi menara gading; perguruan tinggi adalah pusat inovasi, yang mendorong kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan pembangunan ekonomi. Laboratorium penelitian mendorong batasan pengetahuan, dan program kewirausahaan memberdayakan mahasiswa untuk menciptakan usaha mereka sendiri. Selain itu, para pendidik merangkul teknologi baru dan pendekatan pedagogis untuk meningkatkan pengalaman belajar, seperti platform pembelajaran daring, simulasi realitas virtual, dan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi.

Pendidikan tinggi yang berdampak juga menumbuhkan rasa tanggung jawab kewarganegaraan. Lulusannya tidak hanya dipersiapkan untuk karier yang sukses, melainkan juga dipersiapkan untuk menjadi warga negara yang terlibat, berkontribusi pada komunitasnya, dan mengatasi tantangan global. Mereka memahami pentingnya pengambilan keputusan yang etis, tanggung jawab sosial, dan pembelajaran seumur hidup. Ini berarti menumbuhkan pemikiran kritis tentang dunia dan mendorong mahasiswa untuk menjadi peserta aktif dalam proses demokrasi.

Intinya, pendidikan tinggi yang berdampak adalah pengalaman transformatif yang memberdayakan individu untuk menjadi pembelajar seumur hidup, pemikir kritis, dan warga negara yang berkontribusi. Ini adalah perjalanan pertumbuhan intelektual, pengembangan pribadi, dan dampak sosial, yang mempersiapkan siswa tidak hanya untuk pekerjaan, tetapi juga untuk kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Perguruan tinggi bertanggung jawab bukan hanya menghasilkan lulusan tetapi mempersiapkan dan membuka lapangan pekerjaan bagi lulusannya agar tidak menjadi pengangur intelektual.

Kedua, “Penelitian dan pengembangan yang berdampak” (Riset dan Pengembangan/Risbang) lebih dari sekadar proses penemuan dan inovasi, melainkan upaya strategis yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan positif yang nyata di dunia. Risbang adalah mesin penggerak kemajuan

yang menerjemahkan konsep teoritis menjadi solusi praktis untuk menjawab kebutuhan masyarakat mendesak masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Bayangkan sebuah laboratorium penelitian tempat para ilmuwan tidak hanya mengejar teori abstrak, tetapi juga aktif berkolaborasi dengan para insinyur untuk mengembangkan sistem pemurnian air yang terjangkau dan portabel bagi masyarakat yang mengalami kelangkaan air. Inilah inti dari Risbang yang berdampak – perpaduan antara keingintahuan ilmiah dan aplikasi praktis, yang digerakkan oleh semangat untuk memecahkan masalah dunia nyata.

Risbang yang berdampak dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi masyarakat. Hal ini mencakup identifikasi area strategis di mana inovasi dapat memberikan perubahan signifikan – baik dalam pengembangan perawatan medis baru, penciptaan solusi energi berkelanjutan, maupun meningkatkan teknologi komunikasi. Proses ini menuntut pendekatan multidisipliner yang melibatkan kolaborasi lintas bidang untuk berbagi pengetahuan dan keahlian. Kegiatan Risbang bersifat iteratif dan dinamis, yang ditandai dengan eksperimen, analisis, dan penyempurnaan berkelanjutan. Para peneliti secara konsisten menguji hipotesis, mengevaluasi hasil, dan menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan temuan baru, sembari menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang penting.

Namun, dampak Risbang tidak hanya diukur oleh kecemerlangan teknis inovasi semata, tetapi juga dari aspek aksesibilitas dan skalabilitasnya. Sebuah inovasi medis hanya berdampak jika dapat diakses oleh pasien yang membutuhkannya, dan solusi energi berkelanjutan baru akan bermakna jika diterapkan dalam skala luas. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan secara cermat faktor-faktor seperti biaya, infrastruktur, dan kerangka regulasi yang mendukung.

Selain itu, dimensi etika menjadi hal yang esensial dalam pelaksanaan Risbang yang berdampak. Para peneliti dituntut untuk mempertimbangkan konsekuensi potensial dari inovasi yang mereka kembangkan, memastikan bahwa teknologi yang dihasilkan benar-benar digunakan untuk kebaikan umat manusia. Hal ini membutuhkan keterlibatan dalam dialog terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan,

pemimpin industri, dan masyarakat luas, guna menjawab persoalan etika dan memastikan bahwa inovasi yang dilakukan secara bertanggung jawab. Risbang yang berdampak juga memainkan peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Melalui investasi pada riset dan pengembangan, pemerintah dapat menciptakan peluang inovasi, membangun industri baru, serta menciptakan lapangan kerja yang bernilai tinggi. Meski manfaat Risbang mungkin tidak langsung dirasakan, dampaknya dalam jangka panjang dapat berkontribusi besar terhadap kemakmuran nasional.

Selain itu, mendorong budaya kolaborasi dan berbagi pengetahuan juga menjadi kunci dalam menciptakan Risbang yang berdampak. Hal ini mencakup pengembangan platform yang memungkinkan peneliti untuk terhubung, bertukar ide, dan mengakses sumber daya bersama. Perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta kemitraan industri memiliki peran penting dalam memfasilitasi ekosistem kolaboratif ini. Pada akhirnya, Risbang yang berdampak adalah tentang menciptakan masa depan di mana inovasi bukan hanya sekadar jargon, tetapi menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kontribusi dan manfaat positif yang berkelanjutan, adil, dan sejahtera bagi seluruh umat manusia.

Ketiga, Sains dan Teknologi yang Berdampak bermula dari percikan rasa ingin tahu – pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menantang status quo atau keadaan sekarang. Ini adalah upaya tak kenal lelah untuk memahami fondasi dasar alam semesta, fenomena sosial dan budaya, serta perkembangan teknologi dari paling sederhana hingga yang paling canggih. Penelitian dasar, meskipun bersifat abstrak, menjadi fondasi penting bagi kemajuan teknologi inovatif. Sebagai ilustrasi, bayangkan dunia di mana penyakit dapat dideteksi dengan akurasi tinggi bahkan sebelum munculnya gejala, atau sistem pembelajaran yang secara otomatis menyesuaikan diri dengan kebutuhan unik setiap individu. Ini bukan fiksi ilmiah, tetapi potensi riil dari "sains dan teknologi yang berdampak" yang terbentang di hadapan masyarakat yang membutuhkan. Sains dan teknologi adalah pengejaran pengetahuan dan inovasi, bukan demi diri sendiri, tetapi untuk perbaikan nyata kehidupan manusia dan planet yang dihuni.

Inovasi teknologi, pada gilirannya, menjadi sarana untuk menerjemahkan temuan ilmiah ke dalam solusi yang praktis. Contohnya adalah revolusi dalam

bidang medis yang didorong oleh kemajuan dalam ilmu genomik. Pemetaan genom manusia telah membuka rahasia asam deoksiribonukleat (DNA) dan memungkinkan pengembangan terapi yang dipersonalisasi sesuai dengan profil genetik individu. Ini adalah wujud nyata dari sains dan teknologi yang berdampak – menghadirkan manfaat langsung bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia.

Namun demikian, dampak dari kemajuan teknologi tidak hanya diukur dari tingkat penguasaan teknologinya, tetapi juga dari pertimbangan etis dan aksesibilitasnya. Pengobatan yang menyelamatkan jiwa tidak akan berarti jika tidak dapat diakses oleh mereka yang membutuhkannya. Demikian pula, kecanggihan kecerdasan artifisial harus disertai dengan nilai-nilai etika yang menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Di tengah urgensi tantangan global seperti perubahan iklim, masyarakat menuntut hadirnya inovasi yang mampu mentransformasi penggunaan energi dari fosil ke sumber terbarukan, membangun praktik pertanian presisi dan berkelanjutan, serta mengurangi dampak degradasi lingkungan. Upaya ini memerlukan bukan hanya solusi teknologi, melainkan juga perubahan pola pikir yang mencakup ekonomi sirkular dan prioritas pada pengelolaan lingkungan.

Lebih jauh lagi, pendidikan tinggi memegang peran sentral dalam membina ekosistem sains dan teknologi yang berdampak. Perlu dibentuk generasi ilmuwan, dosen, insinyur, inovator, dan mahasiswa yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga sadar etika dan memiliki wawasan global. Hal ini mencakup dorongan terhadap kolaborasi interdisipliner, pemikiran kritis, dan budaya inovatif yang menghargai keberagaman dan inklusivitas. Lebih dari itu, sains dan teknologi yang berdampak bukanlah upaya individu, melainkan kerja kolektif yang melibatkan kemitraan antara akademisi, industri, dan pemerintah. Kolaborasi ini bertujuan untuk menerjemahkan hasil riset menjadi aplikasi dunia nyata, menumbuhkan kewirausahaan, dan membangun ekosistem inovasi yang sehat.

Pada akhirnya, sains dan teknologi yang berdampak adalah tentang menciptakan masa depan di mana kemajuan berjalan beriringan dengan keberlanjutan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Ini adalah pemanfaatan kekuatan pengetahuan dan inovasi untuk membangun dunia yang lebih baik bagi semua.

Model implementasi dari kebijakan "berdampak" telah dikembangkan dan dioperasionalisasikan serta divalidasi di berbagai tempat terutama Eropa dan Amerika. Program Ekosistem Inovasi Eropa *(European Innovation Ecosystems)*, misalnya, berfokus pada penciptaan ekosistem yang saling terhubung, inklusif, dan efisien untuk mendukung perusahaan yang berkembang dan mendorong inovasi melalui kolaborasi antara berbagai pelaku. Tujuannya adalah untuk mendukung peningkatan skala perusahaan, mendorong inovasi, dan merangsang kerja sama antara pelaku inovasi nasional, regional, dan lokal.

Selanjutnya, model yang sudah luas diadopsi adalah model kewirausahaan yang didorong oleh inovasi *(innovation-driven entrepreneurship)*. Pendekatan MIT (Massachusetts Institute of Technology) untuk mengukur 'kewirausahaan yang didorong oleh inovasi' dalam sebuah ekosistem didasarkan pada kerangka kerja yang jelas untuk memahami hal ini sebagai sebuah 'sistem' di mana berbagai masukan digabungkan, pada landasan fondasi kelembagaan yang kurang atau lebih kuat. Di MIT, inovasi adalah proses (suatu mewujudkan ide/ kecocokan antara masalah dan solusi) dari awal hingga berdampak.

'Dampak' yang dihasilkan berasal dari kombinasi kapasitas inovasi (I) dan kewirausahaan (E), bila dipadukan dengan keunggulan komparatif inti dan sering kali mengambil tindakan khusus melalui 'intervensi program dan kebijakan' *(policy and program interventions)* yang merajut gerak langkah kolaborasi antar pelaku dalam menciptakan nilai dan manfaat. Phil Budden dan Fiona Murray (2025) dalam buku berjudul "Accelerating Innovation: Competitive Advantage through Ecosystem Engagement" menjelaskan untuk tujuan analitis dan pengambilan keputusan, kapasitas inovasi (I-Cap) dan kapasitas kewirausahaan (E-Cap) dapat dipisahkan menjadi 'mesin kembar' sistem, masing-masing dengan serangkaian masukan terpisah untuk menggerakkannya. Salah satu atau kedua mesin ini dapat lebih kuat atau lebih lemah di negara mana pun, yang berkontribusi pada ekosistem, dan penilaian ekosistem yang mendorong 'berdampak' dapat dituangkan dalam serangkaian metrik keluaran sederhana.

Perguruan tinggi yang memperluas tanggung jawabnya untuk membina kewirausahaan dapat menjadi pendekatan yang ampuh untuk

mengurangi pengangguran. Dengan membangun program dan inkubator kewirausahaan, perguruan tinggi menciptakan lingkungan yang mendorong mahasiswa untuk berinovasi dan memulai bisnis mereka sendiri. Program Kewirausahaan Mandiri (WMK) yang diperkenalkan pada tahun 2023 merupakan indikator dampak perguruan tinggi dengan memberikan mahasiswa kesempatan untuk pengalaman belajar langsung, bimbingan, dan akses ke sumber daya untuk menciptakan bisnis mereka sendiri. Pendekatan yang dapat direplikasi ini masih perlu ditingkatkan menjadi pendekatan inovatif yang disebut pabrik kewirausahaan (*entrepreneurship factory*) di mana perguruan tinggi mengadaptasi program mereka agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa bisnis yang dikembangkan relevan dan berdampak. Larso dan Simatupang (2023) menjelaskan bahwa dengan merangkul tanggung jawab yang diperluas dalam gerakan pabrik kewirausahaan, perguruan tinggi tidak hanya berkontribusi pada pasar kerja tetapi juga memainkan peran penting dalam menumbuhkan tenaga kerja yang dinamis dan inovatif dan pada akhirnya mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Konsepsi *Disktisaintek Berdampak* diperkenalkan pada acara *Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI) Periode 2024-2029* pada 4 Desember 2024. Mendiktisaintek menyampaikan ucapan selamat kepada Prof. Heri Hermansyah yang dipercaya memimpin Universitas Indonesia periode 2024-2029. Harapan besar disampaikan kepada Rektor baru untuk mendorong kemajuan signifikan UI sebagai perguruan tinggi terkemuka yang memberikan dampak nyata bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi UI, yaitu "Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia." Sebagai universitas yang menyandang nama bangsa, UI harus senantiasa memastikan mutu, relevansi, dan dampak pendidikannya diakui secara nasional maupun internasional.

Ketika menerima tongkat estafet kepemimpinan, Prof. Heri Hermansyah menegaskan pentingnya pelibatan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan visi UI. Ia menggariskan tujuan strategis agar UI menjadi perguruan tinggi dengan kontribusi nasional yang berdampak

(impactful national contribution) dan memperoleh pengakuan global bereputasi *(reputable global recognition)* melalui kolaborasi multidisiplin berbasis produktivitas. Strategi untuk mencapai tujuan tersebut mencakup: Pemberdayaan Kewirausahaan *(Empowering Entrepreneurship)*, Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan *(Improving Education Access and Quality)*, Penelitian dan Inovasi yang Berdampak *(Impactful Research and Innovation)*, Daya Saing Global *(Global Competitiveness)*, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transformasi Budaya *(Good Governance and Cultural Transformation)*.

Diharapkan program kerja yang dikembangkan akan terlaksana dengan baik agar UI dapat menjadi institusi berdampak, bereputasi, berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional. UI diharapkan bukan menjadi menara gading sebagai universitas terkemuka, tetapi harus menjadi perguruan tinggi penggerak untuk kemajuan bangsa. Sebagai bagian dari komitmennya, UI harus menjadi teladan dalam mendedikasikan karya dan kompetensinya untuk bangsa dan negara, serta membantu perguruan tinggi lain untuk berkembang. UI juga harus berkontribusi dalam memajukan dunia industri, komunitas, dan pemerintahan dengan menghadirkan solusi inovatif, inklusif, dan unggul guna mendukung ketercapaian Asta Cita Kabinet Merah Putih.

Pesan perguruan tinggi berdampak juga disampaikan oleh Mendiktisaintek kepada Prof. Tatacipta Dirgantara yang dilantik menjadi Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Periode tahun 2025-2030 pada 20 Januari 2025. Tatacipta Dirgantara diamanatkan untuk membangkitkan kepeloporan ITB sebagai perguruan tinggi teknik terkemuka yang memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Ia mencanangkan visi "ITB sebagai universitas generasi keempat kelas dunia yang unggul dan mandiri sebagai pelopor perubahan untuk pembangunan bangsa berkelanjutan melalui integrasi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta kewirausahaan dan inovasi multidisiplin, untuk menghasilkan karya dan solusi holistik yang memadukan aspek humaniora, seni, sains, teknologi, dan bisnis." Misi yang diemban mencakup pendidikan unggul, riset inovatif, penggerak kemajuan, dan penciptaan insan berdaya.

ITB seyogianya menanggalkan mentalitas kelangkaan *(scarcity mentality)* – yang membuat tidak berdaya menghadapi tantangan – dan beralih ke

mentalitas berkelimpahan *(abundance mentality)* yang memungkinkan kemajuan melalui kepemimpinan transformatif, budaya ilmiah dan inovatif, kepedulian dan empati yang diwujudkan dalam aksi nyata, tata kelola efektif, dan partisipasi aktif sivitas akademika. ITB tidak boleh melupakan jati dirinya yang sarat dengan karakter kepeloporan, kejuangan, keunggulan, dan pengabdian.

Secara lebih khusus, ada empat panggilan ITB agar tetap bermartabat dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia:

1) ITB harus menjadi kekuatan moral intelektual dalam memelopori prakarsa dan praktik mencerdaskan kehidupan bangsa,
2) ITB harus menjaga ruh (kehidupan) dan marwah yang berwibawa dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan,
3) ITB harus memiliki otonomi penuh untuk berinovasi unggul dan menghasilkan mahakarya yang aplikatif untuk kemajuan bangsa dan kemanusiaan,
4) ITB harus menunjukkan komitmen pengabdiannya yang berkontribusi dan berdampak signifikan bagi pembangunan berkelanjutan.

Harapannya, ITB dapat menjadi garda terdepan dalam solusi inovatif dan inklusif, serta berdampak yang mendukung ketercapaian Asta Cita Kabinet Merah Putih dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan demikian, *Diktisaintek Berdampak* merupakan kerangka strategis yang menyatukan kekuatan pendidikan tinggi, riset dan pengembangan, serta sains dan teknologi untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan dunia. Konsep ini menekankan bahwa pembelajaran harus berujung pada pemberdayaan, penelitian harus diarahkan untuk menyelesaikan masalah riil, dan teknologi harus dimanfaatkan secara etis dan inklusif. Melalui pendekatan kolaboratif, inovatif, dan transformatif, *Diktisaintek Berdampak* menjadi panggilan untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat perubahan yang melahirkan solusi berkelanjutan, memperkuat daya saing global, serta memastikan kemajuan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.4 Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi

Dalam pendidikan tinggi, otonomi mengacu pada hak perguruan tinggi untuk mengatur diri sendiri, yang mencakup kemandirian akademis, finansial, dan organisasi, yang memungkinkan institusi untuk menjalankan misinya secara efektif. Otonomi dalam pendidikan tinggi, yang juga dikenal sebagai otonomi institusional, berarti bahwa perguruan tinggi memiliki kebebasan untuk membuat keputusan tentang operasinya sendiri, termasuk kurikulum, penerimaan, penelitian, dan alokasi sumber daya, tanpa campur tangan eksternal yang tidak semestinya. Otonomi memungkinkan perguruan tinggi untuk mengejar pengetahuan dan penyelidikan secara bebas, memastikan bahwa dosen dan mahasiswa dapat terlibat dalam penelitian dan pengajaran tanpa penyensoran atau pengaruh yang tidak semestinya. Otonomi memungkinkan institusi untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan keadaan yang berubah, berinovasi, dan menanggapi tantangan lokal dan global secara efektif. Meskipun otonomi penting, perlu juga bagi perguruan tinggi untuk tetap bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, memastikan bahwa mereka melayani kepentingan publik dan memenuhi misi mereka secara efektif.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menggariskan bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi. Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi diatur dalam Peraturan Menteri.

Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan efektivitas dan efisiensi. Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan

hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu. Sementara itu, penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada bagian Penjelasan UU 12/2012 diterangkan bahwa Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Perguruan Tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian Perguruan Tinggi dapat mengembangkan budaya akademik bagi Sivitas Akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. Perguruan Tinggi sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteran umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Asas yang seringkali terabaikan adalah “asas tanggung jawab” dalam otonomi pengelolaan perguruan tinggi dalam mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan Tridharma. Karena itu, kebijakan otonomi pengelolaan perguruan tinggi harus memberikan ruang untuk peningkatan kapabilitas dan keberdayaan dalam melaksanakan otonomi pengelolaan secara bertahap sehingga perguruan tinggi mampu berangsur-angsur menjadi mandiri dalam mengatasi persoalan internal, kepatuhan, penyediaan layanan yang andal, dan karya-karya yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Artinya, perguruan tinggi menjadi penggerak pembangunan di sekitar untuk mampu memberikan dampak berupa manfaat positif bagi lingkungannya bukan hanya menghasilkan lulusan sebagai warga negara yang produktif. Perguruan tinggi harus bertransformasi untuk bertumbuh dan berkembang dan seiring dengan kematangannya dapat terus memperbaiki diri mencapai tujuan pendidikan tinggi. Hanya dengan keberdayaan dan pertumbuhan saja perguruan tinggi mampu untuk memberikan dampak baik melalui dosen, mahasiswa, tendik, lulusan atau alumninya, maupun melalui pusat-pusat pelayanan sains dan teknologi dan karya intelektual lainnya.

Beberapa dimensi otonomi yang perlu diperhatian antara lain. Otonomi Akademik berupa kebebasan untuk menentukan kurikulum, bidang penelitian, metode pengajaran, dan standar akademik. Otonomi Finansial adalah kemampuan untuk mengelola anggaran mereka sendiri, mengalokasikan sumber daya, dan mengumpulkan dana secara mandiri. Kemudian, otonomi organisasi adalah kebebasan untuk menyusun tata kelola, staf, dan operasi mereka dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan dan misi mereka. Sebagai contoh otonomi, perguruan tinggi (PT) yang memutuskan untuk menerapkan program atau bidang penelitian baru berdasarkan penilaiannya sendiri terhadap kebutuhan dan peluang, PT yang memilih kriteria dan proses penerimaannya sendiri, dan PT yang mengelola keuangan dan investasinya sendiri.

Meskipun otonomi penting, otonomi harus diimbangi dengan akuntabilitas untuk memastikan bahwa PT melayani kepentingan publik dan memenuhi tanggung jawab mereka. Otonomi dan akuntabilitas adalah dua sisi mata uang yang sama. Akuntabilitas memungkinkan suatu lembaga untuk mengatur kebebasan yang diberikan oleh otonomi. Akuntabilitas mencegah lembaga menyalahgunakan otonomi. Otonomi harus mendorong keunggulan dalam bidang akademik, tata kelola, dan manajemen keuangan. Hal ini dapat dicapai melalui tata kelola yang transparan, evaluasi kinerja yang teratur, dan mekanisme untuk keterlibatan dan umpan balik publik.

Dengan setiap keputusan untuk meningkatkan otonomi kelembagaan, pemerintah juga harus meyakinkan publik bahwa lembaga-lembaga ini bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Pertanyaan inti adalah mendapatkan keseimbangan yang tepat antara otonomi dan akuntabilitas perguruan tinggi. Tantangannya adalah menentukan seberapa besar akuntabilitas yang optimal. Akuntabilitas yang terlalu banyak dapat menyebabkan stagnasi inovasi dan potensi pencarian keuntungan, serta berpotensi merusak tujuan otonomi itu sendiri. Lembaga pendidikan tinggi telah menderita hilangnya otonomi karena prevalensi faktor-faktor seperti campur tangan birokrasi yang terlalu tegas, kekuatan uang, dan ketidakmampuan perguruan tinggi untuk melindungi otonomi mereka. Namun, akuntabilitas dan pengawasan tetap penting, terutama karena pemerintah terus menjadi pemodal penting pendidikan tinggi dan kecenderungan yang masih kuat akan adanya bahaya moral penyalahgunaan otonomi.

Tingkat otonomi PT bervariasi di berbagai negara dan sistem pendidikan, dengan beberapa negara memberikan lembaga pendidikan tinggi otonomi yang lebih besar daripada yang lain. Menurut studi kasus SABER *(Systems Approach for Better Education Results* atau Pendekatan Sistem untuk Hasil Pendidikan yang Lebih Baik - Bank Dunia) tentang model universitas otonom, perguruan tinggi bersifat otonom dalam hal pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam 5 aspek: (i) otonomi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran perguruan tinggi, (ii) otonomi dalam pengelolaan sumber daya manusia, (iii) peran dewan perguruan tinggi dalam tata kelola perguruan tinggi (partisipasi), (iv) evaluasi perguruan tinggi dan mahasiswa, dan (v) tanggung jawab perguruan tinggi. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi adalah dengan meningkatkan otonomi perguruan tinggi secara bertahap dalam bidang-bidang berikut: otonomi dalam program dan rencana pendidikan; otonomi dalam penggunaan keuangan dan fasilitas; otonomi dalam rekrutmen, manajemen sumber daya manusia; otonomi dalam tujuan dan mutu pendidikan.

Cara umum untuk meningkatkan otonomi pengelolaan perguruan tinggi adalah menggunakan kartu skor untuk menunjukkan tingkat kematangan otonomi berdasarkan kriteria atau dimensi otonomi. Salah satu contoh adalah kartu skor (*scorecard*) yang diperkenalkan oleh Asosiasi Universitas Eropa (European University Association/EUA) yang memberikan analisis komparatif lengkap tentang keadaan otonomi perguruan tinggi di berbagai sistem pendidikan tinggi di Eropa. Asosiasi Universitas Eropa mewakili lebih dari 800 institusi pendidikan tinggi di 48 negara, menyediakan forum bagi mereka untuk bekerja sama dan bertukar informasi tentang kebijakan pendidikan tinggi dan penelitian. EUA membuat dan menerbitkan Kartu Skor Otonomi Perguruan Tinggi, yang menyediakan analisis lintas empat dimensi: (1) Otonomi organisasi (meliputi struktur akademik dan administratif, kepemimpinan, dan tata kelola); (2) Otonomi keuangan (meliputi kemampuan untuk mengumpulkan dana, memiliki gedung, meminjam uang, dan menetapkan biaya kuliah); (3) Otonomi kepegawaian (termasuk kemampuan untuk merekrut secara mandiri, mempromosikan, dan mengembangkan staf akademik dan non-akademik); dan (4) Otonomi akademik (termasuk bidang studi, jumlah mahasiswa, pemilihan mahasiswa serta struktur dan isi gelar).

Meskipun mengakui bahwa ada berbagai model untuk reformasi ini, dialog yang dikembangkan melalui pendekatan komparatif EUA menguraikan prinsip-prinsip dasar dan kondisi yang perlu dimiliki perguruan tinggi agar dapat memenuhi misi dan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Perguruan tinggi memerlukan: (i) di tingkat sistem, hubungan yang produktif dengan otoritas publik dan kerangka regulasi yang memungkinkan; (ii) di tingkat kelembagaan, model tata kelola internal yang memadai, keseimbangan yang tepat antara keterlibatan komunitas universitas yang beragam dan pengambilan keputusan yang efisien.

Perguruan tinggi menghadapi tantangan transformasi besar, dalam berbagai skala waktu. Perubahan mendalam seperti transisi hijau, kolaborasi transnasional yang berkembang (termasuk aliansi universitas Eropa), transformasi digital (termasuk kecerdasan artifisial), dan banyak lainnya, membutuhkan kepemimpinan yang terampil dan model, struktur, dan proses tata kelola yang tepat. Mempromosikan otonomi kelembagaan sebagai prinsip inti terus menjadi sangat relevan dan penting, karena mendukung nilai-nilai perguruan tinggi. Dalam lingkungan politik yang tegang, upaya untuk membatasi atau melemahkan otonomi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Melalui pekerjaan dan perangkatnya, termasuk Kartu Skor Otonomi *(Autonomy Scorecard),* EUA mendukung dialog terstruktur dan berbasis fakta tentang tata kelola, otonomi, dan efisiensi, dalam kemitraan dengan sektor dan otoritas publik. Dengan temuan di empat dimensi otonomi perguruan tinggi – organisasi, keuangan, kepegawaian, akademik – kartu skor mendukung dialog berbasis bukti tentang topik penting ini. Hal ini memungkinkan pembandingan konkret kerangka regulasi nasional serta pertukaran praktik yang baik.

Banyak negara asing telah melakukan reformasi di bidang otonomi dengan implikasi pendidikan yang luas. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas pimpinan perguruan tinggi di Vietnam dapat dijadikan inspirasi dalam melakukan transformasi di universitas-universitas Vietnam untuk meningkatkan sistem pendidikan tinggi menjadi penghasil lulusan menjadi penggerak pembangunan. Pergeseran perspektif terjadi setelah bertahun-tahun kemitraan antara ASU (Arizona State University) dan universitas-universitas serta lembaga-lembaga pemerintah Vietnam yang dimulai pada tahun 2010. Perubahan terjadi dalam beberapa

tahap. ASU mengerjakan program-program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualitas kursus-kursus teknik di universitas-universitas Vietnam, dan kemudian menerapkan lembaga kepemimpinan untuk mengajak para pemimpin universitas untuk terlibat dalam perubahan-perubahan pendidikan sistemik. ASU berperan penting dalam menciptakan jembatan agar universitas-universitas Vietnam melihat peluang-peluang global dan standar-standar global, misalnya untuk memperoleh akreditasi yang diakui secara global termasuk Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET).

Agar model perguruan tinggi otonom dapat berjalan, perlu ditetapkan secara jelas peranan subjek yang terlibat dalam kepemimpinan dan pengelolaan perguruan tinggi. Peranan tersebut terkait dengan pelaksanaan masing-masing bidang otonomi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengarahan dan pengelolaan kegiatan perguruan tinggi. Menurut United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), tujuan akhir dari diskusi tentang otonomi perguruan tinggi bukanlah untuk menjamin otonomi sebagai kebaikan universal, tetapi untuk mengingat bahwa otonomi ditempatkan untuk melayani kepentingan tertinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pelatihan dan penelitian. Pimpinan perguruan tinggi merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan perguruan tinggi.

Pimpinan perguruan tinggi berwenang untuk membangun dan menata aparatur perguruan tinggi dengan mengusulkan rencana penataan dan pemantapan struktur organisasi perguruan tinggi dan menyerahkannya kepada instansi yang berwenang untuk diputuskan. Tata kelola perguruan tinggi yang menyeimbangkan otoritas yang berwenang, melaksanakan kebijakan untuk dosen dan mahasiswa, melaksanakan peraturan yang demokratis, memobilisasi dan mengoordinasikan sumber daya sosial untuk meningkatkan kualitas pendidikan perguruan tinggi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, kapasitas pimpinan perguruan tinggi dan perbaikan tata kelola perguruan tinggi serta orientasi hasil karya intelektual yang digunakan oleh pemangku kepentingangn menjadi kunci dalam perencanaan dan implementasi otonomi perguruan tinggi yang memberikan dampak positif dalam pembangunan.

2.5 Perguruan Tinggi sebagai Agen Perubahan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan di negara-negara berkembang. Universitas modern, jauh dari sekadar menara gading, harus berevolusi menjadi wadah yang dinamis untuk transformasi masyarakat, agen perubahan yang mendorong pembangunan berkelanjutan. Hal ini memerlukan perubahan mendalam dalam etosnya, bergerak melampaui peran tradisional pengajaran dan penelitian untuk merangkul keterlibatan proaktif dengan tantangan kompleks yang dihadapi dunia kita. Untuk mencapai hal ini, universitas harus secara strategis menumbuhkan budaya inovasi, tanggung jawab sosial, dan tindakan kolaboratif, mengubah diri mereka menjadi katalisator yang kuat untuk kemajuan.

Penguasaan sains dan teknologi merupakan syarat utama bagi sebuah negara untuk menjadi negara maju, karena berkontribusi langsung pada peningkatan pembangunan ekonomi. Castells (1994) menekankan bahwa pendidikan tinggi berperan sebagai mesin pembangunan ekonomi global yang baru. Pendidikan tinggi tidak hanya merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan, pendidikan tinggi memainkan peran sentral dalam mentransformasi negara melalui penguatan kapasitas akademisi, pembelajaran transformatif, serta taut suai dengan pemangku kepentingan.

Studi Bharti dan Yang (2021) menunjukkan keberhasilan Tiongkok dalam mengembangkan pendidikan yang mendukung transformasi industri, terutama melalui peningkatan jumlah lulusan teknik dan vokasi. Sementara itu, Crawley et al. (2020) menegaskan bahwa perguruan tinggi akan lebih efektif sebagai mesin pembangunan ekonomi apabila memiliki sistem pertukaran pengetahuan yang kuat dengan industri dan pemerintah. Perguruan tinggi mempunyai potensi dan kapasitas untuk memikirkan kembali bagaimana perguruan tinggi memberikan solusi yang lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat, berkontribusi pada tujuan percepatan inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan pemulihan dalam menghadapi tantangan lokal seperti tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pertama, universitas harus memprioritaskan penelitian yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat yang mendesak. Ini berarti bergerak melampaui pengejaran teoritis murni untuk merangkul penelitian terapan yang menangani isu-isu seperti perubahan iklim, kemiskinan, kesenjangan perawatan kesehatan, dan pertanian berkelanjutan. Alih-alih beroperasi dalam silo-silo disiplin ilmu, universitas harus mendorong kolaborasi interdisipliner, menyatukan para ahli dari berbagai bidang untuk menghasilkan solusi holistik. Lebih jauh lagi, penyebaran temuan penelitian harus diprioritaskan, menerjemahkan pengetahuan akademis menjadi aplikasi konkret melalui mekanisme transfer teknologi yang kuat dan kemitraan dengan industri dan pemerintah. Hal ini memastikan bahwa penelitian menghasilkan dampak nyata di dunia, mendorong inovasi, dan meningkatkan kehidupan.

Kedua, pendidikan harus ditata ulang untuk menumbuhkan generasi pembuat perubahan. Kurikulum harus mengintegrasikan tema-tema yang terkait dengan pembangunan, menumbuhkan pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan kewirausahaan. Pembelajaran berdasarkan pengalaman, pembelajaran berbasis layanan, dan proyek-proyek berbasis masyarakat harus tertanam dalam proses pendidikan, memberikan siswa pengalaman praktis dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Selain itu, universitas harus merangkul pembelajaran seumur hidup, menawarkan pendidikan berkelanjutan dan kesempatan pengembangan profesional untuk membekali individu dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan cepat. Dengan memelihara budaya pembelajaran seumur hidup, universitas memberdayakan individu untuk menjadi agen pembangunan yang aktif sepanjang hidup mereka.

Ketiga, universitas harus menjalin kemitraan yang kuat dengan masyarakat, pemerintah, dan organisasi nonpemerintah. Hal ini memerlukan perubahan dari pendekatan dari atas ke bawah (*top-down)* ke model kolaboratif, di mana universitas secara aktif mendengarkan dan melibatkan para pemangku kepentingan. Berbagi pengetahuan harus menjadi jalan dua arah, dengan universitas berbagi keahlian dan belajar dari wawasan berharga dari anggota masyarakat. Dengan mendorong dialog dan kolaborasi terbuka, universitas dapat membangun kepercayaan dan menciptakan visi bersama untuk pembangunan. Lebih jauh, universitas harus menumbuhkan budaya

tanggung jawab sosial di antara mahasiswa, dosen, dan staf, mendorong mereka untuk terlibat dalam kesukarelaan, advokasi, dan bentuk-bentuk keterlibatan sipil lainnya.

Keempat, universitas harus merangkul inovasi dan kewirausahaan sebagai pendorong pembangunan. Hal ini melibatkan penciptaan ekosistem yang mendukung bagi perusahaan rintisan, menyediakan akses ke sumber daya, bimbingan, dan pendanaan. Inkubator dan akselerator harus didirikan untuk mendorong pengembangan solusi inovatif untuk tantangan masyarakat. Selain itu, universitas harus menumbuhkan pola pikir kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan staf pengajar, mendorong mereka untuk berpikir kreatif dan mengambil risiko. Dengan menumbuhkan budaya inovasi, universitas dapat memberdayakan individu untuk menciptakan bisnis baru, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Transformasi universitas menjadi agen perubahan untuk pembangunan memerlukan perubahan mendasar dalam misi dan budayanya. Penegasan kembali nilai keberdayaan dan keberlanjutan perguruan tinggi, peningkatan keterlibatan dan kapasitas akademisi, pembelajaran transformatif, praktik evaluasi eksternal, dan taut suai dengan pemangku kepentingan merupakan tantangan peran perguruan tinggi. Sebagai konsekuensi, kebijakan pendidikan tinggi perlu mendorong perguruan tinggi untuk naik kelas dari fokus pada akses, mutu, dan relevansi menuju dampak terhadap kemajuan pembangunan.

Dengan memprioritaskan penelitian yang relevan, menata kembali pendidikan, menumbuhkan keterlibatan masyarakat, dan mempromosikan inovasi, universitas dapat memainkan peran penting dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan, adil, dan sejahtera bagi semua. Transformasi ini bukan sekadar pilihan, tetapi suatu keharusan, karena universitas diposisikan secara unik untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi dunia kita dan memberdayakan individu untuk menjadi agen aktif perubahan positif.

Dengan adanya paradigma baru pendidikan tinggi sebagai agen perubahan, Kemdiktisaintek berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang adaptif, relevan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Transformasi pendidikan tinggi tidak hanya bertujuan mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di kancah global, tetapi juga menjadikan perguruan tinggi

sebagai pilar penting dalam mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan peran strategis tersebut, perguruan tinggi dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun Indonesia yang maju, inklusif, sejahtera, dan berkelanjutan.

2.6 Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L) merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang mencakup penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, serta kebijakan K/L, termasuk langkah-langkah strategis yang diperlukan guna mencapai tujuan jangka panjang. Ketentuan teknis dalam penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renstra K/L, termasuk pemanfaatan Sistem Informasi, mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Kemdiktisaintek bertanggung jawab dalam mendorong pendidikan tinggi yang berkualitas, riset dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan oleh dunia industri dan masyarakat, serta sains dan teknologi yang berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Perumusan Rencana Strategis Kemdiktisaintek mengacu pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Visi, Misi, dan Program Prabowo-Gibran 2024, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, serta Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi 2020-2024.

Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029 diharapkan mampu mencapai visi dan menjawab tantangan yang terus berkembang, sekaligus mengoptimalkan peran kementerian dalam menciptakan pendidikan tinggi yang berkualitas, relevan, adaptif, dan berkelanjutan. Visi Kemdiktisaintek yang diturunkan dari Asta Cita adalah “Terwujudnya keberdayaan perguruan tinggi yang bertanggung jawab dengan tata kelola yang baik untuk bertumbuh dan berdampak, meningkatnya kapasitas riset dan pengembangan hingga hilirisasi bernilai tambah, serta berfungsinya sains dan teknologi dalam

mempercepat transformasi sosial, ekologi, dan ekonomi yang berkelanjutan." Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kemdiktisaintek, kementerian ini memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi serta ilmu pengetahuan dan teknologi guna membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaannya, Kemdiktisaintek menjalankan beberapa fungsi utama, yaitu: (1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pendidikan tinggi; (2) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; serta (3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Arsitektur kinerja pembangunan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 mengadopsi struktur Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045 yang mencakup lima aspek utama, yaitu (1) Transformasi Sosial, (2) Transformasi Ekonomi, (3) Transformasi Tata Kelola, (4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, serta (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Konstruksi kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik sektor dan wilayah serta melibatkan pemangku kepentingan pembangunan. Dokumen Rancangan Teknokratik ini kemudian berkembang menjadi Rancangan Awal RPJMN setelah melalui proses integrasi dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih.

Visi dan misi Prabowo-Gibran dalam pendidikan tinggi berfokus pada penguatan pendidikan, sains, dan teknologi. Beberapa indikator capaian utama meliputi: (1) kelanjutan dan perluasan cakupan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga ke pesantren dan perguruan tinggi; (2) penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas SDM yang produktif dan berdaya saing global; (3) membenahi kurikulum perguruan tinggi, pendidikan vokasi, dan politeknik berbasis riset, inovatif, aplikatif, dan inkubasi yang terhubung dengan industri; (4) peningkatan dana riset dan inovasi hingga mencapai 1,5-2,0% dari PDB dalam lima tahun; (5) pemberian beasiswa kepada anak petani, nelayan, guru, dan buruh untuk melanjutkan pendidikan ke S1 hingga jenjang S3; (6) penguatan pendidikan berbasis literasi digital guna mendukung digitalisasi ekonomi; (7) kemitraan dengan perusahaan swasta dan BUMN dalam membuka program beasiswa dan magang bagi lulusan pendidikan tinggi dan sekolah kejuruan; (8) peningkatan kesejahteraan dosen, peneliti, dan penyuluh;

(9) peningkatan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas, serta kemudahan akses masuk pendidikan tinggi; (10) pembentukan sistem pendidikan nasional yang menitikberatkan pada pembentukan karakter bangsa; (11) penguatan riset dan ilmu pengetahuan yang mendukung strategi pembangunan nasional melalui kolaborasi dengan dunia usaha; serta (12) peningkatan kualitas sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan individu kreatif, inovatif, dan berkualifikasi global.

Periode RPJMN 2025-2029 merupakan tahap awal yang sangat strategis dalam melanjutkan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan sinergi optimal antara Kemdiktisaintek dengan K/L lainnya serta pemerintah daerah. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk sektor swasta dan dunia industri, sangat diperlukan guna memperkuat integrasi pendanaan pendidikan dan riset serta pengembangan yang berkelanjutan. RPJPN mencantumkan 20 upaya transformatif super prioritas *(game changer)*, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, yaitu

a) Transformasi Sosial
   (i) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan dalam bidang sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika *(Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*/STEAM) berkualitas, pemanfaatan dana abadi pendidikan, dan
   (ii) restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan,

b) Transformasi Ekonomi
   (i) peningkatan anggaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) nasional menuju komersialisasi industri,
   (ii) industrialisasi berbasis sumber daya alam unggulan, pengembangan industri padat karya terampil dan teknologi inovatif serta berorientasi ekspor, dan
   (iii) percepatan transformasi digital dengan platform super guna mencetak talenta digital unggulan.

Sebagai bagian dari Prioritas Nasional (PN) 2025-2029 Asta Cita, Kemdiktisaintek berfokus pada PN 4, yaitu memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, dan pendidikan. Pendidikan tinggi diarahkan untuk

meningkatkan relevansi dan akses pendidikan berkualitas yang merata, pengembangan STEAM, peningkatan produktivitas, daya saing lulusan, dan kemampuan kerja lulusan pendidikan tinggi, serta daya saing perguruan tinggi.

Arah penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan STEAM, antara lain:

1) peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi, pengembangan STEAM;
2) penguatan otonomi perguruan tinggi sebagai rumah masyarakat ilmiah, dan peningkatan kualitas dan pengelolaan dosen.

Kemudian, Kemdiktisaintek perlu memastikan adanya sasaran dan indikator spesifik terkait pendidikan tinggi vokasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kemendiktisaintek dalam Peraturan Presiden 189 Tahun 2024 guna memastikan afirmasi terhadap pendidikan tinggi vokasi dapat dijalankan dengan baik dalam periode 2025-2029. Penguatan pendidikan vokasi mencakup:

1) relevansi kurikulum dan kualitas pembelajaran perguruan tinggi vokasi (PTV),
2) peningkatan kompetensi dan mobilitas dosen dan instruktur PTV,
3) sertifikasi kompetensi mahasiswa PTV, sarana dan prasarana PTV, dan penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi sektor strategis.

Selanjutnya, arah penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing, yaitu:

1) pengembangan pusat keunggulan dan peningkatan produktivitas riset dan inovasi perguruan tinggi, dan
2) peningkatan hilirisasi dan komersialisasi produk riset dan inovasi perguruan tinggi.

Selain berkaitan dengan prioritas nasional, Kemdiktisaintek juga mendukung:

(i) Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK),
(ii) Kegiatan Prioritas (KP) Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan,
(iii) Penyelenggaraan Sekolah Ungulan.

Sasaran Reformasi Pendidikan Keguruan melalui Penguatan LPTK dan Revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah menguatnya mutu lembaga pelaksana pendidikan tenaga kependidikan dan profesi guru. Sasaran Peningkatan Produksi SDM Kesehatan adalah Prodi kesehatan strategis yang dibuka melalui upaya percepatan/afirmasi dan akreditasi prodi kesehatan yang ditingkatkan. Sementara itu, sasaran pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul mencakup pembangunan sarana dan prasarana sekolah unggul, penyiapan guru dan tenaga kependidikan sekolah unggul, kurikulum berkarakteristik unggul, penjaringan dan pengembangan potensi peserta didik, dan pengembangan karakter dan kepemimpinan.

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menjadi dasar utama dalam menentukan pengampu dari berbagai program, kegiatan, hingga Rincian *Output* (RO), yaitu keluaran nyata yang bersifat spesifik dan berfokus pada pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, Renstra harus memperhatikan kelayakan indikator RPJMN yang telah ditugaskan kepada Kemdiktisaintek, termasuk ketersediaan sumber data serta proses penurunan indikator hingga ke tingkat Rincian *Output*.

Penyusunan Rincian *Output* diarahkan agar lebih spesifik sehingga dapat membedakan antara RO yang mendukung RPJMN sebagai Rincian *Output* Prioritas Nasional (ROPN), dengan tujuan menentukan jumlah ROPN sesuai dengan fokus RPJMN. Seiring dengan bertambahnya Direktorat Jenderal baru, yakni Ditjen Riset dan Pengembangan serta Ditjen Sains dan Teknologi, diperlukan analisis yang cermat dalam mengusulkan indikasi Rincian *Output* inisiatif baru agar dapat mengakomodasi berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Informasi yang diperoleh dari Bappenas menunjukkan bahwa sistem perencanaan KRISNA-RENJA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran - Rencana Kerja K/L) saat ini masih terbatas pada kegiatan eksisting lanjutan dari Kemendikbudristek serta penambahan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah unggulan.

Capaian 120 Hari Kerja

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Setelah menetapkan arah kebijakan transformasi pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang adaptif serta selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Program Prioritas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), langkah awal implementasi dilakukan melalui berbagai program strategis selama 120 hari pertama. Periode ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen Kemdiktisaintek dalam membangun fondasi yang kokoh bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi, penguatan riset dan inovasi, serta peningkatan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Seluruh kebijakan dan program percepatan yang dijalankan selama kurun waktu ini dirancang untuk menghasilkan capaian nyata sekaligus membangun ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang lebih tangguh. Analisis terhadap capaian kinerja selama periode 120 hari ini menjadi refleksi awal atas efektivitas langkah-langkah yang telah ditempuh, sekaligus pijakan untuk merumuskan kebijakan lanjutan dalam rangka mencapai target pembangunan jangka menengah dan panjang. Capaian-capaian berikut mencerminkan upaya Kemdiktisaintek dalam mewujudkan transformasi visioner pendidikan tinggi yang berdampak luas bagi masyarakat dan bangsa.

3

Pendidikan Tinggi Transformatif

Dokumentasi: Diktisaintek

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, mendorong inovasi, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Sebagai fondasi utama, Pendidikan Tinggi Tri Dharma menciptakan ekosistem akademik yang holistik melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang diterapkan baik dalam pendidikan akademik maupun vokasi. Ketiga aspek ini membentuk ekosistem akademik yang saling terintegrasi untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Seiring dengan perubahan zaman, pendidikan tinggi berkembang menuju pendekatan yang lebih transformasional. Hal ini tergambar dalam Gambar 1, yang menunjukkan paradigma transformasional pendidikan tinggi. Dalam konsep Pendidikan Tinggi Transformatif, terdapat sinergi antara pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan, serta sains dan teknologi. Hubungan dinamis antara ketiga elemen ini memungkinkan lahirnya inovasi yang dapat diaplikasikan ke dunia nyata, memperkuat daya saing lulusan, serta mendorong kontribusi nyata pendidikan tinggi terhadap pembangunan bangsa.

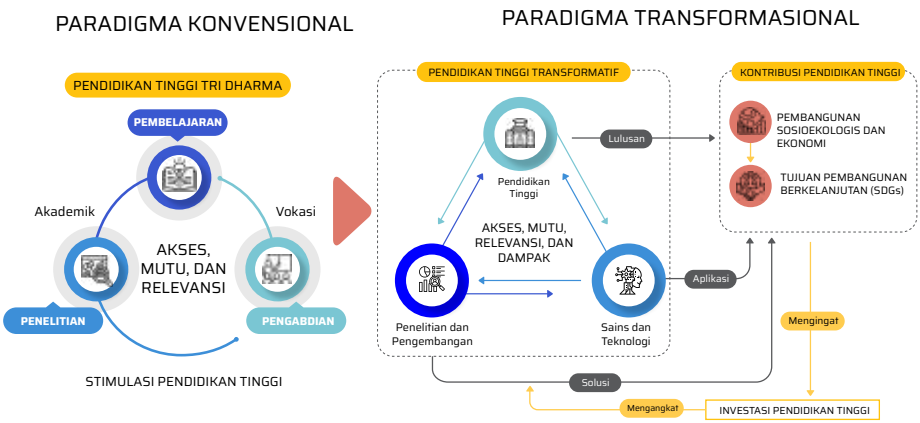

Gambar 1. Paradigma Transformasional Pendidikan Tinggi

Transformasi pendidikan tinggi dari sekadar pos anggaran pemerintah atau yang disebut stimulasi melalui alokasi anggaran menjadi pendorong pembangunan nasional yang diakui merupakan pergeseran paradigma yang mendalam menjadi pendidikan tinggi sebagai investasi pembangunan nasional. Evolusi ini mencerminkan pemahaman yang berkembang bahwa berinvestasi di universitas atau perguruan tinggi menghasilkan keuntungan yang signifikan, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi seluruh tatanan masyarakat.

Secara historis, pendidikan tinggi sering dipandang sebagai pengeluaran publik, biaya yang harus dikelola. Alokasi anggaran ditentukan oleh kendala fiskal langsung, dengan pertimbangan terbatas untuk dampak jangka panjang. Perspektif ini sering menyebabkan pemotongan dana selama kemerosotan ekonomi, karena pendidikan tinggi dianggap sebagai pengeluaran diskresioner daripada investasi strategis. Fokusnya adalah pada biaya langsung untuk menjalankan lembaga, daripada manfaat jangka panjang untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil, mendorong inovasi, dan mempromosikan kemajuan sosial.

Namun, kebangkitan ekonomi berbasis pengetahuan dan meningkatnya kompleksitas tantangan global telah mengharuskan pemikiran ulang yang mendasar tentang peran pendidikan tinggi. Pengakuan bahwa modal manusia adalah pendorong penting pertumbuhan ekonomi telah menjadi inti dari pergeseran ini. Pendidikan tinggi sekarang dipandang penting untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk inovasi, kewirausahaan, dan produktivitas.

Pergeseran paradigma ini ditandai oleh beberapa perubahan utama:

1) Dari Biaya ke Investasi: Penekanan telah bergeser dari memandang pendidikan tinggi sebagai biaya menjadi mengakuinya sebagai investasi strategis. Pemerintah dan pembuat kebijakan kini memahami bahwa berinvestasi dalam pendidikan tinggi menghasilkan keuntungan yang signifikan dalam bentuk tenaga kerja yang lebih terampil, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.
2) Penekanan pada Modal Manusia: Dalam ekonomi yang digerakkan oleh pengetahuan saat ini, modal manusia merupakan aset penting.

Pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk daya saing ekonomi. Ini termasuk menumbuhkan pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan inovasi.

3) Manfaat Sosial dan Kewarganegaraan: Di luar keuntungan ekonomi, pendidikan tinggi berkontribusi pada warga negara yang lebih terinformasi dan terlibat. Individu yang berpendidikan lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, mempromosikan kohesi sosial, dan berkontribusi pada perubahan sosial yang positif. Pendidikan tinggi juga berperan dalam meningkatkan hasil kesehatan masyarakat, mengurangi tingkat kejahatan, dan menumbuhkan masyarakat yang lebih adil.
4) Mendorong Inovasi dan Penelitian: Perguruan tinggi dan lembaga penelitian berfungsi sebagai pusat inovasi, mendorong kemajuan teknologi dan penemuan ilmiah. Kemajuan ini mengarah pada pengembangan industri baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan tinggi sangat penting untuk menumbuhkan budaya inovasi dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam ekonomi global.
5) Daya Saing Global: Dalam dunia yang semakin saling terhubung, negara-negara dengan sistem pendidikan tinggi yang kuat memiliki posisi yang lebih baik untuk bersaing di pasar global. Berinvestasi dalam pendidikan tinggi sangat penting untuk menarik investasi asing, mendorong inovasi teknologi, dan mempertahankan tenaga kerja yang kompetitif.

Intinya, pergeseran paradigma mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran pendidikan tinggi yang beragam. Pendidikan tinggi tidak lagi dilihat sebagai pemborosan sumber daya, tetapi sebagai investasi strategis yang menghasilkan keuntungan ekonomi, sosial, dan ekologi yang substansial. Dapat dipahami bahwa mendanai pendidikan tinggi berarti mendanai masa depan yang lebih baik. Tentunya paradigma transformasional memerlukan persyaratan agar perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan melalui lulusan, sains dan teknologi, maupun kepakaran dan layanan yang menyentuh kebutuhan nyata di masyarakat. Perguruan tinggi harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan yang efektif dan mampu menyelesaikan persoalan internal

dan beringsut mencoba menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan. Ini tidak terlepas dari kepemimpinan yang peduli dan kompeten, tata kelola perguruan tinggi yang baik, keterlibatan dari sivitas, dan interaksi yang intensif dengan pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, kontribusi pendidikan tinggi dapat dilihat dalam skema pada Gambar 1 tersebut, di mana hasil dari pendidikan tinggi tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga memberikan solusi inovatif yang dapat diterapkan secara langsung dalam berbagai sektor masyarakat. Melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi dengan sains dan teknologi, inovasi yang dihasilkan mampu mengangkat serta memperkuat sektor-sektor strategis dalam pembangunan bangsa.

Konsepsi pendidikan tinggi transformatif juga dikuatkan oleh inisiatif Kemdiktisaintek dalam menghadirkan kampus penggerak Asta Cita. Dalam forum penandatanganan kerja sama antara Kementerian Sosial dan perguruan tinggi se-Jawa Timur pada 10 Februari 2025, Wakil Menteri Kemdiktisaintek, Prof. Fauzan (lihat Gambar 2 dan 3), menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus menjadi kekuatan penggerak pembangunan nasional yang didasarkan pada saintifikasi pembangunan. Kampus tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi agen perubahan dengan dampak nyata di tengah masyarakat.

Gambar 2. Wamendiktisaintek, Prof. Fauzan memberikan pengarahan penting dan menyampaikan pesan Mendiktisaintek dalam Penandatanganan MoU Kementerian Sosial dan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Jawa Timur yang difasilitasi FRI dan Universitas Negeri Surabaya
Dokumentasi: Humas Unesa

Gambar 3. Wamendiktisaintek menekankan pentingnya re-evaluasi kebijakan dan tata kelola lembaga untuk menghadirkan dampak bagi civitas, masyarakat, dan negara.
Dokumentasi: Humas Unesa

Selanjutnya, disampaikan juga bahwa lima area dampak prioritas dari kampus penggerak Asta Cita adalah pengentasan kemiskinan, swasembada pangan dan energi, subsidi tepat sasaran, serta hilirisasi komoditas. Inisiatif ini menuntut re-evaluasi tata kelola dan kebijakan kampus agar lebih berdampak secara akademik, ekonomi, dan sosial religius di masyarakat. Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi negeri dan swasta, LLDikti, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, serta masyarakat, kampus diharapkan menjadi kekuatan kolektif yang tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga menghasilkan solusi atas permasalahan nyata bangsa. Dengan pendekatan seperti ini, kampus penggerak Asta Cita menjadi salah satu wujud konkret transformasi pendidikan tinggi menuju kontribusi yang luas, inklusif, dan berkelanjutan bagi pembangunan nasional.

3.1 Transformasi Pendidikan Tinggi

1) *Mengevaluasi dan Menata Kembali Perguruan Tinggi Kementerian/ Lembaga (PTKL)*

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui jenjang pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Tidak hanya dikelola oleh Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi, berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) juga mendirikan serta mengelola perguruan tinggi, baik vokasional maupun akademik. Namun demikian, tata kelola Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) menghadapi berbagai tantangan dan mendapatkan perhatian dari hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta diskusi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menanggapi hal tersebut, Kemdiktisaintek mengambil langkah strategis melalui evaluasi dan penataan terhadap keberlangsungan PTKL serta program studi yang berada di bawah kementerian dan lembaga nonkementerian. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menjamin mutu lulusan PTKL agar memiliki daya saing tinggi dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Evaluasi ini berlandaskan pada amanat Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang erat kaitannya dengan akses terhadap pendidikan tinggi berkualitas. Hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, yang memberikan panduan penyelenggaraan PTKL sesuai standar nasional pendidikan tinggi.

2) Evaluasi Menyeluruh: Menelusuri Kondisi PTKL

Evaluasi menyeluruh terhadap PTKL dalam 120 hari kerja, Kemdiktisaintek telah menyelesaikan evaluasi terhadap 125 PTKL dan 891 program studi yang tersebar di bawah 25 kementerian/lembaga, sebagaimana terlihat dalam Tabel 1, yang menggambarkan jumlah institusi serta program studi yang dikelola oleh setiap Kementerian atau Lembaga terkait.

Tabel 1. Jumlah PTKL dan Jumlah Program Studi pada K/L atau LPNK

NO	BADAN/KEMENTERIAN PEMBINA	∑PT	JUMLAH PRODI
1	Badan Intelijen Negara	1	7
2	Badan Meteor. Klimat. & Geofisika	1	4
3	Badan Pusat Statistik	1	3
4	Badan Siber dan Sandi Negara	1	3
5	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	3
6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional	1	2
7	Kementerian Dalam Negeri	1	13
8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2	8
9	Kementerian Hukum dan HAM	2	8
10	Kementerian Kelautan & Perikanan	11	39
11	Kementerian Kesehatan	38	509
12	Kementerian Ketenagakerjaan	1	3
13	Kementerian Keuangan	1	9
14	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	6

NO	BADAN/KEMENTERIAN PEMBINA	∑PT	JUMLAH PRODI
15	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6	51
16	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	3
17	Kementerian Perdagangan	1	1
18	Kementerian Perhubungan	22	91
19	Kementerian Perindustrian	13	46
20	Kementerian Pertahanan	6	33
21	Kementerian Pertanian	7	27
22	Kementerian Sosial	1	5
23	Kepolisian Republik Indonesia	2	4
24	Lembaga Administrasi Negara	3	13
JUMLAH		**125**	**891**

Catatan:
Pada tahun 2025 ini beberapa kementerian dipisahkan dari satu kementerian menjadi 2 (dua) atau 3 (tiga) kementerian yaitu antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kementenrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu terdapat kementerian yang mengalami perubahan nama yaitu Kementerian Komunikasi dan Ekonomi Kreatif.

Sebaran PTKL berdasarkan kementerian atau LPNK pembina juga divisualisasikan dalam Diagram 1. Diagram ini menunjukkan bahwa sebagian besar PTKL berada di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara kementerian atau lembaga lainnya memiliki jumlah PTKL yang lebih sedikit.

Diagram 1. Sebaran PTKL Pada Kementerian/LPNK Pembina

Evaluasi ini menjadi langkah awal yang strategis untuk memahami kondisi faktual di lapangan, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta mengukur tingkat akreditasi, relevansi kurikulum, dan kesesuaian program studi dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan nasional.

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam evaluasi ini antara lain:

1. perlunya standar pendidikan yang seragam, untuk memastikan kualitas yang merata di seluruh PTKL;
2. peningkatan kualitas tenaga pengajar, guna mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan standar akademik; dan
3. penyelarasan program studi dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan PTKL memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia kerja dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Melalui hasil evaluasi ini, langkah-langkah perbaikan dapat segera dirumuskan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi di Indonesia.

3) Langkah Strategis: Membangun Peta Jalan Masa Depan

Tindak lanjut dan langkah strategis evaluasi PTKL merupakan bagian awal dari upaya transformasi pendidikan tinggi yang berkelanjutan. Untuk menindaklanjuti hasil evaluasi, Kemdiktisaintek telah menetapkan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Penyampaian Surat Edaran kepada PTKL yang berisi arahan penyelenggaraan pendidikan selama masa transisi untuk memastikan kesesuaian operasional PTKL dengan regulasi yang berlaku.
2. Pelaporan hasil evaluasi secara bertahap kepada 24 kementerian/ lembaga nonkementerian sebagai bentuk transparansi dan pemetaan posisi PTKL dalam ekosistem pendidikan tinggi nasional.
3. Koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait guna menyusun peta jalan penataan PTKL sebagai panduan utama arah transformasi PTKL agar selaras dengan kebijakan pendidikan tinggi nasional.
4. Penataan lembaga dan program studi berdasarkan hasil evaluasi, mencakup penggabungan, restrukturisasi, atau penguatan program

akademik sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan kebutuhan pembangunan. Langkah ini tentu akan ditempuh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan penataan PTKL bukan sekadar agenda administratif, tetapi sebuah langkah transformasi yang akan menentukan masa depan pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat, penyelenggaraan PTKL tidak hanya akan lebih efisien, tetapi juga akan lebih berkualitas dan sesuai dengan standar nasional.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal proses ini, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan. Dengan sinergi antara pemerintah, PTKL, dan pemangku kepentingan lainnya, harapan untuk menciptakan pendidikan tinggi yang lebih terstruktur dan berkualitas bukan sekadar wacana, tetapi menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

4) *Mewujudkan Sistem Kenaikan Jabatan Akademik Dosen yang Efisien dan Transparan*

Bagi seorang akademisi, kenaikan jabatan adalah bentuk pengakuan atas kontribusi mereka dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, bagi sebagian dosen di Indonesia, proses kenaikan jabatan akademik—terutama untuk Lektor Kepala dan Profesor—sering kali dihadapkan pada alur birokrasi yang panjang dan kompleks. Untuk mengatasi tantangan ini, Kemdiktisaintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menginisiasi serangkaian reformasi guna mempercepat dan memperkuat layanan kenaikan jabatan akademik dosen. Tujuan dari reformasi ini jelas: menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan berbasis kinerja. Dengan sistem yang lebih baik, diharapkan kualitas dan kapasitas akademik dosen semakin meningkat, sekaligus mendukung pengembangan karier dan kesejahteraan mereka.

5) *Penyederhanaan Proses dan Percepatan Layanan*

Untuk mewujudkan sistem yang lebih efektif, berbagai langkah konkret telah ditempuh. Salah satunya adalah penyederhanaan alur kenaikan

jabatan akademik, yang bertujuan memangkas waktu layanan tanpa mengurangi kualitas penilaian. Reformasi ini mencakup beberapa aspek penting, di antaranya:

1. Penyusunan Keputusan Menteri terkait mekanisme dan prosedur kenaikan Jabatan Akademik Dosen (JAD) pada tahun 2025.
2. Penjaminan mutu asesor yang bertanggung jawab dalam menilai usulan kenaikan jabatan akademik, termasuk rekrutmen asesor berintegritas serta penyamaan persepsi di antara mereka.
3. Sosialisasi prosedur kenaikan jabatan akademik kepada dosen di seluruh Indonesia, didukung dengan bimbingan teknis (Bimtek) untuk membantu mereka memahami persyaratan dan prosedur yang harus ditempuh.
4. Penguatan sistem informasi berbasis digital melalui pengembangan modul dalam Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER), yang akan memastikan proses penilaian lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
5. Penambahan gelombang penilaian dari yang sebelumnya hanya dua periode dalam setahun menjadi tiga gelombang pada tahun 2025. Langkah ini memungkinkan lebih banyak dosen untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik tanpa harus menunggu terlalu lama.

6) Langkah yang Telah Dijalankan

Upaya reformasi ini tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi telah mulai direalisasikan melalui beberapa langkah awal yang strategis. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan ini adalah diterbitkannya Surat Edaran Nomor 0035/D/DT.04.01/2025 pada 22 Januari 2025, yang menandai dibukanya periode perbaikan usulan kenaikan jabatan akademik dosen.

Selain itu, hal lain yang telah dilakukan adalah pengembangan modul dalam Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) sebagai langkah awal menuju digitalisasi penuh dalam proses penilaian jabatan akademik. Sebelumnya, proses kenaikan jabatan akademik dosen mengharuskan setiap pengusul untuk mengunggah berbagai dokumen pendukung melalui laman *pak.kemdikbud.go.id*. Data profil dosen tetap diminta secara manual, sehingga proses administrasi sering kali memakan waktu dan tenaga.

Kini, dengan integrasi sistem SISTER – Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), layanan kenaikan jabatan akademik dapat diakses langsung melalui laman *sister.kemdikbud.go.id.* Kehadiran sistem ini membawa perubahan signifikan, yaitu dosen tidak lagi perlu mengunggah ulang data profilnya, karena informasi tersebut sudah tersimpan dalam SISTER - PDDIKTI.

Lebih jauh, integrasi SISTER dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SIASN BKN) memastikan bahwa data pangkat, golongan, dan jabatan dosen selalu diperbarui secara otomatis. Efisiensi ini memberikan manfaat nyata, terutama bagi dosen yang sudah memenuhi syarat untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan adanya fitur *Eligible* Dosen, mereka dapat dengan mudah memantau status kenaikan jabatan dan melengkapi kekurangan administrasi tanpa harus mengalami proses yang berbelit.

Langkah ini tidak hanya menyederhanakan birokrasi, tetapi juga mendukung percepatan karier akademik dosen dengan lebih transparan dan akurat. Persiapan mekanisme periode perbaikan usulan kenaikan jabatan akademik juga terus berjalan. Hal ini untuk memastikan bahwa dosen yang usulannya belum memenuhi syarat dapat melakukan perbaikan dengan lebih terstruktur dan terpantau.

7) Mewujudkan Layanan yang Lebih Cepat dan Berorientasi pada Kualitas

Ke depan, ada beberapa target utama yang ingin dicapai oleh Kemdiktisaintek dari reformasi ini:

1. Penetapan Keputusan Menteri tentang mekanisme kenaikan jabatan akademik yang diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam implementasi guna mendukung implementasi sistem yang lebih efektif dan akuntabel.
2. Pelaksanaan sosialisasi yang lebih masif dan penyelenggaraan bimbingan teknis bagi para dosen, sehingga mereka memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persyaratan dan prosedur kenaikan jabatan akademik.
3. Penilaian jabatan akademik yang berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan, memastikan efisiensi dalam proses evaluasi.

4. Peningkatan jumlah usulan yang diproses dan percepatan waktu layanan, sehingga mampu mengurangi antrean panjang dalam sistem pengajuan jabatan akademik.
5. Optimalisasi Sistem Informasi SISTER agar seluruh proses pengajuan jabatan akademik dapat berlangsung secara digital, transparan, serta lebih mudah diakses oleh dosen di seluruh Indonesia.
6. Pembentukan mekanisme penanganan pengaduan atau keberatan terhadap hasil penilaian jabatan akademik, sehingga tersedia ruang bagi para akademisi untuk memperoleh keadilan dalam proses evaluasi.
7. Penambahan periode layanan menjadi tiga gelombang dalam setahun, sehingga memberikan kesempatan lebih luas bagi para dosen untuk mengajukan usulan kenaikan jabatan akademik tanpa harus menunggu terlalu lama.

Reformasi dalam sistem kenaikan jabatan akademik ini merupakan bagian integral dari strategi besar peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Upaya ini dilakukan dalam kerangka pengelolaan pendidikan yang adaptif, fleksibel, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Dengan penerapan sistem yang lebih cepat, transparan, dan berbasis kinerja, diharapkan para dosen dapat lebih optimal dalam mengembangkan kapasitas akademik serta meningkatkan kontribusi ilmiah, tanpa terhambat oleh proses birokrasi yang kompleks. Melalui langkah-langkah konkret yang telah dan akan terus dijalankan, Kemdiktisaintek optimis dapat menciptakan ekosistem akademik yang lebih dinamis, profesional, dan berdaya saing global.

8) Menyederhanakan Administrasi dan Meningkatkan Mutu Dosen ASN

Dalam rangka mendorong pengembangan kapasitas akademik, dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi, memperdalam keilmuan, serta meraih kualifikasi akademik yang lebih tinggi. Namun demikian, dalam proses pemenuhan kewajiban tersebut, para dosen kerap menghadapi tantangan berupa prosedur birokrasi administratif yang panjang dan kompleks, khususnya dalam pengajuan tugas belajar, izin belajar, hingga penyetaraan ijazah luar negeri. Menjawab tantangan tersebut, dalam kurun waktu seratus dua puluh hari

kerja, Kemdiktisaintek telah melaksanakan penguatan program relaksasi administrasi terkait tugas belajar, izin belajar, dan penyetaraan ijazah luar negeri sebagai solusi nyata bagi para dosen ASN. Program ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi, sehingga para dosen dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia tanpa terbebani oleh kerumitan prosedur birokrasi.

Selain itu, program ini juga dirancang untuk menciptakan sistem layanan yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh dosen ASN di Indonesia. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu dosen dapat berjalan selaras dengan penyelenggaraan tata kelola administrasi yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan prima.

9) Dari Penyederhanaan Regulasi hingga Digitalisasi Layanan

Transformasi dalam administrasi akademik yang dilaksanakan oleh Kemdiktisaintek tidak hanya berfokus pada upaya pemangkasan prosedur birokrasi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat efektivitas sistem pelayanan melalui penerapan pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis digital. Sejumlah langkah strategis telah dan akan terus dilaksanakan dalam rangka mendukung keberhasilan program ini, di antaranya:

1. Penyusunan Keputusan Menteri
   Penyusunan regulasi yang jelas menjadi landasan penting dalam proses reformasi birokrasi. Untuk itu, Kemdiktisaintek tengah merumuskan Keputusan Menteri yang mengatur tentang relaksasi administrasi terkait tugas belajar, izin belajar, dan penyetaraan ijazah luar negeri. Keputusan ini nantinya akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Koordinasi Antar-Instansi
   Mengingat proses administrasi pengajuan dan pengakuan tugas belajar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, Kemdiktisaintek melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian

Negara (BKN), serta Sekretariat Negara (Setneg). Langkah ini bertujuan untuk memastikan keselarasan kebijakan serta integrasi proses pelayanan antarinstansi.

3. Desentralisasi Proses Administratif
   Sebagai bagian dari inovasi pelayanan, kewenangan pemrosesan akselerasi pengakuan izin belajar diberikan kepada pimpinan perguruan tinggi dan unit kerja terkait. Kebijakan desentralisasi ini diharapkan dapat mempercepat proses layanan yang semula terpusat di Kementerian, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan dosen di perguruan tinggi.

4. Integrasi Sistem Digital dalam SISTER
   Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi yang efektif, Kemdiktisaintek mengintegrasikan sistem administrasi akademik ke dalam SISTER. Beberapa fitur utama yang dikembangkan dalam sistem ini meliputi:
   a. Layanan akselerasi pengakuan izin belajar untuk mempercepat proses legalisasi studi lanjut bagi dosen.
   b. Pengaktifan kembali izin belajar bagi dosen yang sebelumnya menghadapi kendala administrasi.
   c. Penyetaraan ijazah luar negeri dalam satu platform digital, guna mempercepat proses verifikasi dan pengakuan akademik.
   d. Fitur pelacakan status pengajuan secara waktu nyata (*real-time)*, sehingga dosen dapat memantau perkembangan permohonan tanpa harus menghadapi birokrasi manual yang berlarut-larut.

5. Sosialisasi dan Edukasi
   Untuk memastikan kebijakan ini dapat diimplementasikan secara optimal, Kemdiktisaintek melaksanakan sosialisasi secara masif kepada seluruh dosen ASN. Selain itu, pelatihan teknis juga diberikan kepada unit kerja terkait agar pemahaman mengenai prosedur layanan yang baru dapat tersebar merata di seluruh perguruan tinggi.

Melalui rangkaian langkah strategis tersebut, diharapkan proses administrasi

akademik bagi dosen ASN dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman, sehingga dosen dapat lebih fokus pada pengembangan keilmuan dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

10) Langkah yang Sudah Dilaksanakan

Langkah-langkah awal dalam program relaksasi administrasi ini telah dimulai. Salah satu kemajuan signifikan adalah penyusunan draf Naskah Akademik terkait akselerasi pengakuan tugas belajar, izin belajar, dan penyetaraan ijazah luar negeri. Naskah ini akan menjadi dasar bagi implementasi kebijakan ke depan.

Selain itu, pengembangan modul dalam Sistem SISTER telah berjalan untuk memastikan bahwa seluruh layanan administratif dapat segera beralih ke sistem digital yang lebih modern dan terintegrasi.

11) Target dan Proses Tindak Lanjut

Pemerintah telah menetapkan sejumlah target utama untuk memastikan keberhasilan program ini:

1. Keputusan Menteri terkait relaksasi administrasi rampung dan diimplementasikan sesuai jadwal.
2. Sosialisasi prosedur baru secara luas, agar para dosen ASN memahami mekanisme yang telah disederhanakan.
3. Sistem digital SISTER dapat berfungsi optimal, sehingga seluruh proses administrasi dapat berjalan lebih efisien dan transparan.
4. Akselerasi pengakuan tugas belajar dapat dilakukan dengan kriteria yang telah ditetapkan, memberikan kepastian hukum bagi dosen yang terdampak.
5. Peningkatan efisiensi birokrasi, di mana waktu pemrosesan administrasi akademik dapat dipersingkat secara signifikan.

Relaksasi administrasi ini bukan semata-mata penyederhanaan prosedur, melainkan wujud komitmen pemerintah untuk menghadirkan sistem layanan akademik yang ramah, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan dosen. Melalui kebijakan ini, diharapkan para akademisi memperoleh keleluasaan

dalam mengembangkan diri, tanpa terhambat oleh kendala administratif yang selama ini menjadi tantangan.

Ke depan, pemerintah akan terus mengawal dan memastikan pelaksanaan program ini berjalan secara konsisten dan tepat sasaran. Setiap langkah yang diambil diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi dosen ASN di seluruh Indonesia. Sebab, investasi terbaik bagi masa depan pendidikan tinggi adalah memastikan bahwa para pendidik mendapatkan dukungan optimal dalam menjalankan tugas akademiknya. Dengan tata kelola administrasi yang lebih efisien dan berbasis teknologi, Indonesia akan semakin siap mencetak generasi unggul yang berdaya saing di tingkat global.

12) Perluasan Pembelajaran Digital melalui Kredensial Mikro: Digitalisasi untuk Pendidikan Lebih Luas dan Inklusif

Dunia pendidikan tinggi saat ini tengah memasuki era transformasi digital yang semakin revolusioner. Para pengamat dan praktisi menyebut fase ini sebagai era disrupsi sektor pendidikan tinggi, di mana sistem pembelajaran konvensional mulai beradaptasi dengan model yang lebih fleksibel, inklusif, serta berorientasi pada kebutuhan industri. Indonesia, dengan potensi sumber daya manusia yang besar, kini bergerak lebih maju dengan memperluas akses pendidikan tinggi berbasis digital.

Pemerintah melalui Kemdiktisaintek menyadari bahwa tantangan pendidikan tinggi tidak hanya terletak pada aspek aksesibilitas, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ketimpangan akses pendidikan antarwilayah, kesenjangan kualitas antarkampus, serta kesiapan lulusan dalam menghadapi persaingan global menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, Kemdiktisaintek meluncurkan Program Perluasan Pembelajaran Digital melalui Kredensial Mikro. Program ini merupakan sistem pembelajaran digital yang memungkinkan mahasiswa memperoleh sertifikasi keterampilan spesifik yang diakui secara global. Kredensial mikro dirancang untuk melengkapi pendidikan formal

di perguruan tinggi sekaligus menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan kebutuhan industri.

Untuk merealisasikan program ini, Pemerintah membentuk ICE (Indonesia Cyber Education) Institute yang dititipkan di Universitas Terbuka (UT) untuk menjalin kerja sama dengan Coursera, sebuah platform pendidikan global yang menyediakan ribuan mata kuliah dari berbagai universitas terkemuka dan perusahaan teknologi dunia. Melalui platform loka pasar digital *(marketplace)* Coursera, mahasiswa Indonesia kini memiliki akses terhadap beragam kursus berkualitas tinggi serta sertifikasi profesional yang dapat meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja.

13) Langkah Nyata: Implementasi di 7 (Tujuh) Perguruan Tinggi

Program ini bukan sekadar wacana, tetapi telah diimplementasikan di tujuh perguruan tinggi negeri yang ditunjuk sebagai pelaksana utama, yakni:

1. Universitas Andalas
2. Universitas Hasanuddin
3. Universitas Negeri Malang
4. Universitas Negeri Yogyakarta
5. Universitas Pendidikan Indonesia
6. Universitas Sebelas Maret
7. Universitas Sumatera Utara

Sebagai bagian dari implementasi program ini, sejumlah langkah konkret telah dilaksanakan, antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi Program Perluasan Pembelajaran Digital melalui Kredensial Mikro kepada mahasiswa dan civitas akademika di perguruan tinggi pelaksana.
2. Melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan perguruan tinggi pelaksana, serta PKS antara perguruan tinggi dengan Coursera.
3. Menyelenggarakan bimbingan teknis terkait pendaftaran dan pengelolaan akun Coursera, guna memastikan program dapat berjalan efektif serta mahasiswa dapat dengan mudah mengakses kursus yang tersedia.
4. Melakukan seleksi dan pendaftaran mahasiswa oleh tujuh perguruan

tinggi pelaksana, untuk memastikan peserta yang terlibat memenuhi kriteria dan siap beradaptasi dengan sistem pembelajaran digital.

5. Melaksanakan bimbingan teknis terkait pelaporan, monitoring progres, serta pengakuan konversi SKS agar kredensial mikro yang diperoleh mahasiswa dapat diakui dalam sistem pendidikan tinggi nasional.
6. Mengimplementasikan pembelajaran digital yang hingga 31 Januari 2025 telah diikuti oleh 2.276 mahasiswa melalui platform Coursera.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Program Perluasan Pembelajaran Digital melalui Kredensial Mikro diharapkan mampu menjadi solusi inovatif dalam memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas, mempersempit kesenjangan antarkampus, serta meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing global.

14) Langkah ke Depan: Evaluasi dan Penguatan Program

Keberhasilan Program Perluasan Pembelajaran Digital melalui Kredensial Mikro tidak hanya diukur dari segi jumlah peserta, tetapi juga ditinjau berdasarkan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran serta kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dinamika dan tantangan dunia kerja. Oleh karena itu, Kemdiktisaintek telah menetapkan langkah-langkah tindak lanjut guna memperkuat keberlanjutan program ini, meliputi:

a) Pelaporan partisipasi dan pencapaian mahasiswa oleh tujuh perguruan tinggi pelaksana, sebagai upaya untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pembelajaran berbasis kredensial mikro.
b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi program, guna memastikan model pembelajaran ini dapat terus disempurnakan sesuai kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

Transformasi pendidikan tinggi berbasis digital bukan lagi menjadi pilihan, melainkan telah menjadi suatu keharusan. Program Perluasan Pembelajaran Digital melalui Kredensial Mikro merupakan salah satu langkah strategis yang dirancang untuk menjamin akses mahasiswa Indonesia terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di kancah internasional.

3.2 Pemantapan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi

Dalam upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) dan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia menghadapi berbagai tantangan strategis yang bersifat kompleks dan multidimensional. Tantangan tersebut mencakup:

(i) **Perubahan Iklim** yang berdampak pada pembiayaan infrastruktur, pelemahan sektor ekonomi khususnya pertanian, serta gangguan terhadap kesehatan masyarakat;

(ii) **Perlambatan Ekonomi Global** yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional;

(iii) **Disrupsi Kecerdasan Artifisial (*Artificial Intellegence*/AI)** yang berpotensi mengurangi ketersediaan lapangan kerja;

(iv) **Ancaman Pandemi Baru** yang berisiko menimbulkan korban jiwa dalam skala luas; serta

(v) **Terbatasnya Waktu Bonus Demografi**, yang perlu dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, Presiden Prabowo telah mencanangkan Asta Cita sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Asta Cita dirancang untuk menjawab berbagai permasalahan strategis dan meletakkan fondasi bagi pencapaian Indonesia Emas 2045. Dalam konteks ini, peran pendidikan tinggi menjadi sangat krusial sebagai penggerak pembangunan, terutama dalam mendukung pencapaian tujuan Asta Cita.

Sebagai bentuk konkret dari komitmen ini, Kemdiktisaintek telah menetapkan dan mengimplementasikan Program Prioritas sebagai bagian dari upaya strategis dalam pembangunan pendidikan tinggi. Perubahan paradigma pendidikan tinggi dari sistem konvensional menuju Paradigma Transformatif merupakan langkah strategis yang memperkuat peran Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pembangunan sosial dan ekonomi nasional. Paradigma Transformatif ini menempatkan pembelajaran, penelitian, dan pengembangan, serta sains dan teknologi sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan dan integratif. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah peningkatan mutu, perluasan akses, serta dampak nyata yang relevan dalam mendukung kemandirian bangsa. Lebih dari sekadar institusi akademik, pendidikan tinggi kini diposisikan sebagai

bagian dari ekosistem ekonomi yang berperan aktif dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, kolaborasi dengan dunia industri dan masyarakat menjadi strategi utama dalam menjalankan aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan sosial-ekonomi.

Pengelolaan dan pengembangan pendidikan tinggi mengacu pada Program Prioritas Kemdiktisaintek 2025-2029, yang terdiri dari empat pilar utama:

1. Akses Pendidikan Tinggi yang Bermutu, Relevan, dan Berdampak.
2. Pengembangan Talenta di Bidang Sains dan Teknologi.
3. Penumbuhan dan Penguatan Budaya Ilmiah *(Scientific Culture)* dalam Penelitian dan Pengembangan.
4. Penyelesaian Permasalahan Sosial dan Ekonomi Nasional melalui Inovasi Pendidikan dan Teknologi.

Implementasi Paradigma Transformatif diharapkan dapat terwujud melalui sinkronisasi antara program prioritas Kemdiktisaintek dan program prioritas spesifik dari masing-masing perguruan tinggi. Sinkronisasi ini bertujuan untuk memperkuat keunggulan khas dari setiap perguruan tinggi agar lebih kontributif, relevan, dan berdampak nyata dalam pembangunan sosial dan ekonomi nasional. Sebagai instrumen evaluasi, pengukuran kinerja perguruan tinggi dikembangkan dalam kerangka yang menyatukan perguruan tinggi dan Kemdiktisaintek sebagai entitas akselerator dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Oleh karena itu, IKU Kemdiktisaintek dirancang dengan empat indikator utama dan dua indikator tambahan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perguruan tinggi, yang bertujuan sebagai:

1. alat ukur capaian kinerja tahunan dan berkelanjutan bagi perguruan tinggi; dan
2. panduan bagi perguruan tinggi untuk berkomitmen dan bertanggung jawab dalam mewujudkan diri sebagai ‘Kampus Transformasional Penggerak Pembangunan Asta Cita’.

Dengan demikian, IKU Kemdiktisaintek tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung perguruan tinggi berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional dan

pencapaian Indonesia Emas 2045.

Untuk lebih memahami bagaimana perbedaan antara IKU Kemdiktisaintek 2025-2029 dan IKU Kemdikbud 2021, berikut adalah Tabel 2 yang merangkum karakteristik utama dari kedua indikator ini.

Tabel 2. Perbedaan IKU Kemdiktisaintek 2025-2029 dan IKU Kemdikbud 2021

PERIHAL	IKU KEMDIKTISAINTEK	IKU KEMDIKBUD 2021
Tujuan dan Fungsi	1. Alat ukur kinerja perguruan tinggi 2. Panduan sinkronisasi program kegiatan perguruan tinggi terhadap Program Prioritas Kemdiktisaintek	Alat ukur kinerja perguruan tinggi
Muatan Indikator Kinerja	Integratif; mencakup keberadaan indikator kinerja tambahan yang diajukan oleh masing-masing perguruan tinggi	Sentralistik; ditetapkan secara terpusat oleh Kemendikbud
Pemeringkatan Perguruan Tinggi	Pengukuran capaian kinerja berdasarkan pengelompokkan perguruan tinggi (PTNBH, BLU, Satker).	Pemeringkatan perguruan tinggi untuk perolehan *grant*
Gagasan	Kampus Penggerak Pembangunan Asta Cita.	Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Metode Pengukuran	Proses dan hasil kegiatan.	Hasil kegiatan (kuantitatif)

3.3 Kolaborasi Kemdiktisaintek-Kemenkes Tingkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi dan Pelayanan Kesehatan

Indonesia masih menghadapi kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang cukup signifikan, terutama dalam layanan kesehatan primer dan rujukan. Berdasarkan data pada Gambar 4 yang disampaikan dalam rapat kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI tanggal 3 Juli 2024, terdapat kekurangan tenaga kesehatan dengan jumlah banyak yang diperlukan untuk mengisi kekosongan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas dan rumah sakit di berbagai daerah. Selain itu, distribusi dokter spesialis masih belum merata, dengan banyak daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas.

38% (285) RSUD belum lengkap 7 Jenis Dokter Spesialis Dasar[1]

63% RSUD di DTPK belum lengkap 7 Dokter Spesialis Dasar

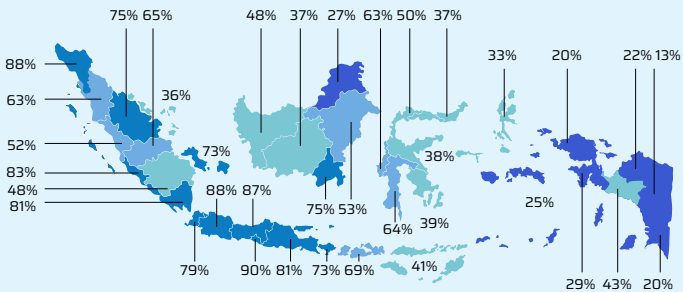

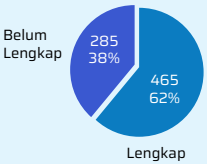

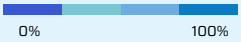

Σ 750 RSUD
RSUD di DTPK : 200 (27%)
RSUD di Non-DTPK : 550 (73%)

[1] 7 Jenis spesialis di RSUD : Sp. Anak, Obgyn. Penyakit Dalam, Bedah, Anastesi, Radiologi, dan Patologi Klinik
[2] SISDMK, Capaian Output TW 1 Maret 2024
[3] Standard Kebutuhan Minimal 1 Jenis Spesialis di Setiap RSUD

Terdapat kekurangan 1.095 Dokter Spesialis Dasar[3] untuk mengisi kekosongan di RSUD

118	**Sp. Penyakit Dalam** DTPK : 33% - Non DTPK : 9%
132	**Sp. Obgyn** DTPK : 32% - Non DTPK : 13%
177	**Sp. Anastesi** DTPK : 44% - Non DTPK : 16%
127	**Sp. Anak** DTPK : 33% - Non DTPK : 11%
138	**Sp. Bedah** DTPK : 33% - Non DTPK : 13%
198	**Sp. Radiologi** DTPK : 49% - Non DTPK : 18%
204	**Sp. Patologi Klinik** DTPK : 47% - Non DTPK : 20%

46% (4.651) Puskesmas mengalami kekosongan dari 9 Jenis Tenaga Kesehatan

65% Puskesmas di DTPK mengalami kekosongan 9 jenis Tenaga Kesehatan

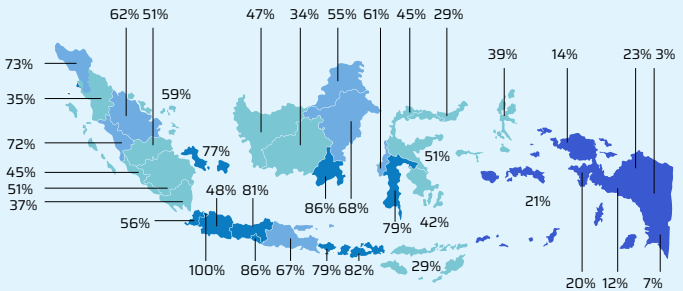

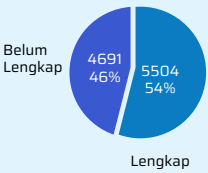

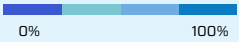

Σ 10.195 Puskesmas
Puskesmas di DTPK : 2.464 (24%)
Puskesmas di Non-DTPK : 7.733 (76%)

[1] 9 Jenis Nakes di Puskesmas : Perawat, Bidan, Farmasi, kesmas, Gizi, ATLM, Kesling dan Dokter Gigi
[2] SISDMK, Capaian Output TW 1 Maret 2024
[3] Standard Kebutuhan Minimal 1 Jenis Nakes di Setiap Puskesmas

Terdapat kekurangan 8.160 Nakes[3] untuk mengisi kekosongan di Puskesmas

26	**Perawat** DTPK : 1% - Non DTPK : 1%
49	**Bidan** DTPK : 1% - Non DTPK : 1%
423	**Dokter** DTPK : 44% - Non DTPK : 16%
564	**Farmasi** DTPK : 11% - Non DTPK : 4%
788	**Kesmas** DTPK : 9% - Non DTPK : 7%
923	**Gizi** DTPK : 13% - Non DTPK : 8%
1.001	**ATLM** DTPK : 15% - Non DTPK : 8%
1.395	**Kesling** DTPK : 17% - Non DTPK : 13%
2.991	**Dokter Gigi** DTPK : 56% - Non DTPK : 21%

62% (6.333) Puskesmas belum memiliki jumlah sesuai standar 9 Jenis Tenaga Kesehatan

74% Puskesmas di DTPK belum memiliki jumlah sesuai standar pada 9 jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar

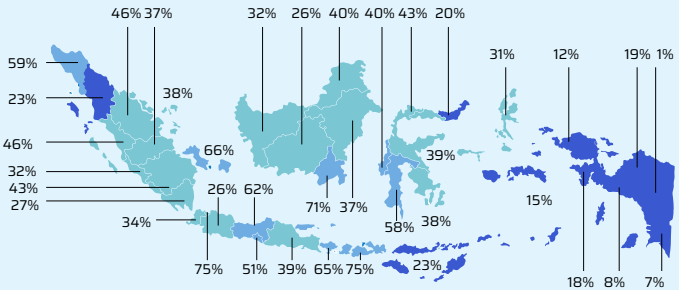

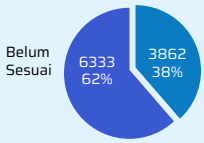

∑ 10.195 Puskesmas
Puskesmas di DTPK : 2.464 (24%)
Puskesmas di Non-DTPK : 7.733 (76%)

[1] 9 Jenis Nakes di Puskesmas : Perawat, Bidan, Farmasi, kesmas, Gizi, ATLM, Kesling dan Dokter Gigi
[2] SISDMK, Capaian Output TW 1 Maret 2024
[3] Standard Kebutuhan Minimal 1 Jenis Nakes di Setiap Puskesmas

Terdapat kekurangan 14.382 Nakes [3] untuk mengisi Nakes standar di Puskesmas

1.584	**Perawat**	DTPK : 1% - Non DTPK : 8%
1.006	**Bidan**	DTPK : 14% - Non DTPK : 2%
1.358	**Dokter**	DTPK : 28% - Non DTPK : 7%
698	**Farmasi**	DTPK : 14% - Non DTPK : 5%
1.600	**Kesmas**	DTPK : 12% - Non DTPK : 15%
2.449	**Gizi**	DTPK : 24% - Non DTPK : 20%
1.202	**ATLM**	DTPK : 18% - Non DTPK : 10%
1.512	**Kesling**	DTPK : 19% - Non DTPK : 14%
2.991	**Dokter Gigi**	DTPK : 56% - Non DTPK : 21%

Pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan wilayah merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam mewujudkan hal tersebut, pendidikan tinggi memiliki peran strategis, khususnya dalam penyediaan SDM kesehatan melalui pendidikan tinggi.

Pendidikan kedokteran dan kesehatan sebagai bagian dari pendidikan tinggi transformatif merupakan investasi jangka panjang bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pendidikan kedokteran dan kesehatan harus berorientasi pada peningkatan akses, mutu, relevansi, dan dampak terhadap pembangunan bangsa yang berkelanjutan sesuai misi Asta Cita. Kemdiktisaintek bertanggung jawab atas peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta mendorong pemerataan distribusi lulusan sesuai kebutuhan wilayah.

Gambaran kondisi terkini pendidikan kedokteran dapat dilihat pada Gambar 5 yang menunjukkan jumlah fakultas kedokteran, mahasiswa, lulusan, serta tenaga pendidik di berbagai institusi pendidikan kedokteran di Indonesia.

Bidang Keilmuan	A/Unggul	B/Baik Sekali	C/Baik	Prodi Baru (Persyaratan akreditasi minimal)	Total Prodi Terakreditasi
S1- Profesi Dokter (FK)	44	35	13	40	132

Jumlah FK/S1-Prodi
Profesi Dokter : 132
PTN: 51
PTS: 81

Jumlah Prodi
Spesialis/Subspesialis : 358
PTN: 352
PTS: 6

Mahasiswa Prodi S1 dan Profesi
PTN: 42.197
PTS: 37.434

Mahasiswa Dokter
Spesialis/Subspesialis : 14.782
PTN: 14.744
PTS: 38

Dosen Prodi Kedokteran
Dosen Dikti (NIDN): 9.220
Dosen Klinis (NIDK): 4.869

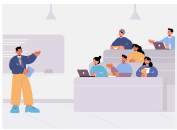

Lulusan Profesi Dokter
17650
PTN: 9.981
PTS: 7.669

Lulusan Dokter Spesialis/ Subspsialis
4.112
(PTN)

Sumber Data: PDDikti dan LAM-PTKes, data per akhir 2024

Gambar 5. Potret Pendidikan Kedokteran saat ini

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya strategi gotong royong untuk percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui pendidikan tinggi sesuai kebutuhan wilayah. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Hal ini dapat dilihat dalam Gambar 6 yang menunjukkan bagaimana berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, kolegium, konsil, dan majelis**,** berperan dalam penguatan sinergi sistem pendidikan dan sistem kesehatan nasional. Selain itu, terdapat program afirmasi/penugasan khusus serta konsorsium PPDS sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di berbagai wilayah prioritas.

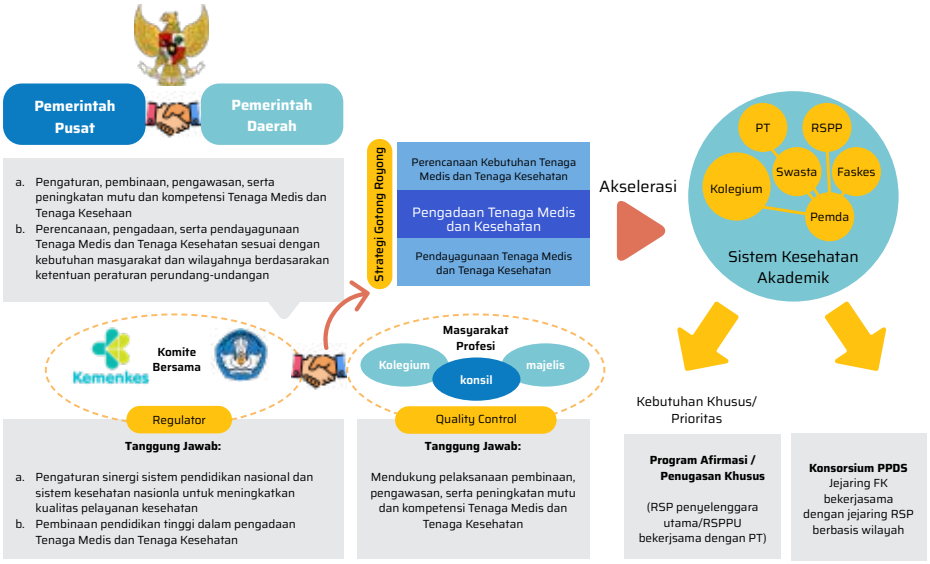

Gambar 6. Transformasi Kebijakan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan sesuai UU No.17/2023

Kolaborasi ini diwujudkan melalui komite bersama Kemdiktisaintek dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) guna memperkuat sinergi antara sistem pendidikan dan sistem kesehatan. Kolaborasi dengan masyarakat profesi, kolegium, konsil, dan majelis disiplin ilmu juga diperlukan sebagai pengendalian mutu *(quality control)* serta mekanisme sistem pengawasan dan keseimbangan *(check and balances)* terhadap kebijakan pemerintah. Kolaborasi semua pihak juga dilakukan untuk akselerasi pemenuhan dan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui sistem kesehatan akademik *(academic health system)*.

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kedokteran dan kesehatan di Indonesia, terdapat beberapa isu strategis dan teknis yang berpotensi menimbulkan konflik antara Kemdiktisaintek dengan Kemenkes. Isu-isu ini berkaitan dengan kewenangan dalam pengaturan kebijakan, standar pendidikan, serta tata kelola sistem akademik dan profesi tenaga medis.

1) Isu Strategis: Tumpang Tindih Kewenangan Regulasi

Salah satu isu utama adalah kewenangan Kemenkes dalam mengatur kebijakan pendidikan tinggi kedokteran dan kesehatan yang dinilai

melampaui batas dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemenkes berpegang pada UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dianggap sebagai *lex specialis*, sehingga menyebabkan persinggungan dengan kewenangan Kemdiktisaintek dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Dari sudut pandang Kemdiktisaintek, kebijakan pendidikan tinggi sepenuhnya berada dalam ranahnya. Oleh karena itu, Kemenkes seharusnya menyesuaikan kebijakannya dengan prinsip otonomi perguruan tinggi dan berorientasi pada kualitas serta nilai akademik.

Sebagai solusi, diusulkan penguatan fungsi Komite Bersama Kemdiktisaintek-Kemenkes yang saat ini kurang berjalan baik (diketuai oleh Wakil Menteri Kesehatan) yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, harmonisasi kebijakan, serta mekanisme arbitrase jika terjadi konflik kewenangan antara kedua sektor. Selain itu, perlu disusun Strategi Sistem Kesehatan Akademik *(Academic Health System)* sebagai peta jalan pendidikan tenaga medis dan kesehatan yang berbasis transformasi layanan kesehatan.

2) Isu Teknis: Dualisme dan Ketidakseimbangan Regulasi

Selain isu strategis, terdapat beberapa tantangan teknis yang perlu diselesaikan agar sistem pendidikan kedokteran dapat berjalan lebih efektif dan efisien:

- *RSPPU (Rumah Sakit Pendidikan Perguruan Tinggi – hospital-based Kemenkes)*

  RSPPU cenderung berjalan secara mandiri, dimana kewajiban kerja sama dengan fakultas kedokteran dinilai hanya bersifat formalitas. Hal ini berpotensi besar menyebabkan dualisme sistem pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Untuk mengatasi hal ini, solusi yang diusulkan meliputi evaluasi pilot program 6 prodi RSPPU dan tidak membuka RSPPU baru, serta memperkuat peran rumah sakit pendidikan milik perguruan tinggi.
- *Uji Kompetensi Nasional dan Seleksi PPDS*

  Saat ini, kolegium di bawah Kemenkes menjadi ujung tombak (*leading sector*) dalam seleksi PPDS dan uji kompetensi nasional. Untuk

menghindari dampak dari kewenangan di luar batas, dan untuk menjaga independensi profesi dan nilai akademik, diusulkan penguatan peran asosiasi penyelenggara pendidikan sebagai wadah koordinasi penyelenggara pendidikan dengan kolegium dan kementerian.

- *Profesor Klinis (Regulasi Perpres tentang Jabatan Akademik Kedokteran)*
  Terdapat potensi dualisme profesor klinis untuk bidang kedokteran dan kesehatan, karena Kemenkes mengatur mekanisme pengangkatannya profesor klinis sebagai gelar penghargaan. Sebagai solusi, perlu penguatan regulasi bahwa hanya ada satu sistem pengaturan jabatan akademik pendidik hingga jenjang profesor (sesuai aturan Kemdiktisaintek) dan kebijakan yang mengakomodasi kekhususan keahlian/keilmuan untuk pemenuhan persyaratan profesor.
- *Pendanaan Pendidikan Kedokteran*
  Ketidakseimbangan dalam skema pendanaan menjadi isu utama, di mana perguruan tinggi menanggung beban besar sementara subsidi yang ada tidak proporsional, sehingga berpotensi meningkatkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Untuk itu, diusulkan skema beasiswa LPDP untuk PPDS dan RSPPU dapat diberikan secara proporsional, serta pemberian imbal jasa medis bagi semua mahasiswa PPDS sesuai amanah UU No. 17/2023.

Untuk memastikan pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas serta selaras dengan kebutuhan nasional, diperlukan langkah konkret dalam menyelaraskan kebijakan antara Kemdiktisaintek dan Kemenkes. Dengan Komite Bersama, Strategi Sistem Kesehatan Akademik *(Strategi Academic Health System)*, evaluasi kebijakan teknis, serta perbaikan regulasi akademik dan pendanaan, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pendidikan kedokteran yang lebih sinergis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam 120 hari kerja pertama, Kemdiktisaintek telah melakukan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dengan Kemenkes, sekaligus menyelesaikan berbagai hambatan yang selama ini terjadi. Capaian-capaian penting yang telah diraih, yaitu:

1. Penguatan Kolaborasi dengan Kemenkes

Mendiktisaintek telah menginisiasi pertemuan dengan Menkes dan pemangku kepentingan pendidikan kedokteran pada 14 November 2024. Mendiktisaintek dan Menkes bersama dengan para Wakil Menteri dan pejabat tinggi madya dari masing-masing kementerian, mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan dan menyampaikan arah kebijakan kementerian. Pemangku kebijakan yang terlibat yaitu Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes).

Gambar 7. Pertemuan Mendiktisaintek dengan Menkes Membahas Pendidikan Kedokteran
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Pada Gambar 7, terlihat pertemuan antara Mendiktisaintek dan Menkes yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan kerja sama pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan Indonesia dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Mendiktisaintek dan Menkes menyepakati pembaruan komite bersama Kemdiktisaintek dan Kemenkes sebagai wujud kolaborasi di tingkat nasional, untuk menyusun kebijakan dan menyelesaikan berbagai isu strategis di bidang pendidikan kesehatan.

Pertemuan ini cukup monumental karena belum pernah dilaksanakan di era kementerian sebelumnya, dan menjadi langkah awal untuk serangkaian koordinasi Kemdiktisaintek dan Kemenkes yang intensif untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

2. Bentuk Tim Kajian Kebijakan Pendidikan Tinggi Tenaga Medis dan Kesehatan

Tim kajian kebijakan terdiri dari berbagai pakar pendidikan kedokteran dan kesehatan yang menjadi pusat pemikitan strategis *(think tank)* kementerian dan berpengalaman dalam menyusun kebijakan di lingkup nasional. Tim kajian kebijakan memiliki tugas:

a) Menyusun kajian implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi;
b) Merumuskan rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
c) Merepresentasikan Kemdiktisaintek dalam berbagai forum pembahasan kebijakan yang melibatkan Kemdiktisaintek sesuai penugasan dari Menteri; dan
d) Hal lain sesuai dengan penugasan dari Menteri.

Hingga akhir Januari 2025, tim kajian kebijakan telah menghasilkan beberapa produk kebijakan sebagai berikut:

a) Evaluasi kinerja Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) berdasarkan hasil uji kompetensi;
b) Pedoman sistem seleksi nasional mahasiswa dokter spesialis;
c) Pedoman penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis;
d) Evaluasi sistem dan hasil uji kompetensi program profesi dokter dan dokter gigi;
e) Rancangan standar nasional pendidikan tinggi tenaga medis;
f) Usulan kebijakan dosen kedokteran dan pendidik klinis; dan
g) Usulan program pencegahan dan penanganan perundungan di pendidikan kedokteran

Tim Kajian Kebijakan juga telah menyampaikan usulan kebijakan prioritas pendidikan kedokteran dan kesehatan tahun 2025 kepada Mendiktisaintek.

3. Perjanjian Kerja Sama Enam RSPPU dengan Empat PT Mitra

Menindaklanjuti Kepmendikbudristek No. 391-396/P/2024 tentang izin pembukaan enam prodi spesialis pada enam RSPPU, telah disepakati seluruh Perjanjian Kerja Sama RSPPU dan PT mitra pada 8 Januari 2025. Adapun Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut meliputi:

a) Universitas Indonesia dengan RSAB Harapan Kita, RSPJN Harapan Kita, RS Kanker Dharmais;
b) Universitas Airlangga dengan RS Pusat Otak Nasional;
c) Universitas Padjadjaran dengan RS Mata Cicendo; dan
d) Universitas Sebelas Maret dengan RS Ortopaedi Shoeharso.

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama tersebut mengatur tentang kerja sama PT mitra, yang dilakukan Fakultas Kedokteran, dengan RSPPU dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis, di antaranya:

a) Pemenuhan syarat pembukaan prodi sesuai Pasal 579 PP Nomor 28 Tahun 2024 (untuk pemenuhan akreditasi minimal prodi dari LAM-PTKes);
b) Penyusunan kurikulum bekerja sama dengan kolegium;
c) Pelaporan terkait mahasiswa, dosen dan rekam pembelajaran di PDDIKTI sesuai petunjuk teknis yang diterbitkan Kemdiktisaintek;
d) Seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh Pansel bersama Kemdiktisaintek dan Kemenkes;
e) Penerbitan sertifikat profesi dan gelar yang ditandatangani oleh pemimpin FK mitra bersama Direktur RSSPU;
f) Penjaminan mutu internal;
g) Pencegahan dan penanganan kekerasan secara bersama;
h) Pendanaan pendidikan sesuai kesepakatan kontribusi FK mitra dan RSPPU; dan
i) Imbal jasa pelayanan medis yang diberikan oleh RSPPU kepada peserta didik.

4. Penyelesaian Penanganan Retaker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD)

Kemdiktisaintek melalui surat Dirjen Dikti Nomor 0018/D/DT.02.00/2025 tanggal 14 Januari 2025, mengimbau para Rektor dan Dekan FK, khususnya yang memiliki mahasiswa pengulang ujian *(retaker)* UKMPPD untuk

memberikan solusi penyelesaian permasalahan para mahasiswa, sehingga mereka dapat menyelesaikan studi mereka dengan baik, termasuk memberikan alternatif bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan studi. Rektor juga perlu menerapkan batas masa studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan ini sekaligus sebagai aksi nyata Kemdiktisaintek terhadap aspirasi Perhimpunan Dokter Muda Indonesia (PDMI) yang disampaikan pada 9 dan 13 Januari 2025 yang menuntut penyelesaian atas permasalahan belum lulusnya mereka dari UKMPPD dan implikasinya pada beban biaya pendidikan yang harus ditanggung selama mereka menunggu waktu untuk mengulang UKMPPD.

Kemdiktisaintek telah melakukan koordinasi dengan Rektor dan Dekan Fakultas Kedokteran untuk evaluasi pendidikan kedokteran di setiap FK secara komprehensif, dalam upaya penjaminan mutu pendidikan kedokteran yang berkelanjutan. Kinerja UKMPPD akan berimplikasi pada kuota penerimaan mahasiswa baru FK.

5. *Kebijakan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidikan Vokasi, Profesi, Spesialis dan Sub-Spesialis*

Kemdiktisaintek dan Kemenkes menyepakati kebijakan pelaksanaan uji kompetensi nasional pada masa transisi, sebelum terbitnya Keputusan Bersama tentang Standar Prosedur Operasional Uji Kompetensi sesuai amanah PP Nomor 28 Tahun 2024, melalui Surat Edaran (SE) Mendiktisaintek Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menkes Nomor HK.02.01/Menkes/28/2025 yang diterbitkan bersamaan pada 16 Januari 2025.

Kolaborasi Kemdiktisaintek dan Kemenkes ini juga diwujudkan dengan sosialisasi bersama dua SE ini pada 20 Januari 2025 kepada seluruh penyelenggara pendidikan, kolegium, konsil, dan pemangku kepentingan terkait.

SE tersebut mengatur tentang penyelenggaraan uji kompetensi nasional di masa transisi. Berikut ini poin penting dalam SE:

a) Uji kompetensi nasional peserta didik pendidikan vokasi dan profesi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan menggunakan

pola pelaksanaan uji kompetensi nasional pada tahun 2024;

b) Mendiktisaintek membentuk dan menetapkan panitia/komite nasional untuk pelaksanaan uji kompetensi; dan

c) Menkes menetapkan keputusan mengenai kolegium yang berwenang menandatangani sertifikat kompetensi dan konsil yang berwenang menerbitkan surat tanda registrasi bagi peserta didik yang lulus uji kompetensi.

6. Panitia Seleksi Bersama Penerimaan Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Sub-spesialis

Seperti terlihat pada Gambar 8 dan 9, Mendiktisaintek dan Menkes telah menandatangani Keputusan Bersama Mendiktisaintek dan Menkes Nomor 1/M/KB/2025 dan Nomor HK.01.08/MENKES/39/2025 tentang Panita Seleksi Bersama Penerimaan Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Sub-spesialis. Keputusan Bersama ini merupakan produk hukum pertama yang diterbitkan oleh Kemdiktisaintek dalam konteks kerja sama dengan Kemenkes.

Gambar 8. Penandatanganan Keputusan Bersama Mendiktisaintek dan Menkes tentang Panitia Seleksi Bersama Penerimaan Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis. Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Gambar 9. Mendiktisaintek dan Menkes telah menandatangani Keputusan Bersama
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Mendiktisaintek menyoroti bahwa peningkatan kapasitas produksi ini perlu diimbangi dengan strategi pendayagunaan dan distribusi yang efektif berbasis kebutuhan di setiap wilayah Indonesia. Penyelesaian masalah akses, kuantitas dan kualitas pendidikan dokter spesialis/sub-spesialis memerlukan sinergi kebijakan Kemdiktisaintek dan Kemenkes yang terwadahi dalam bentuk kerja sama formal yang salah satunya adalah panitia seleksi bersama ini. Panitia bersama ini selain melibatkan pejabat terkait di kedua kementerian, juga melibatkan semua fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan yang menyelenggarakan program studi pendidikan dokter spesialis/sub-spesialis.

Mendiktisaintek dan Menkes selanjutnya akan menetapkan petunjuk teknis tata cara seleksi yang disusun oleh Panitia Seleksi Bersama, sebagai jaminan pemenuhan prinsip objektif, berbasis kompetensi dan prestasi, transparan, berorientasi pada kebutuhan, berbasis teknologi yang terintegrasi dengan sistem informasi. Penerimaan peserta didik juga mempertimbangkan afirmasi untuk pemerataan distribusi di setiap wilayah.

Pada kesempatan tersebut, seperti terlihat pada Gambar 10, hadir juga jajaran Kemdiktisaintek dan Kemenkes yang menyaksikan prosesi penandatanganan SKB Mendiktisaintek dan Menkes.

Gambar 10. Jajaran Kemdiktisaintek dan Kemenkes yang hadir dalam acara penandatanganan SKB Mendiktisaintek dan Menkes
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

7. Pembaruan Keputusan Mendiktisaintek untuk Penyelenggara Uji Kompetensi

Sejalan dengan SE Mendiktisaintek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transisi Uji Kompetensi Nasional, Mendiktisaintek akan segera menerbitkan Kepmendiktisaintek tentang Panitia Nasional UKMPPD dan UKMPPDG, serta Kepmendiktisaintek tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa bidang Kesehatan, berdasarkan pola uji kompetensi 2024.

Kepmendiktisaintek ini ditargetkan untuk terbit pada awal Februari 2025 sebagai dasar hukum bagi panitia/komite nasional uji kompetensi untuk mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan uji kompetensi mulai Februari 2025.

8. Penetapan Kuota Mahasiswa Baru

Mendiktisaintek menerapkan kebijakan transisi untuk penetapan kuota mahasiswa baru S1 pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi untuk tahun

akademik 2025/2026, selama Permendiktisaintek mengenai penentuan kuota penerimaan mahasiswa baru prodi kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan belum diterbitkan.

Penentuan kuota saat ini masih mengacu pada Permenristekdikti Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi. Urgensi revisi Permenristekdikti ini karena parameter dan mekanisme perhitungan dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan saat ini.

Kebijakan transisi penentuan kuota ini sekaligus terobosan untuk menerapkan hasil evaluasi kinerja FK dan FKG, dengan parameter utama kinerja uji kompetensi dan angka efisiensi edukasi (AEE), sebagai berikut:

a) Untuk FK dan FKG yang evaluasi kinerja nya tidak bermasalah, kuota mahasiswa baru FK/FKG tahun 2025 sama dengan kuota mahasiswa baru 2023/2024 (status quo).
b) Untuk FK/FKG yang evaluasi kinerja nya bermasalah (*backlog* > 70 % dan AEE < 25 %), mendapatkan kuota hanya 25 % dari kuota 2023/2024, dengan minimal kuota 25 mahasiswa.
c) Untuk FK/FKG yang evaluasi kinerja nya bermasalah dan memiliki peserta ujian ulang (*retaker*) > 100 (untuk FK), dan > 30 (untuk FKG) mendapatkan kuota minimal 25 mahasiswa.

9. Penyelesaian Permasalahan Perundungan

Kemdiktisaintek bersama dengan Kemenkes telah melakukan upaya percepatan penanganan kasus perundungan di FK Universitas Diponegoro-RS Karyadi dan FK Universitas Sam Ratulangi-RS Kandou yang terjadi mulai pertengahan 2024, sebagai berikut:

a) Kemdiktisaintek dan Kemenkes telah melakukan monitoring dan evaluasi ke RS Karyadi dan FK Universitas Diponegoro untuk memastikan rencana aksi sudah dilaksanakan dengan benar, sehingga penyelenggaraan pendidikan anestesi FK Universitas Diponegoro di RS Karyadi dapat segera dijalankan (ditargetkan awal Februari 2025).
b) Kemdiktisaintek dan Kemenkes akan melakukan bantuan teknis untuk FK Universitas Sam Ratulangi dan RS Kandou, tidak hanya untuk penanganan perundungan, tetapi juga untuk pembinaan pendidikan dokter spesialis.

c) Kemdiktisaintek dan Kemenkes sepakat untuk melakukan pencegahan dan penanganan perundungan di pendidikan kedokteran dan kesehatan secara bersama dan komprehensif yang dituangkan melalui pedoman nasional untuk perguruan tinggi maupun rumah sakit pendidikan.

10. Perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendidik Klinis

Kemdiktisaintek bersama tim kajian kebijakan telah menyusun usulan substansi terhadap konsep rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pendidik Klinis yang akan menjadi bahan usulan Kemdiktisaintek pada pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) rancangan Peraturan Presiden mengenai Pendidik Klinis.

Isu substansial yang muncul dari Rancangan Perpres ini di antaranya:

a) Potensi dualisme tenaga pendidik dalam pendidikan kedokteran, yaitu dosen dan pendidik klinis, termasuk dua jenis profesor. Praktik terbaik dari negara lain, hanya ada satu jenis profesor untuk tiap bidang keilmuan, dan tetap terafiliasi dengan perguruan tinggi.
b) Pengaturan profesor seharusnya tetap sesuai dengan aturan Kemdiktisaintek.
c) Kualifikasi dan persyaratan harus setara dengan profesor (akademik) untuk menjamin kualitas.

11. *Pembentukan Panitia Bersama Kajian Evaluasi Uji Kompetensi*

Kemdiktisaintek dan Kemenkes telah menyepakati pembentukan panitia bersama/kelompok kerja terdiri dari unsur Kemdiktisaintek, Kemenkes, asosiasi institusi pendidikan, panitia nasional uji kompetensi saat ini, Kolegium Kesehatan Indonesia, serta tim pakar. Panitia bersama ini selanjutnya akan menyusun kajian evaluasi uji kompetensi nasional sebagai dasar penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) uji kompetensi mahasiswa program pendidikan vokasi, profesi, spesialis, dan sub-spesialis. Panitia bersama akan mulai melakukan kajian mulai pertengahan Februari 2025, sehingga Keputusan Bersama Mendiktisaintek dan Menkes mengenai SPO uji kompetensi dapat ditetapkan paling lambat Mei 2025, dan diimplementasikan untuk uji kompetensi mulai periode Agustus 2025.

12. Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Seleksi Nasional

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Mendiktisaintek dan Menkes Nomor 1/M/KB/2025 dan Nomor HK.01.08/MENKES/39/2025, Panitia Seleksi Bersama memiliki tugas menyusun petunjuk teknis seleksi nasional mahasiswa pendidikan dokter spesialis yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Bersama Mendiktisaintek dan Menkes.

Panitia Seleksi Bersama akan didukung oleh tim kajian kebijakan dalam merumuskan petunjuk teknis seleksi, berdasarkan rancangan pedoman yang sudah disusun bersama pada akhir 2024. Penyusunan juknis seleksi akan dimulai pada pertengahan Februari 2025, dan ditargetkan untuk ditetapkan pada April 2025.

3.4 Kaji Ulang Regulasi

Regulasi merupakan bagian penting dalam menjalankan pendidikan tinggi yang berfungsi dengan baik. Namun, regulasi harus dirancang dengan cermat agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan atau menyimpang, seperti mengenakan biaya yang tidak perlu bagi pihak-pihak yang terdampak atau membatasi persaingan. Oleh karena itu, penting untuk menilai dampak regulasi, termasuk menganalisis biaya dan manfaatnya, guna memastikan bahwa regulasi tersebut mencapai tujuan yang diharapkan tanpa menimbulkan dampak buruk yang tidak semestinya. Keputusan-keputusan besar harus didukung oleh analisis dampak regulasi (ADR) atau *regulatory impact analysis*.

Analisis dampak regulasi merupakan pendekatan sistemik untuk menilai secara kritis dampak positif dan negatif dari regulasi yang diusulkan dan yang sudah ada, serta mempertimbangkan alternatif non-regulasi (OECD, 2009). ADR menjadi penting karena membantu para pembuat kebijakan untuk memusatkan perhatian pada dampak potensial dari suatu keputusan besar, khususnya terhadap masyarakat, termasuk perguruan tinggi, organisasi masyarakat atau yayasan, dan individu. ADR merupakan disiplin ilmu yang berguna dalam perumusan dan perbaikan kebijakan pendidikan tinggi.

Secara mendasar, ADR merupakan pemeriksaan sistematis atas biaya dan manfaat dari berbagai opsi yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah disepakati atau sebagai solusi atas masalah kebijakan yang teridentifikasi. ADR dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan utama dalam proses perumusan peraturan, terutama pada tahap konsultasi dan pengambilan keputusan. Hasilnya adalah analisis berbasis bukti yang kuat bagi para pengambil keputusan untuk menilai kemungkinan dampak dari kebijakan yang diusulkan.

Terdapat tujuh pertanyaan utama dalam ADR yang dapat membantu menyusun gagasan, menguji asumsi, dan mendorong eksplorasi opsi-opsi di luar solusi regulatif yang lazim. Ketujuh pertanyaan tersebut adalah:

(1) Apa masalahnya?
(2) Mengapa tindakan pemerintah diperlukan?
(3) Pilihan kebijakan apa yang harus dipertimbangkan?
(4) Apa kemungkinan manfaat bersih dari setiap pilihan?
(5) Siapa yang diajak berkonsultasi dan bagaimana masukan mereka dimasukkan?
(6) Pilihan mana yang terbaik dari yang dipertimbangkan dan bagaimana cara pelaksanaannya?
(7) Bagaimana pilihan yang dipilih akan dievaluasi?

Sebagai alat kebijakan, ADR sangat berharga untuk melakukan kaji ulang terhadap kebijakan yang ada. Pendekatan ini meningkatkan mutu pengambilan keputusan melalui evaluasi yang terstruktur, keterlibatan pemangku kepentingan, serta fokus pada transparansi dan akuntabilitas. Beberapa kebijakan perlu dikaji ulang untuk memusatkan kembali tujuan kebijakan agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih positif.

Beberapa regulasi yang memerlukan kaji ulang antara lain adalah:

- Peraturan Menteri tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
- Peraturan Menteri tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan; dan
- Keputusan Menteri tentang Indikator Kinerja Utama yang pada

pokoknya berisi tentang Indkator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pada bagian ini dibahas konsepsi dasar kaji ulang terhadap peraturan tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen dan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kemdiktisaintek menetapkan arah kebijakan baru terkait profesi dan karier dosen yang didasari oleh semangat deregulasi. Prinsip deregulasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang lebih otonom, berdaya, dan berkualitas. Berbagai regulasi yang selama ini dianggap menghambat fleksibilitas dan pengembangan institusi pendidikan tinggi dikaji ulang, termasuk Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen.

Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan regulasi yang lebih proporsional, efisien, dan adaptif terhadap dinamika perguruan tinggi di Indonesia. Kajian ulang ini bertumpu pada tiga hal pokok:

1) Jenjang karier sebagai hak dosen yang memenuhi syarat kenaikan jabatan, sehingga sistem yang dibangun harus menjamin keterbukaan akses terhadap jenjang karier.
2) Rekognisi terhadap kekhasan bidang keahlian dosen, sehingga tidak semua dosen diukur dengan parameter yang sama.
3) Pengurangan beban administrasi dosen, agar dosen dapat lebih fokus pada kegiatan akademik dan pengembangan keilmuan.

Selama masa transisi, Kemdiktisaintek telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024. Dalam edaran ini ditegaskan bahwa pengembangan karier dan profesi dosen dilaksanakan dengan tetap mengacu pada Kepmendikbudristek Nomor 384/P/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen. Revisi atas Permendikbudristek 44/2024 ditargetkan rampung dan terbit paling lambat pada bulan Juli 2025.

Untuk memperjelas arah kebijakan profesi dan karir dosen dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Arah Kebijakan Profesi dan Karier Dosen

NO.	ASPEK	SAAT INI	KE DEPAN
1.	Kewenangan dalam Pengangkatan, Promosi, Demosi, dan Pemberhentian Jabatan Akademik Dosen	• Masa Transisi: Asisten Ahli (AA) dan Lektor (L) oleh Perguruan Tinggi (PT) melalui pendelegasian dari Menteri, Lektor Kepala (LK) dan Guru Besar (GB) oleh Kementerian. • Permen 44: Semua jabatan akademik diangkat oleh PT.	Dikembalikan ke sebelum Permen 44; LK dan GB oleh kementerian.
2.	Jabatan akademik dosen berlaku nasional atau hanya lokal di lingkup PT	Transisi: Berlaku nasional Permen 44: Berlaku lokal PT	Sama dengan sebelumnya; berlaku nasional.
3.	Formasi/ Peta jabatan Akademik Dosen	Wajib ada formasi jabatan akademik dosen untuk masing-masing PT.	Seperti sebelumnya, setiap dosen dapat menaiki jenjang jabatan fungsional sepanjang memenuhi persyaratan.
4.	Mobilitas Dosen	• Transisi: Semi tertutup. • Permen 44: Terbuka (sesuai UU ASN untuk ASN, sesuai UU Ketenagakerjaan utk non ASN).	Terbuka.
5.	Pelaksanaan Sertifikasi Dosen	Oleh PT yang ditunjuk Kementerian.	Serdos diperoleh saat dosen mendapat Jabatan Fungsional.
6.	Penyaluran tunjangan sertifikasi dosen	Oleh Kementerian (PTN) / LLDIKTI (PTS).	Tetap seperti saat ini.
7.	Penempatan Dosen ASN pada PTS	Permen 44: Tertutup kecuali hanya untuk menjadi pemimpin/pimpinan PTS dengan masa waktu tertentu.	Tidak ditutup; tapi bukan formasi baru.

NO.	ASPEK	SAAT INI	KE DEPAN
8.	Pengelolaan Kinerja Dosen (BKD)	• Transisi: Sentralistik oleh Kementerian dengan butir-butir kegiatan Tridharma PT • Permen 44: Kementerian menetapkan standar minimum kinerja, PT menetapkan standar sendiri yang sama atau melampaui standar minimum kementerian.	Jika memungkinkan dihilangkan kewajiban pengisian BKD. Info beban kerja oleh pengelola prodi, bukan oleh dosen.
9.	Perpindahan Dosen WNI dan WNA dari PT Luar Negeri	Permen 44: Sesuai UU Ketenagakerjaan	Sesuai aturan persyaratan Jabatan Fungsional Akademik dosen.
10.	Profesor Kehormatan	Permen 44: dibolehkan hanya bagi PT yang ditetapkan Kementerian dan hanya boleh 1 Profesor kehormatan untuk 1 rumpun ilmu dengan persyaratan yang ketat.	Hilangkan.
11	Gaji Dosen	Permen 44: ASN sesuai UU ASN, Non ASN sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.	Kecuali gaji sebagai ASN ditetapkan masing-masing PT.
12.	Pemisahan Jabatan Akademik dan Jabatan Fungsional Dosen	Tidak diatur secara tegas pemisahan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. Konsekuensinya: - Untuk dosen PTS (nonASN) "dipaksa" tunduk pola jabatan ASN. - Dosen PTN (ASN) jabatan akademik disamakan dengan jenjang karir ASN.	Untuk ASN pengaturan oleh KemenPANRB.
13	Status Dosen	Dosen tidak tetap hanya bekerja secara paruh waktu.	Dosen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang bekerja secara penuh waktu diperhitungkan sebagai dosen tetap.

Pengelolaan SDM merupakan bagian utama dari otonomi perguruan tinggi. Dalam konteks ini, dosen adalah unsur SDM yang memiliki kekhususan tersendiri karena berkaitan dengan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, serta pola kerja yang berbeda dari pegawai pada umumnya. Oleh karena itu, penyusunan peraturan yang mengatur profesi dan karier dosen harus mempertimbangkan karakteristik khusus ini. Kementerian, melalui peraturan yang dikeluarkan, diharapkan dapat berperan aktif dalam mendorong dan memfasilitasi dosen agar mampu berkinerja lebih baik dalam mencapai keunggulan akademik serta memberikan pelayanan optimal kepada mahasiswa. Peran kementerian dalam hal ini adalah menetapkan regulasi yang bersifat mendukung, bukan membatasi.

Sebagai bentuk dukungan tambahan, kementerian juga dapat mengeluarkan panduan (*guidelines*) yang berfungsi sebagai referensi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan sistem manajemen SDM, termasuk untuk pengelolaan dosen. Panduan ini bersifat tidak mengikat dan dimaksudkan hanya sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan internal di masing-masing PT.

Dalam penyusunan peraturan, penting untuk mempertimbangkan efisiensi dan kesederhanaan regulasi. Hal-hal yang telah cukup diatur dalam peraturan lain tidak perlu diatur kembali. Demikian pula, hal-hal yang memang tidak perlu diatur sebaiknya tidak dimasukkan dalam peraturan. Dengan prinsip ini, regulasi yang diterbitkan akan tetap sederhana dan hanya berfokus pada aspek-aspek yang memang memerlukan pengaturan khusus.

Sementara itu, perlu dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengaitkan jabatan fungsional akademik (JFA) dengan besaran tunjangan sertifikasi dan tunjangan kehormatan dosen. Oleh karena itu, pendelegasian sepenuhnya kewenangan kenaikan jabatan akademik dosen (JAD) kepada perguruan tinggi belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Dalam hal status kepegawaian, semua dosen aparatur sipil negara (ASN) yang instansi induknya berada di bawah Kemdiktisaintek—termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)—dikategorikan sebagai dosen tetap. Adapun ASN dari kementerian lain, seperti Kementerian Kesehatan, dikategorikan sebagai dosen tidak tetap. Meskipun demikian,

dosen tidak tetap tetap dapat memiliki jabatan fungsional akademik apabila memenuhi persyaratan tertentu.

Untuk dosen non-ASN yang bekerja di perguruan tinggi swasta (PTS) dan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH), status kepegawaiannya ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, apakah sebagai dosen tetap atau tidak tetap. Dosen tidak tetap dapat bekerja secara penuh waktu, dan bahkan mereka yang menjalani masa kerja penuh waktu dalam kurun waktu tertentu memiliki peluang untuk memperoleh jabatan fungsional akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, dosen yang sedang menjalankan tugas belajar tetap memperoleh hak atas tunjangan sertifikasi dosen sebagai bentuk penghargaan atas upaya peningkatan kompetensi akademiknya.

Kebijakan terbaru mengenai pengembangan karier dosen juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap variasi bentuk prestasi dan reputasi akademik. Dalam hal ini, publikasi di jurnal bereputasi internasional tidak lagi dijadikan satu-satunya tolok ukur dalam proses kenaikan jabatan fungsional dosen. Dengan demikian, publikasi ilmiah tidak menjadi persyaratan mutlak. Sebagai alternatif, pengakuan terhadap capaian akademik dapat diberikan melalui inovasi dalam proses pembelajaran yang terbukti efektif, karya inovatif dan kreatif yang telah diadopsi atau diterapkan di masyarakat dan terbukti memberikan dampak signifikan, maupun karya seni yang diakui oleh lembaga atau komunitas yang memiliki otoritas. Selain itu, pengakuan juga dapat diberikan melalui evaluasi sejawat bestari (*peers*) dari perguruan tinggi lain. Pendekatan ini mencerminkan sistem penilaian yang lebih komprehensif, adil, dan kontekstual dalam menilai capaian serta kontribusi dosen terhadap dunia akademik dan masyarakat luas.

Selain itu, saat ini Kemdiktisaintek pun sedang melakukan evaluasi terhadap Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Evaluasi ini bertujuan untuk memperkuat revitalisasi otonomi perguruan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Secara substansial, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang sedang dikaji ulang diarahkan untuk selaras dengan prinsip otonomi perguruan

tinggi, serta menempatkan upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan sebagai tanggung jawab sepenuhnya dari perguruan tinggi itu sendiri. Dalam sistem ini, penjaminan mutu tidak semata-mata dilihat sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai kebutuhan institusional untuk menjaga eksistensi dan keberlangsungan mutu akademik secara konsisten.

Inti dari revisi Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2024 mencakup beberapa hal berikut.

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi harus bersifat *principle-based* dan tidak preskriptif, artinya tidak bersifat memberikan petunjuk atau ketentuan yang kaku. Standar ini merupakan standar minimal yang wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk menjamin kelayakan layanan pendidikan tinggi.
2. Standar nasional pendidikan tinggi juga tidak boleh mengatur hal-hal yang bergantung pada kekhasan disiplin keilmuan. Oleh karena itu, standar khusus dapat dikembangkan secara mandiri oleh kelompok disiplin ilmu sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing.
3. Penjaminan mutu internal merupakan pilar utama dari sistem penjaminan mutu dan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi. Penguatan sistem ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya budaya mutu akademik secara sistematis dan terprogram.
4. Sementara itu, penjaminan mutu eksternal melalui mekanisme akreditasi harus diposisikan sebagai kebutuhan perguruan tinggi, bukan sebagai kewajiban. Akreditasi dimaksudkan untuk mengevaluasi kelayakan layanan pendidikan tinggi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Pemerintah memiliki kepentingan untuk melindungi masyarakat dari layanan pendidikan tinggi yang tidak layak, sedangkan perguruan tinggi memiliki kepentingan untuk menunjukkan akuntabilitas publik atas pencapaian standar nasional maupun standar internal institusinya.
5. Lembaga akreditasi, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat (lembaga akreditasi mandiri), harus bersifat independen. Lembaga ini menjadi mitra pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi, sekaligus mitra perguruan tinggi dalam menguji efektivitas sistem penjaminan mutu internal yang dijalankan.
6. Proses akreditasi diharapkan tidak menimbulkan beban administratif berlebih bagi perguruan tinggi. Oleh karena itu, mekanisme penilaian

harus memanfaatkan data dan informasi dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) serta didukung oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terkini.

Sebagai bagian dari proses revisi, Mendiktisaintek telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Evaluasi Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2024. Dalam surat edaran ini, kementerian secara terbuka mengundang masukan, saran, dan pertimbangan dari seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan tinggi. Revisi terhadap Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2024 ditargetkan dapat diterbitkan paling lambat pada bulan Juli 2025.

3.5 Transformasi Penilaian Jabatan Akademik Dosen: Dinamika Pertumbuhan Lektor Kepala dan Guru Besar dalam Lima Tahun Terakhir

Penilaian jabatan akademik dosen (JAD) merupakan salah satu elemen kunci dalam pengembangan sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi. Dalam lima tahun terakhir, sistem penilaian ini telah mengalami berbagai transformasi, terutama dalam mendukung pertumbuhan jumlah dosen yang mencapai jabatan Lektor Kepala (LK) dan Guru Besar (GB). Berbagai faktor telah mempengaruhi dinamika ini, termasuk perubahan regulasi, inovasi sistem evaluasi, serta peningkatan jumlah perguruan tinggi dan kelompok ilmu yang aktif mengajukan usulan.

Transformasi ini tidak hanya terlihat dalam peningkatan jumlah dosen yang naik jabatan, tetapi juga dalam distribusi institusi pengusul dan bidang ilmu yang paling banyak berkontribusi dalam proses ini. Dengan reformasi kebijakan dan digitalisasi sistem evaluasi, perguruan tinggi di Indonesia semakin terdorong untuk mempercepat pengembangan karier akademik dosennya.

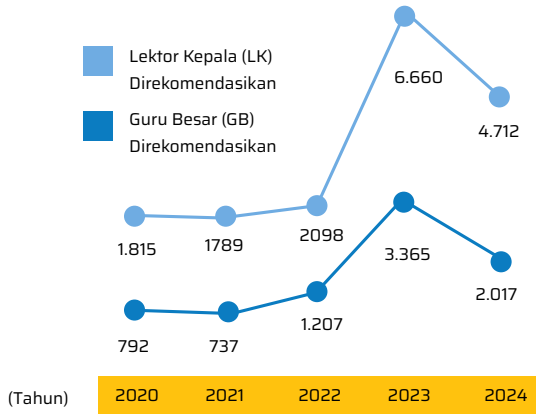

Gambar 11. Pertumbuhan Lektor Kepala dan Guru Besar 5 tahun Terakhir

Berdasarkan data yang dikumpulkan yang terlihat pada Gambar 11 terjadi pergeseran signifikan dalam pertumbuhan jumlah Guru Besar dan Lektor Kepala dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah Guru Besar yang direkomendasikan relatif stabil, dengan angka 792 pada tahun 2020 dan sedikit menurun menjadi 737 pada tahun 2021. Namun, lonjakan tajam terjadi pada tahun 2022, ketika jumlah Guru Besar yang direkomendasikan meningkat drastis menjadi 1.207, mencerminkan pertumbuhan sebesar 63,77% dari tahun sebelumnya.

Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2023, bertepatan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023. Regulasi ini membuka peluang lebih luas bagi dosen untuk mencapai jenjang Guru Besar melalui sistem yang lebih adaptif dan inklusif. Pada tahun tersebut, jumlah Guru Besar yang direkomendasikan melonjak hingga 3.365, mengalami peningkatan sebesar 178,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena ini mencerminkan dampak langsung kebijakan reformasi dalam mempercepat pengembangan karir akademik dosen.

Memasuki tahun 2024, jumlah rekomendasi Guru Besar mengalami penyesuaian dengan sedikit penurunan menjadi 2.017 orang. Meskipun demikian, angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelum

2023, yang menunjukkan bahwa sistem baru tetap memberikan peluang lebih besar bagi dosen untuk mencapai jenjang tertinggi dalam akademik secara lebih terstruktur. Pola ini mengindikasikan adanya normalisasi setelah lonjakan awal akibat implementasi kebijakan baru, serta penyesuaian terhadap standar yang semakin ketat dalam proses seleksi.

Sementara itu, jumlah Lektor Kepala juga mengalami tren pertumbuhan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 7.388 dosen berhasil mencapai jabatan Lektor Kepala. Proporsi yang lebih besar dibandingkan Guru Besar ini mencerminkan bahwa jenjang Lektor Kepala masih menjadi tahap yang lebih banyak diakses oleh dosen sebelum mencapai puncak karir akademik mereka.

Peningkatan jumlah usulan kenaikan jabatan akademik tidak hanya terjadi secara umum, tetapi juga menunjukkan pola distribusi yang menarik di antara perguruan tinggi yang memiliki pengusul terbanyak.

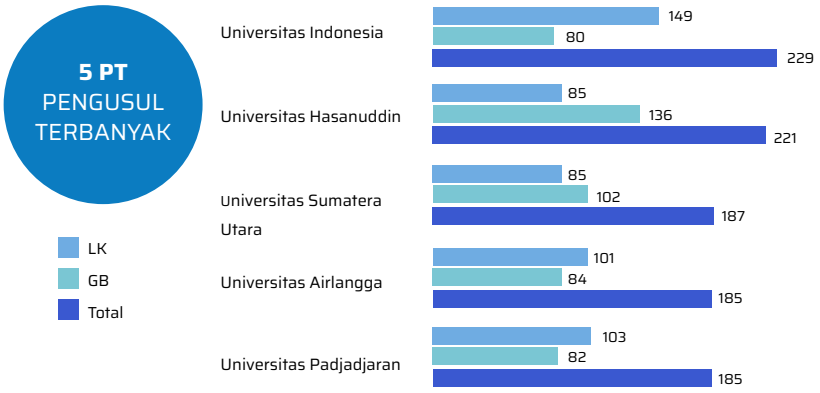

Gambar 12. Lima Teratas Perguruan Tinggi dengan Pengusul Terbanyak

Berdasarkan data tahun 2024 (lihat Gambar 12), lima perguruan tinggi dengan jumlah pengusul tertinggi adalah:

1) Universitas Indonesia (UI) dengan 229 pengusul (149 Lektor Kepala dan 80 Guru Besar).
2) Universitas Hasanuddin (Unhas) dengan 221 pengusul (85 Lektor Kepala dan 136 Guru Besar).

3) Universitas Sumatera Utara (USU) dengan 187 pengusul (85 Lektor Kepala dan 102 Guru Besar).
4) Universitas Airlangga (Unair) dengan 185 pengusul (101 Lektor Kepala dan 84 Guru Besar).
5) Universitas Padjadjaran (Unpad) dengan 185 pengusul (103 Lektor Kepala dan 82 Guru Besar).

Dari data ini, terlihat bahwa Universitas Indonesia menjadi institusi dengan jumlah usulan Lektor Kepala tertinggi, sementara Universitas Hasanuddin memiliki jumlah usulan Guru Besar terbanyak. Selisih antara perguruan tinggi dengan jumlah pengusul terbanyak (UI: 229) dan perguruan tinggi di posisi kelima (Unpad: 185) menunjukkan bahwa distribusi usulan masih cukup kompetitif di kalangan perguruan tinggi besar di Indonesia.

Selain berdasarkan institusi, distribusi usulan juga memperlihatkan pola menarik dari sisi kelompok ilmu yang paling banyak mengajukan kenaikan jabatan akademik.

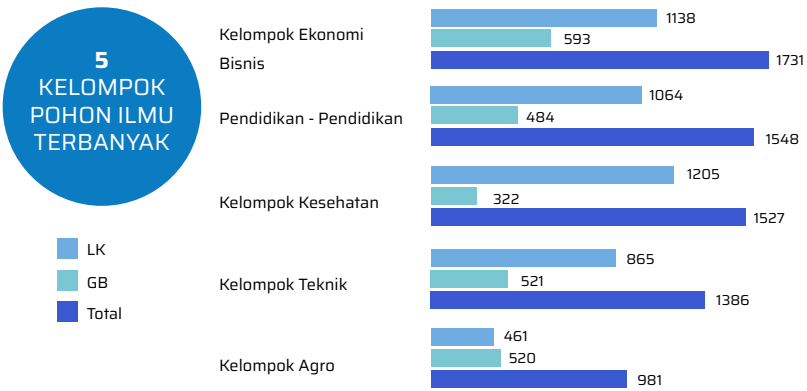

Gambar 13. Lima Teratas Kelompok Pohon Ilmu dengan Pengusul Terbanyak

Berdasarkan data pada Gambar 13, lima kelompok ilmu dengan jumlah pengusul tertinggi pada tahun 2024 adalah:

1) Ekonomi-Bisnis dengan 1.731 pengusul (1.138 Lektor Kepala dan 593 Guru Besar).
2) Pendidikan-Pendidikan dengan 1.548 pengusul (1.064 Lektor Kepala dan 484 Guru Besar).

3) Kesehatan dengan 1.527 pengusul (1.205 Lektor Kepala dan 322 Guru Besar).
4) Teknik dengan 1.386 pengusul (865 Lektor Kepala dan 521 Guru Besar).
5) Agro dengan 981 pengusul, menariknya jumlah Guru Besar (520) lebih tinggi dibandingkan Lektor Kepala (461).

Tren ini menunjukkan bahwa rumpun Ekonomi-Bisnis, Pendidikan, dan Kesehatan menjadi bidang yang paling dominan dalam pengajuan kenaikan jabatan akademik. Namun, fenomena menarik terjadi di kelompok Agro, di mana jumlah usulan Guru Besar lebih tinggi dibandingkan Lektor Kepala, berbeda dengan pola yang terjadi di bidang lain.

Tren pertumbuhan Lektor Kepala dan Guru Besar dalam lima tahun terakhir menunjukkan keberhasilan reformasi dalam sistem penilaian jabatan akademik dosen. Reformasi regulasi, digitalisasi sistem evaluasi, serta peningkatan transparansi telah berkontribusi dalam mempercepat pengembangan karier akademik dosen di Indonesia.

Namun, untuk menjaga efektivitas sistem penilaian di masa depan, beberapa rekomendasi strategis yang perlu diterapkan meliputi:

1) **Penguatan sosialisasi dan pelatihan** bagi dosen dan asesor untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi terbaru.
2) **Pengembangan sistem pendampingan berkelanjutan** bagi calon Guru Besar agar lebih siap memenuhi persyaratan akademik.
3) **Optimalisasi sistem seleksi otomatis** untuk menyaring kelengkapan berkas sebelum masuk ke tahap evaluasi lebih lanjut.
4) **Penambahan jumlah asesor** di bidang dengan tingkat pengajuan tinggi, seperti Hukum, Pendidikan, dan Kesehatan.
5) **Peningkatan kolaborasi antarperguruan tinggi dan institusi terkait** untuk memperkuat sistem kenaikan jabatan akademik secara nasional.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem penilaian jabatan akademik dosen dapat terus berkembang menuju sistem yang lebih transparan, inklusif, dan berorientasi pada kualitas, sehingga mendukung transformasi perguruan tinggi di Indonesia.

3.6 Isu Kontemporer Pendanaan Pendidikan Tinggi

1) Pendanaan Perguruan Tinggi: Penerima Manfaat Pengelolaan Sumber Daya Alam

Rencana kebijakan pemberian konsesi tambang atau izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi menuai silang pendapat. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai solusi inovatif dalam pendanaan perguruan tinggi, bahkan diyakini dapat menurunkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Namun, pendapat lain menentang kebijakan ini, karena dinilai dapat menimbulkan distorsi terhadap pelaksanaan Tridharma – pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Keprihatinan terhadap keterbatasan pendanaan perguruan tinggi yang dicoba dipecahkan dengan melibatkan sektor pertambangan memang patut diapresiasi, terutama mengingat kesulitan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemandirian untuk menghasilkan lulusan yang mumpuni dan jaminan kebekerjaan, mengembangkan sains dan teknologi, dan mewujudkan pengabdian kepada masyarakat. Perhatian utama seyogyanya tetap mendorong perguruan tinggi untuk mengatasi hambatan dan kemampuan meningkatkan nilai tambah melalui sains dan teknologi yang tepat guna di dunia industri.

Saat ini, perguruan tinggi masih berkutat untuk mengatasi ketidakberdayaan dalam meningkatkan mutu termasuk akreditasi, maupun menjawab relevansi terhadap tantangan pembangunan daerah. Sebagai gambaran, berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), tidak sampai 5% perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Dengan demikian, opsi turutnya perguruan tinggi untuk mengelola usaha pertambangan akan menambah beban baru yang kemungkinan besar akan berakhir pada kegagalan.

Lebih jauh, opsi kelola tambang ibaratnya mengalami halusinasi yang mengacu pada kejadian ketika model kebijakan menghasilkan informasi yang masuk akal tetapi tidak akurat atau faktual. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, antara lain kurang memiliki informasi seperti perhitungan, kaji banding acuan, atau perubahan model bisnis perguruan

tinggi. Pola kelola tambang yang bersifat ekstraktif dan komoditas bisa saja menguntungkan, tetapi risiko-risiko yang menyertainya membuat kebijakan ini tidak sesuai dengan kenyataan mengingat lemahnya kompetensi dan tata kelola perguruan tinggi. Alasan lain adalah pertanyaan ambigu tentang pendanaan yang ditafsirkan dengan cara yang tidak terduga, sehingga menghasilkan saran kebijakan yang tidak akurat. Berikutnya, bisa jadi masuknya unsur kreatif ke dalam respons terhadap pendanaan, yang dapat menghasilkan saran yang imajinatif namun keliru.

2) Alternatif Nilai Tambah bagi Pendanaan Perguruan Tinggi

Lantas, apakah ada alternatif lain terhadap niat baik untuk penyertaan sektor pertambangan untuk pendanaan perguruan tinggi selai pengelolaan tambang secara langsung?

Pengelolaan tambang hanyalah salah satu opsi. Bila menilik rantai nilai pertambangan, yang terdiri dari rangkaian kegiatan mulai dari mengekstraksi bahan mentah, mengolah bahan, memurnikan bahan, melakukan hilirisasi, hingga mengirimkan produk ke pelanggan, perusahaan yang mengelola rantai nilainya dengan baik dapat membangun sumber keunggulan kompetitif dan penciptaan nilai tambah yang signifikan. Perguruan tinggi boleh diberikan kesempatan untuk merentangkan kemampuan baik dalam menghasilkan lulusan yang relevan dengan mata rantai nilai pertambahan, meningkatkan nilai tambah di sepanjang rantai nilai pertambangan, sampai pada penyediaan dana lestari bagi perguruan tinggi untuk dapat meningkatkan produktivitas dan hilirisasi pertambangan.

Beberapa model praktik terbaik yang sudah terbukti tidak membiarkan perguruan tinggi mengelola tambang secara langsung tetapi ikatan kontrak dengan perguruan tinggi untuk menghasilkan nilai tambah terhadap rantai pasokan pertambangan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah kebijakan "peruntukan dana" *(earmarking)*, yang mengacu pada alokasi pendapatan sumber daya alam untuk pendidikan tinggi dan penelitian dan pengembangan.

Contoh penerapan kebijakan ini dapat ditemukan di beberapa negara:

- Alberta Heritage Foundation di Kanada menyediakan dana abadi bagi penelitian sains dan teknologi.

- Dana Investasi Pendidikan Tinggi Alaska bertujuan untuk memberikan hibah dan beasiswa kepada mahasiswa dan peneliti.
- Pemerintah Queensland, Australia, memberikan hibah dan peluang pendanaan bagi perusahaan yang ingin mengeksplorasi dan mengekstraksi mineral penting, dengan sebagian pendapatannya didedikasikan untuk pendidikan tinggi.

Di Indonesia, model serupa telah diterapkan dalam "program hibah riset sawit" yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sejak 2015. Dalam skema ini, perguruan tinggi diberikan dana hibah bersaing untuk melakukan riset, pengembangan, serta pemberdayaan sektor perkebunan dan industri sawit nasional.

Skema berbasis sumber daya alam seperti ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam industri pertambangan, dengan dana khusus yang diperuntukkan bagi riset, inovasi, serta pengembangan kapasitas akademik. Hal ini dapat menjadi bentuk kontribusi sektor pertambangan dalam mendorong perguruan tinggi unggul, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo.

Meski demikian, perguruan tinggi tidak boleh hanya bergantung pada satu sumber pendanaan. Diperlukan upaya untuk mencari mitra pendanaan di bidang strategis lainnya guna meningkatkan mutu serta relevansi pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.

Model pendanaan yang berkelanjutan haruslah berfokus pada misi Tridharma yang berdampak nyata**,** dengan memperkuat kemandirian perguruan tinggi serta membangun kemitraan dengan sektor-sektor strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Jika pendanaan dari sektor SDA membutuhkan waktu untuk dikembangkan, maka salah satu langkah yang dapat diambil adalah menggandakan alokasi 8% dari pendanaan wajib *(mandatory spending)* anggaran pendidikan 20% dalam APBN untuk pendidikan tinggi, sehingga pendanaan menjadi lebih stabil dan tidak hanya bertumpu pada satu skema saja.

3.7 Isu Kontemporer Kesejahteraan Dosen

Di balik kebijakan yang tampak sederhana, sering kali terdapat proses panjang yang melibatkan berbagai pihak dan regulasi yang saling terkait. Perjalanan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu contoh nyata yang memperoleh titik terang dalam 120 hari kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

1) Tukin Dosen ASN di Lingkungan Pendidikan Tinggi

Tukin merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada ASN berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan capaian kinerja. Tujuan utama dari pemberian Tukin adalah untuk mendorong profesionalisme, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah. Penetapan besaran Tukin mempertimbangkan indikator kinerja, hasil kerja yang terukur, perilaku kerja, serta kontribusi pegawai terhadap kinerja organisasi.

Dalam perjalanannya, perhatian terhadap tunjangan kinerja terus berkembang, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi. Beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa penganggaran Tukin bagi dosen belum terakomodasi secara optimal dalam perencanaan yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Sejak tahun 2020, belum terdapat proses birokrasi khusus yang mengarah pada penganggaran Tukin bagi dosen, meskipun aspirasi terhadap penguatan kesejahteraan dosen terus mengemuka.

Sebagai respons terhadap aspirasi tersebut, Kemdiktisaintek mengambil langkah strategis melalui pengusulan tambahan anggaran untuk tahun 2025. Usulan ini disusun dalam semangat mendukung penguatan peran dosen sebagai garda terdepan dalam transformasi pendidikan tinggi. Pengajuan ini telah disampaikan secara resmi dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI pada 18 November 2024 dan Rapat Dengar Pendapat pada 4 Desember 2024.

Secara yuridis, Tukin pertama kali diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai hak bersyarat,

yang pelaksanaannya bergantung pada sejumlah kriteria, termasuk capaian kinerja, kontribusi terhadap reformasi birokrasi, dan kemampuan keuangan negara. Dalam pengaturannya, Tukin tidak bersifat otomatis, melainkan diberikan melalui proses evaluasi yang ketat dan terukur.

Seiring perkembangan regulasi, pendekatan terhadap Tukin mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam undang-undang terbaru ini, ketentuan mengenai Tukin sebagai hak bersyarat tidak lagi dicantumkan. Hal ini mengubah karakteristik Tukin dari yang sebelumnya diposisikan sebagai hak yang bersyarat menjadi apresiasi yang diberikan berdasarkan kebijakan pemerintah.

Perubahan ini membawa implikasi penting terhadap tata kelola pemberian Tukin, termasuk bagi ASN yang berstatus dosen. Dalam kerangka regulasi terbaru, pemberian Tukin perlu dilaksanakan secara berhati-hati (pruden), sesuai prosedur, dan akuntabel. Hal ini mencakup pengusulan dan penetapan kelas jabatan, kesiapan alokasi anggaran, serta penyusunan regulasi pelaksana oleh kementerian atau lembaga terkait.

Dengan demikian, meskipun Tukin tetap menjadi instrumen yang penting dalam mendukung kinerja dan profesionalisme ASN, mekanisme pemberiannya kini sepenuhnya bersifat kebijakan pemerintah. Melalui kerangka pemikiran inilah Kemdiktisaintek menyusun dan mengajukan rencana penganggaran tambahan untuk tahun 2025, sebagai wujud dari komitmen dalam memperkuat tata kelola ASN yang adil, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan tinggi.

2) Perjalanan Panjang Tukin Dosen ASN

Dalam perjalanannya, terdapat beberapa perbedaan pemahaman mengenai Tukin dosen. Penting untuk dipahami bahwa Tukin memiliki kedudukan tersendiri dan tidak termasuk dalam kategori tunjangan dosen sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen secara konsisten menetapkan bahwa tunjangan dosen

terdiri atas tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan.

Di sisi lain, tunjangan kinerja merupakan bentuk apresiasi bersyarat atas capaian dan kontribusi kinerja individu, yang pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kepmendikbudristek) Nomor 447 Tahun 2024 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja Dosen. Tunjangan ini diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian standar kualitas dan profesionalitas dalam jabatan fungsional dosen. Kebijakan pemberian tunjangan kinerja dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang prosedural dan akuntabel.

Sehubungan dengan implementasi tunjangan kinerja di lingkungan Kemdiktisaintek, terdapat sejumlah catatan penting terkait penganggaran dan tahapan birokrasi yang perlu ditempuh. Hingga saat ini, penganggaran tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan pendidikan tinggi masih dalam proses penyesuaian, termasuk mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2018. Dalam waktu yang sama, di kementerian lain seperti Kementerian Agama, tunjangan kinerja telah diterapkan sejak tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018.

Perubahan nomenklatur dan struktur kelembagaan kementerian sejak beberapa tahun terakhir membawa implikasi pada penyusunan dan penyesuaian anggaran, termasuk alokasi tunjangan kinerja. Perubahan tersebut turut mempengaruhi waktu pengajuan serta proses birokrasi yang dibutuhkan untuk pengalokasian anggaran tahun 2025. Oleh karena itu, pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai, termasuk dosen ASN, di lingkungan Kemdiktisaintek kini menjadi fokus perhatian dan diarahkan sebagai salah satu prioritas strategis untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan antar instansi pemerintah.

Langkah konkret dalam upaya harmonisasi kebijakan dilakukan pada tanggal 6 Januari 2025, saat Kementerian Hukum melaksanakan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Presiden mengenai tunjangan kinerja bagi pegawai di 25 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur. Dalam proses tersebut, usulan Kemdiktisaintek mendapatkan dukungan melalui persetujuan lisan dari Menteri Keuangan terkait alokasi anggaran, sehingga

rancangan dimaksud dapat diteruskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara guna diproses penandatanganannya oleh Presiden.

Dalam rangka merumuskan skema pemberian tunjangan kinerja yang proporsional dan tepat sasaran, Kemdiktisaintek mengajukan tiga alternatif skenario sebagai berikut:

- Opsi 1: Diberikan kepada dosen ASN di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berstatus satuan kerja (Satker), PTN Badan Layanan Umum (BLU) yang belum menerapkan sistem remunerasi, dan di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Jumlah sasaran kurang lebih sebanyak 33.957 dosen ASN dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp2.884.890.281.000;
- Opsi 2: Selain mencakup kelompok pada opsi pertama, skema ini juga mengakomodasi dosen di PTN BLU yang telah menerapkan sistem remunerasi namun masih di bawah nilai nominal tunjangan kinerja yang diusulkan. Estimasi kebutuhan anggaran untuk sekitar 64.805 dosen adalah sebesar Rp3.628.454.289.138;
- Opsi 3: Diperuntukkan bagi seluruh dosen ASN di PTN Satker, PTN BLU, PTN Badan Hukum, serta dosen ASN di LLDikti, dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp8.032.379.102.804 untuk sekitar 88.299 dosen ASN.

Rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2025 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemdiktisaintek, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, serta Kantor Staf Presiden, menyepakati bahwa opsi pertama menjadi prioritas utama untuk direalisasikan dalam waktu dekat.

Sebagai bagian dari komitmennya terhadap tata kelola yang baik, Kemdiktisaintek secara konsisten menjalankan seluruh proses birokrasi yang diperlukan dalam rangka pemberian Tukin bagi dosen ASN. Setiap tahapan dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur birokrasi dalam pemberian Tukin bagi Dosen ASN melibatkan beberapa tahapan penting yang bersifat lintas kementerian. Secara umum, tahapan tersebut meliputi:

a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi mengusulkan kelas jabatan dosen ASN kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB);
b. Menpan RB kemudian menerbitkan surat persetujuan mengenai kelas jabatan dosen ASN tersebut;
c. Setelah itu, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan terkait besaran Tukin bagi dosen ASN;
d. Dengan dasar persetujuan dari Menteri Keuangan, maka dapat disusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tukin bagi dosen ASN;
e. Selanjutnya, berdasarkan Perpres yang telah ditetapkan, Menteri menerbitkan Peraturan Menteri sebagai dasar hukum pelaksanaan pemberian Tukin bagi dosen ASN di lingkungan kementeriannya.

Tahapan-tahapan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap kerangka regulasi yang berlaku, tetapi juga menunjukkan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan aparatur negara dapat terlaksana secara sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk akuntabilitas publik, Kemdiktisaintek secara resmi telah menyampaikan perkembangan kebijakan ini kepada pimpinan perguruan tinggi melalui Surat Edaran (SE) Nomor 247 Tahun 2025 tertanggal 28 Januari 2025 tentang Tunjangan Kinerja Dosen. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pada periode 2020–2024, pemberian tunjangan kinerja belum dapat dilaksanakan karena belum terpenuhinya prasyarat administratif dan regulasi, khususnya terkait dengan proses penganggaran dan regulasi pelaksana seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri yang diperlukan.

Sebagai bagian dari upaya percepatan, Kemdiktisaintek telah mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Pada Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kemdiktisaintek tanggal 23 Januari 2025, disampaikan bahwa Kementerian Keuangan telah menyetujui alokasi

anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk pelaksanaan tunjangan kinerja bagi ASN di lingkungan Kemdiktisaintek. Pemberian tunjangan kinerja untuk dosen ASN akan dilakukan mulai tahun 2025 berdasarkan sistem evaluasi kinerja dan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Adapun pemberian tunjangan untuk tahun-tahun sebelumnya tidak dimungkinkan karena belum terpenuhinya prosedur yang menjadi prasyarat hukum dan administratif pada saat itu.

Untuk memperkuat pemahaman dan keterlibatan para pemangku kepentingan, pada tanggal 31 Januari 2025 Kemdiktisaintek menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai perkembangan kebijakan tunjangan kinerja dosen ASN. Acara ini dihadiri oleh para pimpinan PTN dan kepala LLDikti, dengan sambutan pembuka oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof. Khairul Munadi, serta pemaparan materi oleh Prof. Johannes Gunawan, selaku Tim Ahli Mendiktisaintek. Kegiatan ini juga dimoderatori oleh Dr. Bhimo Widyo Andoko, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Sumber Daya Manusia. Salah satu pokok penting yang disampaikan adalah penjelasan mengenai latar belakang administratif dan regulatif yang menyebabkan belum terlaksananya pemberian tunjangan kinerja bagi dosen ASN pada periode 2020–2024, serta langkah-langkah yang kini sedang dan akan diambil agar pelaksanaan ke depan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Mengapa Tukin Dosen ASN 2020-2024 Tidak Bisa Diberikan?

Berdasarkan penelusuran terhadap regulasi dan proses administratif yang berlaku, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati mengenai belum dapat direalisasikannya pemberian Tukin bagi Dosen ASN pada periode 2020 hingga 2024.

Pertama, dalam rentang waktu tersebut, alokasi anggaran untuk Tukin bagi Dosen ASN belum tercantum dalam dokumen perencanaan kementerian, meskipun telah tersedia dasar hukum mengenai pemberian tunjangan tersebut, antara lain Permendikbud Nomor 14 Tahun 2016 beserta perubahan-perubahannya melalui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2020. Pada Lampiran Permendikbud Nomor 44 Tahun 2018, telah tercantum ketentuan mengenai kelas jabatan dan besaran tunjangan kinerja bagi Dosen ASN.

Kedua, tindak lanjut terhadap Surat MenpanRB Nomor B/1245/M.SM.02.00/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang memuat persetujuan atas kelas jabatan Dosen ASN, belum dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu pengajuan permohonan persetujuan besaran Tukin kepada Kementerian Keuangan dan proses birokrasi lanjutan sebagaimana mestinya.

Ketiga, pada tanggal 11 Oktober 2024, diterbitkan Keputusan Mendikbudristek Nomor 447/P/2024 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Pemberian Besaran Tunjangan Kinerja Jabatan Fungsional Dosen di lingkungan Kemdikbudristek. Meskipun keputusan tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 10 Perpres tersebut menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja perlu ditetapkan dalam bentuk peraturan menteri, bukan keputusan menteri.

Dengan demikian, secara normatif, Keputusan Mendikbudristek Nomor 447/P/2024 belum dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang memadai dalam pelaksanaan pemberian Tukin. Dapat ditarik kesimpulan bahwa belum terpenuhinya rangkaian proses administratif dan regulasi tersebut serta berlalunya tahun anggaran mengakibatkan tidak sempat dilakukan alokasi anggaran Tukin bagi pegawai Dosen pada periode 2020-2024.

4) Langkah ke Depan: Menjamin Kepastian dan Keberlanjutan

Dengan adanya penyesuaian kebijakan di bawah Kemdiktisaintek, pemberian Tukin Dosen ASN kini telah memasuki tahap yang lebih pasti dari sisi regulasi maupun dukungan anggaran. Pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan.

Kemdiktisaintek menyampaikan bahwa permasalahan terkait penyusunan dan pengusulan tunjangan kinerja bagi Dosen ASN di lingkungan perguruan tinggi telah memperoleh solusi yang konstruktif. Untuk periode tahun 2020 hingga 2024, pembayaran Tukin belum dapat dilakukan karena belum terpenuhinya persyaratan administratif dan kepatuhan terhadap ketentuan regulasi yang berlaku pada saat itu.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan dan akselerasi kebijakan, Kemdiktisaintek telah mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2025,

yang kemudian mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI. Alokasi dana yang disetujui sebesar Rp2,5 triliun akan digunakan untuk pemberian Tukin bagi sekitar kurang lebih 33.957 dosen ASN di seluruh Indonesia.

Adapun kriteria prioritas penerima Tukin ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan dan rasionalitas alokasi anggaran, yaitu:

- Dosen ASN yang bertugas di PTN berstatus Satker,
- Dosen ASN di PTN BLU yang belum menerapkan sistem remunerasi, dan
- Dosen ASN yang diperbantukan di LLDikti.

Prioritas ini juga telah dipertegas oleh Kementerian Keuangan dalam konferensi pers setelah rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada tanggal 14 Februari 2025 di Gedung DPR RI yang membahas efisiensi anggaran. Dasar dari prioritas ini adalah memberikan kesempatan kepada para dosen yang belum sama sekali mendapatkan remunerasi sebagaimana yang sudah diterima oleh para dosen di PTN BLU dan PTN BH. Secara umum, remunerasi mencakup gaji, tunjangan tetap, bonus, insentif, komisi, pesangon, pensiun, dan honorarium. Tunjangan Kinerja yang diberikan adalah jumlah tunjangan kinerja yang telah dikurangi Tunjangan Profesi.

Pokok-pokok kebijakan yang terkait tukin Dosen, antara lain:

- Tukin diberikan kepada pegawai ASN di lingkungan Kemdiktisaintek, termasuk dosen ASN;
- Besaran Tukin dosen ASN adalah selisih tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan jabatan profesi pada jenjangnya (jika sudah menerima tunjangan profesi);
- Tukin diberikan kepada dosen ASN di PTN Satker, PTN BLU yang belum remunerasi, dan di LLDikti; serta
- Pemberlakuan Tukin terhitung sejak 1 Januari 2025.

Langkah-langkah implementasi selanjutnya akan difokuskan pada pemenuhan seluruh aspek regulatif, penyusunan pedoman teknis pelaksanaan, serta penerapan sistem pengukuran kinerja yang selaras dengan arah reformasi birokrasi. Dengan demikian, pemberian Tukin ke depan diharapkan dapat berjalan secara tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan profesionalisme serta kesejahteraan dosen ASN di lingkungan Kemdiktisaintek.

3.8 Pembukaan Program KIP Kuliah 2025

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang inovatif dan adaptif guna menghadapi tantangan zaman. Sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi yang lebih inklusif, Kemdiktisaintek membuka Pendaftaran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2025 pada 4 Februari 2025. Pendaftaran program ini dilakukan secara daring dan disiarkan melalui berbagai platform digital agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas (lihat Gambar 14).

Gambar 14.Webinar Sosialisasi dan Pembukaan Pendaftaran KIP Kuliah 2025
oleh Mendiktisaintek
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

KIP Kuliah merupakan salah satu program utama pemerintah dalam memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, agar mereka dapat menempuh pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. Program ini merupakan kelanjutan dan transformasi dari program Bidikmisi, yang telah dimulai sejak tahun 2010. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2019, program Bidikmisi telah memberikan bantuan pendidikan kepada lebih dari 500 ribu mahasiswa. Seiring dengan perubahan kebijakan, program ini kemudian bertransformasi menjadi KIP Kuliah pada tahun 2020, yang hingga 2024 telah menjangkau lebih dari 1,1 juta mahasiswa. Secara keseluruhan, sejak 2010 hingga 2024, program Bidikmisi dan KIP Kuliah

telah memberikan manfaat kepada 1,6 juta mahasiswa di seluruh Indonesia.

Dengan adanya restrukturisasi kementerian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pengelolaan pendidikan tinggi kini berada dalam kewenangan Kemdiktisaintek. Program KIP Kuliah secara khusus dikelola melalui Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi, yang bertanggung jawab dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini. Rencana ke depan adalah memperluas cakupan KIP Kuliah agar semakin inklusif dan relevan dengan kebutuhan pendidikan tinggi masa kini, melanjutkan praktik-praktik baik yang telah berjalan sebelumnya, serta menyesuaikan program ini dengan Asta Cita, visi besar pemerintahan dalam membangun Indonesia Emas 2045.

1) *KIP Kuliah dan Asta Cita: Memperkuat SDM Menuju Indonesia Emas 2045*

Pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas merupakan prioritas utama dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, pendidikan tinggi menjadi pilar utama dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kapasitas akademik yang baik, tetapi juga mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan bangsa.

Namun, tantangan dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi masih cukup besar. Pada tahun 2024, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di Indonesia masih berada pada angka 32%, yang menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang belum memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berperan sebagai pemampu (*enabler*) dalam meningkatkan keterjangkauan dan kualitas pendidikan tinggi bagi masyarakat luas.

Melalui Program KIP Kuliah, pemerintah berkomitmen untuk mendukung anak-anak pintar dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat masuk dan menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Mahasiswa penerima program ini tidak hanya diberikan bantuan biaya pendidikan, tetapi juga bantuan biaya hidup, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam menjalani pendidikan

tanpa terbebani masalah ekonomi. Dengan adanya program ini, diharapkan lulusan perguruan tinggi dari berbagai latar belakang sosial dapat turut serta membangun Indonesia melalui keahlian dan kompetensi yang mereka miliki.

2) *Pendidikan Tinggi untuk Semua: Mewujudkan Kesetaraan Akses dan Peluang*

KIP Kuliah bukan sekadar program bantuan pendidikan, tetapi juga merupakan strategi jangka panjang dalam membangun sistem pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada mahasiswa yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan program ini terus mengalami penyempurnaan, baik dari segi mekanisme seleksi, transparansi distribusi dana, hingga pemanfaatan teknologi dalam proses pendaftaran dan monitoring.

Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya diharapkan untuk menyelesaikan studinya, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademik, penelitian, inovasi, dan pembangunan sosial. KIP Kuliah memungkinkan mahasiswa untuk terlibat dalam proyek-proyek yang berdampak luas bagi masyarakat, sehingga manfaat dari program ini tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat secara individu, tetapi juga oleh komunitas yang lebih besar.

Komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan zaman tercermin dalam berbagai kebijakan pendidikan tinggi, termasuk perluasan akses bagi mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan memperkuat pemerataan kesempatan dalam pendidikan tinggi, Indonesia akan semakin siap dalam menghadapi tantangan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.

3) *KIP Kuliah sebagai Investasi Jangka Panjang dalam Pembangunan Nasional*

Dalam jangka panjang, keberlanjutan program KIP Kuliah akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja nasional, berkurangnya kesenjangan sosial, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Melalui

kebijakan ini, pemerintah tidak hanya ingin memastikan bahwa lebih banyak mahasiswa dapat mengakses pendidikan tinggi, tetapi juga ingin membangun generasi yang lebih mandiri, inovatif, dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

Dengan semakin luasnya cakupan program ini, KIP Kuliah diharapkan menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Melalui pendidikan yang berkualitas dan inklusif, Indonesia dapat mencetak sumber daya manusia yang siap berkontribusi dalam pembangunan nasional maupun global.

Mendiktisaintek menegaskan bahwa Program KIP Kuliah harus terus dikembangkan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi generasi muda Indonesia. Dengan program ini, anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki harapan untuk meraih pendidikan tinggi yang layak, membuka peluang bagi mereka untuk menjadi bagian dari SDM unggul yang berdaya saing dan mampu membawa perubahan bagi bangsa dan negara.

3.9 Skema Pinjaman Pendidikan Tanpa Bunga bagi Mahasiswa

Akses terhadap pendidikan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan salah satu prioritas utama dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Kemdiktisaintek mengembangkan skema Pinjaman Pendidikan Tanpa Bunga, yang bertujuan untuk mendukung mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terbebani oleh kendala finansial.

Menurut kajian the SMERU Institute yang berjudul “Financing Higher Education in Indonesia: Assessing the Feasibility of an Income-Contingent Loan System”, terdapat dua opsi skema pendanaan pinjaman mahasiswa (*Kompas*, 24 Mei 2024). *Pertama,* pinjaman berbasis kredit jangka panjang *(mortgage)* dengan hak tanggungan. Skema ini mirip dengan pinjaman mahasiswa *(student loan)* di Amerika Serikat dan Kanada. Dalam opsi ini, tenor pembayaran sudah ditetapkan sejak awal. Tipe pinjaman ini biasanya lebih memberatkan dengan potensi gagal bayar yang lebih besar. Opsi

kedua adalah sistem pinjaman berbasis pendapatan *(Income Contingent-Loan* atau ICL). Dalam opsi ini, pembayaran cicilan disesuaikan dengan level pendapatan mahasiswa setelah lulus. Mahasiswa baru mulai membayar pinjaman setelah pendapatannya mencapai level tertentu. Semakin kecil gajinya, semakin kecil pula cicilan yang ditanggung, demikian pula sebaliknya.

Program skema pinjaman tanpa bunga dirancang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa pemenuhan hak mahasiswa dapat dilakukan dengan cara memberikan pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. Dengan skema ini, mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tanpa harus khawatir mengenai biaya kuliah yang besar di awal, sementara kewajiban pelunasan hanya berlaku setelah mereka memasuki dunia kerja dan memiliki penghasilan tetap.

Namun, implementasi skema ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah penguatan kelembagaan dan mekanisme pengelolaan dana pinjaman, agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam berbagai praktik global, pinjaman mahasiswa tanpa bunga dikelola melalui berbagai mekanisme, seperti lembaga nirlaba, yayasan amal, lembaga keagamaan, ataupun skema Badan Layanan Umum (BLU) yang memungkinkan pengelolaan dana lebih fleksibel dalam struktur pemerintahan.

1) Landasan Yuridis Pinjaman Pendidikan

Secara hukum, konsep pinjaman pendidikan telah memiliki dasar yuridis yang jelas, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi berikut:

a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) – Pasal 12 huruf (b) menyatakan bahwa setiap peserta didik wajib ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mereka yang memperoleh pengecualian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi – Pasal 76 ayat (2) huruf (c) menegaskan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah mahasiswa lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan – Menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
d) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Pendidikan – Pasal 13 huruf (e) memungkinkan penggunaan Dana Abadi Pendidikan untuk membiayai program layanan lainnya sesuai dengan arahan Dewan Penyantun, termasuk skema pinjaman pendidikan.

Selain itu, sumber pendanaan program ini juga telah memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (3), yang menyatakan bahwa sumber dana yang sah dan tidak mengikat dapat berupa hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, pendapatan alih teknologi hasil riset, royalti atas hak paten, dana pihak ketiga, dana perwalian, baik dari dalam maupun luar negeri, serta sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan ini, skema pendanaan Pinjaman Pendidikan Tanpa Bunga dapat berasal dari berbagai mekanisme, seperti:

a) Alokasi Dana Abadi Pendidikan (DAP) sebagai pendanaan awal program, dengan mengalokasikan sebagian bagi hasil DAP untuk mendukung implementasi pinjaman pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu.
b) Donor dan Filantropi, berupa sumbangan dari perusahaan swasta, BUMN, serta lembaga filantropi, yang dapat diberikan insentif pajak sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan tinggi yang inklusif.
c) Pengembalian investasi dari obligasi pemerintah dan aset berpendapatan tetap, yang dapat digunakan kembali untuk memperluas cakupan mahasiswa penerima pinjaman dan memastikan keberlanjutan program.

2) Konsep Pinjaman Pendidikan: Prinsip dan Mekanisme

Skema Pinjaman Pendidikan Tanpa Bunga yang dikembangkan oleh Kemdiktisaintek bertujuan untuk memberikan solusi pendanaan bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria akademik dan sosial ekonomi tertentu.

Program ini akan membantu mahasiswa dalam membiayai pendidikan tinggi di berbagai institusi, termasuk universitas, akademi komunitas, dan politeknik.

Secara umum, terdapat dua jenis skema pinjaman pendidikan yang dapat diterapkan:

a) Pinjaman langsung bersubsidi, di mana pemerintah menanggung sebagian atau seluruh bunga pinjaman sehingga mahasiswa hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman.
b) Pinjaman langsung tanpa subsidi, di mana mahasiswa tetap harus mengembalikan dana sesuai jumlah yang dipinjam, tetapi tanpa bunga tambahan.

Ketentuan pembayaran kembali akan ditetapkan saat pinjaman disetujui, dan mahasiswa wajib menandatangani dokumen hukum yang menyetujui seluruh persyaratan terkait. Kriteria kelayakan untuk menerima pinjaman mencakup prestasi akademik mahasiswa, kondisi sosial ekonomi pribadi atau keluarga, serta faktor lainnya yang akan diatur dalam peraturan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek.

Untuk memastikan bahwa program ini tidak membebani masyarakat dan tetap inklusif, beberapa langkah regulasi telah disiapkan, antara lain:

1) Pengaturan batas atas Uang Kuliah Tunggal (UKT)
   Pemerintah akan melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024, untuk memastikan bahwa penerima program beasiswa dan pinjaman pendidikan tidak terbebani oleh kenaikan UKT yang tidak terkendali.
2) Kolaborasi dengan Perusahaan dan Sektor Swasta
   Mahasiswa penerima pinjaman dapat mengikuti seleksi kerja sama dengan perusahaan BUMN/swasta, yang berpotensi menawarkan pengikatan kerja setelah lulus sebagai bentuk jaminan pengembalian pinjaman.
3) Seleksi Ketat dan Berbasis Kinerja
   Pinjaman hanya akan diberikan kepada mahasiswa mulai semester ke-3, setelah melalui proses seleksi yang mempertimbangkan:
   - Prestasi akademik pada semester 1 & 2,

- Hasil tes potensi akademik,
- Tes kesehatan fisik dan mental, untuk memastikan bahwa penerima program mampu menyelesaikan studi dengan baik.

4) Sistem Penjaminan bagi Peminjam
Mahasiswa yang tidak memiliki riwayat kredit atau memiliki risiko gagal bayar harus memiliki penjamin *(second guarantor)*, yang dapat berupa:
   - Orang tua atau wali yang ikut menandatangani perjanjian,
   - Donor atau lembaga penjamin lainnya dengan pendapatan stabil, yang dapat menjamin kelayakan kredit mahasiswa.

5) Integrasi dengan Sistem Keuangan Nasional
Data peminjam akan terhubung dengan *BI Checking* dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sehingga status kredit mahasiswa dapat dipantau dan diintegrasikan dengan sistem perbankan nasional.

6) Perlindungan terhadap Risiko Gagal Bayar
Pemerintah akan membentuk Dana Asuransi Gagal Bayar, yang bertanggung jawab menanggung hingga 50% dari risiko pinjaman gagal bayar untuk mahasiswa yang menghadapi kesulitan dalam melunasi pinjamannya.

3) Insentif Peserta Program Pinjaman Pendidikan

Untuk menarik lebih banyak mahasiswa berpartisipasi dalam program ini, beberapa insentif juga disediakan, di antaranya:

1. Program Pengampunan Pinjaman bagi Profesi Tertentu
   - Lulusan yang bekerja di sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan pedesaan selama 5-10 tahun akan mendapatkan keringanan pembayaran.
   - Contoh:
     - Pengampunan 50% dari total pinjaman jika bekerja di sektor prioritas selama 5 tahun.
     - Pengampunan 100% dari total pinjaman jika bekerja di sektor ini selama 10 tahun.
2. Program Pengikatan Kerja dengan Pihak Donor/Penjamin Pendidikan
   - Perusahaan BUMN atau swasta yang memberikan pendanaan

dapat menyeleksi mahasiswa penerima pinjaman, dengan opsi pengikatan kerja setelah lulus.

3. Penghargaan untuk Pengembalian Lebih Awal atau Tepat Waktu
   - Peminjam yang melakukan pembayaran tepat waktu selama 5 tahun berturut-turut akan mendapatkan pengurangan pokok pinjaman hingga 20%.
   - Mereka yang membayar lebih dari jumlah minimum bulanan akan mendapatkan diskon tambahan 10% pada sisa saldo.

4) Skema Pengembalian Pinjaman: Fleksibel dan Berbasis Pendapatan

Salah satu keunggulan utama dari Pinjaman Pendidikan Tanpa Bunga adalah mekanisme pengembalian yang fleksibel dan berbasis pendapatan *(Income-Based Repayment/IBR).* Skema ini dirancang untuk memastikan bahwa kewajiban pembayaran kembali pinjaman tidak membebani lulusan, terutama bagi mereka yang belum memiliki penghasilan tetap atau masih dalam masa transisi menuju dunia kerja.

Beberapa prinsip utama dalam skema pengembalian ini meliputi:

1. Persentase pembayaran ditentukan berdasarkan pendapatan
   - Lulusan dengan pendapatan rendah (di bawah Rp6 juta/bulan) dapat mengajukan penangguhan sementara tanpa penalti hingga 24 bulan.
   - Tingkat pembayaran kembali berkisar antara 1% (untuk peminjam dengan penghasilan rendah) hingga 8% (untuk peminjam dengan penghasilan tinggi).
2. Mekanisme pembayaran kembali untuk lulusan yang bekerja di sektor formal
   - Untuk pekerja di sektor formal, pemberi kerja akan memotong pembayaran pinjaman langsung dari gaji, sehingga proses pengembalian lebih mudah dan terjamin.
   - Bagi mereka yang bekerja di sektor informal, pembayaran dilakukan melalui setoran manual ke bank yang ditunjuk.
3. Restrukturisasi pinjaman bagi peminjam yang menghadapi kesulitan finansial
   - Peminjam yang mengalami kesulitan ekonomi atau menganggur dapat mengajukan penundaan pembayaran sementara hingga 24 bulan tanpa dikenakan penalti.

- Jika peminjam mengalami penurunan pendapatan, maka besaran cicilan bulanan dapat disesuaikan berdasarkan kapasitas keuangan.
- Peminjam yang membutuhkan jangka waktu lebih panjang dapat mengajukan perpanjangan durasi pembayaran hingga 20 tahun.

Dengan sistem yang lebih adaptif ini, program Pinjaman Pendidikan Tanpa Bunga tidak hanya memberikan akses ke pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang kurang mampu, tetapi juga memastikan bahwa proses pengembalian pinjaman tidak menjadi kendala bagi lulusan dalam meraih stabilitas ekonomi setelah menyelesaikan studi.

3.10 Konsep Uang Kuliah Tunggal Minimalis

Pendidikan tinggi merupakan faktor krusial dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi. Salah satu tantangan terbesar adalah pembiayaan pendidikan yang memberatkan mahasiswa dan keluarganya, khususnya melalui skema Uang Kuliah Tunggal (UKT). Oleh karena itu, konsep Uang Kuliah Tunggal Minimalis menjadi solusi alternatif yang berfokus pada peningkatan subsidi negara untuk memastikan pendidikan tinggi negeri lebih terjangkau, bahkan menuju biaya nol rupiah. Data menunjukkan bahwa 349 PTN di Indonesia hanya mampu menampung 47% dari total populasi mahasiswa. Sementara itu, PT Swasta (PTS) menampung 53% mahasiswa, yang menunjukkan bahwa keterbatasan daya tampung PTN menjadi kendala utama dalam perluasan akses pendidikan tinggi.

Tiga masalah utama yang dihadapi pendidikan tinggi Indonesia adalah:

- Ketimpangan Akses *(Inequality in Access)* – APK pendidikan tinggi di Indonesia masih 31%, jauh tertinggal dibandingkan Thailand (49%), Malaysia (43%), dan Singapura (91%).
- Kesenjangan Kualitas *(Inequality in Quality)* – Dari 4.356 perguruan tinggi, hanya sebagian kecil yang terakreditasi unggul.
- Kurangnya Relevansi Perguruan Tinggi *(Less Relevance of Higher Education)* – Pada tahun 2023, 945.413 lulusan pendidikan tinggi masih menganggur, terdiri dari 191.681 lulusan diploma dan 753.732 lulusan sarjana.

Dari sisi anggaran, pendidikan tinggi masih bergantung pada skema Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Alokasi BOPTN 2024 mencapai Rp6,6 triliun, namun masih jauh dari kebutuhan operasional PTN. Dengan kondisi ini, PTN terpaksa menaikkan UKT untuk menutupi biaya yang tidak tercukupi, sehingga mahasiswa menanggung beban yang lebih besar.

Konsep UKT Minimalis mengacu pada model pembiayaan pendidikan tinggi yang bertumpu pada prinsip subsidi yang lebih besar dari pemerintah sehingga mahasiswa tidak harus menanggung sebagian besar biaya pendidikan mereka. Model ini mengusulkan beberapa skenario subsidi, yaitu:

- Subsidi Penuh (100%) – Pendidikan tinggi gratis bagi mahasiswa reguler di PTN.
- Subsidi 75% – UKT diturunkan hingga 50% dari tarif saat ini.
- Subsidi 50% – UKT tetap dalam jangka waktu lima tahun tanpa kenaikan.
- Subsidi Bertahap – Penurunan UKT secara progresif dengan skema pembiayaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data yang tersedia, untuk menggratiskan mahasiswa S1 reguler di seluruh PTN, diperlukan subsidi sebesar Rp22,6 triliun per tahun. Angka ini hanya sekitar 3,4% dari total anggaran pendidikan nasional tahun 2024 yang mencapai Rp665,02 triliun. Oleh karena itu, konsep UKT Minimalis ini sangat memungkinkan untuk direalisasikan dengan optimalisasi anggaran yang lebih efisien.

Implementasi UKT Minimalis akan memberikan berbagai dampak positif, antara lain:

1. Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Tinggi – Mengurangi hambatan ekonomi bagi calon mahasiswa, sehingga lebih banyak masyarakat bisa mengakses pendidikan tinggi.
2. Mengurangi Pengangguran Terdidik – Dengan beban finansial yang lebih ringan, mahasiswa dapat lebih fokus pada kualitas pendidikan dan kesiapan kerja.
3. Meningkatkan Daya Saing SDM Indonesia – Pendidikan tinggi yang lebih terjangkau akan mendukung pengembangan tenaga kerja yang lebih kompetitif.

4. Mendorong Hilirisasi Riset dan Inovasi – Perguruan tinggi dapat lebih fokus pada pengembangan riset tanpa ketergantungan pada pendapatan dari UKT.

Untuk merealisasikan UKT Minimalis, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Optimalisasi Anggaran Pendidikan – Mengalokasikan lebih banyak anggaran ke BOPTN untuk menutupi biaya operasional PTN.
2. Peningkatan Efisiensi Pembiayaan PTN – Menekan biaya administrasi dan operasional agar anggaran pendidikan dapat lebih difokuskan pada pembelajaran.
3. Kolaborasi dengan Sektor Industri – Mendorong industri untuk ikut serta dalam pembiayaan pendidikan melalui skema beasiswa atau kerja sama riset.
4. Reformasi Regulasi Pembiayaan – Menyusun kebijakan yang menjamin keterjangkauan pendidikan tinggi tanpa membebani mahasiswa.

Konsep Uang Kuliah Tunggal Minimalis merupakan solusi nyata untuk memastikan pendidikan tinggi yang lebih terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan. Dengan alokasi anggaran yang tepat dan efisiensi pengelolaan dana, Indonesia dapat mewujudkan pendidikan tinggi gratis atau berbiaya rendah untuk seluruh mahasiswa PTN. Langkah ini akan membawa dampak besar dalam mencapai Indonesia Emas 2045, di mana pendidikan tinggi menjadi pilar utama pembangunan SDM unggul dan inovatif.

Sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan, riset dan pengembangan (R&D) memegang peranan strategis dalam menjawab berbagai tantangan bangsa di era transformasi digital dan disrupsi global. Peningkatan kualitas dan relevansi riset menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong inovasi, memperkuat daya saing, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah terstruktur dan berkelanjutan guna memperkuat ekosistem riset dan pengembangan, termasuk melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan kapasitas sumber daya, serta penajaman arah kebijakan riset yang responsif terhadap kebutuhan bangsa.

4

Peningkatan Riset dan Pengembangan

Dokumentasi:
Humas Diktisaintek

4.1 Tantangan Strategis Indonesia

Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang memerlukan perhatian serius, antara lain perubahan iklim, perlambatan ekonomi global, disrupsi kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*/AI), serta terbatasnya waktu pemanfaatan bonus demografi.

Perubahan iklim, misalnya, terjadi karena pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut yang melilit bumi, menghasilkan panas matahari dan menaikkan suhu. Sudah ada banyak solusi untuk mengatasi tantangan strategis ini yang dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kehidupan masyarakat dan melindungi lingkungan. Salah satunya, pengalihan sistem energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan seperti matahari atau angin akan mengurangi emisi yang mendorong perubahan iklim.

Kemudian perlambatan ekonomi global yang ditandai dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia. Ada sejumlah faktor yang menjadi penyebabnya, seperti inflasi, ketegangan geopolitik, dan kondisi keuangan global yang ketat. Perlambatan ekonomi global dapat berdampak pada penurunan harga komoditas. Untuk merespons tantangan strategis ini, Indonesia mesti mengoptimalkan kebijakan fiskal, mempercepat reformasi struktural, mendorong kolaborasi dengan negara lain, dan memantau risiko perlambatan ekonomi global. Hal ini bertujuan sebagai upaya untuk meminimalkan dampak perlambatan ekonomi global bagi masyarakat.

Tantangan strategis berikutnya adalah disrupsi AI, terutama di bidang pendidikan. Jangan sampai, keberadaan AI ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti memperburuk ketidaksetaraan sosial atau meningkatkan ketergantungan pada teknologi. Karenanya, penerapan AI dalam pendidikan membutuhkan kesiapan yang komprehensif, termasuk dalam hal manajemen risiko. Salah satunya, implementasi AI berpusat pada manusia. Ini sangat penting untuk memastikan AI tidak mengganggu hak asasi atau memperkuat ketidaksetaraan sosial.

Penilaian kesiapan dalam implementasi AI juga harus mencakup analisis mendalam mengenai bagaimana AI akan berinteraksi dengan sistem

pendidikan yang sudah ada, serta identifikasi potensi hambatan yang mungkin muncul. Selain itu, penting untuk memiliki rencana manajemen risiko yang tanggap dan fleksibel, yang dapat menyesuaikan dengan perubahan dalam teknologi dan lingkungan pendidikan. Lembaga pendidikan dapat bermitra dengan pakar teknologi dan organisasi kebijakan untuk mengembangkan pendekatan manajemen risiko yang solid.

Indonesia juga dihadapkan pada tantangan terbatasnya waktu pemanfaatan bonus demografi yang diperkirakan akan berakhir pada tahun 2041. Jika tidak dioptimalkan, hal ini dapat menimbulkan permasalahan seperti penurunan partisipasi angkatan kerja, peningkatan pengangguran, dominasi sektor informal, kurangnya perlindungan finansial bagi penduduk usia tua, serta kualitas pendidikan yang masih memerlukan penguatan.

Untuk memitigasi risiko tersebut, pemerintah perlu mengimplementasikan strategi yang mencakup pengendalian angka kelahiran, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pemerataan manfaat bonus demografi antarwilayah, peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja, serta penyediaan perlindungan finansial yang memadai bagi penduduk usia lanjut. Dengan demikian, bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan nasional.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia sebesar 0,77% per tahun, yaitu kemajuan signifikan dalam kualitas hidup masyarakat, yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan pendapatan). Hal ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, yang pada gilirannya akan mendukung daya saing global negara ini. Salah satu peluang terbesar adalah proyeksi bahwa pada tahun 2045, sekitar 65% dari populasi Indonesia akan berada dalam kelompok usia produktif (Asian Productivity Organization, APO Productivity Databook 2024). Ini berarti Indonesia akan memiliki potensi demografis yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, jika dikelola dengan baik melalui peningkatan keterampilan dan pendidikan.

Namun, ada tantangan yang tak kalah besar. Meskipun kemajuan IPM memberikan optimisme, laju pertumbuhan Produktivitas Faktor Total (TFP)

Indonesia menunjukkan stagnasi (Asian Productivity Organization, APO Productivity Databook 2024). Hal ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya investasi di sektor riset dan pengembangan (R&D), yang sangat penting untuk mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas di berbagai sektor industri. Tanpa investasi yang cukup dalam R&D, Indonesia berisiko kehilangan daya saing dalam era globalisasi yang semakin mengedepankan teknologi dan inovasi.

Untuk memanfaatkan peluang yang ada (lihat Gambar 15), Indonesia harus fokus pada pengembangan keterampilan sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan, serta meningkatkan investasi di sektor R&D untuk merangsang inovasi yang dapat mendorong produktivitas di semua sektor. Jika tantangan ini dapat diatasi, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saingnya di tingkat global.

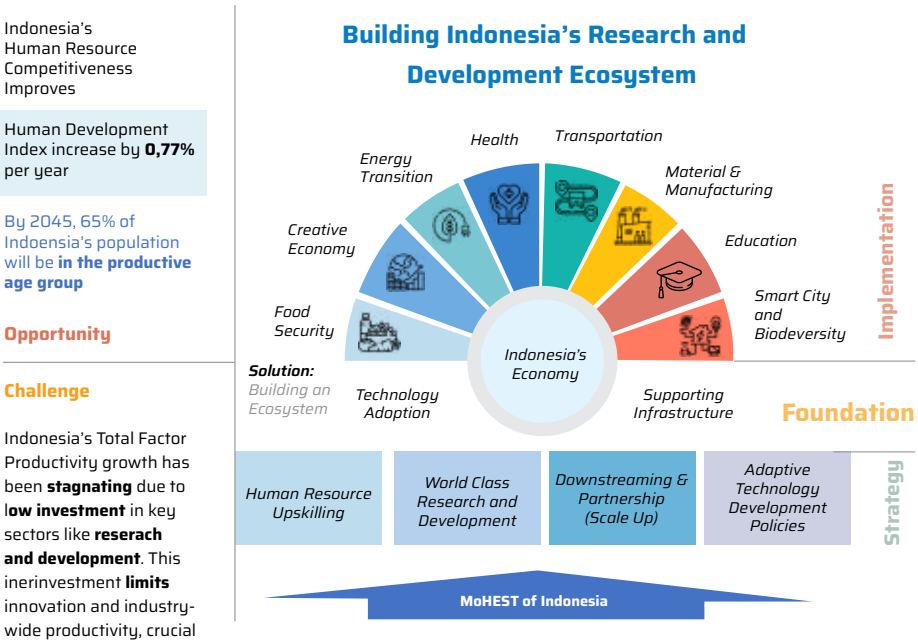

Gambar 15. Peluang dan Tantangan Ekosistem Riset di Indonesia

4.2 Urgensi Riset Respons Tantangan Strategis Bangsa

Selain dihadapkan pada berbagai tantangan strategis global, Indonesia juga menghadapi permasalahan terkait ketahanan pangan. Sebagai negara agraris, sektor pertanian memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2020, Indonesia memiliki wilayah daratan seluas 1,92 juta kilometer persegi atau sekitar 1,3 persen dari luas lahan dunia.

Namun, berdasarkan data Global Food Security Index (GFSI) tahun 2021 (EUI, 2021), indeks ketahanan pangan Indonesia tahun 2021 berada pada level 59,2, menurun dari tahun sebelumnya 2020 di level 59,5. Indeks tersebut menjadikan ketahanan pangan Indonesia tahun 2021 berada pada peringkat ke-69 dari 113 negara.

Dalam kaitannya dengan infrastruktur pertanian pangan, menurut GFSI, Indonesia masih di bawah rata-rata global. Demikian pula dengan keragaman makanan pokok dan standar nutrisi yang dinilai rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), impor gandum Indonesia tahun 2021 mencapai 11,2 ribu ton dengan nilai total US$ 3,4 miliar. Dari jumlah tersebut, seberat 4.626,4 ton diimpor dari Australia dengan nilai US$ 1,4 miliar.

Dengan kondisi tersebut, pemenuhan kebutuhan bahan pokok dan penguatan ketahanan pangan menjadi agenda yang semakin mendesak bagi Indonesia. Terlebih, jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tersebar luas di wilayah geografis yang heterogen menuntut adanya sistem ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendorong penguatan ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan, diperlukan riset dan inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas sektor pangan, baik dalam aspek produksi primer maupun pengolahan hasil pertanian. Sektor pangan harus menjadi prioritas riset nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045.

Kemdiktisaintek mendukung penguatan program ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia yang berkelanjutan. Salah satu bentuk implementasinya

adalah dengan melakukan intervensi melalui skema pendanaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian.

Kemdiktisaintek juga berkomitmen mendukung pengembangan kapasitas perguruan tinggi agar mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas riset serta pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program hibah. Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia industri terus didorong untuk mempercepat hilirisasi hasil riset yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing bangsa, serta mendorong kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan.

Upaya tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan bahwa pendidikan tinggi bertujuan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora untuk kemajuan bangsa, peradaban, serta kesejahteraan umat manusia. Pendidikan tinggi juga dituntut untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penalaran dan hasil penelitian untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemdiktisaintek memiliki tugas dalam merumuskan, mengoordinasikan, serta menyinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan pengembangan. Kemdiktisaintek akan terus mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

4.3 Wujudkan Asta Cita melalui Riset dan Pengembangan

Salah satu tujuan utama Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan adalah memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kemdiktisaintek mendukung penuh tujuan tersebut dan berperan strategis dalam mendorong hilirisasi dan industrialisasi hasil riset guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Peran strategis perguruan tinggi dalam menguatkan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) akan menjadi modal investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu terus didorong dan difasilitasi agar mampu menghasilkan talenta-talenta unggul di bidang penelitian. Penelitian di perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan invensi dan inovasi teknologi yang tepat guna, bernilai tambah, serta berpotensi untuk di hilirisasi sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan industri dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Secara umum tujuan riset di perguruan tinggi meliputi:

a) menghasilkan riset sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b) menjamin pengembangan riset unggulan spesifik;
c) meningkatkan kapasitas riset;
d) mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil riset bagi masyarakat Indonesia;
e) memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
f) meningkatkan diseminasi hasil riset dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional;
g) melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; serta
h) melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

4.4 Kawal Delapan Program Hasil Terbaik Cepat

Kemdiktisaintek turut mengawal langsung penelitian yang mendukung Delapan Program Hasil Terbaik Cepat yang menjadi perhatian khusus Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu program prioritas tersebut adalah pencetakan dan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui pengembangan lumbung pangan di tingkat desa, daerah, hingga nasional. Peningkatan produktivitas lahan pertanian ini dilaksanakan melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan sebagai bagian dari upaya strategis untuk mencapai swasembada pangan nasional.

Pelaksanaan program ini diterapkan secara terpadu di berbagai tingkatan, mulai dari level desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga nasional, dengan menitikberatkan pada komoditas utama seperti padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Program tersebut ditargetkan mampu menambah luas panen tanaman pangan hingga minimal 4 juta hektare pada tahun 2029. Dengan tambahan luas panen tersebut, produksi padi diproyeksikan meningkat minimal 20 juta ton (dengan asumsi produktivitas lahan sebesar lima ton per hektare), atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan asumsi rendemen 50 persen).

Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2020, Indonesia memiliki total wilayah daratan seluas 1,92 juta kilometer persegi, atau sekitar 1,3 persen dari total luas lahan dunia. Luas wilayah ini menjadikan Indonesia masuk ke dalam jajaran 15 negara dengan wilayah daratan terluas di dunia, bersama Rusia, Kanada, Tiongkok, Amerika Serikat, India, dan Meksiko.

Dalam mendukung pencapaian Delapan Program Hasil Terbaik Cepat, riset di bidang pangan menjadi prioritas, khususnya pada aspek budi daya dan optimalisasi pemanfaatan lahan. Kemdiktisaintek berkomitmen mendukung upaya ini melalui pendanaan BOPTN Penelitian, yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta. Diharapkan dukungan riset ini dapat mendorong lahirnya inovasi dan teknologi yang berkontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian serta penguatan ketahanan pangan nasional.

4.5 Pergeseran Paradigma Pendidikan Tinggi

Dalam paradigma transformasional pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pendidikan tinggi dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Penelitian dan pengembangan juga diarahkan untuk menghasilkan akuisisi serta transfer pengetahuan dan teknologi baru yang dapat dimanfaatkan oleh dunia industri serta menjadi solusi dalam menjawab permasalahan di tengah masyarakat. Pada akhirnya, hasil penelitian dan pengembangan diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi, mencakup pengentasan kemiskinan, swasembada pangan, swasembada energi, subsidi tepat sasaran, dan hilirisasi komoditas, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 16.

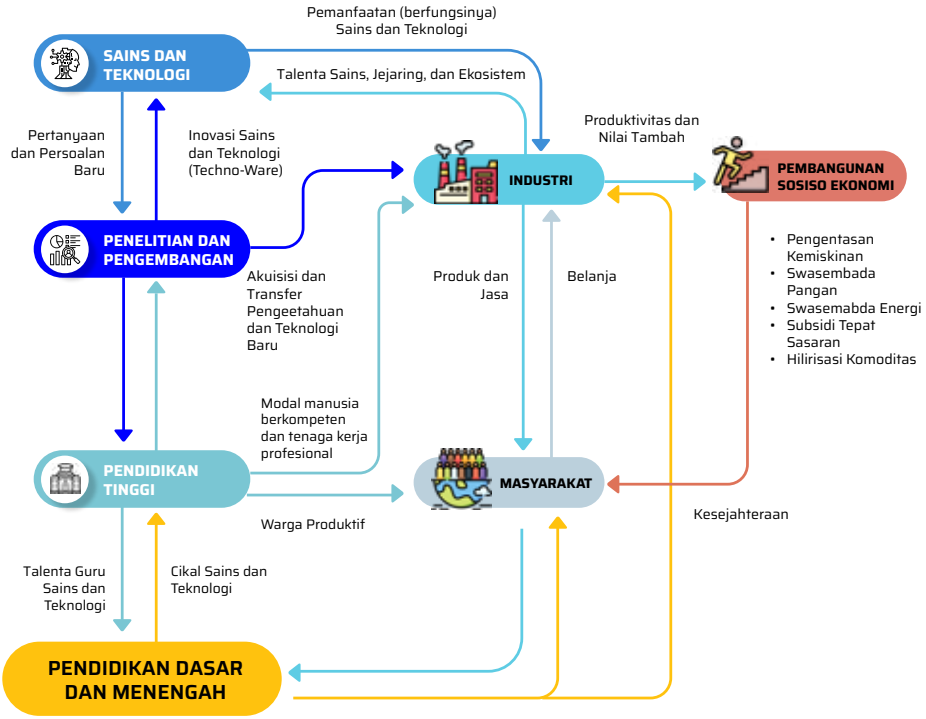

Gambar 16. Paradigma Transformasional Pendidikan Tinggi

Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi, peranan perguruan tinggi menjadi sangat penting sebagai agen transformasi pengetahuan di tengah masyarakat. Peranan tersebut diwujudkan melalui riset dan pengembangan yang dilakukan Kemdiktisaintek, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (digital) sebagai instrumen pendukung. Sinergi antara riset, pengembangan, dan digitalisasi diharapkan mampu mempercepat proses penciptaan inovasi untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana tergambar pada Gambar 17.

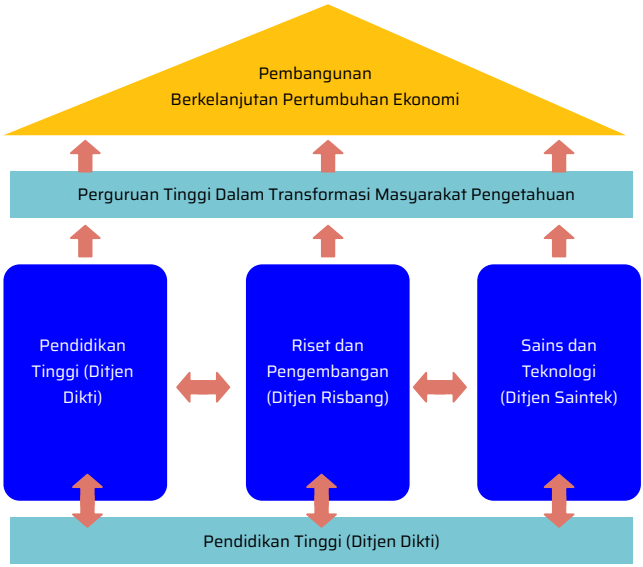

Gambar 17. Peranan Kemdiktisaintek dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Pertumbuhan Ekonomi

Peran Kemdiktisaintek dalam membangun masyarakat pengetahuan serta mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan adalah dengan menyelenggarakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Susunan organisasi Kemdiktisaintek yang berkaitan dengan pendidikan tinggi serta sains dan teknologi meliputi:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
3. Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi, dengan menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi vokasi dan pendidikan tinggi akademik;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi vokasi dan pendidikan tinggi akademik;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kompetensi vokasional, dosen vokasi, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan tinggi vokasi;
- pelaksanaan kemitraan dan penyelarasan Pendidikan tinggi vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri;
- perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi dan pergururan tinggi akademik yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
- pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi vokasi dan pendidikan tinggi akademik; pelaksanaan pemantanan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan tinggi vokasi dan pendidikan tinggi akademik;
- pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan pengembangan, dengan menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan kebijakan di bidang riset dan pengembangan;
b) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan pengembangan;
c) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan pengembangan;
d) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan perulmusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sains dan teknologi, dengan menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan kebijakan di bidang sains dan teknologi;
b) pelaksanaan kebijakan di bidang sains dan teknologi;
c) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sains dan teknologi;
d) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4.6 Program Prioritas Riset dan Pengembangan

Salah satu fokus utama untuk mendukung program prioritas sesuai dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam sebagai upaya membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mewujudkan keadilan ekonomi.

Untuk itu, Kemdiktisaintek akan melakukan intervensi strategis untuk mendukung swasembada pangan. Fokus penelitian diarahkan pada aspek budidaya, pascapanen, pengolahan pangan, konsumsi pangan, serta penguatan kebijakan dan regulasi di bidang pangan.

Di sektor energi, Kemdiktisaintek memberikan perhatian khusus pada pendanaan penelitian di bidang energi terbarukan, energi tak terbarukan, hybrid energi terbarukan-tak terbarukan, penyimpanan energi (*energy storage*), energi dan lingkungan, peningkatan efisiensi energi, serta kelistrikan. Selain itu, aspek keamanan, keselamatan, serta pengelolaan limbah nuklir juga menjadi bagian penting dalam penelitian, guna mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang aman dan ramah lingkungan.

Pada bidang sumber daya air, selama ini penelitian cenderung berfokus secara terpisah pada air permukaan dan air tanah, seakan keduanya adalah entitas yang terpisah. Padahal, pemanfaatan salah satu sumber daya air tersebut dapat memengaruhi kuantitas dan kualitas sumber daya air lainnya. Interaksi antara air permukaan dan air tanah terjadi dalam berbagai bentuk, seperti sungai, danau, waduk, lahan basah, dan muara yang saling terhubung dengan sistem air tanah. Pemanfaatan air permukaan dapat mengurangi air tanah, begitu pula sebaliknya. Pencemaran air permukaan dapat menurunkan kualitas air tanah, dan sebaliknya pencemaran air

tanah berdampak pada kualitas air permukaan. Oleh karena itu, riset mengenai interaksi air permukaan dan air tanah menjadi sangat penting untuk mendukung pengelolaan sumber daya air yang terpadu, perumusan kebijakan berbasis bukti, serta pengembangan inovasi pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam 17 program prioritas, Kemdiktisaintek berkontribusi dalam pelaksanaan program hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam dan maritim untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang luas guna mewujudkan keadilan ekonomi. Dukungan ini diwujudkan melalui pendanaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian Dana Padanan (*Matching Fund* - MF).

Program BOPTN Penelitian MF dirancang untuk mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta institusi pemerintah. Program ini bertujuan untuk menghasilkan reka cipta yang inovatif dan solutif, mempercepat hilirisasi kepakaran dan produk inovasi, serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan nasional dan global.

Dalam menumbuhkan dan memperkuat budaya ilmiah di bidang riset dan pengembangan, Kemdiktisaintek memiliki enam program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui inovasi berbasis penelitian. Program-program ini meliputi:

a) Peningkatan talenta penelitian dan pengembangan;
b) Penguatan penelitian dan pengembangan;
c) Peningkatan hilirisasi hasil penelitian dan kerja sama DUDI;
d) Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (STP);
e) Pengembangan kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat; dan
f) Penguatan pengabdian kepada masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Gambar 18, yang menggambarkan bagaimana berbagai elemen dalam ekosistem riset dan pengembangan saling terhubung untuk menciptakan sinergi yang berkelanjutan. Dalam skema ini, pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta program Kedaireka, yang menjembatani dunia akademik dengan industri.

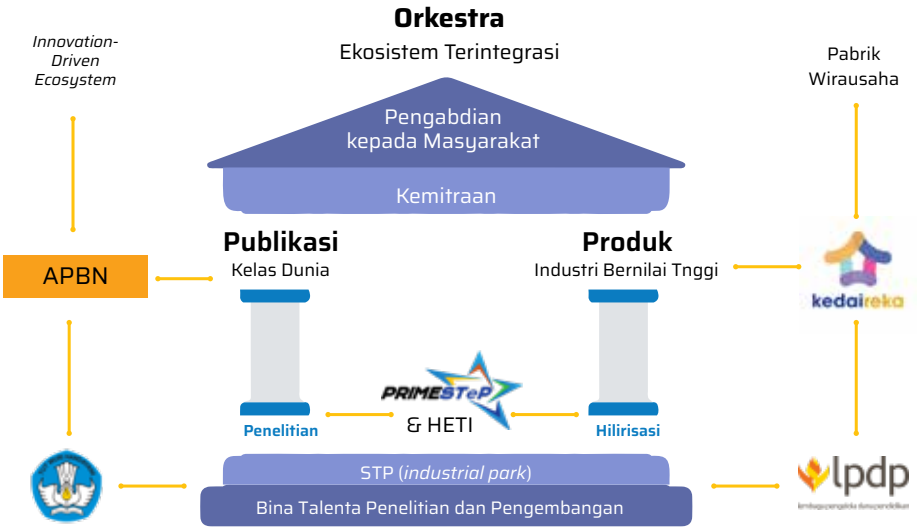

Gambar 18. Skema Ekosistem Terintegrasi Riset dan Pengembang

4.7 Capaian 120 Hari Kerja dan Rencana Jangka Pendek di Bidang Riset dan Pengembangan

Dalam kurun waktu 120 hari kerja pertama, Kemdiktisaintek telah melaksanakan berbagai program kerja secara optimal serta mencatatkan sejumlah capaian penting di bidang riset dan pengembangan. Sejalan dengan capaian tersebut, perencanaan strategis untuk program kerja ke depan telah ditetapkan secara cermat guna memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja di bidang riset dan pengembangan.

1) Platform Digital Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan

Saat ini, pemantauan terhadap kinerja utama penelitian, khususnya terkait publikasi ilmiah dan jurnal, telah didukung oleh beberapa sistem informasi yang digunakan secara nasional. Adapun sistem informasi yang dimaksud meliputi:

a) Science and Technology Index (Sinta);
b) Sistem informasi Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna);
c) Garba Rujukan Digital (Garuda).

Ketiga platform tersebut menjadi instrumen utama yang dimanfaatkan oleh para dosen dan tenaga profesional di bidang penelitian untuk pengembangan kompetensi serta pemantauan capaian kinerja penelitian.

Sebagai bagian dari langkah strategis, telah dirumuskan rencana pengembangan platform digital terpadu yang akan mengintegrasikan ketiga sistem tersebut dalam satu kesatuan ekosistem digital. Platform terpadu ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sistem indeksasi kinerja nasional bagi peneliti, sebagaimana yang selama ini dijalankan melalui Sinta. Namun demikian, pengembangan platform ini tidak hanya berorientasi pada aspek kuantitatif semata (jumlah publikasi, penelitian, paten, dan sebagainya), melainkan juga mencakup aspek kualitatif dengan menghadirkan fitur visualisasi berupa foto, video, serta narasi singkat terkait hasil penelitian dan inovasi yang dihasilkan.

Lebih jauh, platform ini akan dilengkapi dengan fitur interaktif yang memungkinkan kolaborasi dan komunikasi langsung antara peneliti dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pelaku industri, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan hadirnya platform ini, diharapkan berbagai manfaat strategis dapat dicapai, antara lain:

a) meningkatkan kolaborasi transdisiplin antar peneliti untuk mempercepat inovasi;
b) meningkatkan visibilitas hasil penelitian, guna memperluas peluang kerja sama dengan sektor industri maupun pemerintah;
c) membantu peneliti dalam mendiseminasikan hasil risetnya dengan cara yang lebih menarik dan interaktif;
d) memotivasi calon peneliti untuk berpikir kreatif dan menghasilkan inovasi baru;
e) meningkatkan transparansi dan aksesibilitas penelitian bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya; serta
f) mempercepat hilirisasi hasil penelitian dengan mempertemukan peneliti dan industri melalui satu platform digital; dan
g) mendorong semangat peneliti dalam memecahkan berbagai permasalahan nyata melalui riset yang lebih berdampak.

Untuk mewujudkan pengembangan platform ini, beberapa langkah strategis yang dilakukan dalam jangka pendek meliputi:

a) Evaluasi sistem informasi penelitian yang saat ini digunakan secara nasional, khususnya Sinta, Arjuna, dan Garuda;

b) Identifikasi kebutuhan pengguna (*user needs assessment*) melalui diskusi dengan peneliti, industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
c) Penyusunan draf (*draft)* rencana pengembangan platform digital untuk diseminasi hasil penelitian dan inovasi, sebagai bentuk pengembangan dan integrasi dari sistem yang telah ada.

2) Riset Prioritas

Kemdiktisaintek melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan telah memberikan pendanaan penelitian ke perguruan tinggi sebanyak 12.808 judul dengan total pendanaan sekitar 1 triliun rupiah. Alokasi dana penelitian tersebut juga mendukung topik-topik riset prioritas sesuai arahan Presiden Republik Indonesia di antaranya: teknologi nano satelit, ketahanan pangan, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial untuk mendukung kemandirian kesehatan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan dan akurasi diagnosis.

Beberapa capaian 120 hari kerja pertama yang telah dilaksanakan, sebagai berikut:

a) Evaluasi dan Revisi Juknis: Klasterisasi vokasi dan akademik;
b) Penyusunan Juknis Penelitian BIMA;
c) Penarikan data laporan akhir penelitian dan luaran penelitian;
d) Diskusi riset prioritas Nano-Satelit dan AI, Ketahanan Pangan, dan *AI in Health*; serta
e) Rasionalisasi dan efisiensi anggaran riset dan pengembangan 2025.

Beberapa luaran dari capaian 120 hari kerja pertama yang telah dilaksanakan berupa:

a) Daftar klasterisasi perguruan tinggi akademik dan vokasi tahun 2025.
b) Buku petunjuk teknis dan panduan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang telah terbarukan tahun 2025.
c) Dokumen laporan akhir dan daftar luaran penelitian tahun 2024 sebagai dasar untuk melakukan evaluasi.

d) Ringkasan arah pengembangan riset prioritas selanjutnya, kendala-kendala yang dihadapi serta rencana aksi selanjutnya.
e) Dokumen penyesuaian program kerja dan hasil riset dan pengembangan yang berbasis skala prioritas, kualitas dan pemerataan.

Selain itu, program jangka pendek untuk Riset Prioritas ke depan sudah tersusun, di antaranya:

a) validasi luaran penelitian tahun 2024;
b) pembukaan proposal dengan topik sesuai prioritas nasional saat ini yaitu: ketahanan pangan, ketahanan air, kecerdasan artifisial/ AI, teknologi informasi dan komunikasi/TIK (*information and communication technology*/ICT) dan otomasi, energi baru dan terbarukan, kesehatan;
c) peningkatan kapasitas riset;
d) penetapan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas jurnal ilmiah, terutama yang berada di institusi pendidikan, instansi pemerintahan lain, dan lembaga-lembaga non-komersial yang mengelola jurnal-jurnal terakreditasi tersebut;
e) pelatihan penulisan artikel ilmiah;
f) pengembangan sistem-sistem yang mendukung peningkatan kualitas jurnal ilmiah; serta
g) pembentukan sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan jurnal dan publikasi ilmiah berkualitas.

3) Program Pendanaan Bersama Penelitian (*Co-Funding Research*) LPDP

Program Pendanaan Riset Pembangunan Berkelanjutan (PRPB) merupakan program bersama antara Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek dengan Direktorat Fasilitasi Riset, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Program tersebut dimulai sejak 2024. Kegiatan ini untuk memfasilitasi penelitian yang berkelanjutan, bagi peneliti di lingkungan Perguruan Tinggi melalui sinergi yang baik antara Kemdiktisaintek dan LPDP. Program ini bertujuan untuk:

a) membangun landasan ekosistem penelitian di perguruan tinggi;
b) meningkatkan kualitas dan kapasitas penelitian di perguruan tinggi melalui kerja sama penelitian dalam dan luar negeri dalam

konsorsium keilmuan, keterlibatan aktif dalam menyelesaikan tantangan global, penguatan jejaring para periset di Indonesia, dan pendanaan penelitian yang bersifat inklusivitas;

c) membangun sinergi yang optimal melalui tata kelola yang cemat dan bertanggung jawab antara K/L teknis yang membidangi bidang Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Bersama Lembaga yang mengelola Dana Abadi di bidang Pendidikan dalam Program Riset Pembangunan Berkelanjutan (PRPB);
d) menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pendanaan dan pelaksanaan program pendanaan penelitian yang berkelanjutan; serta
e) membangun rekam jejak penelitian yang berkelanjutan bagi peneliti di lingkungan Perguruan Tinggi.

Adapun Kegiatan Pendanaan Penelitian terkait akan terdiri dari empat Kategori Pendanaan, yakni:

a) Riset Prioritas Nasional, pelaksanaan skema pendanaan untuk riset yang bersifat konsorsium pada Perguruan Tinggi Negeri pada bidang yang menjadi Prioritas Nasional Kegiatan strategis nasional;
b) Riset Kolaborasi, Kolaborasi Dalam Negeri/Luar Negeri, Riset Dalam Negeri atau Luar Negeri merupakan pelaksanaan pendanaan untuk riset kegiatan yang bersifat kolaboratif, baik antar-Perguruan Tinggi Dalam Negeri (PTDN) atau dengan Perguruan Tinggi Asing (PTA Luar Negeri (PTLN) dan/atau Lembaga Penelitian Asing lainnya lembaga riset dalam negeri maupun luar negeri;
c) Riset Kolaborasi PT – Kerja Sama Perguruan Tinggi dengan Industri, Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah merupakan skema pendanaan riset yang bersifat kolaboratif. Program ini mendorong kerja sama antara Perguruan Tinggi Dalam Negeri (PTDN) dengan industri, yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan mitra industri serta didukung oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhannya. Riset ini terdiri dari dua skema, yaitu riset kolaborasi dengan industri dan riset kolaborasi dengan pemerintah daerah;
d) Riset Inklusivitas, merupakan program pendanaan yang bertujuan untuk memberikan pemerataan kesempatan dalam melakukan

penelitian berkualitas bagi para peneliti. Program ini ditujukan bagi perguruan tinggi di wilayah Indonesia Timur, perguruan tinggi swasta, dan/atau perguruan tinggi selain Perguruan Tinggi Dalam Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Riset Inklusivitas mulai dilaksanakan sejak Oktober 2024 dengan tiga skema utama.

Untuk memastikan pendanaan bersama penelitian LPDP berjalan optimal, beberapa hal yang telah disusun untuk rencana jangka pendek, yakni:

a) pelaksanaan penelitian yang dananya telah dicairkan pada akhir tahun 2024;
b) pencairan dana penelitian tahap kedua;
c) monitoring pelaksanaan;
d) persiapan undangan proposal (*call for proposal*) untuk pendanaan bersama penelitian tahun 2025: serta
e) penyusunan panduan proposal KONEKSI (kerja sama antara Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT Australia dengan Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek).

4) Program Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi PRIME STeP

Promoting Research and Innovation through Modern and Efficient Science and Technology Parks Project (PRIME STeP) merupakan program yang mendukung strategi pemerintah dalam mengkomersialisasikan penelitian dan pengembangan (R&D) serta meningkatkan keberhasilan inkubasi *startup* di 4 (empat) *Science* and *Technology Park* (STP).

Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (*Science Technology Park* / STP) merupakan salah satu langkah strategis dalam mendorong hilirisasi hasil riset dan teknologi untuk dapat segera dimanfaatkan sepenuhnya dalam proses industrialisasi. Program pengembangan STP ini sejalan dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam Proyek Prioritas Nasional *(Major Project)* RPJMN 2020-2024, pengelolaan Kawasan Sains dan Teknologi (*Science Technology Park*, STP) dilaksanakan oleh empat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yaitu STP Universitas Indonesia (STP-UI), STP Institut Teknologi Bandung

(STP-ITB), STP Institut Pertanian Bogor (STP-IPB), STP Universitas Gadjah Mada (STP-UGM). Setiap STP memiliki fokus pengembangan sesuai dengan keunggulan dan karakteristik perguruan tinggi bersangkutan.

Fokus utama pengembangan STP adalah sebagai berikut.

a) Institut Teknologi Bandung (ITB): Teknologi Cerdas & Konektivitas Digital yang meliputi kecerdasan artifisial, internet untuk segala *(internet of things)*, realitas virtual *(virtual reality)*, jaringan 5G, dan mahadata *(big data)*; Rekayasa Transportasi dan Energi; Infrastruktur dan Kebencanaan; dan Pangan dan Kesehatan.
b) Universitas Gadjah Mada (UGM): Kedaulatan farmasi dan alat kesehatan termasuk di dalamnya alat kesehatan, pangan sehat, fitofarmaka, Bahan Baku Obat (BBO), dan pangan sehat; Peningkatan produktivitas agribisnis dan agro industri berbasis perkebunan; Rekayasa bioproses dan bioteknologi; serta Energi baru dan terbarukan.
c) Institut Pertanian Bogor (IPB): Pertanian tropika; Teknologi pangan; Biosains; Kelautan; dan Pembangunan gedung halal.
d) Universitas Indonesia (UI): Rekayasa teknik (energi baru terbarukan, transportasi, kecerdasan artifisial, bangunan maju; alat kesehatan (implan tulang, implan gigi, vaksin, sel punca); serta obat herbal terpadu dan pangan fungsional.

Rencana kerja jangka pendek yang telah dilakukan untuk optimalisasi PRIME STeP, diantaranya:

a) Evaluasi kegiatan PRIME STeP Tahun 2023 dan 2024;
b) Persiapan revisi juknis kegiatan PRIME STeP 2025 berdasarkan hasil evaluasi;
c) Persiapan perubahan orientasi dan hasil (*output*) kegiatan PRIME STeP 2025 berdasarkan hasil evaluasi;
d) Pencairan dana luncuran PRIME STeP tahun 2024 agar dapat digunakan pada Tahun Anggaran 2025;
e) Penguatan kelembagaan di Sekretariat PRIME STeP;
f) Penguatan kelembagaan di keempat STP;
g) Pemilihan dan kontrak konsultan untuk pendampingan kegiatan PRIME STeP; dan
h) Persiapan draf Peraturan Menteri mengenai STP.

5) Hilirisasi dan Kemitraan

Dalam melaksanakan tugas di bidang hilirisasi dan kemitraan, Kemdiktisaintek berperan dalam perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan pada perguruan tinggi akademik, vokasi, dan profesi. Hilirisasi dipahami secara luas sebagai proses pengembangan dan penerapan hasil riset atau inovasi dari perguruan tinggi ke dalam industri atau masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, atau solusi yang memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan masyarakat.

Selain itu, fasilitasi kerja sama antara perguruan tinggi (termasuk unit kerja/usaha di dalamnya) dengan mitra industri, baik di dalam maupun luar negeri, terus diupayakan untuk mendukung pengembangan usaha (*scaling up*) yang bersumber dari komersialisasi produk/layanan hasil riset dan pengembangan.

Sebelum merancang kebijakan baru untuk memperkuat hilirisasi R&D di perguruan tinggi, telah dilakukan evaluasi dan inventarisasi permasalahan yang selama ini dihadapi melalui berbagai pertemuan dengan akademisi, komunitas usaha mula, serta industri besar. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi meliputi:

a) Masih perlunya penguatan ekosistem inkubasi hasil inovasi menjadi usaha mula, khususnya terkait kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia pendukung, desain program inkubasi yang tepat, serta peningkatan interaksi dan kolaborasi antarpelaku di dalam dan antarekosistem inkubasi;
b) Perlunya menjembatani kesenjangan pembiayaan usaha mula, yang mana inkubasi membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan usaha mula belum mampu membiayai sendiri;
c) Ekosistem pendanaan tahap awal (pra-modal/*pre-seed* dan modal awal/*seed*) masih terbatas; dan
d) Perlunya meningkatkan peranan industri sebagai pihak yang menyerap hasil *(off-taker)* hilirisasi R&D perguruan tinggi.

Berdasarkan evaluasi tersebut, telah disusun sejumlah subprogram dalam program prioritas hilirisasi hasil penelitian. Kemdiktisaintek berperan sebagai orkestrator dalam penciptaan nilai bersama (*value co-creation*) oleh para

pemangku kepentingan di dalam hilirisasi riset dan pengembangan (R&D). Kemdiktisaintek melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan akan membuat kebijakan dan melakukan fasilitasi pelaksanaan kebijakan untuk mendorong interaksi antara inovator dan usaha mula (subsistem penyedia/ *supply*) di perguruan tinggi dengan industri dan masyarakat (subsistem pengguna/*demand*), melalui kerja sama dengan pelaku lain dalam ekosistem inkubasi dan pengembangan *(scaling up)* hasil inovasi, seperti inkubator, akselerator, modal ventura *(venture capital)*, dan lain-lain.

Hal ini sebagaimana tergambar dalam Gambar 19 sebagai berikut.

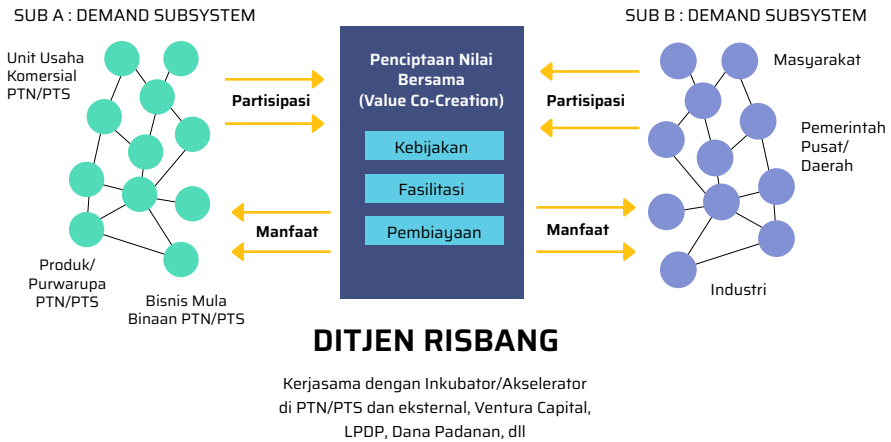

Gambar 19. Kemdiktisaintek sebagai Orkestrator Penciptaan Nilai Bersama (*Value Co-creation*) Hilirisasi R&D Perguruan Tinggi

Beberapa subprogram yang dirancang dalam program prioritas peningkatan hilirisasi hasil penelitian dan penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan industri meliputi:

- **Kebijakan dan Fasilitasi Pengembangan Produk Pra Komersial**

  Penyusunan kebijakan dan fasilitasi diberikan kepada perguruan tinggi dalam pengembangan produk pra-komersial yang memiliki potensi untuk dikomersialisasikan. Selain itu, perguruan tinggi difasilitasi untuk dapat menguji produk melalui kerja sama dengan industri atau komunitas yang memiliki kapasitas pengujian produk berbasis riset

- **Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Transfer Teknologi**

  Dukungan terhadap pembentukan dan penguatan Kantor Alih Teknologi *(Technology Transfer Office*/TTO*)* di perguruan tinggi terus dilakukan. TTO memiliki peran strategis dalam pengelolaan, perlindungan, dan komersialisasi inovasi. Komersialisasi hasil inovasi peneliti tidak harus dilakukan secara mandiri, melainkan dapat bekerja sama melalui lisensi atau model kemitraan lainnya dengan wirausaha atau industri yang memiliki kapasitas produksi dan distribusi lebih optimal.

- **Penguatan Ekosistem Inkubasi dan Akselerasi Bisnis**

  Penguatan ekosistem inkubator dan akselerator bisnis di lingkungan pendidikan tinggi terus didorong. Inkubator menyediakan fasilitas, pelatihan, mentoring, serta akses pendanaan untuk mendukung pengembangan usaha berbasis riset oleh dosen dan mahasiswa. Akselerator berperan dalam mempercepat pertumbuhan usaha mula yang telah memiliki produk, layanan, atau model bisnis yang jelas. Setelah usaha mampu berkembang dan memiliki pendapatan yang stabil, pemisahan usaha *(spin-off)* dilakukan agar usaha dapat beroperasi secara mandiri.

- **Pendanaan dan Kemitraan Strategis**

  Upaya mendorong diperolehnya pendanaan lanjutan dari investor, modal ventura (pra-modal, modal awal), hibah pemerintah, serta kemitraan dengan industri besar terus dilakukan untuk memperkuat kapasitas produksi usaha mula yang telah terbukti layak dikembangkan. Kolaborasi ini diharapkan memperluas akses pasar dan mempercepat ekspansi produk ke pasar yang lebih luas.

  Dalam pelaksanaan program tersebut, telah disusun dan dilaksanakan sejumlah rencana aksi jangka pendek sebagai berikut:

  a) finalisasi penempatan sumber daya manusia kementerian;
  b) evaluasi program dana padanan (*matching fund*) BOPTN yang telah berjalan untuk revitalisasi supaya lebih efektif;

c) identifikasi dan pembangunan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait proses hilirisasi;
d) merancang kebijakan pemberdayaan kawasan sains dan teknologi (STP) sebagai hub hilirisasi perguruan tinggi dan interaksi dengan industri; dan
e) perancangan skema pendanaan baru bersama LPDP untuk memfasilitasi hilirisasi.

6) Program Dana Padanan Kerja Sama Perguruan Tinggi dengan Industri

Program Dana Padanan merupakan skema pendanaan yang dirancang untuk memperkuat sinergi antara riset dan inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Melalui mekanisme pendanaan bersama, program ini mendukung penelitian yang diarahkan untuk menjawab tantangan nasional, meningkatkan kapasitas industri, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Inisiatif ini menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang menitikberatkan pada kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2021, Kedaireka hadir sebagai platform ekosistem riset dan inovasi yang memfasilitasi kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri. Platform ini berperan mengorkestrasi proses inovasi, mulai dari pengembangan ide, hilirisasi hasil riset, hingga peningkatan skala produksi. Kehadiran Kedaireka mendukung agenda strategis nasional, sekaligus menjadi katalis dalam memperkuat daya saing ekonomi, mendorong kemandirian teknologi, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan Program Dana Padanan Kelompok 1 Tahun 2025, proses administrasi telah diselesaikan selama periode pembukaan 1-31 Oktober 2024, dengan menghasilkan 436 proposal. Saat ini, Kelompok 1 masih berada pada tahap pending dan memerlukan tindak lanjut agar seluruh proses dapat segera diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Di sisi lain, Kedaireka sebagai aset strategis pemerintah dalam mengorkestrasi inovasi nasional terus menunjukkan perkembangan positif. Sejak 2021 hingga saat ini, platform tersebut telah mencatat

partisipasi sebanyak 32.088 pengguna dari perguruan tinggi dan 13.568 pengguna dari kalangan industri. Selain itu, capaian yang telah dihasilkan meliputi lebih dari 19 ribu inisiatif Kreasi Reka dan 10 ribu Peluang Cipta.

Sebagai langkah akselerasi pelaksanaan Program Dana Padanan, telah disusun rencana kerja jangka pendek yang mencakup:

a) Tindak Lanjut PDP Kelompok 1 2025 (enam minggu pelaksanaan);
b) Peningkatan dan Perluasan Ruang Lingkup Kedaireka: Penyusunan adendum juknis (8 minggu pelaksanaan), pembentukan tim dan skema swakelola Tim Manajemen Proyek/PMO (delapan minggu pelaksanaan), dan perencanaan mekanisme seleksi tim penilai; dan
c) Persiapan Kelompok Afirmasi Strategis: Penyusunan juknis, penyusunan skema pendampingan dan pelaksanaan paralel.

7. Pengabdian kepada Masyarakat

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencarikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, terus dioptimalkan melalui penguatan di berbagai lini. Komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat tercermin dalam sejumlah langkah yang telah ditempuh selama 120 hari kerja pertama, antara lain:

a) Klasterisasi perguruan tinggi berbasis SINTA (Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik);
b) Penyusunan Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian TA 2025;
c) Penarikan data laporan akhir pengabdian tahun 2024;
d) Validasi Luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat Pelaksanaan Tahun 2023; dan
e) Rasionalisasi dan efisiensi anggaran Risbang 2025.

Sebagai bagian dari upaya penguatan kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan nasional, program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke depan diarahkan untuk mendukung pencapaian 8 Asta Cita melalui Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi

(BOPTN). Dukungan diarahkan pada Asta Cita ke-2 (swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi baru), Asta Cita ke-5 (hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri), serta Asta Cita ke-6 (pembangunan desa dan pemberantasan kemiskinan).

Adapun Program Pengabdian kepada Masyarakat yang akan dilaksanakan pada 2025 sebagai berikut.

a) Program Pengabdian kepada Masyarakat Kompetitif Nasional

Program ini memfasilitasi kewajiban insan perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma. Paradigma yang diterapkan berorientasi pada penyelesaian masalah (*problem solving*), bersifat komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan, dengan melibatkan kolaborasi antara pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri. Hilirisasi produk penelitian menjadi aspek penting yang diutamakan agar hasil riset dapat diterapkan secara nyata dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Program ini terbagi dalam beberapa skema.

1) Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat

Membentuk dan mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial, membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (keterampilan nonteknis/ *soft skill* dan keterampilan teknis/*hard skill*), memberdayakan mitra dari kelompok masyarakat umum, kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi dan kelompok masyarakat yang belajar berwirausaha, mengubah pelaksanaan program dari paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan dengan konsep penciptaan bersama (*co-creation),* pembiayaan bersama *(co-financing)*, dan manfaat bersama *(co-benefit)*, hilirisasi hasil-hasil riset dosen yang dapat diterapkan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa, dan mengembangkan tema-tema Kuliah Kerja Nyata yang bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha/dunia industri.

2) Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan

Meningkatkan jejaring antara kewirausahaan perguruan tinggi dengan masyarakat industri dan lembaga lainnya, meningkatkan daya tarik produk/jasa unggulan kepada masyarakat luas/pasar, memperkuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)/Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar berkembang, dan memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya, mempercepat difusi teknologi dan manajemen dari masyarakat perguruan tinggi ke masyarakat industri, mengembangkan proses link and match antara perguruan tinggi, industri, Pemda dan masyarakat luas.

3) Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah

Mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada wilayah binaan, memberikan solusi permasalahan mitra dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin, membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan masalah kewilayahan, serta membantu mensukseskan terlaksananya program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat umum, masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi (Ibu Rumah Tangga (IRT), UKM/UMKM, dan kelompok usaha lainnya), pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan program lainnya sesuai kebutuhan wilayah, memperkuat sinergi perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan kewilayahan, dan membentuk kolaborasi keberdayaan di desa berbasis wilayah.

Program Pengabdian kepada Masyarakat akan terus diperkuat dengan pendekatan berbasis sinergi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah daerah guna mendukung misi Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini akan difokuskan pada peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM), skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK) dan Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW), yang diarahkan untuk menciptakan ekosistem inovasi yang inklusif

dan berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan hasil riset terapan dan teknologi tepat guna, program ini akan dikembangkan dalam sektor strategis seperti pertanian berbasis digital, energi terbarukan, serta industri kreatif berbasis kearifan lokal. Selain itu, digitalisasi program melalui *platform* BIMA akan terus ditingkatkan guna mempercepat proses seleksi, monitoring, dan evaluasi berbasis data. Target utama dalam satu tahun ke depan adalah memperluas cakupan program, menciptakan ekosistem kewirausahaan sosial yang mandiri, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi global melalui peningkatan keterampilan dan akses terhadap sumber daya inovatif.

4) Program Kosabangsa (Kolaborasi Sosial Membangun Masyarakat)

Program pemberdayaan masyarakat di perguruan tinggi ini diarahkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat berdasarkan analisis situasi, serta dilaksanakan oleh perguruan tinggi pelaksana berkolaborasi dengan perguruan tinggi pendamping. Konsep sinergi ini disebut sebagai suatu Kolaborasi Sosial Membangun Masyarakat (Kosabangsa).

Program Kosabangsa (Kolaborasi Sosial Membangun Masyarakat) yang merupakan wujud kontribusi nyata insan perguruan tinggi bagi bangsa, khususnya dalam pengembangan kesejahteraan dan kemajuan bangsa dengan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya.

Fokus Program Kosabangsa di perguruan tinggi adalah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan partisipasi penuh dari masyarakat yang melibatkan nilai-nilai pengetahuan, sosial, budaya, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang diselaraskan dengan keilmuan dari perguruan tinggi.

Tujuan dan manfaat Program Kosabangsa adalah sebagai berikut.

- Mewujudkan kolaborasi antara perguruan tinggi, mitra kerja

sama, dan pemerintah dalam meningkatkan daya saing bangsa, pengembangan SDM unggul melalui penerapan teknologi dan inovasi untuk penyelesaian permasalahan di masyarakat.

- Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi yang berada di wilayah prioritas Kosabangsa atau wilayah lain yang memenuhi kriteria daerah tertinggal, wilayah prioritas kemiskinan ekstrem, dan/atau wilayah rawan kebencanaan pada klaster madya, pratama, dan binaan untuk mendapatkan pendampingan dari perguruan tinggi klaster mandiri dan utama.
- Mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat dan tema Program Kosabangsa.
- Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan memberikan solusi permasalahan dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin.
- Adanya jejaring kerja sama perguruan tinggi dengan lembaga mitra kerja sama untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat akan memberikan nilai tambah.
- Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat umum, masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi (IRT, UKM/UMKM, kelompok usaha lainnya) dengan tema utama mengenai ketahanan pangan, kemandirian kesehatan, energi baru terbarukan, kemandirian ekonomi serta pariwisata; dan
- Memfasilitasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan memfasilitasi ketercapaian SDGs.

Ke depannya, Program Kosabangsa akan terus diperluas dan diperkuat guna mendukung misi Asta Cita dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berbasis inovasi. Dengan menargetkan lebih banyak daerah tertinggal, wilayah kemiskinan ekstrem, dan kawasan rawan bencana, program ini akan semakin mengedepankan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam menciptakan solusi nyata bagi permasalahan masyarakat.

Implementasi teknologi dan inovasi akan dioptimalkan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mempercepat kemandirian kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Keberlanjutan program juga akan diperkuat dengan optimalisasi pendanaan, termasuk dari sektor swasta dan lembaga filantropi, guna memastikan dampak jangka panjang yang lebih luas. Dengan pendekatan berbasis kolaborasi dan gotong royong, Kosabangsa akan terus menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan semangat inovasi dan kemandirian bangsa.

5) Program Diseminasi Teknologi dan Inovasi (PDTI)

Program ini merupakan skema yang dikembangkan dengan mempertimbangkan banyaknya teknologi dan inovasi hasil karya perguruan tinggi yang telah siap diterapkan di masyarakat, tetapi belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui PDTI, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ditjen Risbang, Kemdiktisaintek hadir sebagai upaya komprehensif untuk mengakselerasi proses hilirisasi produk teknologi dan inovasi hasil penelitian di perguruan tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat produktif secara ekonomi.

Bidang fokus utama yang akan ditangani adalah kemandirian ekonomi. PDTI difokuskan pada penyelesaian permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakat. Adapun bidang fokus kedua yang akan diselesaikan adalah terkait pangan, kesehatan dan obat, energi terbarukan, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, material maju, kemaritiman, kebencanaan, dan sosial humaniora.

Pada akhir program diharapkan dengan adanya diseminasi teknologi dan inovasi dari perguruan tinggi dapat dimanfaatkan dalam proses penyelesaian permasalahan di masyarakat, utamanya pada penyelesaian permasalahan ekonomi.

Tujuan dan manfaat Program Diseminasi Teknologi dan Inovasi adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan kolaborasi antara perguruan tinggi, mitra sasaran, dan pemerintah dalam meningkatkan daya saing bangsa, serta mengembangkan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui penerapan teknologi dan inovasi untuk penyelesaian permasalahan di masyarakat.
- Membentuk jaringan kolaborasi antara perguruan tinggi sebagai penghasil teknologi dan inovasi dan masyarakat sebagai pengguna teknologi dan inovasi.
- Mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat yang produktif secara ekonomi.
- Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.
- Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas maupun daya saing produk berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Program PDTI telah menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan misi Asta Cita, khususnya dalam penguatan ekonomi berbasis inovasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PDTI sebagai program dalam mempercepat hilirisasi hasil penelitian perguruan tinggi ke masyarakat melalui kolaborasi dengan sektor ekonomi produktif di pedesaan sejalan dengan visi pemerintahan yang menekankan peningkatan kemandirian ekonomi dan penguatan kapasitas teknologi dalam negeri, dengan menargetkan implementasi teknologi di sektor pangan, energi, kesehatan, dan sosial humaniora.

Program ini akan dioptimalkan dengan mendistribusikan teknologi unggulan dari perguruan tinggi kepada kelompok usaha masyarakat, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berdampak nyata dalam peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi lokal. Dengan langkah ini, PDTI tidak hanya mempercepat pemerataan teknologi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat, selaras dengan agenda pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran yang menitikberatkan pada keberlanjutan dan kedaulatan teknologi bangsa.

6) Program Diseminasi Inovasi Seni (PDIS)

Program Diseminasi Inovasi Seni (PDIS) merupakan skema yang dikembangkan dengan mempertimbangkan banyaknya inovasi seni hasil karya perguruan tinggi yang telah siap diterapkembangkan ke masyarakat. Melalui PDIS, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ditjen Risbang, Kemdiktisaintek hadir sebagai upaya komprehensif untuk akselerasi dan pengembangan inovasi seni dan budaya di perguruan tinggi.

PDIS berfokuskan pada penyelesaian permasalahan sosial dan humaniora yang ada di masyarakat dan peningkatan kualitas masyarakat. Indikator keberhasilan PDIS diwujudkan dengan adanya hilirisasi produk inovasi hasil penelitian di perguruan tinggi dan peningkatan aspek-aspek sosial di masyarakat. Adapun bidang fokus kedua yang akan diselesaikan adalah terkait pangan, kemandirian ekonomi, kesehatan dan obat, energi terbarukan, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, material maju, kemaritiman, dan kebencanaan. Pada akhir program diharapkan dengan adanya diseminasi inovasi seni dari perguruan tinggi sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses penyelesaian permasalahan di masyarakat, utamanya pada penyelesaian permasalahan sosial masyarakat dalam bidang seni dan budaya.

Tujuan dan manfaat PDIS ini adalah sebagai berikut.

- Mewujudkan kolaborasi antara perguruan tinggi, mitra sasaran, dan pemerintah dalam meningkatkan daya saing bangsa, mengembangkan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui penerapan dan pengembangan inovasi seni untuk penyelesaian permasalahan di masyarakat.
- Memperluas jaringan kolaborasi antar perguruan tinggi sebagai penghasil teknologi dan inovasi seni.
- Mengaplikasikan hasil karya seni unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat;
- Meningkatkan nilai sosial dan budaya di masyarakat; dan

- Memperkuat kelompok seni di masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas dan daya saing produk berbasis seni.

Ke depan, PDIS akan terus diperluas dengan memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, komunitas seni, dan pemerintah daerah guna memastikan keberlanjutan dampak inovasi seni terhadap pemberdayaan masyarakat. Program ini akan difokuskan pada peningkatan kapasitas kelompok seni melalui transfer teknologi, pelatihan berkelanjutan, serta pemanfaatan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam sektor ekonomi kreatif.

Selain itu, PDIS akan memperluas cakupan mitra sasaran dengan menjangkau lebih banyak desa adat dan kelompok seni tradisional agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat identitas budaya nasional. Dengan skema evaluasi yang lebih terukur, program ini juga akan mengoptimalkan publikasi ilmiah dan media massa untuk memperluas diseminasi hasil inovasi seni ke tingkat nasional maupun internasional. Kemdiktisaintek akan terus mendukung PDIS sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi berbasis budaya dalam perwujudan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam menjalankan program-program di atas, telah dipersiapkan dan sedang berjalan rencana aksi jangka pendek sebagai berikut:

- Klasterisasi perguruan tinggi berbasis SINTA (Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi);
- Penyusunan Panduan Pengusulan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2025;
- Penyesuaian Panduan pada Sistem BIMA;
- Peluncuran Panduan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2025;
- Sosialisasi Panduan Penelitian dan Pengabdian;
- Lokakarya Peningkatan Kualitas Penulisan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Pengumuman Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025; dan

- Seminar Kelayakan Program Pengabdian kepada Masyarakat Lanjutan (Multitahun).

b) Transformasi Kinerja Akademik: Klasterisasi Perguruan Tinggi 2025 sebagai Peta Jalan Pengembangan Institusi

Dalam upaya mendorong peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Kemdiktisaintek kembali menetapkan Klasterisasi Perguruan Tinggi untuk tahun 2025. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 1114/E5/PG.02.00/2024 tanggal 4 Desember 2024.

Klasterisasi ini bukan sekadar pemeringkatan, tetapi lebih merupakan strategi pengelompokan perguruan tinggi berdasarkan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diukur melalui Sistem Informasi SINTA dalam periode 2021–2023. Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan peta jalan yang jelas bagi setiap perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing akademiknya serta sebagai dasar penyusunan kebijakan strategis, termasuk distribusi kewenangan dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Empat klaster utama yang ditetapkan dalam skema ini meliputi Klaster Mandiri, Utama, Madya, dan Pratama, sementara perguruan tinggi yang belum memenuhi kriteria klaster tersebut dimasukkan dalam Klaster Binaan (Pra-Kualifikasi). Setiap klaster tidak hanya merefleksikan capaian akademik institusi, tetapi juga mengarahkan perguruan tinggi dalam mengembangkan strategi penguatan riset dan inovasi.

Data yang digunakan dalam klasterisasi ini telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di masing-masing perguruan tinggi, mencakup beberapa indikator utama, seperti jumlah dan kualitas publikasi ilmiah, afiliasi akademik, hak kekayaan intelektual, serta kontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat. Pentingnya klasterisasi ini terletak pada dorongan terhadap sinergi dan kolaborasi lintas klaster yang memungkinkan institusi dengan kinerja lebih tinggi membantu institusi lain dalam memperkuat kapasitas riset dan inovasi. Dengan adanya pengelompokan yang lebih terstruktur,

perguruan tinggi dapat lebih fokus dalam mengembangkan peta jalan penelitian yang selaras dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Transformasi pendidikan tinggi di Indonesia melalui klasterisasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing akademik nasional di tingkat global serta memperkuat peran perguruan tinggi dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

Pada tahun 2025, perguruan tinggi di Indonesia dikelompokkan ke dalam beberapa klaster berdasarkan kualitas akademik, penelitian, inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat. Klasterisasi ini bertujuan untuk memberikan pemetaan yang lebih jelas mengenai performa institusi pendidikan tinggi serta mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan. Secara umum, perguruan tinggi dikelompokkan ke dalam empat klaster utama, yaitu Mandiri, Utama, Madya, dan Pratama. Berikut adalah contoh lima perguruan tinggi teratas pada masing-masing klaster:

1. Klaster Mandiri
    - Institut Pertanian Bogor
    - Institut Teknologi Bandung
    - Institut Teknologi Sepuluh Nopember
    - Universitas Ahmad Dahlan
    - Universitas Airlangga
2. Klaster Utama
    - Institut Bio Scientia Internasional Indonesia
    - Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
    - Institut Bisnis dan Keuangan Nitro
    - Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia
    - Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri
3. Klaster Madya
    - Iisip Yapis Biak
    - IKIP PGRI Bojonegoro
    - IKIP Saraswati
    - Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo
    - Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
4. Klaster Pratama
    - IKIP Widya Darma
    - Institut Az Zuhra

- Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957
- Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya
- Institut Bisnis dan Multimedia Asmi Jakarta

Dengan adanya klasterisasi ini, diharapkan setiap perguruan tinggi dapat terus meningkatkan daya saingnya baik di tingkat nasional maupun internasional serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam dunia pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

6.3 Implementasi Riset Peternakan Berbasis Inovasi untuk Ketahanan Pangan

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan melalui riset dan inovasi di sektor peternakan. Salah satu contoh nyata adalah program riset dan pengembangan peternakan domba yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) di Jonggol, Bogor. Program ini bukan hanya sekadar usaha peternakan, tetapi juga menjadi model penerapan hasil penelitian dalam skala industri yang lebih luas. Pendekatan berbasis riset ini memungkinkan pengembangan unit usaha yang tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada inovasi pembiakan (*breeding*) dan penerapan teknologi modern dalam sistem pemantauan ternak. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya berkontribusi dalam penguatan akademik, tetapi juga dalam penyediaan solusi nyata bagi masyarakat.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., pada tanggal 2 Januari 2025 hadir langsung dalam kunjungan ke lokasi peternakan untuk melihat praktik riset yang telah berjalan. Hal ini terlihat dalam Gambar 20 dan 21, di mana Wamen Prof. Fauzan bersama Dirjen Risbang, Sesjen, dan pimpinan UHAMKA meninjau langsung kandang ternak, mendiskusikan inovasi pengelolaan, serta mendorong hilirisasi hasil riset ke masyarakat. Selain itu, konsep ekonomi sirkular dan bebas sampah (*zero waste)* juga menjadi perhatian utama dalam program ini, memastikan bahwa seluruh proses peternakan memberikan dampak lingkungan yang minimal dan nilai ekonomi yang maksimal. Salah satu inovasi yang sedang dikembangkan adalah implementasi teknologi deteksi berbasis cip (*chip*), yang memungkinkan pemantauan kesehatan ternak secara otomatis dan waktu riil (*real-time)*.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga riset, model pengembangan ini diharapkan dapat direplikasi di perguruan tinggi lain untuk memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis riset dan teknologi.

Gambar 20. Wamendiktisaintek Prof. Fauzan Didampingi Dirjen Risbang dan Sesjen Kemdiktisaintek Meninjau Langsung Pengelolaan Peternakan Domba UHAMKA
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Gambar 21. Foto Jajaran Pejabat Kemdiktisaintek Bersama Civitas AkademikaU HAMKA Agrovision Dalam Rangka Peninjauan Riset Ketahanan Pangan
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

5

Penguatan Sains dan Teknologi

Penguatan sains dan teknologi menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi di tengah percepatan perubahan global. Pendidikan yang berorientasi pada pembelajaran transformatif, pemanfaatan hasil riset secara luas, serta penguatan literasi numerik merupakan kunci untuk menumbuhkan generasi unggul yang menguasai iptek secara komprehensif. Melalui kebijakan yang berpihak pada kemajuan ilmu pengetahuan serta penguatan regulasi yang mendukung ekosistem iptek nasional, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam percaturan global sebagai bangsa berbasis pengetahuan.

5.1 Pendidik Bertalenta Pembelajaran Transformatif

Sistem pembelajaran pendidikan tinggi di Indonesia perlu terus berinovasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang berada tepat di depan mata. Tantangan yang muncul berpotensi menjadi batu sandungan dalam memperkuat kualitas pendidikan tinggi.

Adapun *tantangan pertama* yang dihadapi pendidikan tinggi di Indonesia adalah kurikulum yang dianggap "one-size-fits-all" (seragam untuk semua). Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran di antara pengelola pendidikan tentang pentingnya menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, dosen/guru dan konteks institusi pendidikan/ sekolah. *Tantangan kedua* adalah belum terintegrasinya transformasi pembelajaran di pendidikan menengah-dasar dan pendidikan tinggi. Selain itu, pendidikan yang seharusnya menjadi motor penting untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam beradaptasi dan mengatasi berbagai tantangan masa kini dan masa depan sering dikembangkan terpisah dari berbagai kenyataan di masyarakat dan kebutuhan di dunia kerja, industri dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Ketiga*, adanya mentalitas berada di zona nyaman dapat menghambat motivasi berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan *tantangan terakhir* yakni akses pelatihan dan pendidikan berkualitas yang terbatas bagi dosen karena distribusi fasilitas pelatihan atau pendidikan dan berbagai upaya pengembangan kemampuan dosen/guru yang belum merata dan sistem pengelolaan pelatihan yang tersentralisasi menyebabkan terbatasnya kuota pelatihan atau pendidikan yang bertujuan utama untuk meningkatkan kapasitas dosen/guru dalam menerapkan pembelajaran transformatif.

Dalam 120 hari ini, Kemdiktisaintek telah menerapkan upaya untuk menghadapi tantangan tersebut. *Pertama* adalah upaya mengembangkan berbagai model pembelajaran transformatif yang dapat diadaptasi oleh para dosen/guru sesuai dengan kebutuhan melalui Program "Pengembangan Model Pembelajaran Transformatif". *Selanjutnya*, berbagai model pembelajaran transformatif tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dosen dalam mengembangkan dan menerapkan pembelajaran transformatif melalui Program "SDM yang ditingkatkan kemampuannya melalui Pembelajaran Transformatif".

Pendekatan pembelajaran transformatif memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan yang lebih relevan untuk kehidupan di era digital, seperti kreativitas, kemampuan inovasi, kemampuan beradaptasi, dan penguasaan teknologi yang diharapkan berdampak pada partisipasi peserta didik dalam upaya penyelesaian masalah di lingkungan terdekatnya dan lingkungan yang lebih luas.

Pembelajaran transformatif atau *'transformative learning'* adalah proses pembelajaran yang menekankan transformasi pola pikir, kebiasaan berpikir dan upaya memaknai berbagai aspek dalam penyelesaian masalah yang relevan sehingga proses dan solusi yang dirumuskan bersifat lebih inklusif, memiliki ciri khas, terbuka, reflektif dan mampu berperan dalam perubahan sikap dan perilaku (Mezirow, 1991).

Pembelajaran transformatif memerlukan aktivitas yang memungkinkan adanya tantangan atau '*challenge*' terhadap pemahaman saat ini, dorongan melakukan refleksi diri secara kritis, meningkatkan kesempatan untuk transformasi atau perubahan pandangan seseorang dan fasilitasi perkembangan personal dan profesional seseorang.

Berbagai kompetensi atau kemampuan sesuai bidang ilmu dan kemampuan generik menjadi sasaran penting dalam pembelajaran transformatif, sehingga peserta didik diharapkan dapat berperan dalam penyelesaian berbagai masalah yang relevan di sekitarnya, termasuk di dunia kerja dan di masyarakat secara umum. Pembelajaran transformatif diharapkan juga memberikan kemampuan Kompetensi Berbentuk T, yang dideskripsikan dalam Gambar 22.

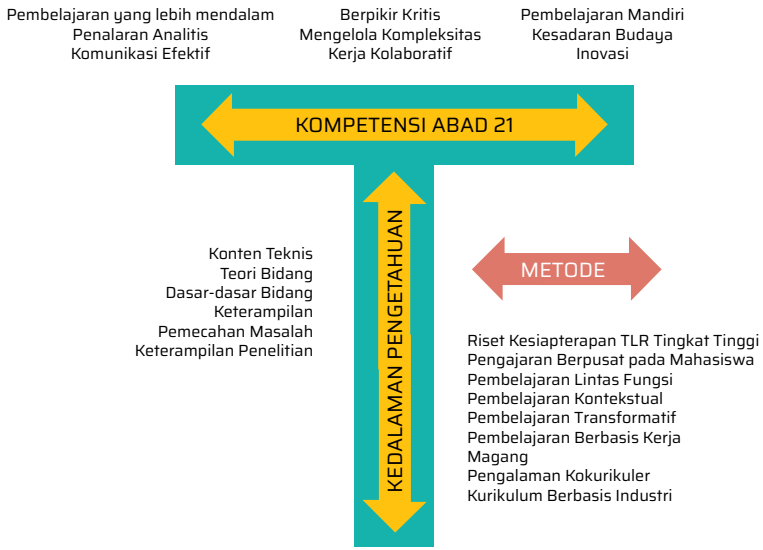

Gambar 22. Kompetensi Berbentuk T *(T-Shaped Competency)*,
Sasaran Penerapan Pembelajaran Transformatif

Model pembelajaran transformatif perlu mengintegrasikan paparan terhadap masalah nyata baik dari industri, masyarakat, dan lingkungan sekitar, dialog, dan diskusi sistematis antara peserta didik dengan dosen/guru dan praktisi/profesional, kemampuan mengevaluasi diri dan refleksi diri, dan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pembelajaran termasuk penerapan kecerdasan artifisial yang manusiawi (*human-centered AI*).

Penerapan model pembelajaran transformatif memerlukan kehadiran dosen dan guru yang mampu menjadi panutan sebagai pembelajar sepanjang hayat yang reflektif dan adaptif, sebagai mentor dan sebagai pembimbing *(coach).* Filosofi pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara: “ing ngarso sung tuladha” (di depan menjadi contoh), “ing madya mangun karsa” (di tengah membangun motivasi/kekuatan diri), dan “tut wuri handayani” (memberi kesempatan berkembang dan tetap memandu sesuai kebutuhan), sangat relevan dengan peran dosen/guru yang diharapkan dalam pembelajaran transformatif.

Peningkatan kapasitas dosen/guru untuk mengembangkan dan menerapkan pembelajaran transformatif perlu dilakukan dengan langkah strategis. Analisis kebutuhan yang komprehensif diterapkan untuk dapat mengajak semua pihak terutama di institusi pendidikan tinggi dan mitra industri dan masyarakat untuk mengevaluasi berbagai program pembelajaran dan pengembangan kemampuan dosen/guru yang telah dilakukan, sebagai titik awal pengembangan dan strategi penerapan model pembelajaran transformatif. Hal ini penting agar model pembelajaran yang dirancang lebih efektif, efisien dan dapat disesuaikan dengan karakteristik capaian pembelajaran, topik atau konten, peserta didik dan sarana-prasarana pembelajaran yang dimiliki.

Selanjutnya pelatihan, lokakarya atau pendidikan lanjut akan diterapkan secara berkelanjutan sehingga pembelajaran transformatif dapat diterapkan, dievaluasi dan dikembangkan dan sekaligus dikaji lebih mendalam agar dapat menghasilkan praktik baik penerapan pembelajaran transformatif di pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan mengikuti berbagai program pengembangan kemampuan (*faculty development*), dosen diharapkan dapat menjadi penggerak utama sekaligus fasilitator pembelajaran transformatif yang efektif, mampu mengembangkan kurikulum, metode pembelajaran dan asesmen yang mendukung penerapan prinsip pembelajaran transformatif, dan akhirnya berperan dalam menghasilkan lulusan program pendidikan yang berkualitas dan adaptif.

Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan akan berfokus pada aspek-aspek penting yang dijelaskan di Gambar 23.

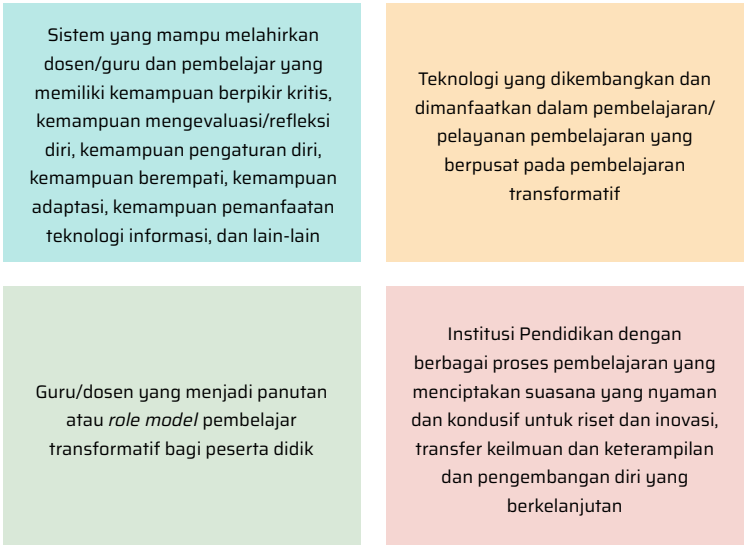

Gambar 23. Landasan dan Komponen Utama Pengembangan Program Pembelajaran Transformatif

5.2 Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi

Diseminasi dan pemanfaatan sains dan teknologi merupakan elemen krusial dalam memastikan bahwa hasil riset tidak hanya berhenti di ruang laboratorium atau dalam publikasi ilmiah, tetapi benar-benar hadir dan memberi dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Ilmu pengetahuan perlu menembus batas-batas akademik dan menjadi kekuatan transformatif yang menyentuh sektor-sektor strategis, mulai dari ekonomi komunitas hingga penguatan budaya dan kesehatan masyarakat. Melalui berbagai program strategis, Kemdiktisaintek mendorong hilirisasi hasil riset agar lebih inklusif, aplikatif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada industri dan sektor ekonomi, tetapi juga menjangkau aspek sosial dan budaya yang selama ini kerap luput dari pemanfaatan sains secara langsung.

Pertanyaannya: bagaimana jika inovasi yang lahir dari ruang-ruang riset bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas? Bagaimana jika teknologi tidak hanya menjadi milik industri besar, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan sosial di berbagai wilayah?

Inilah semangat yang diusung oleh Kemdiktisaintek—menjadikan sains dan teknologi sebagai kekuatan kolektif yang membumi dan berdampak luas.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kemdiktisaintek telah meluncurkan beberapa program unggulan yang tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi benar-benar dirancang sebagai langkah nyata untuk membumikan ilmu pengetahuan. Program-program ini bertujuan menjalin kolaborasi lintas sektor, memperkuat jejaring antara perguruan tinggi, industri, pemerintah daerah, serta komunitas masyarakat, dan menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan dan potensi lokal.

1) Inovasi yang Menghidupi: Program BERDIKARI

Program Katalisator Kemitraan Berdikari (Program BERDIKARI) diluncurkan pada 25 Oktober 2024 dengan *tagline*/baris tera "Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Raganya". Program ini merupakan program tahun kedua yang menjadi lanjutan dari Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah yang selanjutnya (Ekosmira). Sebelumnya, program-program ini adalah program kolaborasi bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dit. Mitras DUDI) dan kemudian pada Pemerintahan baru dialihkan ke Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kemdiktisaintek.

Program Ekosmira merupakan rancangan besar pengembangan inovasi di daerah/wilayah berupa pemetaan potensi dan kondisi daerah secara komprehensif untuk menghasilkan klaster inovasi yang selaras dengan agenda pembangunan daerah dan program prioritas nasional. Program tahun pertama memiliki fokus untuk melakukan pemetaan potensi daerah dengan luaran rencana ketenagakerjaan dan rencana inovasi. Sedangkan pada tahun kedua dan ketiga memiliki fokus untuk mengimplementasikan rencana inovasi berbasis potensi daerah yang telah dibuat di tahun pertama. Pendanaan Program BERDIKARI ini diberikan kepada 100 tim kerja yang terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan di Perguruan Tinggi

Penyelenggara Program Pendidikan Vokasi (PTPPPV). Program Katalisator Kemitraan Berdikari merupakan penguatan kemitraan berbasis jejaring antara PTPPPV dan mitranya (DUDI, pemerintah daerah, *Non-governmental Organisation* (NGO), komunitas masyarakat, dan sebagainya) dengan aktivitas berupa riset untuk menciptakan inovasi yang berdampak pada peningkatan nilai tambah ekonomi, baik di komunitas masyarakat atau peningkatan daya saing industri.

Program BERDIKARI dijalankan melalui dua skema utama:

a. Skema Emas (Ekonomi, Mandiri, dan Sejahtera), yaitu jejaring kemitraan riset PTPPPV dengan komunitas masyarakat di daerah yang menghasilkan produk tepat guna untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal, menyelesaikan masalah lokal, meningkatkan produktivitas, dan menambah nilai jual komoditas unggulan. Besaran pendanaan per riset ada pada rentang Rp100 juta s.d. maksimal Rp500 juta.
b. Skema Berlian (Berdaya Saing, Efektif, dan Berkelanjutan), yaitu jejaring kemitraan riset satuan pendidikan vokasi dengan industri untuk menghasilkan inovasi yang menjadi bagian dari rantai pasok industri. Pada skema ini terjadi transfer pengetahuan dan teknologi dari industri ke satuan pendidikan vokasi, sedangkan bagi industri akan menerima manfaat ekonomi dalam bentuk efisiensi produksi, peningkatan produktivitas dan pengembangan produk. Besaran pendanaan per riset maksimal Rp700 juta.

Katalisator Kemitraan Berdikari

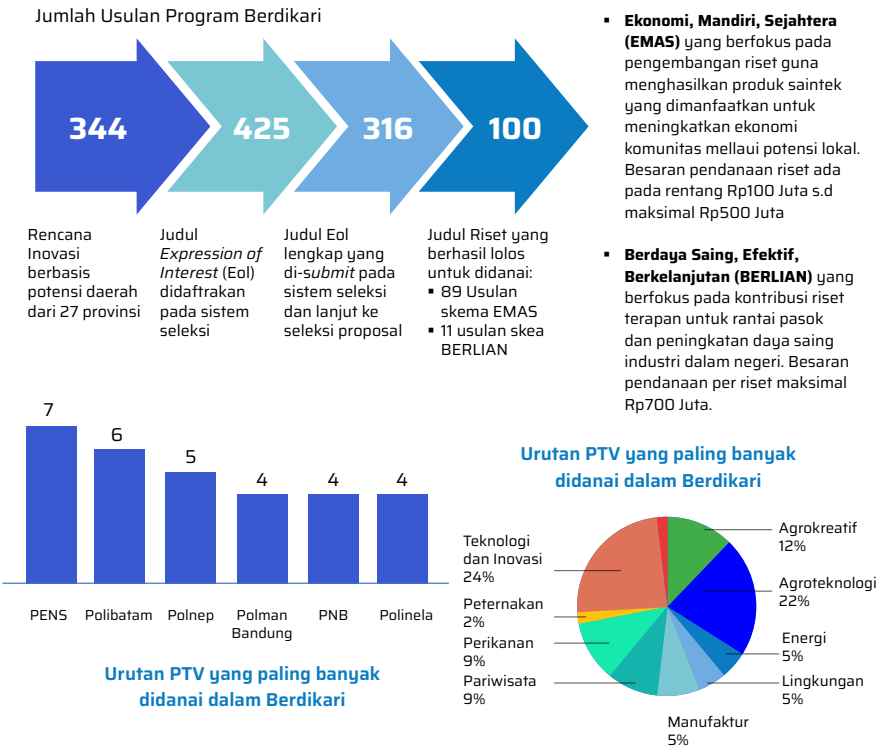

SKEMA PROGRAM BERDIKARI

- **Ekonomi, Mandiri, Sejahtera (EMAS)** yang berfokus pada pengembangan riset guna menghasilkan produk saintek yang dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi komunitas mellaui potensi lokal. Besaran pendanaan riset ada pada rentang Rp100 Juta s.d maksimal Rp500 Juta
- **Berdaya Saing, Efektif, Berkelanjutan (BERLIAN)** yang berfokus pada kontribusi riset terapan untuk rantai pasok dan peningkatan daya saing industri dalam negeri. Besaran pendanaan per riset maksimal Rp700 Juta.

Gambar 24. Jumlah Usulan dan Skema Program BERDIKARI

Gambar 24 memperlihatkan bahwa jumlah usulan Program BERDIKARI terdiri dari 344 rencana inovasi berbasis potensi daerah dari 27 provinsi, 425 judul *Expression of Interest* (EoI) yang didaftarkan dalam sistem seleksi**,** 316 judul EoI yang disubmit ke sistem seleksi, serta 100 judul riset yang berhasil lolos untuk didanai. Selanjutnya, sebaran topik riset BERDIKARI mencakup berbagai bidang, seperti Teknologi dan Inovasi (24%), Agroteknologi (22%), Agrokreasi (12%), Perikanan (11%), Manufaktur (8%), Energi dan Lingkungan (5%), dan Peternakan (2%).

Seperti ditunjukkan dalam Gambar 25 dan 26, terdapat beberapa contoh pemanfaatan sains dan teknologi pada Program BERDIKARI tahun 2024-2025 ini, di antaranya:

a. Peningkatan produktivitas peternakan sapi perah di Kecamatan Pudak, Ponorogo, Jawa Timur. Pada implementasi ini, terdapat beberapa judul riset yang dilakukan oleh tim periset dari Konsorsium Jawa Timur: (1) D-Cows-Reog: Otomatisasi kandang dengan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas peternakan sapi perah; (2) SMART-UHT: Pemanfaatan IoT untuk otomatisasi produksi susu UHT guna meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing ekonomi lokal; (3) POROS-PJU: Smart Penerangan Jalan Berbasis IoT untuk Efisiensi Energi; (4) CREATE e-ATV: Solusi Ekosistem Elektrifikasi Transportasi pada Mobilisasi Hasil Susu dan Limbah Peternak Sapi Perah; (e) WAROK-GREEN: Optimasi Produksi Biogas dari Limbah Kotoran Sapi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

b. Pengembangan agrokreatif dan agroteknologi untuk ketahanan pangan nasional. Pada implementasi ini, terdapat beberapa judul riset yang dilakukan, seperti: (1) Inovasi Desain dan Prototipe Traktor Tangan Dua Roda; (2) Fermentasi dan Ektrasi Limbah Pertanian Menjadi Zat Pewarna Alam; (3) Otomatisasi Pertanian Sirkular *(Circular Farming)* dengan Pengaplikasian Teknologi Biofertilizer Berbasis Energi Terbarukan dan IOT; (4) Pengembangan Beras Sorgum Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Lokal Jawa Barat.

Pemanfaatan Sains dan Teknologi Program Berdikasi 2025: Pengembangan Produktivitas Peternakan Sapi Perah di Kecamatan Pudak, Ponorogo, Jawa Timur

Gambar 25. Pemanfaatan Sains dan Teknologi pada Program BERDIKARI 2025: Peningkatan Produktivitas Peternakan Sapi Perah di Kecamatan Pudak, Ponorogo, Jawa Timur

Pemanfaatan Sains dan Teknologi Program Berdikasi 2025: Pengembangan Agrokreatif dan Agroteknologi untuk Ketahanan Pangan Nasional

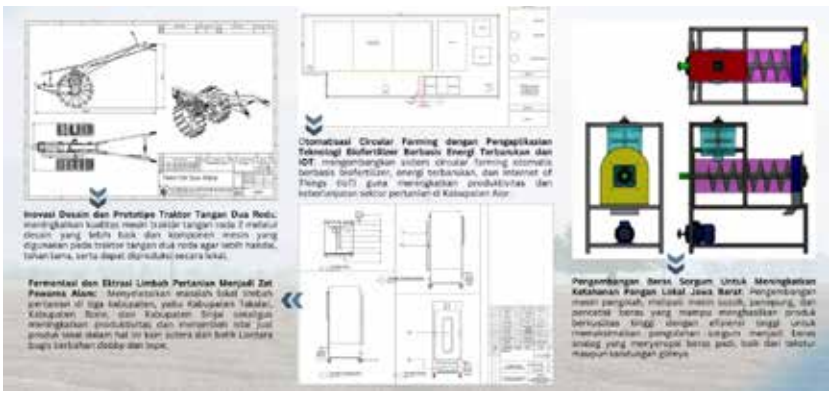

Gambar 26. Contoh Pemanfaatan Sains dan Teknologi pada Program BERDIKARI 2025: Pengembangan Agrokreatif dan Agroteknologi untuk Ketahanan Pangan Nasional

Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan program, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp35 miliar untuk memperkuat riset kolaboratif antara perguruan tinggi dengan mitra (dunia usaha dan dunia industri, Pemda, NGO, komunitas masyarakat, dan sebagainya) pada BERDIKARI tahap selanjutnya (2026). Kolaborasi ini diharapkan meningkatkan pemanfaatan sains dan teknologi oleh masyarakat sehingga semakin membumi.

2) Musik dan Otak: Bagaimana Musik Memengaruhi Otak dan Kesehatan?

Di sudut lain dari hilirisasi sains, Kemdiktisaintek berupaya membawa ilmu pengetahuan keluar dari ruang-ruang akademik yang kaku. Selain mendorong pemanfaatan hasil riset di sektor ekonomi dan industri, Kemdiktisaintek juga menginisiasi upaya diseminasi sains yang lebih dekat dengan masyarakat melalui pendekatan budaya dan kesehatan. Pada 12 Januari 2025, Kemdiktisaintek bekerja sama dengan Tsinghua University dan Kementerian Kebudayaan menyelenggarakan forum ilmiah bertajuk *"Musik dan Otak: Bagaimana Musik Memengaruhi Otak dan Kesehatan?" (Music and Brain: How Does Music Influence The Brain and Health?)"* di Bali.

Pada kesempatan tersebut (lihat gambar 27), Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof. Stella Christie menyampaikan bahwa musik merupakan satu hal yang disukai masyarakat umum. Musik membutuhkan proses otak, dan berdasarkan penelitian, musik memiliki pengaruh pada proses otak dan kesehatan. Prof. Stella Christie menjelaskan bahwa kegiatan kuliah umum ini merupakan upaya Kemdiktisaintek memberikan akses informasi kemajuan sains dan teknologi kepada masyarakat dan komunitas akademik.

Gambar 27. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,
Stella Christie Membuka Forum Ilmiah Musik dan Sains
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Musik dan sains merupakan dua dunia yang sering dianggap berseberangan. Keduanya bertemu dalam satu panggung yang memperlihatkan bahwa acara tersebut bukan sekadar seminar ilmiah, melainkan eksperimen sosial yang mencoba mengubah cara kita memandang ilmu pengetahuan.

Selama ini, sains sering dikaitkan dengan keseriusan dan kaku dalam bingkai akademik, sementara musisi dan budayawan lekat dengan kebebasan ekspresi dan kreativitas tanpa batas. Acara ini membalik perspektif tersebut: *bagaimana jika musik, sebagai produk budaya, dianalisis dengan pendekatan ilmiah? Bagaimana jika nada dan irama yang selama ini dinikmati secara emosional, dibedah melalui studi neurologi dan kesehatan?*

Seperti terlihat pada Gambar 28, Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha, tampil menyanyi dalam acara forum ilmiah tersebut sambil mengenakan alat Spektroskopi Inframerah Dekat Fungsional atau FNIRS (*Functional Near-Infrared Spectroscopy*).

FNIRS merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur kinerja otak dengan menganalisis intensitas aktivitas di berbagai bagiannya. Teknologi ini bekerja dengan mendeteksi pantulan cahaya inframerah yang dipantulkan oleh darah dalam otak. FNIRS dapat membedakan antara darah bersih yang kaya oksigen dan darah kotor yang mengandung lebih sedikit oksigen, keduanya terus mengalir dalam otak. Dengan menganalisis pola pantulan ini, FNIRS memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi guna mengidentifikasi area otak yang memiliki lebih banyak darah bersih dibandingkan darah kotor. Melalui teknologi ini, para ilmuwan dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai aktivitas otak seseorang saat melakukan berbagai aktivitas, termasuk saat bernyanyi di hadapan publik.

Kolaborasi antara Kemdiktisaintek, Tsinghua University, dan Kementerian Kebudayaan ini menghadirkan ilmuwan, musisi, dan pakar kesehatan dalam satu forum diskusi. Mereka membuktikan bahwa musik bukan sekadar hiburan, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap otak, suasana hati, bahkan pemulihan kesehatan mental. Sains, dalam konteks ini, tidak lagi terasa jauh dan eksklusif. Ia menjadi sesuatu yang bisa dinikmati, dipahami, dan dirasakan oleh siapa saja.

Gambar 28. Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Mempraktikkan Pemindaian Otak Ketika Bernyanyi Menggunakan Alat FNIRS
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

3) Masa Depan Hilirisasi Sains dan Teknologi

Inisiasi Program BERDIKARI dan Forum "Music and Brain" menunjukkan bahwa sains tidak boleh berhenti sebagai wacana intelektual. Ia harus bergerak, menyentuh masyarakat, menyatu dengan budaya, dan menjadi bagian dari solusi nyata bagi berbagai tantangan di Indonesia.

Dalam 120 hari, Kemdiktisaintek telah menegaskan bahwa hilirisasi sains dan teknologi bukan sekadar retorika. Program BERDIKARI membuktikan bahwa riset yang baik harus berdampak, sementara forum "Music and Brain" mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan bisa hadir dengan cara yang lebih menyenangkan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Jika langkah ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan memasuki era di mana inovasi bukan lagi sekadar cita-cita, tetapi sebuah realitas yang menggerakkan perubahan.

Program BERDIKARI yang merupakan rangkaian program yang diawali dari Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah (Ekosmira) ini memiliki total anggaran Rp40 miliar pada BERDIKARI Tahap I. Kemudian pada tahun ketiga, direncanakan akan diluncurkan Program BERDIKARI Tahap II dengan fokus riset berbasis potensi daerah untuk peningkatan ekonomi komunitas, dan jumlah penerima program minimal 70 tim periset. Luaran yang akan dicapai pada BERDIKARI II ini adalah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Hal ini dapat terlihat lebih jelas dalam Gambar 29 sebagai berikut.

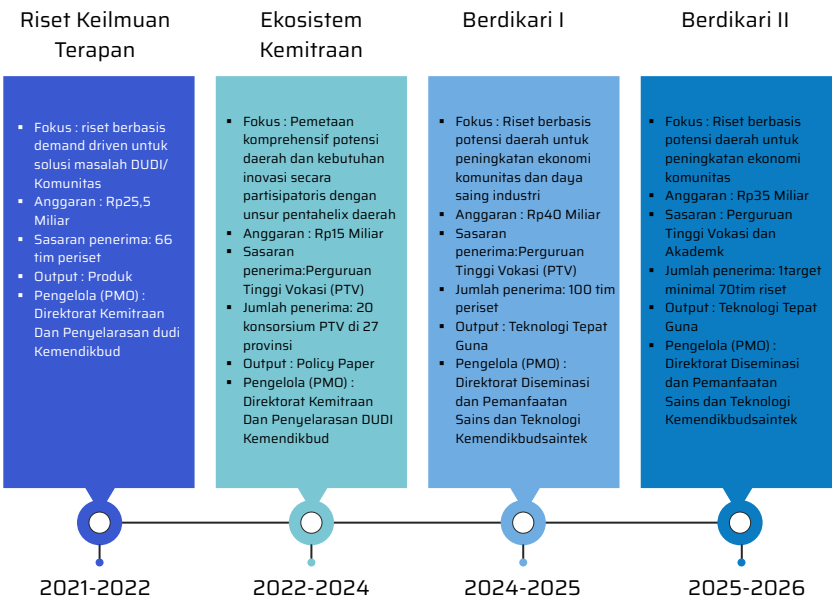

Akhir 2024 ke awal 2025 terjadi peralihan dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI Kemendikti ke Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Saintek Kemendikbudsaintek

Gambar 29. Gambaran Pelaksanaan Program BERDIKARI

5.3 SMA Unggul Garuda

Sebagai bagian dari implementasi delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kemdiktisaintek merancang pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Menegah Atas (SMA) Unggul Garuda. Program ini bertujuan untuk menciptakan lembaga pendidikan menengah atas berkualitas tinggi yang mampu mencetak lulusan berdaya saing global, khususnya di bidang sains dan teknologi.

Pada tahun 2025, direncanakan Pembangunan 4 (empat) SMA Unggul Garuda Baru yang rencananya berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Bangka Belitung, Papua, dan Sulawesi Utara dan 12 (dua belas) SMA Unggul Garuda Transformatif.

Sebagai langkah percepatan implementasi program tersebut, dalam kurun waktu 120 hari kerja pertama, Kemdiktisaintek telah menyelesaikan penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembangunan dan Pengelolaan SMA Unggul Garuda. Selain itu, cetak biru (*blueprint*) SMA Unggul Garuda juga telah dirampungkan, mencakup kajian akademik mengenai urgensi pembangunan, mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kurikulum, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan anggaran, linimasa pelaksanaan, serta target capaian periode 2025–2029. Penetapan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut turut diselesaikan dalam periode yang sama.

Gambar 30 memperlihatkan ilustrasi konsep pembangunan SMA Unggul Garuda yang mengusung desain futuristik dengan lingkungan hijau dan teknologi digital yang canggih. Bangunan sekolah dirancang dengan struktur modern yang dilengkapi dengan ruang belajar terbuka, area hijau, dan integrasi teknologi dalam sistem pembelajaran. Selain itu, tampak hologram yang merepresentasikan elemen teknologi dalam proses pembelajaran di sekolah ini. Ilustrasi ini mencerminkan visi SMA Unggul Garuda sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan inovasi dan sains.

Ilustrasi Sekolah unggulan Garuda (Sumber foto: Teknologi AI)

Gambar 30. Ilustrasi Sekolah Unggulan Garuda

Program SMA Unggul Garuda diarahkan untuk mengatasi kesenjangan di bidang sains dan teknologi melalui strategi penciptaan lulusan yang mampu diterima di 100 universitas terbaik dunia. Lulusan tersebut diharapkan dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, untuk kemudian mentransfer serta mengembangkan pengetahuan tersebut di Indonesia. Kehadiran lulusan berkualitas tinggi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian kemajuan riset, inovasi, serta penguatan ekosistem sains dan teknologi nasional.

Selain bertujuan meningkatkan daya saing bangsa di bidang sains dan teknologi, pembangunan SMA Unggul Garuda juga dirancang sebagai bagian dari upaya pemanfaatan bonus demografi dan penyiapan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Program ini mengedepankan prinsip inklusivitas, baik dalam proses pembangunan, pemilihan lokasi, seleksi peserta didik, maupun rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan. Seleksi peserta didik dilakukan dengan memberikan prioritas kepada siswa-siswi berprestasi yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah/menengah. Lokasi pembangunan sekolah difokuskan pada daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan bermutu. Dengan demikian, SMA Unggul Garuda diharapkan tidak hanya menjadi sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berkontribusi terhadap pemerataan akses pendidikan, pengurangan kesenjangan sosial, serta mendorong pembangunan ekonomi daerah.

5.4 Penguatan Literasi Numerik

Dalam era persaingan global yang semakin ketat, literasi numerik menjadi salah satu keterampilan mendasar yang harus dimiliki oleh generasi muda Indonesia. Kemampuan ini tidak hanya berperan dalam penguasaan sains dan teknologi, tetapi juga menentukan daya saing bangsa dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan industri berbasis pengetahuan.

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kualitas literasi numerik suatu negara adalah *Programme for International Student Assessment* (PISA), sebuah asesmen internasional yang dilakukan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) setiap tiga tahun sekali. PISA mengukur keterampilan matematika, membaca, dan sains siswa berusia 15 tahun dari berbagai negara.

Sayangnya, hasil asesmen PISA dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa kemampuan numerasi siswa Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Berdasarkan laporan resmi OECD:

- Tahun 2015: Skor matematika Indonesia berada di angka 386.
- Tahun 2018: Skor menurun menjadi 379.
- Tahun 2022: Skor kembali mengalami penurunan hingga 366.

Dari hasil ini, terlihat bahwa tantangan dalam meningkatkan literasi numerik masih sangat besar. Skor yang terus menurun menunjukkan adanya kendala dalam sistem pembelajaran matematika di sekolah-sekolah Indonesia, baik dari segi metode pengajaran, kesiapan tenaga pendidik, maupun minat siswa terhadap mata pelajaran ini.

1) Strategi Penguatan Literasi Numerik

Sebagai respons terhadap tantangan ini, pemerintah melalui Kemdiktisaintek bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah merancang Program Persiapan Asesmen Numerasi Internasional 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran matematika, memperkuat metode pembelajaran berbasis pemecahan masalah, serta membangun fondasi numerasi yang lebih kuat bagi siswa sejak dini.

Salah satu pendekatan yang diterapkan dalam program ini adalah pelatihan metode GASING (Gampang, Asyik, dan Menyenangkan) yang dikembangkan oleh Prof. Yohanes Surya, Ph.D.. Metode ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan psikologis siswa terhadap matematika, sehingga mereka dapat memahami konsep-konsep numerik dengan cara yang lebih intuitif dan menyenangkan.

Sebagaimana terlihat dalam Gambar 31, pelatihan metode GASING ini dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2024 di Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Kemendikdasmen, Parung, Kabupaten Bogor, dan diikuti oleh 98 guru dari 51 sekolah di berbagai provinsi. Selain itu, pelatihan ini juga merupakan hasil kolaborasi antara Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Kemdiktisaintek, dan Gasing Academy, dalam

bentuk Program Pengabdian Masyarakat dengan tema “Penyiapan Talenta Muda Sains dan Teknologi Bidang Numerasi”.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wamendiktisaintek Prof. Fauzan, perwakilan UHAMKA, dan Prof. Yohanes Surya dari Gasing Academy, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dalam acara ini, para guru diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan metode GASING serta bagaimana cara mengintegrasikan pendekatan ini ke dalam kurikulum pembelajaran sehari-hari.

Gambar 31. Wamendiktisaintek Prof Fauzan didampingi Prof Yohanes dan Perwakilan UHAMKA pada Pelatihan Metode GASING: Meningkatkan Literasi Numerik Guru Matematika untuk Indonesia Emas 2045
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Dalam sambutannya, Wamendiktisaintek menyampaikan harapannya bahwa pelatihan ini tidak hanya meningkatkan penguasaan materi matematika, tetapi juga dapat mengubah karakter dan pendekatan guru dalam mengajar, agar lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Perwakilan dari UHAMKA menekankan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat pembelajaran matematika yang inovatif di seluruh Indonesia. Sementara itu, Prof. Yohanes Surya berharap bahwa metode GASING dapat mengubah persepsi siswa terhadap matematika, sehingga mereka lebih tertarik untuk mempelajari dan memahami konsep-konsep numerik secara lebih menyenangkan.

Hasil dari pelatihan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan guru dan pemahaman siswa. Rata-rata nilai *post-test* peserta

meningkat sebesar 127% dibandingkan pretest, yang mencerminkan adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis, logika matematis, serta keterampilan visual-spasial mereka. Selain itu, 75,79% peserta mendapatkan nilai di atas 70 pada *post-test,* dibandingkan hanya 18,95% sebelum pelatihan.

Selain itu, program ini juga dirancang agar memiliki luaran akademik, yakni dalam bentuk artikel ilmiah yang akan disusun bersama oleh Kemdiktisaintek, UHAMKA, dan Gasing Academy sebagai bagian dari dampak positif program ini di bidang akademik.

2) Strategi ke Depan: Membangun Ekosistem Literasi Numerik yang Lebih Kuat

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah strategis, antara lain:

a) Peningkatan Kapasitas Guru:
   - Melanjutkan pelatihan GASING bagi lebih banyak tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
   - Mendorong pembentukan komunitas belajar bagi guru untuk saling berbagi strategi pembelajaran numerasi yang efektif.

b) Integrasi Numerasi dalam Kurikulum:
   - Mengembangkan modul numerasi berbasis pemecahan masalah dalam kurikulum sekolah.
   - Menggunakan teknologi digital sebagai alat bantu pembelajaran numerasi.

c) Evaluasi Berkelanjutan:
   - Mengukur efektivitas metode yang digunakan melalui asesmen berkala.
   - Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi guru dan siswa dalam meningkatkan kemampuan numerasi.

d) Kolaborasi dengan Lembaga Internasional:
   - Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan internasional untuk mengadaptasi praktik terbaik dalam pembelajaran numerasi.
   - Mengikuti berbagai asesmen dan kompetisi internasional guna meningkatkan daya saing siswa Indonesia.

3) Mewujudkan Generasi Cakap Numerasi untuk Indonesia Emas 2045

Penguatan literasi numerik bukan sekadar upaya untuk meningkatkan skor PISA, tetapi merupakan bagian dari strategi besar dalam menciptakan generasi yang unggul dalam sains, teknologi, dan ekonomi berbasis pengetahuan. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis riset, Indonesia dapat membangun sistem pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang berpikir kritis, analitis, serta siap bersaing di tingkat global.

Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, tenaga pendidik, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program ini. Dengan adanya dukungan dari institusi pendidikan tinggi seperti UHAMKA, efektivitas implementasi metode GASING di sekolah-sekolah Indonesia semakin diperkuat. Jika strategi yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara optimal, bukan tidak mungkin skor PISA Indonesia akan mengalami peningkatan yang signifikan di tahun-tahun mendatang. Dengan penguatan literasi numerik yang terus dikembangkan, Indonesia semakin siap dalam mencetak sumber daya manusia yang cakap, kompetitif, dan berdaya saing, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

5.5 Evaluasi dan Revisi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, telah disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta RPP tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kedua RPP ini memiliki peranan strategis sebagai panduan pengembangan dan penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Seiring dengan dinamika perubahan struktur pemerintahan, khususnya pasca-penyesuaian tugas dan fungsi kementerian/lembaga dalam Kabinet Merah Putih, dipandang perlu dilakukan evaluasi terhadap penyusunan

kedua RPP tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, disimpulkan bahwa penetapan kedua RPP ini perlu ditunda untuk sementara waktu dengan memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai berikut.

Pertama, penyusunan kedua RPP dimulai sebelum diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Peraturan tersebut menetapkan pembentukan Kemdiktisaintek yang memiliki kewenangan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Oleh karena itu, materi muatan kedua RPP perlu disesuaikan agar mencerminkan peran dan tanggung jawab Kemdiktisaintek sesuai dengan struktur pemerintahan yang baru.

Kedua, substansi dalam kedua RPP saat ini masih mengacu pada asumsi bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan satu-satunya penyelenggara ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dalam naskah rancangan, BRIN disebut memiliki kewenangan dalam menyusun rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, melakukan koordinasi dengan kementerian dan/atau pimpinan lembaga pemerintah lainnya, mengelola sarana dan prasarana riset, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan terbentuknya Kemdiktisaintek, diperlukan penyesuaian peran kementerian ini dalam ekosistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan tugas.

Ketiga, dalam RPP Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi disebutkan bahwa pendanaan riset dan program layanan pendanaan yang bersumber dari dana abadi penelitian akan dikelola oleh BRIN. Dengan terbentuknya Kemdiktisaintek, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai koordinasi dan pembagian tugas antara BRIN sebagai lembaga pemberi serta pengelola dana penelitian (*funding agency*) dan Kemdiktisaintek sebagai koordinator kebijakan riset dan teknologi (*regulating agency*). Kejelasan pembagian peran ini sangat penting guna mencegah tumpang tindih kewenangan serta memastikan pengelolaan pendanaan riset berjalan secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan dinamika kebijakan serta perkembangan tata kelola pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, peninjauan dan penyempurnaan terhadap kedua RPP ini diharapkan dapat menghasilkan peraturan yang lebih selaras dengan kebutuhan nasional serta mampu mendorong penguatan ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Pelaksanaan evaluasi ini merupakan bagian dari langkah strategis Kemdiktisaintek dalam program 120 hari Kerja sebagai fondasi awal menuju Indonesia Emas 2045, sehingga seluruh kebijakan yang disusun dapat mendukung percepatan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia secara efektif dan tepat sasaran.

Untuk mewujudkan lembaga pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang adaptif, responsif, dan berdaya saing tinggi, diperlukan fondasi kelembagaan yang kuat. Penguatan tata kelola, sumber daya, dan layanan menjadi prasyarat penting dalam memastikan seluruh program strategis dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam 120 hari kerja pertama, Kemdiktisaintek telah mengambil berbagai langkah pembenahan internal, mulai dari penyusunan struktur organisasi, reformasi administrasi, penguatan sistem informasi, hingga peningkatan sarana prasarana kerja.

Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses birokrasi mendukung percepatan inovasi dan pelayanan publik yang prima. Kolaborasi antarunit, strategi komunikasi yang lincah, dan kemitraan strategis menjadi penopang dalam memperkuat ekosistem kelembagaan yang modern dan berorientasi pada hasil. Berikut adalah sejumlah aspek penting yang menjadi fokus penguatan kelembagaan dalam periode ini.

6

Penguatan Tata Kelola, Sumber Daya, dan Layanan untuk Kinerja Institusi yang Efektif

Dokumentasi:
Humas Diktisaintek

6.1 Penyusunan Organisasi dan Tata Kelola

Berdasarkan penetapan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, tugas dan fungsi beberapa kementerian dan lembaga mengalami pergeseran. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, misalnya, terbagi menjadi suburusan yang dilaksanakan oleh tiga kementerian, yakni:

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen);
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek); dan
3. Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).

Kemdiktisaintek adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Kemdiktisaintek telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pembentukan organisasi dan tata kerja tersebut dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun susunan organisasi Kemdiktisaintek terdiri:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan;
4. Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi;
5. Inspektorat Jenderal;
6. Staf Ahli Bidang Regulasi; dan
7. Staf Ahli Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Dokumentasi: Humas Diktisaintek

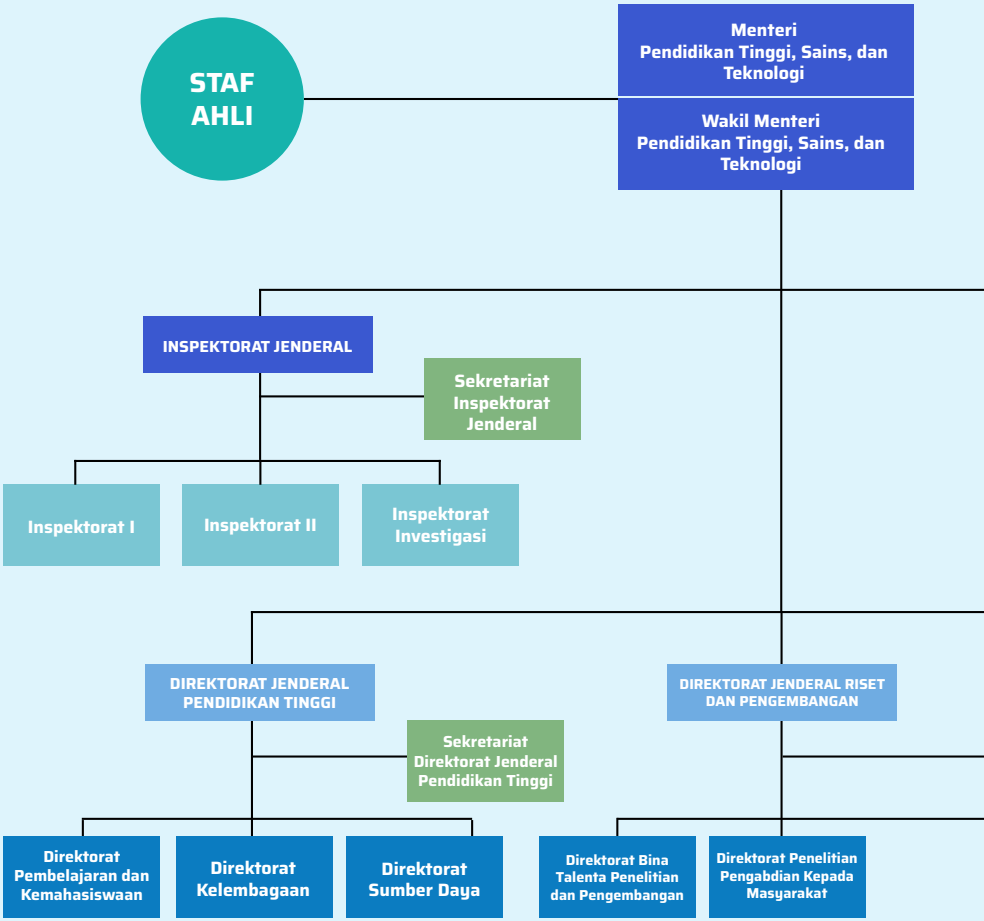

Bagan 1. Struktur Organisasi Kemdiktisaintek

Struktur Organisasi Kemdiktisaintek terlihat jelas melalui Bagan 1 sebagai berikut:

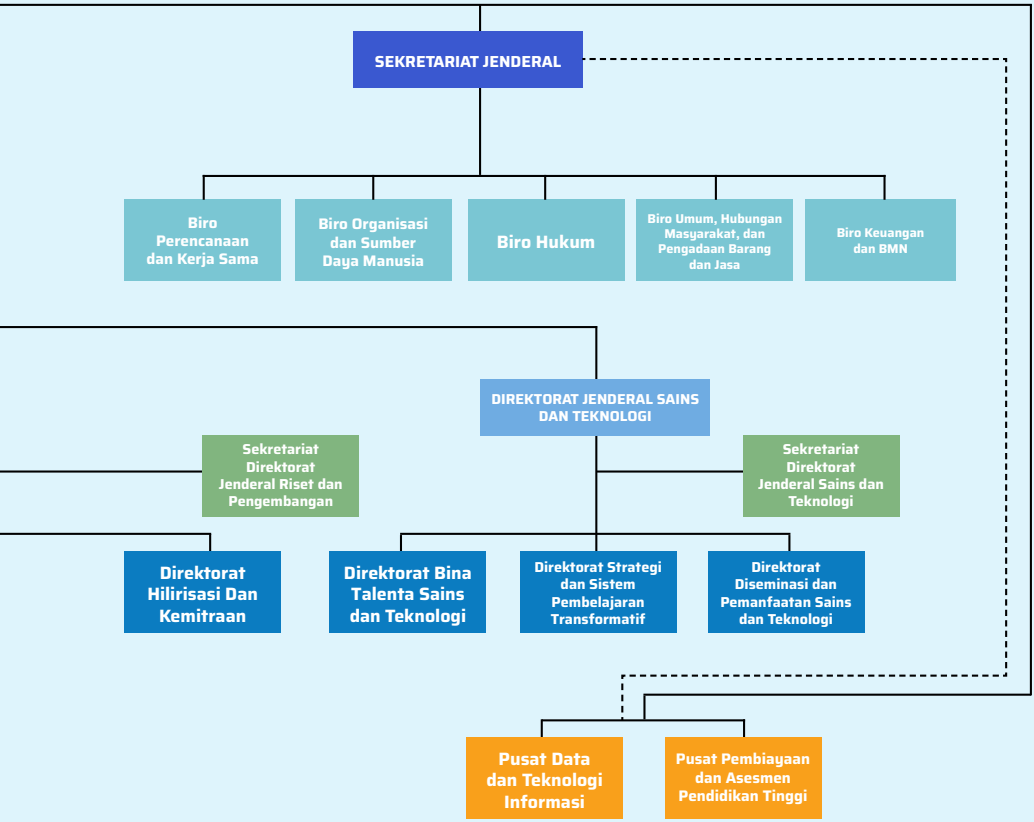

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024, Mendiktisaintek mengakselerasi penempatan-penempatan pegawai yang akan bertugas di bawah kepemimpinannya.

Pada 6 Januari 2025, Mendiktisaintek melalui Keputusan Presiden Nomor 2/TPA Tahun 2025 melantik pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yaitu:

1) Prof. Ir. Togar Mangihut Simatupang, M.Tech., Ph.D., IPU., sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2) Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H., sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
3) Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T., M.Eng., sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
4) Dr. Fauzan Adziman, S.T., M.Eng., sebagai Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
5) Dr. Ahmad Najib Burhani, M.A., sebagai Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
6) Nur Syarifah, S.H., LL.M., sebagai Staf Ahli Bidang Regulasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
7) Dr. Muhamad Hasan Chabibie, S.T., M.Si., sebagai Staf Ahli Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Jajaran Pejabat Tinggi Madya Kemdiktisaintek

Prof. Ir. Togar Mangihut Simatupang, M.Tech., Ph.D., IPU.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H.

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dr. Ahmad Najib Burhani, M.A.

Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Nur Syarifah, S.H., LL.M.

Staf Ahli Bidang Regulasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T., M.Eng.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dr. Fauzan Adziman, S.T., M.Eng.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dr. Muhamad Hasan Chabibie, S.T., M.Si.

Staf Ahli Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Gambar 32. Jajaran Pejabat Tinggi Madya Kemdiktisaintek

Pelantikan pejabat di lingkungan Kemdiktisaintek bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan amanah besar yang mengandung tanggung jawab dalam menjalankan peran strategis kementerian. Dalam sambutannya, Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro menekankan bahwa jabatan yang diemban harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan dedikasi penuh.

"Saya yakin dengan pengalaman, integritas, kompetensi, dan kapasitas yang dimiliki, Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dan amanah dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme," ujarnya dalam upacara pelantikan pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemdiktisaintek pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan tersebut, ditegaskan juga bahwa Kemdiktisaintek memiliki peran krusial dalam mewujudkan Asta Cita, 8 Program Hasil Terbaik Cepat, dan 17 Program Prioritas. Secara khusus, Kemdiktisaintek bertanggung jawab dalam tiga aspek utama: (1) memperkuat sistem pertahanan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui riset dan pengembangan, (2) membangun sumber daya manusia (SDM) dalam bidang sains, teknologi, dan pendidikan, serta (3) memajukan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri.

Selain itu, disampaikan juga bahwa setiap pejabat memiliki kewajiban untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Inspektur Jenderal, misalnya, memegang peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan menjadi penggerak utama dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang.

Beberapa dokumentasi agenda pelantikan tersebut terlihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 33. Pembacaan Doa Saat Pelantikan
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Gambar 34. Penandatanganan Berita Acara
Pelantikan Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek oleh Mendiktisaintek
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Gambar 37. Penandatanganan Berita Acara Pelantikan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek oleh Mendiktisaintek
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Gambar 38. Ucapan Selamat Mendiktisaintek kepada
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Gambar 39. Penandatanganan Berita Acara Pelantikan Staf Ahli Menteri
Bidang Regulasi Kemdiktisaintek oleh Mendiktisaintek
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Gambar 40. Ucapan Selamat Mendiktisaintek kepada Staf Ahli Menteri
Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Kemdiktisaintek
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2025, Kemdiktisaintek menggelar pelantikan pejabat struktural, Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) di lingkungan Kemdiktisaintek. Acara yang berlangsung di Graha Kemdiktisaintek, Jakarta, ini dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Pelantikan ini mencakup 18 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 23 Pejabat Administrator, 22 Pejabat Pengawas, Rektor Universitas Negeri Manado Periode 2025–2030, Kepala LLDikti Wilayah IV, sekaligus penyerahan Surat Keputusan Mendiktisaintek kepada 5 Staf Khusus Menteri dan 1 Penasihat Khusus Menteri.

Dalam kesempatan pelantikan tersebut, ditegaskan kembali bahwa setiap pejabat harus menjunjung tinggi etika jabatan serta bekerja dengan penuh tanggung jawab.

"Saya percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Saya yakin, dengan pengalaman, integritas, dan kompetensi yang dimiliki, Saudara-saudara akan menjalankan tugas dan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme," tegas Menteri Satryo.

Disampaikan juga keberhasilan Kemdiktisaintek sangat bergantung pada kepemimpinan yang kuat di setiap lini. Pejabat tinggi madya memiliki tanggung jawab strategis dalam merumuskan kebijakan dan memastikan efektivitas pelaksanaannya, sementara pejabat tinggi pratama berperan sebagai penggerak utama dalam eksekusi kebijakan serta operasional kementerian. Oleh karena itu, kolaborasi dan inovasi menjadi kunci dalam mewujudkan visi kementerian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.

"Kami berharap Saudara-saudara sekalian diberi kekuatan dalam menjalankan amanah dan mengemban jabatan yang baru, serta mampu memimpin pembangunan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dengan penuh tanggung jawab untuk tujuan bersama mencerdaskan kehidupan bangsa," pungkasnya.

Beberapa dokumentasi pada pelantikan tanggal 4 Februari 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 41. Foto Bersama Mendiktisaintek bersama
Jajaran Pejabat Tinggi Pratama Kemdiktisaintek Seusai Pelantikan
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Gambar 42. Foto Bersama Mendiktisaintek bersama Penasihat Khusus Menteri
dan Para Staf Khusus Menteri
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Gambar 43. Foto Bersama Mendiktisaintek Bersama Pejabat Administrator
dan Pejabat Pengawas Kemdiktisaintek
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Gambar 44. Foto Bersama Rektor Universitas Manado Periode 2025-2030 dengan
Mendiktisaintek dan Wamendiktisaintek
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Selanjutnya, dalam hal penyediaan sumber daya manusia, Kemdiktisaintek berkoordinasi dengan Kemdikdasmen yang berfungsi sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan atau redistribusi SDM Kemendikbudristek ketiga Kementerian: Kemdikdasmen, Kemdiktisaintek dan Kemenbud.

SDM pada Kemdiktisaintek merupakan gabungan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, sebagian Sekretariat Jenderal dan sebagian Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Tekologi. Setelah dilakukan penataan pegawai dari redistribusi pegawai Kemendikbudristek, didapatkan distribusi pegawai pada Kemdiktisaintek sebagai berikut.

Tabel 4. Distribusi Pegawai Kemdiktisaintek

Unit Utama	Jumlah Pegawai
Sekretariat Jenderal	344
Inspektorat Jenderal	142
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	368
Direktorat Jenderal Risetdan Pengembangan	127
Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi	120
Jumlah	**1.101**

Adapun pengisian Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi adalah sebagai berikut.

SEKRETARIAT JENDERAL
Prof. Ir. Togar Mangihut Simatupang, M.Tech., Ph.D., IPU.

BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA

Kepala
Indra Ni Tua, S.T., M.Comm.
Kepala Bagian Evaluasi dan Kerja Sama
Firman Hidayat, S.S., M.Si.
Kepala Subbagian Tata Usaha
Sukrimal, S.Si.

BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

Kepala
Dr. Agus Sunarya Sulaeman, S.S.T., Ak., M.Si.
Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara
Dr. Azhar Syahrir, ST, M.PMat, QIA, CRP, QRMA.
Kepala Subbagian Tata Usaha
Novita Sulistyana, S.E., M.Si.

BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kepala
Dr. Bhimo Widyo Andoko, S.H., M.H.
Kepala Bagian Transformasi Organisasi
Drs. Widodo Budi Siswanto, M.Pd.
Kepala Bagian Manajemen Talenta
Andi Irawan, S.I.P., M.M.
Kepala Subbagian Tata Usaha
Dr. Solehudin, S.Kom., M.M.

BIRO HUKUM

Kepala
Ineke Indraswati, S.H., M.H.
Kepala Bagian Fasilitasi dan Advokasi Hukum
Khozin Alfani, S.H., M.H.
Kepala Subbagian Tata Usaha
Resta Fauziah, S.T.

BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kepala
Manifes Zubayr, S.E., M.M.Ak.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Doddy Zulkifli Indra Atmaja, S.I.Kom., M.Si.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Fajar Adi Hemawan, S.T., M.Log.
Kepala Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan
Oki Putra Budiarahman, S.H.
Kepala Subbagian Tata Usaha
Novitasari Cahyaning Utomo, S.Kom., M.Pd.
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri
Pradita Solistama, S.E.
Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri dan Wakil Menteri
Muhammad Syarifuddin Fajri, S.I.Kom.
Kepala Subbagian Rumah Tangga
Irwan Luswandi, S.E., M.M.

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Kepala
Dr. Andika Fajar, M.Eng.
Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Transformasi Digital
Dr. Didi Rustam, S.Si., M.T.I.
Kepala Subbagian Tata Usaha
Srividola Wulandari, S.Komp.

PUSAT PEMBIAYAAN DAN ASESMEN PENDIDIKAN TINGGI

Kepala
Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, S.E., M.A.
Kepala Bidang Fasilitasi Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi
Septien Prima Diassari, S.Kom., M.Si.
Kepala Bidang Pengelolaan Asesmen Pendidikan Tinggi
Prof. Anton Rahmadi, S.TP., M.Sc., Ph.D.
Kepala Subbagian Tata Usaha
Dr. Tatang Supriatna, S.Pd., M.Pd.

INSPEKTORAT JENDERAL

Inspektur Jenderal
Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H.

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Sekretaris Inspektorat Jenderal
Yudi Saptono, S.T., M.T.
Kepala Bagian Fasilitasi Tindak Lanjut Pelaporan Hasil Pengawasan
Julians Andarsa, S.H., LL.M.
Kepala Bagian Umum
Rita Permatasari, S.E., M.Ak.

INSPEKTORAT I

Inspektur I
Lindung Saut Maruli Sirait, S.E., Ak., M.Si.
Kepala Subbagian Tata Usaha
Farida Nurbani, S.A.P., M.Ak.

INSPEKTORAT II

Inspektur II
Waluyo, S.IP., M.Ak
Kepala Subbagian Tata Usaha
Niken Setyorini, S.E.

INSPEKTORAT INVESTIGASI

Inspektur Investigasi
Albertus Agus Windarto, S.E., M.M, CFrA.
Kepala Subbagian Tata Usaha
Widyasta Puraardi Pinem, S.H., M.H.

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Direktur Jenderal
Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T., M.Eng.

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Sekretaris Direktorat Jenderal
Prof. Dr. Ir. Aisyah Endah Palupi, M.Pd.
Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Arnold Achdijalsjah, S.Sos., M.M.
Kepala Bagian Keuangan dan Umum
Rika Susanti, S.E.

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

Direktur
(Plt.) Dr. Berry Juliandi, S.Si., M.Si.
Kepala Sub Direktorat Penjaminan Mutu
Kevin Leonard Michael Marbun, S.E., M.A.
Kepala Subbagian Tata Usaha
Nandan, S.E.

DIREKTORAT KELEMBAGAAN

Direktur
Prof. Dr. Mukhamad Najib, STP, M.Si
Kepala Sub Direktorat Pengembangan dan Penataan Kelembagaan Perguruan Tinggi
Deny Kurniawan, S.T., M.T.I.
Kepala Subbagian Tata Usaha
Sugiharto, S.E.

DIREKTORAT SUMBER DAYA

Direktur
Prof. Dr. Sri Suning Kusumawardani, S.T., M.T.
Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan
Pauzan, S.Sos., M.Si.
Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana
Windi Kurnia Lestari, S.Hum.
Kepala Subbagian
Effi Setyowati, S.E.

DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

Direktur Jenderal
Dr. Mohammad Fauzan Adziman, S.T., M.Eng.

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

Sekretaris Direktorat Jenderal
Dr. Beny Bandanadjaja, ST., MT.
Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Achmad Hadiansyah, S.Kom., M.A.P.
Kepala Bagian Keuangan dan Umum
Irvan Yuliastono, S.E.

DIREKTORAT BINA TALENTA DAN PENGEMBANGAN

Direktur
(Plt.) Dr. Karlisa Priandana, ST., M.Eng
Kepala Subbagian Tata Usaha
Dra. Sri Yantilisda Surya Parma

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Direktur
Prof. I Ketut Adnyana, M.Si., Ph.D.
Kepala Subbagian Tata Usaha
Hatidja Madjid, S.H., M.Sc.

DIREKTORAT HILIRISASI DAN KEMITRAAN

Direktur
Prof. Yos Sunitiyoso, S.T., M.Eng., Ph.D.
Kepala Sub Direktorat Kemitraan
(Plt.) Dini Adiba Septanti, S.Sos., M.Sc.
Kepala Subbagian Tata Usaha
N. Nurmala Faujan, S.T., M.T.

DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI

Direktur Jenderal
Dr. Ahmad Najib Burhani, M.A.

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI

Sekretaris Direktorat Jenderal
Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T., IPU.
Kepala Bagian Keuangan dan Umum
Arief Sanjaya S.E.
Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Russy Arumsari, S.E., M.M.Si.

DIREKTORAT STRATEGI DAN SISTEM PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF

Direktur
Prof. dr. Ardi Findyartini, Ph.D.
Kepala Subbagian Tata Usaha
Rian Sari, S.Sos.

DIREKTORAT DISEMINASI DAN PEMANFAATAN SAINS DAN TEKNOLOGI

Direktur
Prof. Dr. Eng. Yudi Darma, M.Si.
Kepala Subbagian Tata Usaha
Aris Winarna, S.E.

DIREKTORAT BINA TALENTA SAINS DAN TEKNOLOGI

Direktur
Dr. Adi Nuryanto, S.T., M.T.
Kepala Subbagian Tata Usaha
Maulana Okto, S.Sos., M.AP.

STAF AHLI, PENASIHAT KHUSUS, DAN STAF KHUSUS

Staf Ahli Menteri bidang Regulasi
Nur Syarifah, SH., LLM
Staf Ahli Menteri bidang Penguatan Ekosistem Diktisaintek
Dr. Muhammad Hasan Chabibie, ST., M.Si
Penasihat Khusus Menteri Bidang Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio
Staf Khusus Menteri Bidang Riset dan Pengembangan
Prof. Ir. I Gede Wenten, Ph.D.
Staf Khusus Menteri Bidang Ekosistem Sains dan Teknologi
Prof. Dra. Sri Hartati Dewi Reksodiputro, M.A., Ph.D.
Staf Khusus Menteri Bidang Pendidikan Tinggi
Prof. Drs. T. Basaruddin, M.Sc., Ph.D.
Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola dan Akuntabilitas
Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc.
Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Publik dan Media Massa
Dr. Ezki Tri Rezeki Widianti, S.H., M.A.

6.2 Pembenahan Administrasi Tugas Belajar

1) Akselerasi Pengakuan Tugas Belajar

Tugas belajar merupakan kesempatan strategis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pendidikan tinggi untuk meningkatkan kompetensi dan memperkuat pengembangan karier, demi kontribusi yang lebih optimal bagi pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah kendala administratif yang menyebabkan ketidakpastian status kepegawaian dosen dan tenaga pendidik di lingkungan Kemdiktisaintek. Salah satu persoalan yang muncul adalah studi lanjut yang telah diselesaikan oleh ASN tanpa disertai Surat Keputusan (SK) Tugas Belajar dari Menteri sebagai bentuk pengakuan formal.

Padahal, secara regulatif, ketentuan mengenai tugas belajar bagi ASN telah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang

Pemberian Tugas Belajar, Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 yang memberikan pedoman teknis bagi ASN di lingkungan Kemendikbudristek, serta Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2023 yang menjadi rujukan pelaksanaan tugas belajar di lingkungan kementerian. Meskipun regulasi telah tersedia, dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat hambatan yang menyebabkan keterlambatan atau ketidakterbitan SK Tugas Belajar.

Bagi para dosen dan tenaga pendidik yang telah menempuh studi lanjut, penerbitan SK Tugas Belajar seharusnya menjadi bagian dari kepastian administratif dan status kepegawaian. Namun, terdapat dua permasalahan umum yang menyebabkan kendala dalam pengakuan administratif ini.

Pertama, sebagian ASN melanjutkan studi tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan resmi tugas belajar kepada Menteri. Hal ini umumnya disebabkan oleh minimnya sosialisasi terkait prosedur, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, atau adanya anggapan bahwa permohonan dapat diajukan setelah studi selesai. Akibatnya, proses administratif yang seharusnya dilakukan di awal menjadi tertunda atau bahkan terabaikan.

Kedua, terdapat pengajuan permohonan tugas belajar yang tidak memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Permasalahan ini meliputi ketidaksesuaian instansi pembiaya pendidikan, ketidakhubungan antara program studi dengan tugas jabatan ASN, serta dokumen atau syarat lain yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan regulasi.

Kedua kondisi ini berdampak pada terhambatnya penerbitan SK Tugas Belajar dan menyebabkan sejumlah ASN yang telah menyelesaikan studi berada dalam status kepegawaian yang tidak pasti. Mereka tidak tercatat secara administratif sebagai penerima tugas belajar, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap jenjang karier dan kejelasan status kepegawaian mereka.

Menyikapi permasalahan tersebut, Kemdiktisaintek mengambil langkah konkret melalui kebijakan akselerasi pengakuan tugas belajar. Kebijakan ini dirancang sebagai mekanisme penyelesaian administratif yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan pengakuan formal bagi ASN yang terdampak, sehingga mereka dapat melanjutkan karier akademik dan profesionalnya tanpa hambatan administratif.

Langkah-langkah strategis yang ditempuh antara lain:

a) Pendataan

Langkah pertama yang ditempuh adalah melakukan pendataan terhadap PNS yang telah atau sedang menyelesaikan studi lanjut namun belum memperoleh SK Tugas Belajar. Pendataan ini menjadi dasar penting bagi penyusunan kebijakan selanjutnya. Berdasarkan data awal hingga Juli 2024, tercatat sekitar 2.000 ASN di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri menghadapi berbagai kendala administratif terkait penugasan belajar. Situasi ini menyebabkan ketidakpastian status kepegawaian yang berpotensi menghambat perkembangan karier mereka.

Guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan akurat, Kemdiktisaintek saat ini tengah memperluas cakupan pendataan untuk mencakup ASN yang berada di bawah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), Politeknik, dan Akademi Komunitas. Pendataan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan secara rinci serta merumuskan solusi yang tepat dalam penyelesaian status kepegawaian ASN terkait tugas belajar.

b) Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

Akselerasi pengakuan tugas belajar tidak dapat dilaksanakan secara sepihak. Oleh karena itu, Kemdiktisaintek menjalin koordinasi secara intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil telah sesuai dengan ketentuan dan regulasi kepegawaian yang berlaku secara nasional.

Koordinasi lintas lembaga ini menjadi elemen kunci dalam menyelaraskan kebijakan akselerasi pengakuan dengan sistem administrasi kepegawaian yang telah ada, sehingga proses pengakuan tugas belajar dapat berlangsung dengan tertib, sah, dan terstandarisasi.

c) Penyusunan Regulasi sebagai Dasar Hukum

Sebagai bentuk penguatan legalitas, Kemdiktisaintek juga menyiapkan regulasi yang akan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan akselerasi pengakuan tugas belajar. Saat ini, regulasi tersebut masih dalam tahap penyusunan dengan mempertimbangkan kebutuhan ASN yang telah maupun yang sedang melanjutkan studi.

Penyusunan regulasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses akselerasi pengakuan berjalan secara sistematis dan memiliki legitimasi yang kuat. Regulasi tersebut nantinya akan menjadi acuan resmi bagi seluruh pihak yang terlibat, serta menjamin kepastian hukum bagi para ASN penerima tugas belajar.

d) Penerbitan SK Tugas Belajar

Langkah terakhir dalam rangkaian kebijakan ini adalah penerbitan SK Tugas Belajar bagi ASN yang memenuhi kriteria pengakuan. Setelah seluruh tahapan sebelumnya dilaksanakan, penerbitan SK ini menjadi bentuk pengakuan administratif yang sah atas studi lanjut yang telah ditempuh. Dengan diterbitkannya SK tersebut, ASN yang bersangkutan akan memperoleh kejelasan status kepegawaian dan dapat melanjutkan karier akademiknya tanpa hambatan administratif.

2) Perbaikan Proses Perizinan Tugas Belajar

Tugas belajar merupakan salah satu metode pengembangan kompetensi bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur pendidikan formal. Dalam pengertian lainnya, tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS, untuk menempuh pendidikan formal sesuai dengan rencana kebutuhan instansi atau organisasi.

Peningkatan kapasitas dan kompetensi PNS melalui tugas belajar telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ketentuan teknis pelaksanaannya kemudian diatur

lebih lanjut melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 3 Tahun 2023.

PNS yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lolos seleksi diberikan penugasan resmi untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan sebagai PNS tugas belajar oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Prosedur perizinan tugas belajar ini mencakup sejumlah tahapan penting, mulai dari pengajuan permohonan oleh PNS yang bersangkutan, pemberian rekomendasi dari pimpinan unit kerja, proses seleksi, hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) Tugas Belajar oleh pejabat yang berwenang.

Dalam praktiknya, proses pemberian izin tugas belajar masih menghadapi sejumlah tantangan administratif dan teknis yang berdampak pada keterlambatan atau hambatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, selain menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi, kebijakan terkini menjadi momentum strategis untuk melakukan perbaikan mendasar terhadap proses perizinan tugas belajar ke depan.

Salah satu fokus utama kebijakan ini adalah membangun sistem administrasi kepegawaian yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis data. Penguatan sistem dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengajuan dan persetujuan tugas belajar, mencakup aspek persyaratan administratif, kesesuaian program studi dengan tugas jabatan, serta kejelasan skema pembiayaan.

Perbaikan ini ditujukan agar tidak ada lagi ASN yang terhambat dalam memperoleh izin tugas belajar hanya karena kendala teknis atau prosedural. Proses perizinan tugas belajar juga tengah dipertimbangkan untuk diberikan kewenangannya kepada pimpinan perguruan tinggi, dengan proses pencatatan dilakukan melalui SISTER (Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi).

Lebih jauh, kebijakan ini menegaskan pentingnya menjadikan tugas belajar sebagai hak yang dapat diakses secara adil dan transparan oleh setiap ASN yang memenuhi persyaratan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan sistem informasi yang terintegrasi, peningkatan kapasitas unit pelayanan kepegawaian, serta sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh instansi di lingkungan Kemdiktisaintek.

Melalui pembenahan administrasi yang berkelanjutan ini, diharapkan proses pemberian tugas belajar menjadi lebih tertib, terarah, dan benar-benar mendukung pengembangan sumber daya manusia secara optimal. Pada akhirnya, perbaikan sistem tugas belajar ini akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi nasional serta pelayanan publik yang lebih profesional.

6.3 Pengokohan Fondasi Regulasi dan Advokasi

Kemdiktisaintek telah menjalankan berbagai program dan kebijakan dalam 120 hari pertama sejak pembentukannya, kementerian ini berperan dalam penyusunan regulasi, advokasi hukum, serta koordinasi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Capaian yang telah diperoleh meliputi advokasi hukum dalam dan luar persidangan, penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan berbagai perjanjian kerja sama strategis.

- **Advokasi dalam Persidangan**. Selama 120 hari pertama, Kemdiktisaintek melalui Biro Hukum telah menangani berbagai perkara hukum yang melibatkan kementerian di berbagai pengadilan, termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri. Kasus-kasus yang ditangani mencakup sengketa terkait status pegawai negeri sipil, perselisihan internal perguruan tinggi, serta tuntutan atas keputusan administratif kementerian. Beberapa perkara masih dalam proses penyelesaian, sementara yang lainnya telah mencapai keputusan.
- **Advokasi di Luar Persidangan**. Selain menangani kasus di pengadilan, Kemdiktisaintek juga melakukan advokasi hukum di luar persidangan, termasuk penyelesaian sengketa internal, telaah hukum, dan pendampingan hukum. Berbagai isu yang telah ditelaah mencakup keanggotaan Majelis Wali Amanat PTN, kebijakan tunjangan kinerja dosen, dan penyelesaian sengketa kepemilikan aset institusi pendidikan tinggi.

Kemdiktisaintek telah berhasil merancang berbagai peraturan dalam upaya memperkuat regulasi di sektor pendidikan tinggi. Berikut adalah beberapa regulasi penting yang telah disusun:

- **Peraturan Presiden:**
  - Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja

Pegawai di Lingkungan Kemendiktisaintek
    - Rancangan Peraturan Presiden tentang Ekosistem Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda
- **Peraturan Menteri:**
    - Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
    - RPM tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen
    - RPM tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi
    - RPM tentang Organisasi dan Tata Kerja berbagai perguruan tinggi negeri dan politeknik
    - RPM tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS Kemendiktisaintek
    - RPM tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
    - RPM tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kemendiktisaintek
    - RPM tentang Statuta berbagai perguruan tinggi di Indonesia
    - RPM tentang Tata Naskah Dinas Kemdiktisaintek
- **Keputusan Menteri:**
    - Izin pembukaan lebih dari 100 program studi baru di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
    - Pencabutan izin program studi yang tidak memenuhi standar mutu pendidikan tinggi.

Kerja sama aktif pun dijalankan dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan riset di Indonesia. Beberapa perjanjian kerja sama yang telah melalui penelaahan yaitu:

1. Perjanjian Kerja Sama Kementerian dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
2. Nota Kesepahaman Ruang Bersama Indonesia (RBI) antara Kementerian PPPA dengan Kemendiktisaintek.
3. Nota Kesepahaman dengan Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) dan LPDP tentang riset Wallacea.
4. Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi dengan bank penyalur Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (PIP DIKTI).

Kemendiktisaintek melalui Biro Hukum telah menunjukkan kinerja yang progresif dalam berbagai aspek hukum, perundang-undangan, dan kerja sama strategis. Capaian ini menunjukkan komitmen kementerian dalam menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih baik, berbasis regulasi yang kuat dan sistem advokasi hukum yang efektif. Ke depan, kementerian akan terus memperkuat regulasi, menyelesaikan berbagai kasus hukum, serta memperluas kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, sains, dan teknologi di Indonesia.

6.4 Strategi Komunikasi melalui Gerak Cepat Kehumasan dan Media

Komunikasi publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemdiktisaintek menyadari bahwa kualitas komunikasi publik merupakan kunci dalam membangun keterlibatan pemangku kepentingan terhadap proses perumusan dan implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif mampu mendorong partisipasi publik, sekaligus memperkuat dukungan terhadap berbagai program strategis kementerian.

Di tengah perkembangan era digital, arus informasi bergerak sangat cepat. Kebijakan dan program pemerintah dapat menjadi perhatian luas dalam hitungan jam, baik melalui pemberitaan media maupun pembahasan di media sosial. Situasi ini mendorong fungsi kehumasan dan media untuk berperan strategis sebagai garda terdepan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan kementerian. Kehumasan dituntut untuk bergerak secara dinamis. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin kemitraan dengan berbagai media nasional dan lokal guna mempercepat penyebarluasan informasi terkait kebijakan dan program kementerian. Dalam waktu singkat, berbagai kebijakan yang diluncurkan telah mendapatkan publikasi luas melalui portal berita, siaran televisi, hingga diskusi interaktif di platform media sosial.

Selain itu, strategi komunikasi juga diperkuat melalui penyajian informasi dalam berbagai format yang lebih mudah dipahami publik, seperti infografis dan video singkat. Konten informasi tersebut disebarluaskan secara masif melalui platform media sosial, antara lain Instagram, TikTok, dan YouTube. Kehumasan turut menyelenggarakan webinar bersama

sivitas akademika sebagai ruang dialog untuk memperdalam pemahaman mengenai kebijakan kementerian. Fungsi kehumasan tidak hanya berperan dalam publikasi program, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam pengelolaan isu-isu publik. Melalui pendekatan komunikasi yang cepat, tepat, dan terbuka, isu yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat dapat diredam dan dikelola dengan baik, sehingga stabilitas opini publik dapat terjaga.

Lebih jauh, kehumasan berkontribusi dalam membangun citra positif kementerian, sejalan dengan komitmen peningkatan jumlah riset di perguruan tinggi. Diseminasi informasi terkait target peningkatan riset mulai gencar dilakukan. Di sisi lain, media massa juga diajak untuk memperluas jangkauan publikasi hasil-hasil inovasi yang lahir dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Dengan mengedepankan strategi komunikasi yang modern dan inklusif, peran kehumasan tidak lagi sebatas juru bicara kementerian. Kehumasan kini menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, memastikan kebijakan kementerian dapat dipahami dengan baik serta memperoleh dukungan publik. Keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansinya, melainkan juga dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat.

1) Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi tidak hanya sebatas penyampaian informasi, melainkan juga memastikan bahwa informasi tersebut dapat diterima oleh publik yang tepat, pada waktu yang tepat, serta melalui cara yang sesuai, sehingga mudah dipahami dan diterima oleh khalayak luas. Perumusan strategi komunikasi yang efektif menjadi hal krusial untuk memastikan setiap pesan yang disampaikan dapat dimengerti secara jelas oleh masyarakat.

Tanpa perencanaan komunikasi yang matang, terdapat risiko pesan disalahartikan atau kehilangan makna substansialnya. Oleh karena itu, strategi komunikasi dirancang untuk menjamin bahwa penyebaran informasi berlangsung dengan efektif, mudah dipahami, serta sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik publik yang dituju.

Selama periode 120 hari pertama, penerapan strategi komunikasi di lingkungan Kemdiktisaintek dilakukan melalui beberapa langkah taktis sebagai berikut:

a) **Publikasi Media Massa.** Penyebarluasan informasi terkait kebijakan dan program kementerian dilakukan melalui penerbitan artikel, wawancara, serta penyampaian siaran pers di berbagai media massa, baik cetak maupun digital.
b) **Media Sosial dan Digital.** Optimalisasi pemanfaatan berbagai platform media sosial, seperti Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan YouTube untuk mempercepat penyebarluasan informasi serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat.
c) **Kemitraan dengan Media.** Penguatan kerja sama dengan media nasional dan lokal dalam rangka publikasi program kerja kementerian, termasuk pembentukan grup komunikasi bersama Forum Wartawan Pendidikan guna mempercepat distribusi informasi dan membangun hubungan yang lebih erat dengan awak media.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas komunikasi publik kementerian, sehingga setiap kebijakan dan program kerja dapat tersampaikan secara optimal kepada masyarakat luas.

2) Capaian Utama 120 Hari di Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik

Selama 120 hari pertama pelaksanaan program kehumasan dan komunikasi publik, sejumlah capaian signifikan berhasil diraih sebagai hasil dari strategi komunikasi yang telah diterapkan. Berbagai aktivitas publikasi dan pengelolaan informasi melalui media sosial, media massa, serta pemantauan isu publik menjadi bagian integral dalam memperkuat penyebarluasan informasi kebijakan kementerian kepada masyarakat. Adapun capaian utama yang berhasil dicapai selama periode tersebut sebagai berikut:

a) Aktivitas di Media Sosial

Selama 120 hari pertama, lebih dari 50 konten terkait program dan kebijakan Kemdiktisaintek telah diunggah melalui berbagai platform media sosial. Penyebarluasan informasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap berbagai inisiatif yang dijalankan kementerian.

b) Publikasi di Media Massa

Sepanjang periode yang sama, telah dipublikasikan lebih dari 500 berita mengenai program dan kebijakan kementerian di media nasional dan lokal. Selain itu, telah dilaksanakan lebih dari 20 wawancara eksklusif dengan Menteri dan sejumlah pejabat kementerian guna memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat.

c) Titik Kunci Media Monitoring

Pemantauan pemberitaan selama 120 hari pertama mencatat total 3.257 pemberitaan terkait Kemdiktisaintek. Dari jumlah tersebut, pemberitaan bernada positif sebanyak 1.203 berita (37%), bernada netral sebanyak 1.481 berita (46%), dan bernada negatif sebanyak 545 berita (17%). Hal ini dapat dilihat melalui Tabel 5. Capaian ini menunjukkan upaya komunikasi publik yang intensif serta komitmen dalam menjaga transparansi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat secara luas.

Tabel 5. Total Pemberitaan Selama 120 Hari Kemdiktisaintek

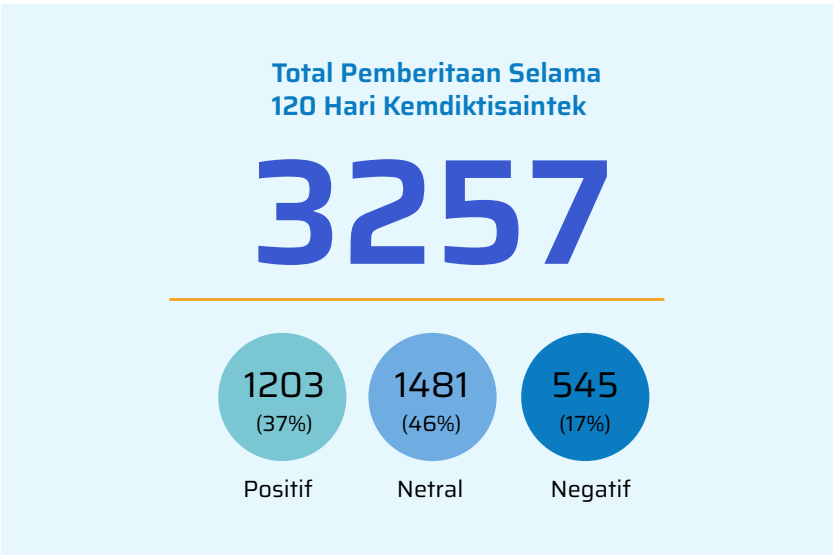

Tabel 6. Tren Pemberitaan Kemdiktisaintek 20 Oktober 2024 hingga 29 Januari 2025

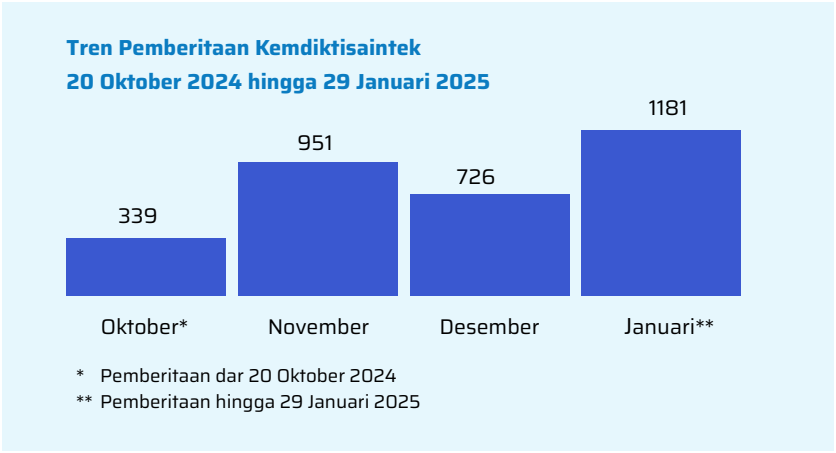

Terlihat dengan jelas melalui Tabel 6, bahwa tren pemberitaan hingga 120 hari Kemdiktisaintek, cenderung naik, yang mana pada Januari 2025 pemberitaan berjumlah 1.181 pemberitaan.

Untuk sebaran narasumber seperti terlihat pada Tabel 7, Mendiktisaintek menjadi narasumber pemberitaan terbanyak, dengan 876 pemberitaan.

Tabel 7. Sebaran Narasumber Pemberitaan Internal Kemdiktisaintek

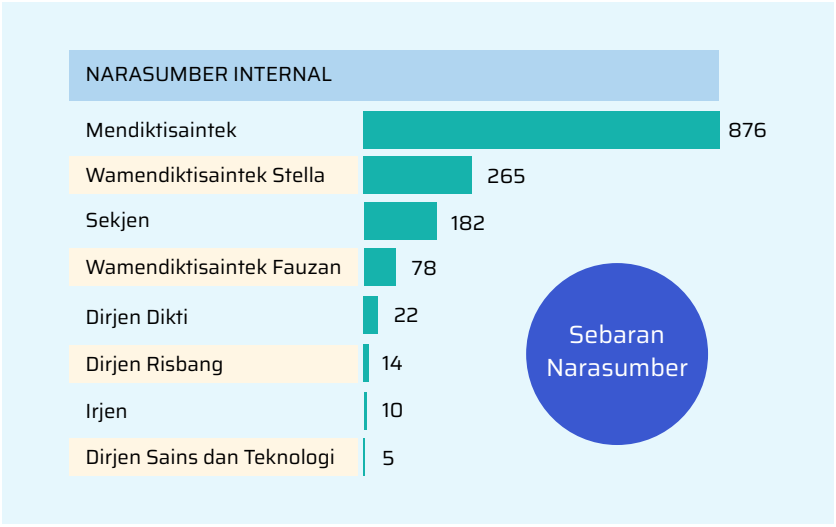

Sementara itu, di Tabel 8 dapat terlihat dengan jelas banyaknya siaran pers yang diangkat oleh media, antara lain sebagai berikut.

Tabel 8. Banyaknya Siaran Pers Kemdiktisaintek yang Diangkat Media

SIARAN PERS			
BULAN	HEADLINE	PROGRAM	JUMLAH
Desember	Kemdiktisaintek Gelar Anugerah Diktisaintek 2024	Event	83
Januari	Kemendikti Gelar Taklimat Media	Konferensi Pers	71
November	Kemendiktisaintek Siap Berkolab-orasi dalam Pencegahan Judi Online	Siaran Pers	24
Oktober	Terima Kunjungan Universitas Berkeley, Kemendiktisaintek Siap Kerjasama	Siaran Pers	8

d) Taklimat Media

Dalam rangka memperkuat komunikasi publik serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan strategis di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, Kemdiktisaintek telah mengadakan taklimat media untuk beberapa unit utama. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terkini mengenai program-program unggulan serta kebijakan-kebijakan terbaru yang tengah dijalankan.

Acara yang berlangsung di Gedung D, Kemdiktisaintek, Jakarta, pada tanggal 3 Januari 2025 seperti terlihat pada Gambar 45 dan 46 yang dihadiri oleh Menteri dan sejumlah pejabat kementerian serta perwakilan media massa. Taklimat media merupakan salah satu agenda rutin Kemdiktisaintek yang memberikan penjelasan mengenai berbagai upaya transformasi pendidikan tinggi, tantangan yang dihadapi, serta arah pengembangan inovasi guna mempercepat kemajuan di bidang sains dan teknologi nasional. Berbagai program terkait dampak positif yang juga akan dirasakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya turut disampaikan pada taklimat media tersebut.

Gambar 45. Mendiktisaintek Bersama Jajaran Pejabat Kemdiktisaintek
Dalam Taklimat Media Membahas Transformasi Pendidikan Tinggi
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Gambar 46. Mendiktisaintek Bersama Jajaran Pejabat Kemdiktisaintek
dan Perwakilan Media Massa
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Selain menjadi sarana penyebarluasan informasi, taklimat media juga dimaksudkan untuk membuka ruang dialog dengan publik serta memperoleh masukan konstruktif dari berbagai pihak terkait implementasi kebijakan yang telah dan akan dijalankan. Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan transparansi dalam pengelolaan pendidikan tinggi dan sains, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan inggi, dan dunia industri.

Di samping taklimat media yang bersifat umum, beberapa sesi taklimat media lainnya juga telah dilaksanakan secara tematik dalam rangka merespons isu-isu strategis yang berkembang, guna memastikan informasi yang akurat dan komprehensif dapat diterima oleh masyarakat. Pada tanggal 11 Februari 2025, taklimat media atau dikemas dalam acara "Ngopi Bareng Kemdiktisaintek" dengan menghadirkan Dirjen Riset dan Pengembangan, Dr. Fauzan Adziman, S.T., M.Eng. dan tim yang menyampaikan berbagai kebijakan Ditjen Risbang untuk mendukung visi dan misi serta program prioritas pemerintah (lihat Gambar 47).

Gambar 47. Taklimat Media Bersama Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Selanjutnya, tanggal 18 Februari 2025 sebagaimana terlihat di Gambar 48, agenda "Ngopi Bareng Kemdiktisaintek" menghadirkan tim dari Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi (Ditjen Saintek) untuk menyampaikan beberapa program unggulannya. Sekretaris Ditjen Sains dan Teknologi, M. Samsuri, menyampaikan bahwa Ditjen Saintek merupakan unit baru yang memiliki tiga direktorat teknis: Bina Talenta Sains dan Teknologi, Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif, serta Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi. Fokus utama Ditjen Saintek tahun ini adalah memperkuat ekosistem saintek nasional agar lebih membumi dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi, Yudi Darma, menegaskan pentingnya membangun masyarakat ilmu pengetahuan *(citizen-based science)* guna menanggulangi berbagai persoalan sosial serta mendorong pengambilan keputusan yang berbasis sains dan teknologi.

Ditjen Saintek akan melaksanakan program diseminasi melalui diplomasi sains yang dipadukan dengan seni agar lebih mudah dipahami dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, antara lain melalui program "Rapsodi Saintek dan Seni." Untuk aspek pemanfaatan, akan dikembangkan konsep laboratorium hidup di tengah masyarakat, yaitu ekosistem riset kolaboratif yang berbasis potensi lokal dan langsung menyatu dengan kehidupan warga. Selain itu, Ditjen Saintek juga mengelola Program Berdikari yang didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp40 miliar. Program ini berfokus pada riset berbasis potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui dua skema: EMAS (Ekonomi, Mandiri, Sejahtera) dan BERLIAN (Berdaya Saing, Efektif, Berkelanjutan).

Salah satu contoh pelaksanaannya adalah riset yang dilakukan oleh Konsorsium Pendidikan Vokasi Jawa Timur yang dikoordinasikan oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), dengan lima judul riset terintegrasi yang mencakup otomatisasi kandang sapi, teknologi susu tahan ultra panas (UHT), teknologi Internet untuk Segala *(Internet of Things/IoT)*, kendaraan listrik pengangkut hasil ternak, dan optimalisasi biogas dari limbah peternakan. Seluruh inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem sains dan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan serta membentuk masyarakat Indonesia yang berbasis

Gambar 48. Taklimat Media Bersama Tim Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

e) Pelayanan Publik

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan transparansi, serta dukungan terhadap keterbukaan informasi publik di lingkungan Kemdiktisaintek, dibentuk Unit Layanan Terpadu (ULT), yang didalamnya terdapat layanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), layanan informasi umum, pengaduan, dan pusat panggilan yang berlokasi di Lobi Lantai Dasar Gedung D Kemdiktisaintek.

ULT yang sudah beroperasi sejak tanggal 2 Januari 2025 ini merupakan miniatur seluruh layanan publik di kementerian dalam kerangka pembangunan reformasi birokrasi (area ke 8) dan zona integritas (area ke 6) dan juga unit bagi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun maksud dan tujuan didirikannya ULT Diktisaintek antara lain:
i) meningkatkan koordinasi antarinstansi pendukung;

ii) mempermudah masyarakat dalam hal permohonan data dan informasi, serta pengaduan yang terkait Diktisaintek;
iii) menyediakan layanan publik yang berkualitas dengan tingkat yang terstandar;
iv) meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelayan masyarakat; serta
v) menyediakan akses informasi yang mudah dan pelayanan publik berkualitas.

Adanya ULT Diktisaintek yang terlihat di Gambar 49, 50, dan 51 akan menjamin kepuasan masyarakat dengan waktu respons yang cepat dan solusi tepat melalui berbagai kanal antara lain:

- Tatap muka (*walk-in*)
- Pusat panggilan (*call center*) nomor 021-126
- Instagram - DM & Comment @kemdiktisaintek.ri
- Facebook - DM & Comment @kemdiktisaintek.ri
- X - DM & Comment @kemdiktisaintek.ri
- Whatsapp – pesan nomor WAB Kemdiktisaintek (085186069126)
- *Live chat* pada laman Diktisaintek dan PDDikti
- *Email*: ult@kemdiktisaintek.go.id

Gambar 49. Unit Layanan Terpadu Diktisaintek: Pusat Informasi dan Pelayanan Publik
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Gambar 50. Tim Layanan Unit Layanan Terpadu Diktisaintek:
Mendukung Pelayanan Publik yang Cepat dan Efisien
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Gambar 51. Tim Layanan Informasi ULT Diktisaintek:
Responsif dalam Memberikan Pelayanan Publik
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

6.5 Penguatan Kemitraan Strategis di Bidang Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Selama 120 hari pertama Kemdiktisaintek, sejumlah dukungan kerja sama diberikan melalui penyusunan, pendampingan, dan laporan berbagai program strategis dan implementatif dalam hubungan luar negeri dengan negara mitra. Hal ini turut dilakukan dengan menyesuaikan dengan bidang prioritas Kemdiktisaintek dan koordinasi melekat dengan para unit utama dalam mendukung percepatan peningkatan kapasitas pendidikan tinggi, sains, dan teknologi Indonesia. Adapun capaian utama yang berhasil dicapai selama periode 120 hari pertama terdiri dari:

1) Kerja Sama Luar Negeri

Kemdiktisaintek telah melalukan identifikasi mitra kerja sama luar negeri melalui koordinasi erat dengan paraK/L terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia serta Kedutaan Besar negara sahabat di Jakarta. Beberapa kunjungan kehormatan (*Courtesy Call*) yang telah dilakukan antara lain terlihat di Tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9. Daftar Negara yang telah Melakukan Kunjungan Kehormatan ke Kemdiktisaintek

Australia	Hungaria	Kroasia
Denmark	India	Palestina
Singapura	Yordania	Rwanda
Finlandia	Jerman	Ethiopia
Perancis	Jepang	Selandia Baru
RRT	Belarusia	Timor Leste
Inggris Raya	Amerika Serikat	Arab Saudi
Belanda	Tunisia	
Ukraina	Kenya	

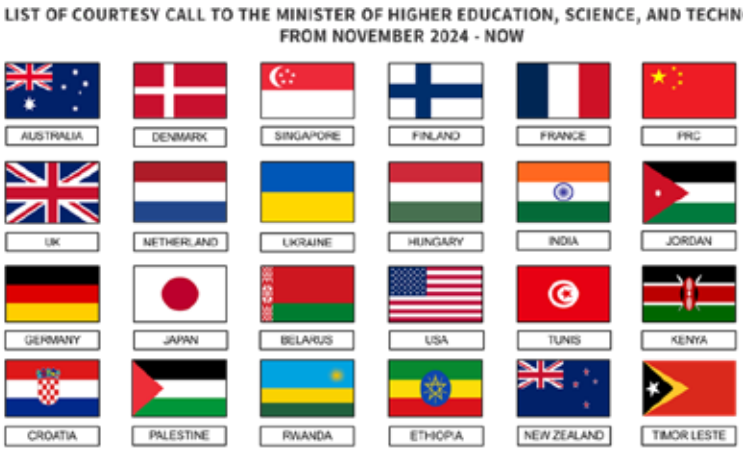

a) Kunjungan Kehormatan Duta Besar Australia (1 November 2024)

Kerja sama dengan Australia melibatkan partisipasi aktif perguruan tinggi kedua negara dalam program seperti:

- PAIR (Partnership for Australia – Indonesia Research),
- KONEKSI (Knowledge Partnership Platform Australia – Indonesia),
- PRIME (Partnership in Research Indonesia and Melbourne).

Beberapa perguruan tinggi Australia yang aktif terlibat antara lain Australian National University dan University of Melbourne. Potensi kerja sama meliputi ekonomi hijau *(green economy),* ekonomi biru *(blue economy),* pembangunan berkelanjutan *(sustainable development),* program mobilitas *(mobility programs),* serta beasiswa yang masih menjadi daya tarik utama dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Berikut dokumentasi (Gambar 52) kunjungan kehormatan tersebut.

Gambar 52. Pertemuan dengan Duta Besar Australia:
Membangun Kerja Sama Pendidikan dan Pengembangan SDM
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

b) Kunjungan Kehormatan Duta Besar Jepang (20 November 2024)

Kerja sama antara Indonesia dan Jepang baik di tingkat pemerintahan kedua negara maupun antar perguruan tinggi telah terjalin dengan cukup baik di berbagai sektor, termasuk:

- Program beasiswa bagi mahasiswa dan dosen Indonesia,
- Program riset bersama,
- Pembentukan konsorsium riset dalam bidang *artificial intelligence, green economy, renewable energy,* dan *advance materials*.

Berikut dokumentasi kunjungan tersebut.

Gambar 53. Penguatan Kerja Sama Indonesia-Jepang
dalam Pendidikan, Riset, dan Inovasi
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

c) Kunjungan Kehormatan Duta Besar Singapura (25November 2024)

Singapura merupakan mitra dan negara sahabat yang telah lama menjalin kerja sama komperhensif dengan Indonesia di berbagai bidang. Pada sektor pendidikan tinggi, sains, dan teknologi Indonesia dan Singapura memiliki program seperti:

- *Indonesia NTU Singapore Institute of Research for Sustainability and Innovation* (INSPIRASI) yang melibatkan perguruan tinggi Indonesia dan Nanyan Technological University, Singapura.
- *Youth Mobility Program* (YMP) yang bertujuan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia melalui kerja sama dengan sektor industri. Hal ini selanjutnya menjadikan Singapura sebagai mitra potensial sebagai pintu gerbang internasionalisasi pendidikan tinggi dan akses jaringan riset internasional.

Berikut dokumentasi kunjungan tersebut.

Gambar 54. Kunjungan Kehormatan Duta Besar Singapura:
Memperkuat Kemitraan dalam Pendidikan, Sains, dan Teknologi
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

d) Kunjungan Kehormatan Duta Besar RRT (31 Desember 2024)

Kemitraan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah mencapai ke tahap kerja sama strategis komperhensif yang turut membawa dampak positif dalam pengembangan sektor pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dari kedua negara. Hal ini turut diperkuat dengan kunjungan Bapak Presiden RI ke RRT pada bulan November 2024 sebagai kunjungan kenegaraan perdana setelah pelantikan beliau menjadi Presiden RI. Melalui kunjungan tersebut pula turut ditindaklanjuti dalam peningkatan pembahasan pengembangan kerja sama antar kedua negara seperti:

- eksplorasi potensi program beasiswa,
- pertukaran praktik terbaik dalam sistem pendidikan, dan
- lokakarya pendidikan tinggi.

Kedua negara juga telah berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama di sektor pendidikan tinggi terutama dalam pelibatan perguruan tinggi kedua negara.

Gambar 55. Kunjungan Kehormatan Duta Besar RRT:
Memperkuat Kemitraan Strategis dalam Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

e) Kunjungan Kehormatan Duta Besar Palestina (17 Januari 2025)

Indonesia memandang Palestina sebagai negara sahabat yang amat penting terutama di kawasan Timur Tengah. Dukungan Indonesia terhadap Palestina sesuai dengan semangat kebijakan nasional untuk terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Dalam hal ini, Kemdiktisaintek terus berkomiten untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia Palestina melalui:

- program beasiswa dan pelatihan, dan
- kerja sama antar perguruan tinggi Indonesia dan Palestina.

Gambar 56. Kunjungan Kehormatan Duta Besar Palestina:
Penguatan Kerja Sama Pendidikan dan Pengembangan SDM
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

f) Kunjungan Kehormatan British Group Inter-Parliamentary Union (19 Februari 2025)

Kunjungan kehormatan ini dilakukan disela-sela kunjungan parlemen Inggris yang membawahi bidang pendidikan ke Indonesia. Pada pertemuan ini, pihak Indonesia menyampaikan kebutuhan:

- Pengembangan SDM pada bidang Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*/ STEM) sebagai dasar pembangunan negara, begitu pula dengan pengembangan sains dan teknologi.
- Dukungan terhadap program ketahanan pangan, ketahanan energi, serta hilirisasi (*food security, energy security and dowstreaming*) untuk mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Untuk itu, dibutuhkan kerja sama internasional termasuk dengan Inggris untuk mencapai visi menuju Indonesia Emas 2045. Adapun peluang kerja sama dengan Inggris juga dapat dilakukan pada sektor energi dimana Inggris memiliki banyak perusahaan yang dapat berinvestasi di sektor energi terbarukan (*renewable energy)* dan industri berbasis teknologi. Pihak Indonesia juga menyampaikan program prioritas pemerintah

yaitu program makan bergizi gratis dan program sekolah unggulan (SMA Garuda).

Sebagai hasil nyata dari salah satu kerja sama Inggris-Indonesia bidang pendidikan tinggi, yaitu pembangunan dua kampus cabang dari Inggris di Indonesia:

- King's College London di Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari, dan
- Lancaster-Deakin University (kolaborasi antara perguruan tinggi Inggris dan Australia) di Bandung.

Gambar 57. Kunjungan Kehormatan British Group Inter-Parliamentary Union: Penguatan Kerja Sama Pendidikan dan Teknologi untuk Indonesia Emas 2045. Dokumentasi: Humas Diktisaintek

2) Dukungan Administratif dalam Implementasi Kerja Sama

Pemberian dukungan administrasi dalam implementasi program kerja sama luar negeri bagi perguruan tinggi Indonesia turut diberikan melalui kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Dukungan yang diberikan berupa:

- surat rekomendasi kerja sama,
- permohonan penyampaian nota diplomatik, dan
- dukungan implementasi kerja sama luar negeri di lingkungan perguruan tinggi.

Contoh implementasi:

- Kerja sama antara Kemdiktisaintek, Institut Pertanian Bogor, dan KOICA (Korea International Cooperation Agency) dalam pemanfaatan tenaga ahli, dan
- Dukungan rekomendasi kerja sama antara Universitas Pendidikan Indonesia dengan Korea National University of Education.

3) Partisipasi dalam Forum Regional dan Multilateral

Sesuai dengan salah satu sasaran utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, visi nomor 3 yaitu "Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat", Kemdiktisaintek telah bekerja sama dengan Kemdikdasmen dalam mengikuti forum-forum dalam lingkup subkawasan, kawasan, maupun multilateral sebagai berikut.

1. G20 - *1st Education Working Group*
   G20 merupakan forum kerja sama multilateral yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa (UE). G20 dibentuk untuk mengatasi krisis ekonomi global dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia kembali berpartisipasi dalam pertemuan G20 Education Working Group di bawah keketuaan Afrika Selatan, dengan fokus pada "Mutual Recognition of Qualifications in a Global Context"
2. BRICS – *Education Working Group*
   Kemdiktisaintek turut serta dalam pertemuan pertama Education Working Group BRICS guna memperkuat kerja sama pendidikan di tingkat global.
3. BIMP-EAGA – *Strategic Planning Meeting 2025*
   Indonesia terlibat dalam penyusunan rencana strategis untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dalam subkawasan BIMP-EAGA.

6.6 Peningkatan Performansi Pusat Data dan Teknologi Informasi

Dalam 120 hari pertama, Kemdiktisaintek telah mencapai berbagai kemajuan dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Implementasi berbagai sistem digital telah memastikan kelancaran pengelolaan maha data serta penyediaan layanan digital bagi masyarakat.

1. Peralihan Domain Kementerian (kemdiktisaintek.go.id)

Sebagai bagian dari penyesuaian identitas kementerian, domain resmi telah beralih dari Kemendikbudristek ke **kemdiktisaintek.go.id**. Langkah ini bertujuan meningkatkan tata kelola informasi, memperkuat identitas kelembagaan, serta mendukung transparansi layanan publik. Peralihan domain dilakukan melalui tahapan berikut:

- **Persiapan infrastruktur** untuk memastikan kompatibilitas sistem lama dan baru.
- **Migrasi data** guna mempertahankan kelangsungan layanan.
- **Pengujian sistem** untuk menjamin keamanan dan stabilitas operasional.

2. Penguatan Akurasi dan Standarisasi Data PDDikti

Penguatan Akurasi dan Standarisasi Data PDDikti merupakan langkah strategis dalam memastikan validitas dan keterpaduan data pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan sistem yang terintegrasi dari berbagai sumber dan aksesibilitas dapat mendukung transparansi serta pengambilan kebijakan berbasis data yang lebih akurat.

Hal ini terlihat dari Gambar 58. Struktur Sistem Digital Kemdiktisaintek, yang menunjukkan keterhubungan berbagai sistem data, mulai dari *Neo Feeder*, PDDikti Admin, hingga integrasi dengan berbagai lembaga terkait melalui API. Struktur ini memastikan bahwa data pendidikan tinggi dapat digunakan secara optimal untuk mendukung kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti.

Struktur Sistem Digital Kemdiktisaintek

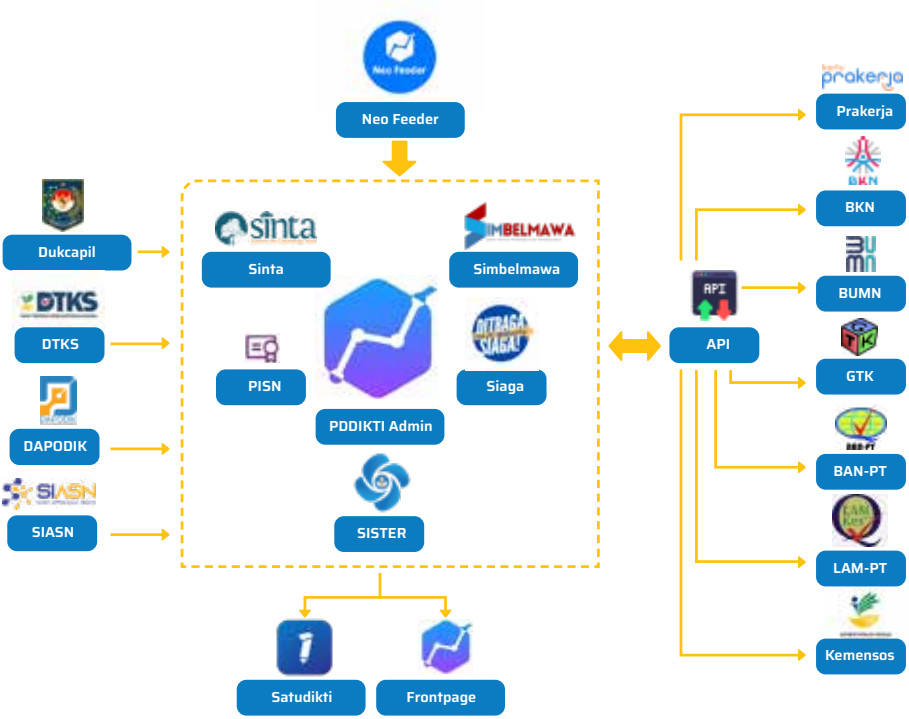

Gambar 58. Struktur Sistem Digital Kemdiktisaintek

a. Perilisan Sistem Maturitas Pengelolaan PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi).
Sistem ini dirancang untuk mengukur tingkat kematangan pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi. Sistem ini dirilis pada tanggal 25 Desember 2024. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan:
   - Peningkatan transparansi dan akuntabilitas data akademik.
   - Dukungan terhadap pengambilan keputusan berbasis data.
   - Standarisasi pengelolaan data perguruan tinggi.

Maturitas PDDikti bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data pendidikan tinggi di Indonesia.

Contoh konkret dari maturitas PDDikti yang dapat dilihat:

1. **Akses Terbuka ke Data Pendidikan**: PDDikti menyediakan data pendidikan tinggi secara terbuka melalui laman PDDikti admin. Informasi tentang status akreditasi program studi, jumlah mahasiswa, fasilitas pendidikan, dan data relevansi lainnya dapat diakses oleh publik, lembaga pendidikan, hingga pihak-pihak terkait lainnya.
2. **Pengelolaan Data Terpusat**: Dengan PDDikti, data dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dikelola secara terpusat dan sistematis. Hal ini memungkinkan untuk memantau perkembangan dan kinerja masing-masing institusi pendidikan tinggi dengan lebih mudah dan transparan.
3. **Pemantauan Kinerja Perguruan Tinggi**: PDDikti mendukung evaluasi dan monitoring kinerja perguruan tinggi berdasarkan data yang terhimpun. Pihak terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lembaga akreditasi, serta masyarakat dapat mengakses informasi ini untuk menilai kinerja dan kualitas pendidikan di setiap institusi.
4. **Sistem Pemeringkatan**: Melalui data yang tersedia di PDDikti, lembaga atau institusi pendidikan tinggi dapat diperbandingkan berdasarkan sejumlah indikator kinerja, yang mendorong kompetisi sehat dan transparansi di antara perguruan tinggi.
5. **Laporan Keuangan dan Anggaran**: PDDikti juga memungkinkan akses terhadap laporan keuangan dan anggaran perguruan tinggi. Ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana dana pendidikan dikelola, baik dari pemerintah, mahasiswa, maupun sumber lainnya.
6. **Proses Akreditasi yang Terintegrasi**: Sistem ini memfasilitasi proses akreditasi program studi atau perguruan tinggi yang lebih transparan, karena data dan laporan yang digunakan untuk penilaian disusun dan tersedia secara sistematis dalam PDDikti.

Contoh konkret dari transparansi bisa dilihat bagaimana masyarakat atau calon mahasiswa dapat mengakses informasi mengenai akreditasi program studi yang mereka minati atau membandingkan data statistik antara perguruan tinggi satu dengan lainnya.

Dengan begitu, pengelolaan PDDikti bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan oleh publik dan pemerintah.

Berikut adalah tampilan dasbor maturitas PDDikti.

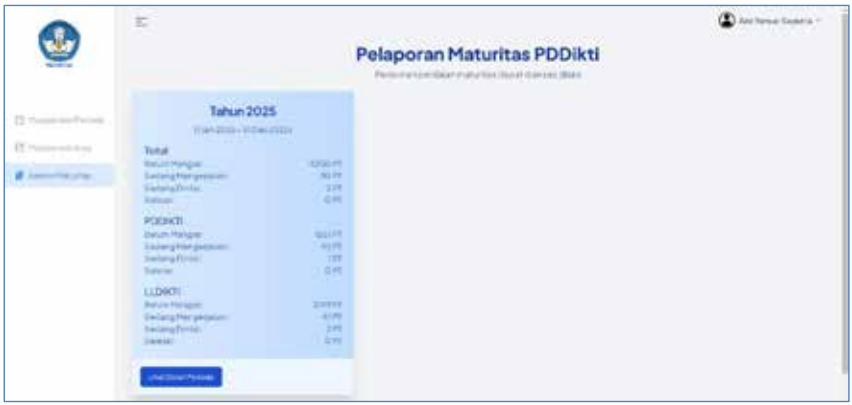

Gambar 59. Laman Awal Dasbor Maturitas PDDikti

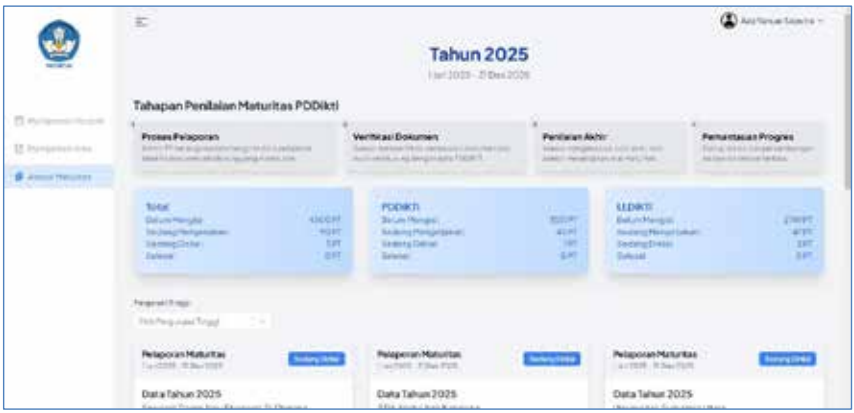

Gambar 60. Tampilan Tahapan Penilaian Maturitas PDDikti

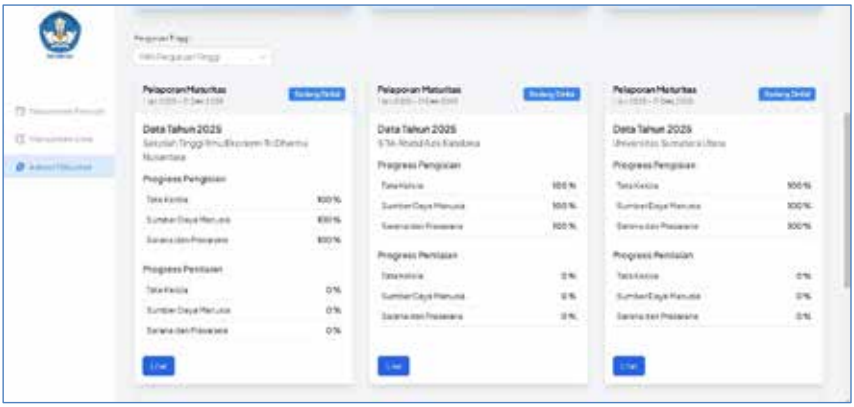

Gambar 61. Tampilan Pelaporan Maturitas Perguruan Tinggi PDDikti

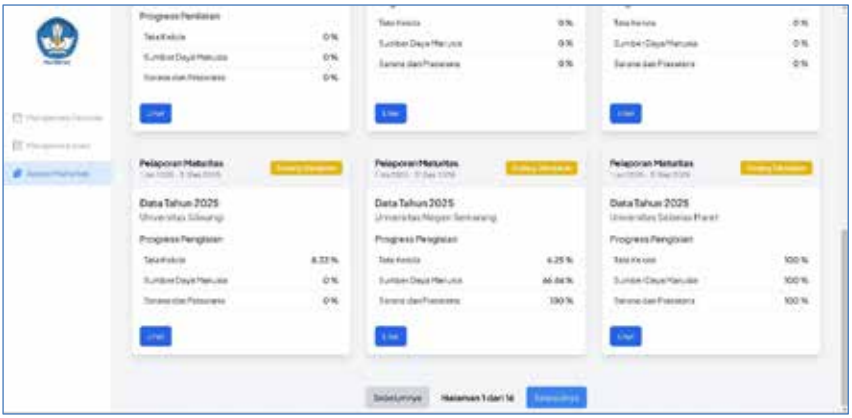

Gambar 62. Tampilan Proses Penilaian Pelaporan Maturitas Perguruan Tinggi di PDDikti

b. Pendataan Program Studi Spesialis Rumah Sakit Pendidikan

Kemdiktisaintek telah menerbitkan dokumen Petunjuk Teknis Pendataan Program Studi Spesialis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggaran Utama (RSPPU) pada PDDikti. Lingkup pendataan mencakup:

- **Identitas Program Studi Spesialis.** Informasi dasar terkait program studi spesialis yang ada di rumah sakit pendidikan, termasuk nama, kode, dan status prodi.
- **Fasilitas Pendukung,** seperti ruang kuliah, ruang praktek, serta peralatan medis yang digunakan dalam proses pendidikan.

- **Dosen Pengajar**. Data mengenai tenaga pengajar yang mengajar di program studi spesialis, termasuk kualifikasi akademik, pengalaman, dan jabatan fungsional.
- **Data Mahasiswa,** termasuk jumlah mahasiswa, latar belakang pendidikan, dan aktivitas kuliah mahasiswa.

3. Pembaruan dan Integrasi Data Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER)

SISTER dikembangkan untuk mempermudah pengelolaan data tenaga pendidik di perguruan tinggi. Beberapa fitur baru yang telah dirilis:

a) Menu Manajemen PTK pada SISTER

SISTER adalah sistem yang dikembangkan untuk mengelola dan memantau sumber daya pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya terkait dengan data dosen dan tenaga kependidikan (PTK). Sistem ini membantu perguruan tinggi dalam memantau, mengelola, dan melaporkan data PTK secara terintegrasi dan terstandarisasi. Menu Manajemen PTK pada SISTER merupakan fitur yang menyediakan pola pengelolaan terpusat dalam proses pendataan, perubahan hingga penonaktifan dosen. Fitur baru ini merupakan terobosan dalam penyederhanaan layanan satu pintu terintegrasi untuk pengelolaan data dosen. Selain itu terdapat integrasi dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Dukcapil (verifikasi NIK) dan data BKN (verifikasi NIP). Hal ini diharapkan dapat menjadi bagian penting yang memberikan berbagai kemudahan dan fungsionalitas baru bagi pengelola perguruan tinggi dalam melakukan pendataan dan pelaporan PTK secara lebih terstruktur dan tepat waktu.

b) Menu Penugasan Dosen pada SISTER

SISTER dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemdiktisaintek yang berfungsi untuk memantau dan mengelola data sumber daya manusia (SDM) di perguruan tinggi. Salah satu komponen penting dalam SISTER adalah fitur terkait penugasan dosen, yang memungkinkan perguruan tinggi untuk melakukan pendataan dan pengelolaan tugas

dosen secara lebih sistematis dan terintegrasi. Rilis terbaru dari menu Penugasan Dosen pada SISTER bertujuan untuk menyederhanakan proses penugasan dosen, meningkatkan efisiensi administrasi, serta memastikan bahwa data mengenai beban kerja dan kontribusi dosen dalam kegiatan akademik tercatat dengan jelas dan akurat. Dengan adanya fitur ini, perguruan tinggi dapat lebih mudah mengelola informasi terkait penugasan dosen di berbagai kegiatan akademik, termasuk pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Adapun lingkup pendataan penugasan dosen meliputi:

- Beban Mengajar. Perguruan tinggi dapat memasukkan data tentang jumlah jam mengajar setiap dosen, termasuk mata kuliah yang diajarkan, kelas yang dibimbing, serta jumlah mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah tersebut.
- Penugasan Non-Akademik. Selain pengajaran, dosen juga dapat diberikan tugas lainnya, seperti tugas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau tugas-tugas administrasi dan pengelolaan di perguruan tinggi.
- Detail Penugasan. Setiap penugasan dapat dilengkapi dengan informasi lebih lanjut, seperti jenis tugas (mengajar, meneliti, mengabdi, dan sebagainya), hingga waktu pelaksanaan.

Rilis menu Penugasan Dosen pada SISTER adalah langkah penting dalam meningkatkan manajemen sumber daya manusia di perguruan tinggi Indonesia. Dengan sistem yang lebih terstruktur dan terintegrasi, pengelolaan tugas dosen menjadi lebih efisien, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, fitur ini juga memudahkan perguruan tinggi dalam memenuhi standar yang diperlukan untuk akreditasi dan evaluasi kualitas pendidikan tinggi.

Dengan adanya fitur ini, perguruan tinggi diharapkan dapat lebih mudah mengelola penugasan dosen, mengoptimalkan beban kerja dosen, dan meningkatkan kualitas kinerja akademik di Indonesia.

c) Dasbor Data Pokok Dosen Pasca Pemadanan Data pada SISTER

Fitur ini menyediakan tampilan visual terpusat (*dashboard*) yang menampilkan data pokok dosen setelah proses pemadanan data (penyelarasan dan validasi data antar sistem). Tujuannya adalah:

- Memberikan gambaran menyeluruh tentang kelengkapan dan akurasi data dosen pasca integrasi dengan sumber eksternal (seperti Dukcapil dan BKN).
- Menampilkan indikator kualitas data, seperti persentase data yang telah tervalidasi, ketidaksesuaian data, atau data yang perlu diperbarui.
- Memudahkan perguruan tinggi dalam memantau pembaruan data dosen secara langsung, termasuk Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), status kepegawaian, serta riwayat pendidikan.

d) Dasbor Beban Kerja Dosen (BKD) pada SISTER

Dasbor BKD dirancang untuk memantau dan mengelola distribusi tugas dosen sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Fitur ini mencakup:

- Visualisasi beban kerja dosen dalam pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tugas tambahan.
- Perbandingan antara beban kerja ideal dan realisasi per semester.
- Integrasi dengan data penugasan sebelumnya untuk analisis kinerja dan evaluasi produktivitas dosen.

e) Layanan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen

Fitur ini memfasilitasi proses pengajuan kenaikan jabatan fungsional dosen (Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar) dengan:

- Panduan terstruktur untuk mengunggah dokumen persyaratan (portofolio, publikasi, sertifikat, dan lain-lain).
- Integrasi data kinerja dosen (BKD, penelitian, pengabdian) sebagai bahan evaluasi.

f) Implementasi Terbatas *Single Sign-On* (SSO) PDDIKTI

Kini SISTER mengadopsi SSO PDDIKTI untuk mempermudah akses bagi validator data PTK. Implementasi ini bertujuan:

- Menyederhanakan akses dengan menggunakan satu akun (SSO) untuk beberapa sistem (PDDIKTI dan SISTER).
- Meningkatkan keamanan melalui autentikasi terpusat yang dikelola Pusdatin Kemdiktisaintek.

g) Peralihan Penggunaan Nomor Induk Dosen (NID) Menjadi NUPTK (90,9%) pada SISTER

SISTER kini beralih menggunakan NUPTK sebagai identitas utama dosen, menggantikan NID. Hal ini dilakukan untuk:

- Menyelaraskan dengan kebijakan nasional tentang standardisasi data pendidik.
- Mengurangi duplikasi data dan memastikan validasi NIDN/NUP/NUPTK secara terpusat.
- Progres: 90,9% data dosen di SISTER telah menggunakan NUPTK, sisanya dalam proses sinkronisasi.

h) Pemadanan Data Dosen dengan Dukcapil dan BKN

Proses pemadanan data ini telah mencapai 91,23% dan melibatkan integrasi data dosen di SISTER dengan:

- Dukcapil (Data Kependudukan): Memvalidasi NIK, nama, tanggal lahir, dan alamat.
- BKN (Badan Kepegawaian Negara): Memverifikasi status kepegawaian, golongan, dan masa kerja.

Manfaatnya adalah:

- Memastikan kesesuaian data dosen dengan rekam jejak kependudukan dan kepegawaian.
- Meningkatkan akuntabilitas data PTK untuk kebutuhan pelaporan nasional.
- Progress 91,23% data dosen telah tervalidasi melalui integrasi ini.

Berikut dalam Gambar 63, 64, 65, 66, dan 67 merupakan tampilan dasbor dan statistik pengguna aman SISTER setelah adanya penambahan dan penyesuaian fitur terbaru.

Gambar 63. Tampilan Dasbor Dosen dengan Fitur Filter

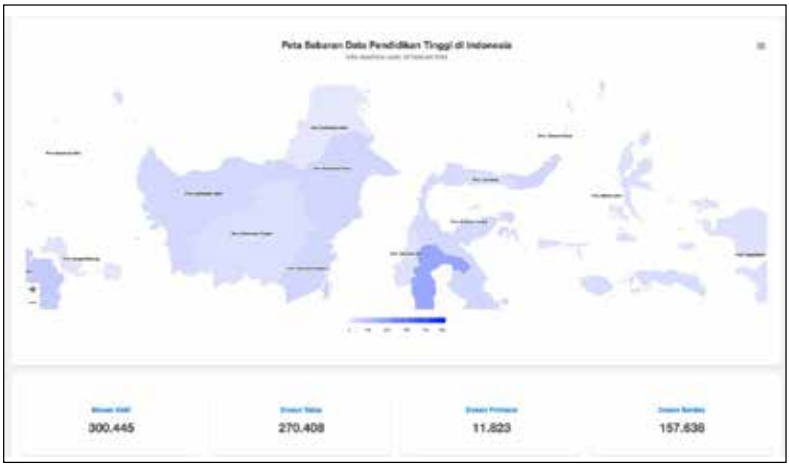

Gambar 64. Tampilan Dasbor Dosen dengan Fitur Filter

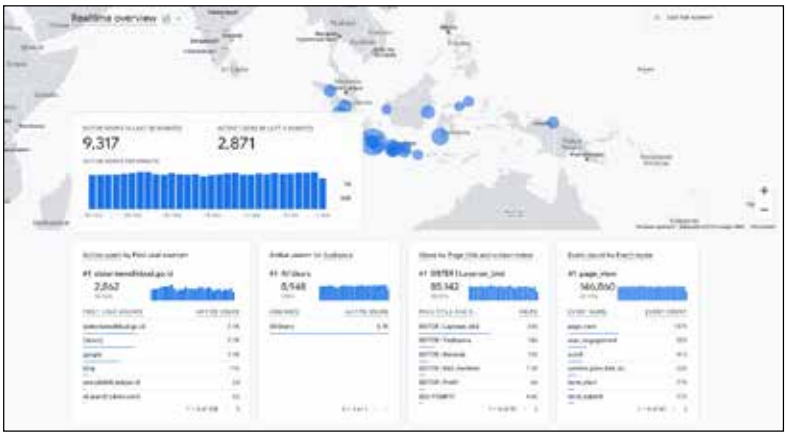

Gambar 65. Tampilan Peta Sebaran Data Pendidikan Tinggi di Indonesia

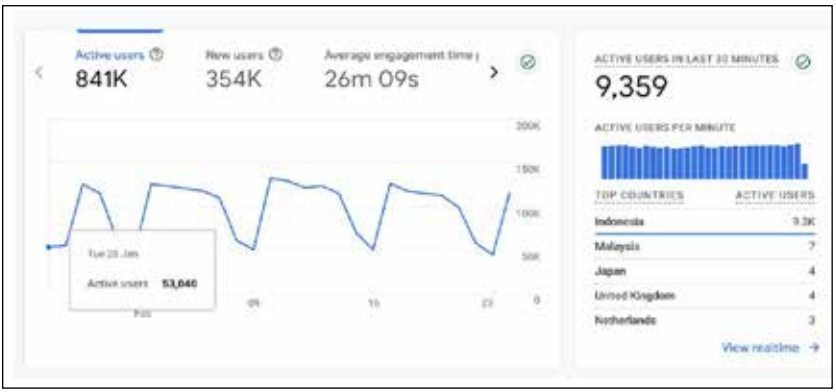

Gambar 66. Tampilan Tinjauan Waktu Nyata Pengguna SISTER

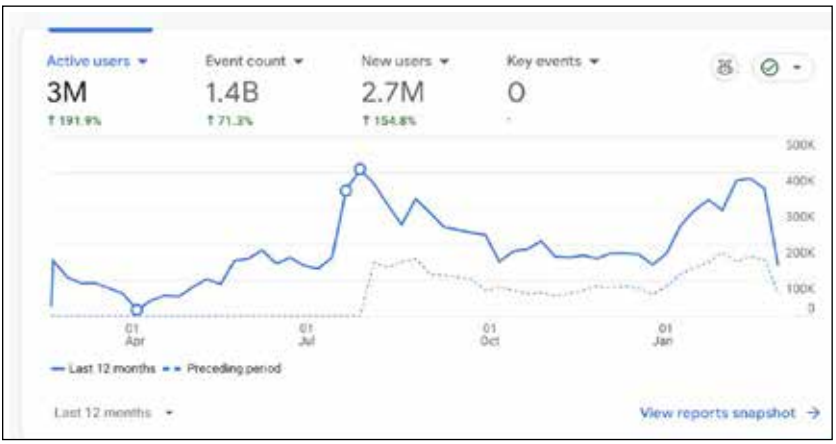

Gambar 67. Tampilan Aktifitas Pengguna SISTER di Berbagai Negara

4. Peningkatan Keamanan dan Efisiensi Akses Digital

a) Rilis Otentifikasi Pengguna pada SSO PDDikti

Salah satu fitur penting yang terus diperbarui adalah otentifikasi sekali masuk atau *single sign-on* (SSO) untuk PDDikti. Fitur ini meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna dalam mengakses layanan digital PDDikti, memungkinkan akses multi-aplikasi dengan satu log masuk atau *login*.

Dampak praktis dari implementasi SSO pada PDDikti, baik pengguna (mahasiswa, dosen, dan staf) maupun pengelola sistem pendidikan dapat menikmati berbagai keuntungan, mulai dari kemudahan akses, keamanan yang lebih baik, efisiensi waktu, hingga pengelolaan yang lebih baik dalam hal administrasi dan keamanan data.

Tampilan Desain SSO dapat terlihat jelas dalam Gambar 68 sebagai berikut.

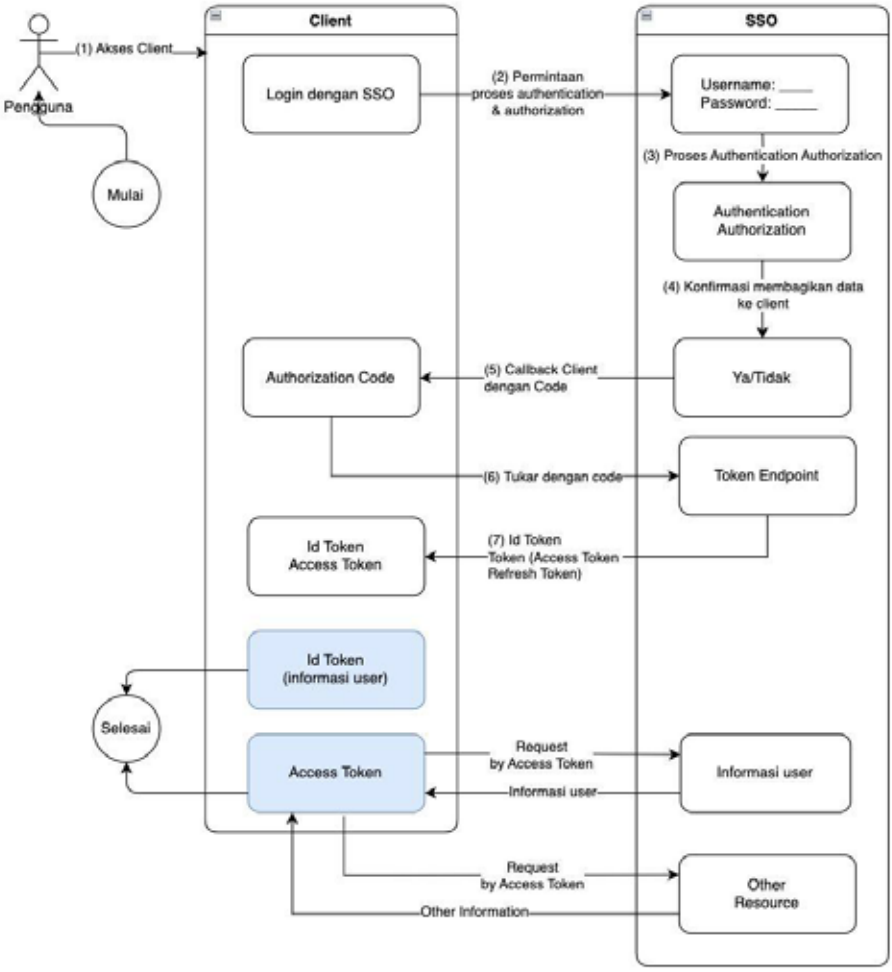

Gambar 68. Tampilan Proses Bisnis SSO pada PDDikti

b) Pembaruan SuperApps Satudikti Versi 3.3.1

Satudikti dikembangkan untuk menyediakan berbagai layanan pendidikan tinggi yang lebih terintegrasi dalam satu platform. Kemdiktisaintek berupaya untuk terus mengembangkan fitur-fitur baru seperti integrasi antar aplikasi, perbaikan, dan peningkatan kinerja untuk mendukung kemudahan akses. Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, mengoptimalkan fungsionalitas sistem, serta memberikan kemudahan dalam pengelolaan data yang lebih efisien.

Peningkatan pada versi terbaru meliputi:

- Antarmuka yang lebih intuitif.
- Penguatan sistem keamanan.
- Perbaikan galat atau *bug* dan peningkatan performa.
- Tampilan desain yang lebih ramah pengguna dan memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai fitur yang disediakan.

Untuk lebih jelasnya, Tampilan *Frontpage* Laman Satudikti terlihat dalam Gambar 69 dan 70 sebagai berikut.

Gambar 69. Tampilan Depan Platform SatuDikti:
Layanan Terintegrasi untuk Pendidikan Tinggi

Gambar 70. Tampilan Kategori Pengguna Layanan SatuDikti:
Akses Mudah bagi Mahasiswa, Dosen, dan Umum

5. Rencana Strategis ke Depan

Untuk mempercepat transformasi digital di lingkungan pendidikan tinggi, beberapa langkah strategis yang direncanakan adalah:

- 100% pemadanan data dosen dengan Dukcapil dan BKN dalam 6 bulan ke depan.
- Implementasi otomatisasi laporan akademik berbasis AI dalam 1 tahun.
- Integrasi layanan digital dengan sistem internasional untuk validasi sertifikat akademik.
- Pengembangan fitur studi penelusuran *(tracer study)* alumni di PDDikti untuk meningkatkan pemantauan lulusan.

Dengan berbagai inovasi dan peningkatan sistem ini, Kemdiktisaintek berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi layanan pendidikan tinggi berbasis digital serta mendukung pengelolaan data yang transparan dan akurat.

6.7 Renovasi Gedung dan Ruang Kerja dalam 120 Hari Kemdiktisaintek

Penetapan nomenklatur Kemdiktisaintek membawa konsekuensi pada penataan ruang kerja yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan serta pegawai sesuai struktur organisasi yang baru. Oleh karena itu, dilakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan ruang kerja yang efisien dan fungsional.

a) Alokasi dan Penataan Ruang Kerja

Berdasarkan hasil perhitungan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, kondisi eksisting ruang perkantoran dapat mengakomodasi kebutuhan alokasi ruang kerja bagi tiga kementerian. Hal ini disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 9 Desember 2024, dengan melibatkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), Direktur Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta Kepala Biro Umum Sekretariat Negara. Rapat ini membahas alokasi penggunaan Gedung eks Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan. Selain itu, dilakukan pula peninjauan langsung pada tanggal 9 s.d. 10 Desember 2024 untuk memastikan kesesuaian hasil perhitungan SBSK dengan kebutuhan riil di lapangan.

Sebagai hasil dari koordinasi tersebut, Kemdiktisaintek memperoleh alokasi penggunaan 16 (enam belas) lantai dari total 18 (delapan belas) lantai Gedung D. Pembagian lantai sebagai berikut:

- Lantai 1: Lobi utama.
- Lantai 2: Ruang pertemuan besar (Graha Diktisaintek)
- Lantai 3 - 18 (kecuali Lantai 11 dan 16): Ruang kerja kementerian.

Penanggung jawab Mekanikal, Elektrikal, dan Perpipaan (*Mechanical, Electrical, and Plumbing*/MEP) Gedung D diserahkan kepada Kemdiktisaintek, yang kini tengah melakukan berbagai upaya renovasi guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan fungsional.

b) Progres Renovasi dan Penataan Ruang Kerja

Sejak Oktober 2024, sejumlah kegiatan renovasi dan penataan ruang telah dilaksanakan, antara lain meliputi:

- **Renovasi area lobi utama untuk meningkatkan kenyamanan dan profesionalisme.**

Tampilan area lobi sebelum renovasi terlihat pada Gambar 71.

Gambar 71. Tampilan Area Lobi Kemdiktisaintek Sebelum Renovasi
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Selanjutnya setelah mengalami renovasi yang terlihat di Gambar 72, area lobi kini menghadirkan suasana yang lebih modern, elegan, dan profesional. Dengan desain yang lebih terbuka dan pemilihan material berkualitas, ruang ini memberikan kesan luas serta meningkatkan kenyamanan bagi para pengunjung.

Penerangan yang lebih baik, tata letak furnitur yang lebih efisien, serta sentuhan elemen dekoratif yang harmonis menjadikan

area lobi sebagai ruang yang lebih fungsional dan representatif. Selain itu, integrasi elemen alam seperti tanaman hias dan aksen kayu menambah nuansa hangat, menciptakan lingkungan yang tidak hanya estetik tetapi juga lebih ramah dan menyambut.

Dengan renovasi ini, area lobi kini mampu mendukung berbagai aktivitas dengan lebih efektif, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi setiap tamu dan pengguna fasilitas.

Gambar 72. Lobi Utama Setelah Renovasi: Modern, Elegan, dan Fungsional
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

- **Peningkatan ruang kerja Menteri, Wakil Menteri, Staf Khusus Menteri, dan Staf Ahli Menteri.**

  Sebagai bagian dari upaya peningkatan fasilitas, ruang kerja Menteri, Wakil Menteri, Staf Khusus Menteri, dan Staf Ahli Menteri telah mengalami renovasi menyeluruh. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih modern, nyaman, dan efisien, guna mendukung produktivitas serta efektivitas kerja.

Seperti terlihat di Gambar 73, area resepsionis utama dirancang dengan tampilan yang lebih elegan dan profesional, menghadirkan suasana yang representatif dan menyambut bagi para tamu serta pegawai. Sentuhan material kayu dan marmer menambah kesan eksklusif dan modern. Ruang pertemuan yang lebih luas dan fleksibel kini dilengkapi dengan pencahayaan yang lebih baik serta desain akustik yang meningkatkan kenyamanan dalam diskusi dan koordinasi tim. Ruang kerja individu dengan desain kaca transparan memberikan keseimbangan antara privasi dan keterbukaan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan kolaboratif. Ruang rapat yang diperbarui kini memiliki desain ergonomis dan estetis, mendukung suasana yang lebih formal namun tetap nyaman untuk diskusi strategis.

Dengan renovasi ini, ruang kerja para pimpinan Kementerian kini lebih representatif dan mendukung kinerja yang lebih optimal dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya.

Gambar 73. Renovasi Ruang Kerja: Modernisasi dan Kenyamanan untuk Kinerja Optimal
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

- Peningkatan fasilitas umum seperti ruang rapat dan area layanan publik.
- Pekerjaan MEP *(Mechanical, Electrical, and Plumbing)* guna meningkatkan efisiensi energi.
- Penataan lingkungan kantor agar lebih ramah lingkungan dan ergonomis.

Sebagai bagian dari strategi percepatan penyelesaian renovasi di lingkungan Kemdiktisaintek, telah ditetapkan beberapa langkah utama:

1. Penetapan Alokasi Ruang – Ruang kerja bagi pimpinan unit utama, pejabat tinggi, administrator, pengawas, dan staf pendukung telah ditentukan.
2. Koordinasi Perpindahan Penghuni – Berkoordinasi dengan Kemdikdasmen untuk mempercepat perpindahan dari lantai 13-15.
3. Target Penyelesaian Renovasi – Pekerjaan pada lantai-lantai yang telah dikosongkan ditargetkan rampung pada akhir Maret 2025.

c) Dampak Renovasi terhadap Kinerja dan Layanan Publik

Renovasi ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan produktivitas kerja. Dampak yang diharapkan meliputi:

- Peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat dengan sistem kantor yang lebih efisien.
- Optimalisasi tata ruang digital, termasuk akses kartu elektronik dan sistem reservasi ruang rapat berbasis aplikasi.
- Penerapan prinsip ramah lingkungan, seperti penggunaan lampu LED hemat energi dan sistem ventilasi otomatis.

d) Langkah Strategis Pasca-Renovasi

Untuk menjaga keberlanjutan ruang kerja yang telah diperbaiki, Kemdiktisaintek akan menerapkan strategi pemeliharaan sebagai berikut.

- Manajemen energi berbasis sensor otomatis, yang diprediksi dapat menghemat konsumsi listrik.

- Digitalisasi ruang kerja, termasuk sistem paperless dalam administrasi.
- Pemantauan kualitas ruang kerja melalui audit berkala guna memastikan kenyamanan dan efisiensi pegawai.

Berbagai langkah strategis tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan pegawai Kemdiktisaintek, sekaligus memperkuat peran kementerian dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul, serta kemajuan sains dan teknologi menuju Indonesia Emas 2045.

6.8 Dinamika Anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dinamika anggaran merujuk pada perubahan dan interaksi yang terjadi dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran, baik di tingkat kementerian maupun lembaga. Dinamika ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, serta dimulai sejak tahap perencanaan, di mana berbagai pemangku kepentingan seperti eksekutif, legislatif, dan masyarakat terlibat untuk menentukan prioritas dan alokasi anggaran.

Selama 120 hari kerja, Kemdiktisaintek telah mengalami serangkaian proses penyusunan anggaran. Pada Kamis, 28 November 2024, Mendiktisaintek melaporkan rasionalitas pengembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi beserta kebutuhan anggarannya kepada Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Laporan ini sejalan dengan arah kebijakan yang disampaikan dalam Pidato Perdana Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, yang menekankan sejumlah target pembangunan strategis, yaitu pengentasan kemiskinan, swasembada pangan dan energi, penyaluran subsidi tepat sasaran melalui teknologi digital, serta hilirisasi komoditas untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

Dalam konteks ini, tantangan utama pendidikan tinggi adalah mengatasi “mata rantai yang hilang” antara pendidikan tinggi dan pembangunan nasional. Selama ini, perguruan tinggi masih berfokus pada luaran berupa lulusan serta ketergantungan terhadap alokasi anggaran pemerintah. Padahal, meskipun dukungan anggaran tetap dibutuhkan, perguruan tinggi harus mampu mandiri dalam mengatasi persoalan akses, mutu, dan relevansi pendidikan. Perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan

solusi konkret kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui layanan berbasis kekayaan intelektual.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi semestinya dapat menggerakkan lima modal utama: (1) talenta intelektual, (2) institusi dengan tata kelola baik, (3) aplikasi sains dan teknologi tepat guna, (4) ekosistem riset yang kondusif, dan (5) keterampilan sebagai penggerak pembangunan. Perguruan tinggi diharapkan turut serta dalam menjawab tantangan pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, swasembada pangan dan energi, digitalisasi subsidi, serta hilirisasi hasil riset. Gagasan besarnya adalah menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat kekuatan baru (*new powerhouses*) untuk inovasi regional dengan dampak nasional dan global.

Kebijakan pendidikan tinggi diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan dengan mengejar target kemajuan yang ditetapkan Presiden, melalui upaya mempersiapkan dan memampukan warga negara yang terampil dan produktif, termasuk talenta sains dan teknologi; meningkatkan institusi perguruan tinggi yang berdampak; serta mengembangkan ekosistem riset dan pengembangan. Upaya ini ditempuh melalui: (i) akses pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, dan berdampak; (ii) pengembangan talenta sains dan teknologi; (iii) penumbuhan dan penguatan budaya ilmiah *(scientific culture)* dalam penelitian dan pengembangan; serta (iv) penyelesaian permasalahan sosial dan ekonomi nasional.

Kebijakan keberdayaan tersebut mendorong perguruan tinggi Indonesia untuk masuk ke dalam kategori Generasi IV. Faktor kunci dalam mendefinisikan perguruan tinggi generasi keempat adalah kemampuannya menjadi pintu gerbang pelatihan dan retensi talenta sains dan teknologi, menarik pemikir hebat untuk berkarya, dan menjaga kesinambungan mereka dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

Anggaran Kemdiktisaintek tahun 2025 diharapkan mampu meletakkan fondasi bagi terwujudnya otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang bertanggung jawab dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Postur alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp57,6 triliun terdiri dari: Rp46,5 triliun rupiah murni (RM), Rp11 miliar rupiah murni pendamping (RMP), Rp839 miliar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rp8,049 triliun Badan Layanan Umum (BLU), Rp688

miliar pinjaman luar negeri (PLN), Rp37 miliar hibah luar negeri (HLN), dan Rp1,539 triliun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dari total anggaran tersebut, pendanaan wajib sebesar Rp25,79 triliun dialokasikan untuk:

- KIP Kuliah sebesar Rp14,7 triliun, dengan target 1.040.192 mahasiswa;
- Tunjangan Profesi Dosen dan Guru Besar Non-PNS sebesar Rp2,7 triliun untuk 65.027 orang;
- BOPTN Perguruan Tinggi sebesar Rp8,39 triliun untuk 125 lembaga.

Sementara itu, program prioritas lainnya dengan total alokasi Rp5,88 triliun mencakup:

- Rp2 triliun untuk sekolah unggulan,
- Rp213,73 miliar untuk Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK),
- Rp65,13 miliar untuk Beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN),
- Rp85,35 miliar untuk Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB),
- Rp1,463,72 miliar untuk revitalisasi sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Vokasi,
- Rp341,62 miliar untuk peningkatan kualitas SDM Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Vokasi,
- Rp839,33 miliar untuk pengembangan kelembagaan Perguruan Tinggi,
- Rp325,77 miliar untuk pembelajaran di luar kampus bagi mahasiswa dan uji kompetensi profesi,
- Rp8,26 miliar untuk penerapan kurikulum taut-suai *(link and match)* dengan dunia kerja, serta
- Rp98,60 miliar untuk layanan pendidikan tinggi di wilayah 1 hingga 17.

Kemdiktisaintek terbagi ke dalam tiga irektorat jenderal: Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti), Ditjen Riset dan Pengembangan (Risbang), dan Ditjen Sains dan Teknologi (Saintek). Masing-masing ditjen mengembangkan program prioritas berikut:

- **Akses Pendidikan Tinggi Bermutu, Relevan dan Berdampak**: (a) Perluasan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang kurang mampu dan mahasiswa wilayah 3T, (b) Peningkatan inovasi pembelajaran dan kemahasiswaan, (c) Pengembangan kelembagaan perguruan tinggi, (d) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia, dan (e) Peningkatan sarana dan prasarana perguruan tinggi.
- **Penumbuhan dan Penguatan Budaya Ilmiah *(Scientific Culture)* Penelitian dan Pengembangan**: (a) Peningkatan talenta penelitian dan pengembangan, (b) Penguatan penelitian dan pengembangan, dan (c) Peningkatan Hilirisasi hasil penelitian dan kerjasama DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri).
- **Pengembangan Talenta Sains dan Teknologi**: (a) Pengembangan sekolah unggulan, (b) Pengembangan Pembelajaran Transformatif, dan (c) Revitalisasi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan).
- **Penyelesaian Permasalahan Sosial dan Ekonomi Nasional**: (a) Pengembangan Taman Sains dan Teknologi, (b) Penguatan pengabdian kepada masyarakat, dan (c) Pengembangan Kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat.

Kemdiktisaintek juga mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp5,067 triliun kepada Komisi X DPR RI. Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ini terdiri dari belanja pegawai yang belum dianggarkan sebesar Rp1,820 triliun termasuk pegawai baru pengangkatan 2024 (CPNS sebanyak 7.082 orang dan PPPK sebanyak 3.282 orang senilai Rp594 miliar); sertifikasi dosen dan kehormatan guru besar angkatan 2024 sebesar Rp170 miliar (sertifikasi dosen sebanyak 2.784 orang dan 244 guru besar); tambahan KIP Kuliah sebesar Rp192 miliar; serta tunjangan kinerja dosen sebesar Rp2,884 triliun.

Pada 22 Januari 2025, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025. Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor. Poin penting dari arahan Inpres

tersebut yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah. Dalam instruksinya, Presiden mengarahkan seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja Kementerian/Lembaga sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Lebih lanjut, rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non-operasional paling sedikit mencakup belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan peralatan dan mesin. Sementara belanja pegawai dan belanja bantuan sosial tidak termasuk dalam identifikasi rencana efisiensi. Inpres juga mengarahkan agar pimpinan Kementerian/Lembaga menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra Komisi DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Kementerian Keuangan menindaklanjuti perintah efisiensi anggaran dengan mengeluarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kementerian dan lembaga mengefisiensikan anggaran 16 pos belanja hingga Rp256,1 triliun. Sehingga secara keseluruhan, APBN ditargetkan mengalami efisiensi senilai Rp306,6 triliun. Kemdiktisaintek mengkaji dampak efisiensi anggaran tahun 2025, terutama untuk memastikan program tahun berjalan dapat dilaksanakan. Pagu anggaran Kemdiktisaintek yang semula Rp57,6 triliun ditetapkan target efisiensi sebanyak Rp22,5 triliun atau sekitar 39 persen dari pagu anggaran.

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Kemdiktisaintek mengeluarkan Surat Edaran terkait instruksi efisiensi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025. Efisiensi adalah program yang bagus supaya tidak terjadi atau berkurangnya pemborosan, tidak produktif, dan kurang relevan dengan program prioritas. Surat Edaran ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek dengan Nomor 4 Tahun 2025 dengan tujuan sebagai pedoman dan berisikan prinsip-prinsip dalam melakukan program efisiensi di semua unit di lingkungan Kemdiktisaintek termasuk Perguruan Tingggi Negeri dan LLDikti.

Setiap unit perlu melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja yang meliputi belanja operasional dan non-operasional dengan sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Kemudian, kebijakan internal pelaksanaan sistem kerja pegawai perlu disusun untuk menjalankan penghematan belanja operasional dan non-operasional dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Kemdiktisaintek. Kemudian, para pimpinan unit kerja diminta menyosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan surat edaran.

Kalkulasi ulang terhadap anggaran Kemdiktisaintek dilakukan berdasarkan efisiensi yang diprioritaskan untuk pos-pos tertentu, termasuk anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, rupiah murni pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir TA 2025, anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak – Badan Layanan Umum kecuali yang disetorkan ke kas negara TA 2025, serta anggaran yang bersumber dari SBSN dan menjadi aset yang mendasari atau menjamin *(underlying asset)* dalam rangka penerbitan SBSN. Namun kemudian, Kementerian Keuangan melakukan rekonstruksi anggaran sehingga pemangkasan anggaran Kemdiktisaintek menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Pagu indikatif tersebut sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 terkait Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025. Kemdiktisaintek setelah rekonstruksi ada penambahan kembali, efisiensi menurun dari Rp22,5 triliun ke Rp14,3 triliun atau efisiensi sebanyak 24,81%.

Hasil rekonstruksi ini disampaikan Kemdiktisaintek dalam Rapat Koordinasi dengan Komisi X DPR RI pada hari Rabu, 12 Februari 2025. Dengan rekonstruksi anggaran, Kemdiktisaintek dapat mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai dan bantuan sosial berupa beasiswa. Sesuai dengan arahan Komisi X DPR RI bahwa tambahan anggaran dapat menjaga program-program yang sudah berjalan *(ongoing)* dan bisa saja untuk sementara waktu dianggarkan untuk enam bulan. Selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sehingga bisa menutupi kebutuhan untuk tahun berjalan. Kendatipun demikian Komisi X DPR RI tetap berharap adanya

relaksasi agar pelayanan publik di perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik. Komisi X DPR menyetujui anggaran memadai sekitar Rp50,89 triliun yang tetap menjamin layanan publik pendidikan tinggi. Anggaran ini belum termasuk tunjangan kinerja dosen, penambahan beasiswa KIP-K, dan biaya tambahan untuk belanja pegawai baru pada saat pengadaan tahun 2024.

Dalam konferensi pers pada 14 Februari 2025 di Kompleks DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Republik Indonesia (DPR RI) Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan beberapa hal penting:

1) Alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tetap dipertanahkan, dengan demikian seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa saat ini terdapat 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah, dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 14,698 triliun. Dengan tidak adanya pemotongan terhadap KIP-K, para mahasiswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa gangguan.
2) Tunjangan Kinerja (Tukin) Dosen ASN, saat ini Kementerian Keuangan sedang memproses penghitungan dan pendataan Tukin serta finalisasi Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kemdiktisaintek. Dosen yang di PTN Badan Layanan Umum (BLU) yang belum menerapkan remunerasi, bersama-sama dengan dosen yang ada di PTN Satker di lingkungan Kemdiktisaintek dan dosen PNS Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) yang saat ini menerima tunjangan profesi, akan diberikan tunjangan kinerja.
3) Efisiensi pada alokasi anggaran Bantuan Operasional Pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dilakukan terhadap aktivitas yang menyangkut item belanja perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya. Dengan demikian alokasi BOPTN akan mengalami pemotongan atau pengurangan pada item belanja dimaksud.
4) Efisiensi anggaran Kemdiktisaintek dilakukan dengan memperhatikan agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer sehingga

tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tenaga honorer di lingkungan Kemdiktisaintek.

5) Pimpinan PTN agar menyampaikan informasi tersebut kepada dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa.
6) Apabila ada saran dan masukan dari sivitas akademika agar dapat disampaikan melalui kanal komunikasi yang tersedia secara berjenjang, baik melalui pimpinan PTN maupun DPR RI dengan tetap memperhatikan ketertiban umum agar penyelenggaraan layanan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar di PTN berjalan dengan baik.

Sebagai refleksi, dinamika penganggaran di Kemdiktisaintek menunjukkan perlunya pendekatan yang dinamis, dengan mengakui sifat kebutuhan pendidikan dan pergeseran masyarakat yang terus berkembang. Beberapa prinsip penting dalam pengelolaan anggaran meliputi:

Pertama, fleksibilitas adalah yang terpenting. Anggaran yang kaku dan terbatas sering kali gagal mengatasi keadaan yang tidak terduga, seperti peningkatan pendaftaran mahasiswa secara tiba-tiba, kemajuan teknologi, atau krisis kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, mengalokasikan sebagian anggaran untuk dana darurat sangatlah penting.

Kedua, pengambilan keputusan berdasarkan data harus menjadi landasan. Kementerian harus berinvestasi dalam sistem pengumpulan dan analisis data yang kuat untuk melacak kinerja mahasiswa, pemanfaatan sumber daya, dan dampak program pendidikan. Hal ini memungkinkan penyesuaian berbasis bukti terhadap alokasi anggaran, memastikan sumber daya diarahkan ke area dengan kebutuhan dan potensi dampak terbesar.

Ketiga, fokus pada perencanaan strategis jangka panjang sangat penting. Siklus anggaran jangka pendek sering kali mengabaikan kebutuhan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur, pelatihan dosen, dan pengembangan kurikulum. Kementerian harus mengembangkan kerangka anggaran multi-tahun yang selaras dengan tujuan pendidikan nasional dan mengantisipasi kebutuhan masa depan.

Keempat, keterlibatan pemangku kepentingan sangatlah penting. Berkonsultasi secara teratur dengan para pemangku kepentingan seperti DPR, K/L lain, dosen, pimpinan PT, orang tua, dan mahasiswa memberikan

wawasan berharga tentang realitas di lapangan. Umpan balik mereka dapat menginformasikan prioritas anggaran dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan cara yang secara langsung menguntungkan lingkungan belajar.

Terakhir, transparansi dan akuntabilitas tidak dapat dinegosiasikan. Dengan pengungkapan informasi anggaran secara publik dan menetapkan mekanisme yang jelas untuk pemantauan dan evaluasi membangun kepercayaan dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif. Penganggaran berbasis kinerja, di mana pendanaan dikaitkan dengan hasil yang terukur, dapat lebih meningkatkan akuntabilitas dan mendorong efisiensi.

Dengan merangkul prinsip-prinsip dinamis ini, Kemdiktisantek dapat mewujudkan anggaran yang responsif, adil, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi nasional.

7

Estafet Kepemimpinan Kemdiktisaintek dan Harapan untuk Masa Depan

Dokumentasi:
Humas Diktisaintek

Seiring dengan percepatan pengembangan kementerian, yang ditandai dengan kebijakan program kesangkilan dan proses yang rumit, tantangan yang melekat pun meningkat. Kompleksitas yang berkembang ini menuntut peningkatan tingkat komunikasi dan manajemen strategis terhadap pihak internal dan eksternal. Mendiktisaintek Satryo Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang menyadari meningkatnya kesulitan dalam menyampaikan realitas yang bernuansa dari lanskap yang terus berkembang ini secara efektif, melihat adanya kebutuhan kritis untuk penataan kembali kepemimpinan. Saran ini berasal dari penilaian krusial terhadap situasi, memprioritaskan kemajuan berkelanjutan kementerian, dan memastikan arus informasi yang lancar ke tingkat pemerintahan tertinggi dan antar kementerian. Rekomendasi Mendiktisaintek menggarisbawahi pentingnya mengadaptasi kepemimpinan agar sesuai dengan tuntutan yang terus berubah dari organisasi yang dinamis dan berkembang.

Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kepemimpinan Kemdiktisaintek dimandatkan kepada Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D. dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Pelantikan dilaksanakan pada Rabu, 19 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta. Prof. Brian dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029. Usai pelantikan di Istana Negara, Prof. Brian Yuliarto menyampaikan bahwa dirinya diminta oleh Presiden untuk segera bekerja, mengambil langkah-langkah cepat dan konkret dalam mendukung program-program strategis pemerintahan. Penekanan utama Presiden adalah pada konsolidasi awal serta percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional. Meski baru dilantik, Prof. Brian menegaskan komitmennya untuk segera masuk kantor, berkoordinasi, dan mulai mengidentifikasi langkah-langkah kerja yang selaras dengan arahan Presiden.

Tongkat estafet kepemimpinan secara resmi diserahkan dalam acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (lihat Gambar 74 dan 75). Serah terima jabatan dan pisah sambut Mendiktisaintek di Graha Diktisaintek ini dihadiri para Wakil Menteri Diktisaintek, pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, jajaran pegawai Kemdiktisaintek, dan tamu undangan.

Gambar 74. Penandatanganan Serah Terima Jabatan Mendiktisaintek
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Gambar 75. Jabat Tangan Simbol Kolaborasi dan Keberlanjutan
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

Selama masa kepemimpinan sebelumnya, kementerian ini memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi di Indonesia. Dalam perjalanan ini, dukungan serta kerja sama dari seluruh jajaran Kemdiktisaintek menjadi fondasi utama dalam mewujudkan program-program yang berorientasi pada Asta Cita pemerintah untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Kini, kepemimpinan Kemdiktisaintek berada di tangan yang tepat. Prof. Brian Yuliarto merupakan akademisi sekaligus pemimpin visioner yang memiliki kompetensi serta pengalaman untuk membawa kementerian ini ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan kepemimpinan yang baru, Kemdiktisaintek diharapkan semakin berkembang dan mampu menjawab tantangan zaman, terutama dalam penguatan kolaborasi antara pendidikan tinggi, riset, dan teknologi demi pembangunan nasional.

Dalam sambutannya, Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan keyakinannya terhadap kepemimpinan yang baru. “Beliau merupakan sosok yang memiliki kompetensi tinggi. Sosok yang mampu memimpin Kemdiktisaintek untuk mencapai tujuan Asta Cita pemerintah.”

Sementara itu, Prof. Brian Yuliarto mengapresiasi kerja keras kepemimpinan sebelumnya dan menegaskan komitmennya dalam menjalankan tugasnya. *“Saya berharap kita semua bekerja sama, saling bahu-membahu. Semoga kita bisa memegang amanah mencapai tujuan Asta Cita pemerintah.”*

Salah satu tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan tinggi saat ini adalah menciptakan kampus yang transformatif, yaitu kampus yang tidak hanya menjadi pusat keilmuan, tetapi juga penggerak inovasi, pusat pengembangan teknologi, serta wadah bagi kolaborasi multidisiplin. Kampus transformatif harus mampu melahirkan generasi unggul dengan kompetensi global, daya saing tinggi, serta kesiapan menghadapi dinamika dunia kerja.

Ke depan, diharapkan visi ini dapat terus dilanjutkan, memastikan bahwa kampus-kampus di Indonesia semakin adaptif terhadap perkembangan zaman, semakin erat hubungannya dengan industri, serta semakin kuat dalam menghasilkan riset yang berdampak luas bagi masyarakat dan

pembangunan nasional. Prof. Brian pun menambahkan dalam sambutannya *"Sinergi antara akademisi, industri, dan pemerintah harus terus diperkuat agar Kemdiktisaintek semakin berkontribusi bagi kemajuan bangsa"*.

Terima kasih kepada seluruh rekan di Kemdiktisaintek atas dedikasi dan kerja sama yang telah diberikan. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, di bawah kepemimpinan yang baru, kementerian ini diharapkan dapat terus melangkah maju dan semakin berjaya dalam menjalankan amanah Presiden dan pemerintah. Semoga kampus-kampus transformatif di Indonesia menjadi lokomotif perubahan bagi bangsa dan dunia, membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju.

Gambar 76. Dari Masa ke Masa: Kepemimpinan Baru Kemdiktisaintek untuk Indonesia Maju
Dokumentasi: Humas Diktisaintek

RUARI 2025
aintek

Gambar 77. Pelantikan Prof. Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Sumber: Setneg

Penutup

Seratus dua puluh hari pertama pelaksanaan tugas di Kemdiktisaintek bukan sekadar pencapaian waktu, melainkan titik awal dari perjalanan panjang menuju transformasi sistem pendidikan tinggi, penguatan riset dan sains, serta pemanfaatan teknologi untuk kemajuan Indonesia. Dalam kurun waktu ini, berbagai langkah awal telah ditempuh guna memperkuat kebijakan, mendorong lahirnya inovasi, serta membangun ekosistem pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan berdaya saing. Sebagai bagian dari upaya tersebut, inovasi visioner menjadi elemen kunci dalam pengembangan dan penerapan ide-ide inovatif yang mengantisipasi kebutuhan masa depan serta menciptakan perubahan positif yang signifikan. Pendekatan ini sering kali membutuhkan perspektif yang berani dan berjangka panjang agar dampak transformatif dapat benar-benar diwujudkan.

Pencapaian selama seratus dua puluh hari pertama ini juga mencerminkan komitmen dalam mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat ekosistem pendidikan tinggi, mempercepat hilirisasi riset dan inovasi, serta mendorong industrialisasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, Kemdiktisaintek memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa perguruan tinggi menjadi pusat pengembangan ilmu yang relevan, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Namun demikian, perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan. Setiap langkah yang telah dilaksanakan menjadi pembelajaran berharga untuk terus memperbaiki proses kerja dan mempercepat pencapaian tujuan ke depan.

Keberhasilan dalam seratus dua puluh hari pertama ini bukan sekedar pencapaian, tetapi sebagai pijakan awal bagi terwujudnya transformasi pendidikan tinggi, riset, dan teknologi yang lebih adaptif dan inovatif.

Landasan yang dibangun pada Program 120 Hari Kerja berfokus pada aspek deklarasi dan masih membutuhkan langkah panjang untuk aspek demonstrasi. Dalam kerangka ini, Kemdiktisaintek mendeklarasikan semangat "Kampus Transformatif dan Berdampak" guna mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan perubahan, tidak hanya dalam peningkatan akses, mutu, dan relevansi, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, perguruan tinggi diharapkan dapat memastikan bahwa sains dan teknologi memberikan dampak nyata bagi pembangunan berkelanjutan.

Sebagai luaran dari Program 120 Hari Kerja, telah disampaikan berbagai prasarana organisasi, program kerja, dan perubahan regulasi. Ke depan, tantangan utama terletak pada aspek demonstrasi guna mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman, riset dan sains yang menjadi penggerak utama kemajuan bangsa, serta pemanfaatan teknologi yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misi penting dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang baru adalah memastikan bahwa perguruan tinggi memberikan dampak nyata bagi kemajuan bangsa dengan menghadirkan maslahat yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Keyakinan kuat terbangun bahwa dengan kolaborasi sinergis antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat, cita-cita besar ini dapat diwujudkan bersama. Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kerja sama dalam mendukung pelaksanaan tugas selama seratus dua puluh hari pertama ini. Semoga sinergi dan kerja bersama ini dapat terus diperkuat, sehingga Indonesia dapat menjadi pusat keunggulan dalam pendidikan tinggi, riset, sains, dan teknologi di masa yang akan datang.

Sekilas Biografi Penulis

Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah seorang akademikus Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam Kabinet Merah Putih dari 21 Oktober 2024 hingga 19 Februari 2025. Satryo merupakan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) dan menyelesaikan Ph.D. di University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Ia mengawali karier menjadi dosen di almamaternya ITB. Pada 1992, Satryo terpilih menjadi Ketua Jurusan Teknik Mesin ITB. Dikenal sebagai salah satu pembaharu dunia pendidikan, peletak konsep Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang setelah era 2000 dikenal dengan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Satryo diamanahi tanggung jawab sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada periode tahun 1999-2007 dan memberikan kontribusi bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, Satryo pernah menjabat sebagai Ketua AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada periode 2018-2023. Pengalaman lainnya yang turut menghasilkan karya, yaitu saat bergabung bersama tim Japan International Cooperation Agency (JICA) sebagai perancang gedung

Fakultas Teknik Universitas Hasanudin, Gowa, Sulawesi Selatan. Beberapa prestasi dan penghargaan lainnya yang pernah diraih Satryo antara lain berhasil memperoleh Medali Ganesha Bakti Cendekia Utama dari ITB pada Maret 2010 dan mendapatkan Bintang tanda jasa the Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon dari Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia pada 3 November 2016.

Khairul Munadi adalah profesor teknik yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sejak 6 Januari 2025. Ia merupakan dosen tetap di Jurusan Teknik Elektro, Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, dengan keahlian di bidang pengolahan citra digital dan multimedia. Di lingkungan USK, ia pernah menjabat sebagai Direktur Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC), sebuah Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi (PUI-PT) yang berfokus pada mitigasi bencana berbasis sains dan teknologi. Dalam konteks internasional, Khairul juga pernah bertugas sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, serta menjadi peneliti tamu di Suleyman Demirel University, Turki. Sebelum menjabat sebagai Dirjen Dikti, ia dipercaya sebagai Direktur Kelembagaan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sejak 10 Oktober 2024. Ia meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, serta gelar magister dan doktor dari Tokyo Metropolitan University, Jepang, pada tahun 2007. Ia juga menyelesaikan program pascadoktoral di universitas yang sama pada tahun 2008 sebelum kembali ke Indonesia dan terus berkiprah dalam pengembangan pendidikan tinggi, riset, inovasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Togar Mangihut Simatupang merupakan profesor dan inovator bidang manajemen operasi dan sistem rantai pasok di Institut Teknologi Bandung. Ia diberikan amanat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mulai 8 November 2024 dan kemudian dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek pada 6 Januari 2025. Ia meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Gelar Doktor diraihnya dari Massey University di New Zealand pada tahun 2004. Ia dikenal sebagai pakar di bidang manajemen rantai pasok, sistem logistik, sistem inovasi, kewirausahaan, dan pengembangan industri kreatif. Hasil penelitiannya telah banyak dipublikasikan di berbagai jurnal internasional bereputasi. Berpengalaman dalam berbagai riwayat kepemimpinan manajerial, antara lain sebagai Ketua Program Studi Magister dan Doktor Sains Manajemen ITB periode 2008-2011, Wakil Dekan Bidang Akademik di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB periode 2011-2014, dan Rektor Institut

Teknologi Del periode 2016-2021. Ia memprakarsai pendirian Program Studi Kewirausahaan pertama di Indoensia dan meraih Penghargaan Emerald Literati Network tahun 2006 untuk karya ilmiah berprestasi yang dipiblikasikan di jurnal internasional. Ia juga dianugerahi Penghargaan Endeavour Pemerintah Australia untuk studi pascadoktoral di Universitas Newcastle pada tahun 2008 dan penghargaan dosen peneliti terbaik ITB pada tahun 2015.

Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi Republik Indonesia

Seruan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan sistem pendidikan tinggi yang memberikan sumbangan inovasi dan terobosan riset guna mendukung transformasi ekonomi nasional menggugah kembali pertanyaan tentang eksistensi perguruan tinggi. Secara historis, perguruan tinggi telah menjadi sentral dalam menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa. Namun, di era yang penuh dengan berbagai krisis ekonomi, sosial, dan ekologi yang kompleks, peran dan relevansi perguruan tinggi semakin dipertanyakan: mengapa pemangku kepentingan masih membutuhkan perguruan tinggi, dan apa sesungguhnya kontribusi perguruan tinggi dalam masyarakat?

Dalam konteks itulah, Satryo Soemantri Brodjonegoro diberi amanah untuk membentuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Sebagai Kementerian baru, langkah awal yang dilakukan adalah menata ulang lanskap pendidikan tinggi secara menyeluruh mulai dari perubahan paradigma bahwa perguruan tinggi tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga membuka lapangan kerja. Ditekankan pula pentingnya otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang akuntabel, serta penguatan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan industri dalam membangun ekosistem pendidikan dan riset yang unggul sebagai kunci menjaga kedaulatan sains dan teknologi serta meningkatkan daya saing global. Tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi sebagai ujung tombak dalam mencetak lulusan bermutu dan inovatif – termasuk para inovator dengan karya intelektual yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat – menjadi sorotan utama, seiring dengan upaya peningkatan dana penelitian dan pengembangan serta optimalisasi pemanfaatan sains dan teknologi untuk pembangunan berkelanjutan.

Buku ini merupakan sinkronik tentang pemikiran dan kiprah Kemdiktisaintek selama seratus dua puluh hari pertama yang menjadi titik tolak pembenahan dan inovasi yang transformatif dan berdampak di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, sehingga setiap tantangan yang dihadapi dapat ditransformasikan menjadi peluang emas untuk menciptakan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang. Pendidikan tinggi memegang peranan penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Tanpa pendidikan tinggi yang tangguh, inklusif, mandiri, transformatif, dan berdampak, Indonesia hanya akan menjadi negara dengan bonus demografi tanpa keunggulan bernilai tambah. Untuk itu, diperlukan dukungan dan pengawalan terhadap setiap gagasan besar yang telah dirumuskan, dengan keyakinan bahwa kepemimpinan yang visioner, kebijakan yang tepat sasaran, program yang terarah, serta sinergi antarpemangku kepentingan akan menjadi fondasi kokoh dalam menciptakan perubahan positif yang nyata dan berkelanjutan guna mewujudkan Indonesia yang lebih maju, berintegritas, dan sejahtera.